



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN TPB/SDGs PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022



TUJUAN
PERKEMBANGAN
BERKELANJUTAN

SAMBUTAN

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Izinkan kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua yang bekerja sepenuh hati untuk menyusun dan menyelesaikan Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini. Laporan ini kami sampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Laporan ini merupakan tindak lanjut amanat Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sekarang diganti Peraturan Presiden Perpres 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan aturan ini setiap tahun Gubernur harus menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs di daerah kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.

Laporan ini merupakan dokumen integral yang memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah dan nonpemerintah. Seluruh program dan kegiatan tersebut memberikan dukungan bagi pencapaian target dari 234 indikator TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian besar program dan kegiatan tersebut telah tercantum di dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2019. Sementara lainnya, merupakan program dan kegiatan adisional yang berhasil diidentifikasi dari pemerintah maupun nonpemerintah.

Pada laporan ini juga disajikan potret secara umum tantangan dan strategi pencapaian target TPB/SDGs pada tahun 2022. Khususnya, perubahan besar pada tatanan kehidupan global sebagai dampak dari pandemic COVID-19. Adanya pandemic yang melanda dunia, menarik mundur sejumlah pencapaian TPB/SDGs di seluruh wilayah ke beberapa warsa silam. Namun, pada saat yang sama, terdapat kemajuan untuk indikator-indikator tertentu, khususnya terkait dengan lingkungan hidup.

Langkah yang terpadu antara pemerintah, akademisi, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat sipil dan media sangat dibutuhkan. Kami sadar bahwa kami memiliki keterbatasan, tetapi bila masalah yang ada ini kita tuntaskan bersama-sama maka tantangan apa pun bisa kita lalui. Data, inovasi dan kolaborasi menjadi tiga hal penting untuk dioptimalkan dalam mewujudkan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030, dengan begitu kita bisa tetap melunasi target yang diberikan.

pembangunan berkelanjutan di tahun 2030, dengan begitu kita bisa tetap melunasi target yang diberikan.

Tetapi tentunya kami memerlukan evaluasi. Karena itu laporan ini memuat hasil evaluasi atas pencapaian target dari 234 indikator TPB/SDGs serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian target tersebut, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun nonpemerintah.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Samarinda, 30 Januari 2023

Gubernur Kalimantan Timur

Selaku

Pengarah Tim Koordinasi Pelaksanaan
Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan



KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs memuat 17 Tujuan dan Sasaran Global Tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk mencapai Tujuan.

Dalam pengelolaan dan penanganan sumberdaya dengan pendekatan *landscape*, konsep berkesinambungan (*sustainability*) secara sederhana direfleksikan dalam keseimbangan antara konservasi dan pembangunan ekonomi. Artinya pembangunan ekonomi berjalan tidak dengan merusak lingkungan hidup. Itulah bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan yang prinsipnya tidak boleh menghabiskan (*ekstraktif eksploitatif*) tetapi harus memperhatikan kesinambungan ekosistem. Ada prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan yang harus dijaga.

Laporan ini disusun berdasarkan data-data capaian indikator TPB/SDGs yang bersumber dari Badan Pusat Statistik serta Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, hasil monitoring, evaluasi serta hasil laporan realisasi fisik dan keuangan dari program dan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang mendukung capaian indikator-indikator TPB/SDGs, serta laporan capaian program dan kegiatan pada Organisasi NonPemerintah (*Non State Actor*) di Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung capaian TPB/SDGs yang bersifat sukarela (*voluntary*) melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*). Mekanisme pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini pada prinsipnya mencakup seluruh tujuan yang ada pada SDGs. Akan tetapi mengingat keterbatasan ketersediaan data, tidak

Informasi yang disajikan dalam laporan ini pada prinsipnya mencakup seluruh tujuan yang ada pada SDGs. Akan tetapi mengingat keterbatasan ketersediaan data, tidak semua indikator dapat disajikan dalam laporan ini. Dengan demikian laporan ini belum mampu memotret semua target yang ada di SDGs. Diharapkan posisi capaian SDGs dan perkembangannya dapat dipotret di masa mendatang seiring dengan semakin bertambahnya ketersediaan data untuk indikator SDGs.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam membantu pencapaian TPB/SDGs juga secara khusus pihak berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan SDGs di Provinsi Kalimantan Timur.

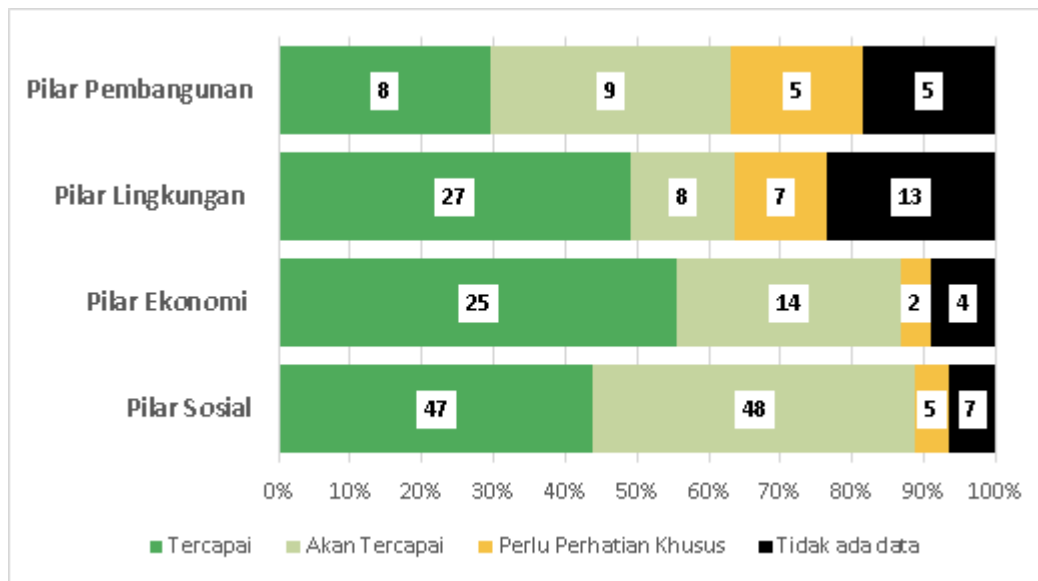
Samarinda, 31 Januari 2023
Plt. Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan
Timur



Yusliando, ST.
NIP. 19671005 199803 1 009

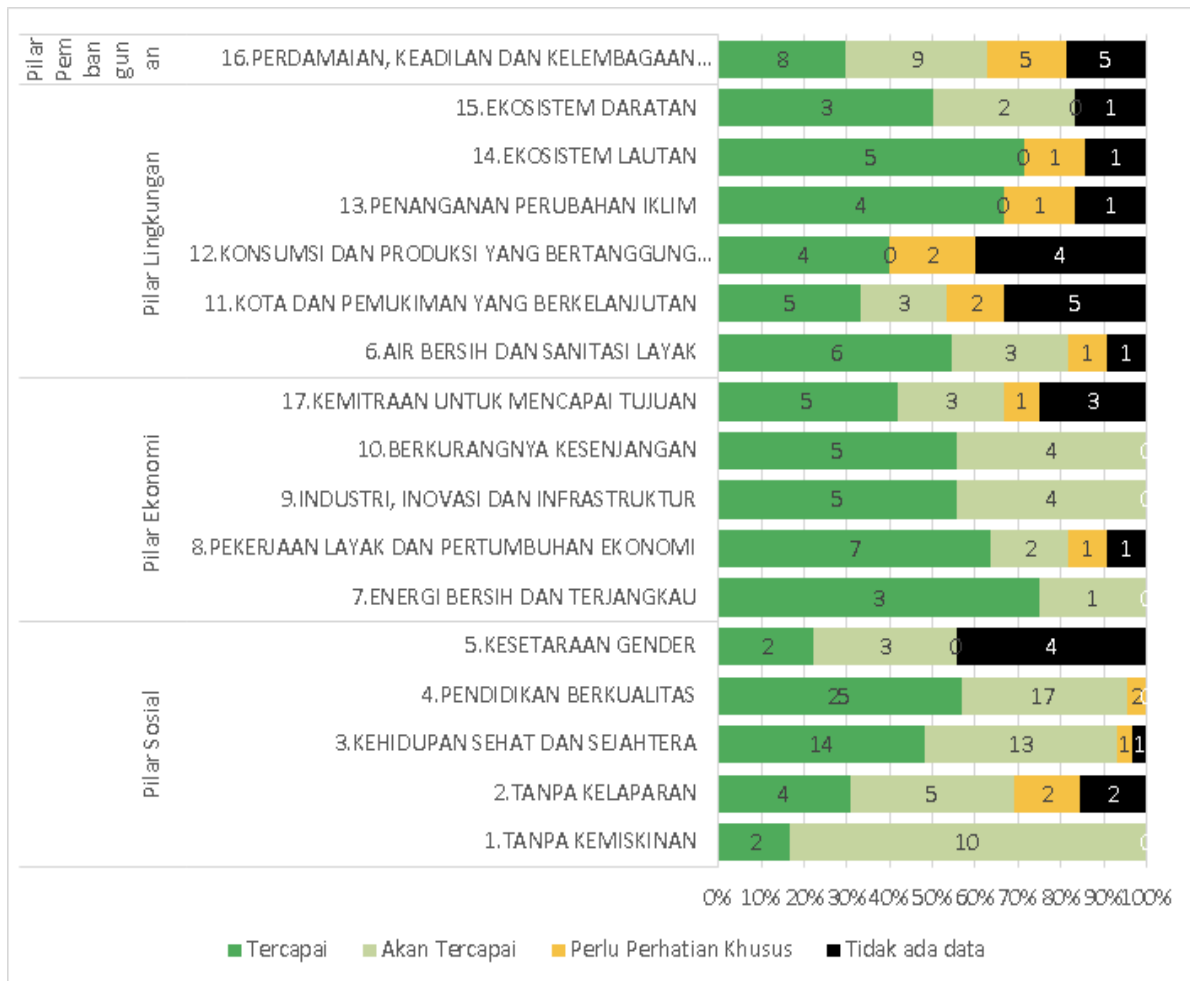
RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2019-2023. Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan TPB, maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator TPB Provinsi Kalimantan Timur. Dari 234 indikator yang ada, 107 indikator (45,73%) telah tercapai, 79 indikator (33,76%) akan tercapai, dan 19 indikator (8,12%) perlu perhatian khusus, sedangkan 29 indikator (12,39%) belum tersedia datanya. Secara umum, kondisi ini menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur telah menuju pencapaian TPB dan telah berjalan dengan baik.



Pilar Sosial, dengan 5 Tujuan di dalamnya memiliki indikator terbanyak yang telah tercapai, disusul dengan Pilar Lingkungan dengan 6 Tujuan, dan Pilar Ekonomi dengan 5 Tujuan dan Pilar Pembangunan dengan 1 Tujuan. Dari masing-masing tujuan, dapat dilihat Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau memiliki persentase tertinggi dari indikator yang telah tercapai, disusul Tujuan 14 Ekosistem Lautan, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, dan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Tujuan dengan indikator yang masih memerlukan perhatian khusus, persentase tertinggi ada pada Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, selanjutnya Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 14 Ekosistem Lautan, dan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.

Tiga Tujuan terbanyak yang datanya masih belum tersedia, yaitu Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, Tujuan 5 Kesenjangan Gender dan Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Tantangan ini akan dijawab dalam periode pelaporan selanjutnya, melalui pendokumentasian lebih awal terkait kebutuhan data dalam mengisi indikator Tujuan.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
1. Latar Belakang	1
2. Metodologi Penyusunan Laporan	1
3. Sistematika Pelaporan	2
BAB II	3
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	3
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan	4
Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	6
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	7
Tujuan 5. Kesenjangan Gender	10
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	11
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau	12
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	13
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	14
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan	15
Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	15
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	16
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	16
Tujuan 14. Ekosistem Lautan	17
Tujuan 15. Ekosistem Daratan	17
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	18
Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	20
BAB III	22
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	22
a. Keadaan dan Kecenderungan	22
b. Tantangan dan Pembelajaran	23
c. Kebijakan dan Strategi	24

d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	25
Tujuan 2.	Tanpa Kelaparan	25
e.	Keadaan dan Kecenderungan	25
f.	Tantangan dan Pembelajaran	29
g.	Kebijakan dan Strategi	30
h.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	30
Tujuan 3.	Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	34
a.	Keadaan dan Kecenderungan	34
b.	Tantangan dan Pembelajaran	39
c.	Kebijakan dan Strategi	40
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	41
Tujuan 4.	Pendidikan Berkualitas	42
a.	Keadaan dan Kecenderungan	42
b.	Tantangan dan Pembelajaran	43
c.	Kebijakan dan Strategi	45
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	46
Tujuan 5.	Kesetaraan Gender	46
a.	Keadaan dan Kecenderungan	46
b.	Tantangan dan Pembelajaran	47
c.	Kebijakan dan Strategi	48
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	48
Tujuan 6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	49
a.	Keadaan dan Kecenderungan	49
b.	Tantangan dan Pembelajaran	49
c.	Kebijakan dan Strategi	50
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	50
Tujuan 7.	Energi Bersih dan Terjangkau	51
a.	Keadaan dan Kecenderungan	51
b.	Tantangan dan Pembelajaran	52
c.	Kebijakan dan Strategi	53
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	53
Tujuan 8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	54
a.	Keadaan dan Kecenderungan	54

b.	Tantangan dan Pembelajaran	55
c.	Kebijakan dan Strategi	56
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	57
Tujuan 9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	57
a.	Keadaan dan Kecenderungan	57
b.	Tantangan dan Pembelajaran	59
c.	Kebijakan dan Strategi	60
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	61
Tujuan 10.	Berkurangnya Kesenjangan	61
a.	Keadaan dan Kecenderungan	61
b.	Tantangan dan Pembelajaran	65
c.	Kebijakan dan Strategi	65
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	66
Tujuan 11.	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	66
a.	Keadaan dan Kecenderungan	66
b.	Tantangan dan Pembelajaran	68
c.	Kebijakan dan Strategi	69
Tujuan 12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	70
a.	Keadaan dan Kecenderungan	70
b.	Tantangan dan Pembelajaran	70
c.	Kebijakan dan Strategi	70
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	71
Tujuan 13.	Penanganan Perubahan Iklim	71
a.	Keadaan dan Kecenderungan	71
b.	Tantangan dan Pembelajaran	72
c.	Kebijakan dan Strategi	73
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	73
Tujuan 14.	Ekosistem Lautan	73
a.	Keadaan dan Kecenderungan	73
b.	Tantangan dan Pembelajaran	75
c.	Kebijakan dan Strategi	75
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	76
Tujuan 15.	Ekosistem Daratan	76

a.	Keadaan dan Kecenderungan	76
b.	Tantangan dan Pembelajaran	76
c.	Kebijakan dan Strategi	77
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	77
Tujuan 16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	78
a.	Keadaan dan Kecenderungan	78
b.	Tantangan dan Pembelajaran	79
c.	Kebijakan dan Strategi	80
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	81
Tujuan 17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	81
a.	Keadaan dan Kecenderungan	81
b.	Tantangan dan Pembelajaran	83
c.	Kebijakan dan Strategi	83
d.	Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	84
BAB IV		86
1.	Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan	86
2.	Pembangunan Pembangkit Listrik Komunal	87
3.	Percepatan Perhutanan Sosial	88
4.	Pendampingan Penanggulangan Bencana	90
5.	Program Konfigurasi Kolam Pengendap	91
6.	Program Desa Bersinar yang dilaksanakan oleh BNNP Kaltim	94
7.	Simpator (Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor)	95
8.	Digitasi (Data dan Informasi Digital Tanaman Koleksi)	96
9.	Samarinda Siaga 112	97
10.	Simenawan Hati	98
11.	Iman Karlabun	98
12.	Kabupaten PPU - Inovasi Serbu Gas	99
13.	Kabupaten PPU - Inovasi Anjungan SIAPKerja	99
14.	Kabupaten Paser- Inovasi E-Buen	100
15.	Kabupaten Paser - DASHBOARD EKSEKUTIF	101
16.	Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK Kukar)	101
17.	JELITA (Jemput , Beli dan Tabung Sampah Anorganik)	101
18.	PAKAR Berau (Pelayanan Perekaman KTP-EL Khusus Pelajar)	102

19. Probebaya	102
BAB V	104
Simpulan	104
Rencana Tindak Lanjut	104

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan telah diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam melaksanakan amanah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2019-2023.

Untuk mengetahui pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGs, praktik baik serta permasalahan yang ditemui maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan setiap tahunnya, termasuk Laporan Pelaksanaan TPB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 ini.

2. Metodologi Penyusunan Laporan

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menyampaikan Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan kepada Menteri Dalam Negeri.

Langkah yang dilakukan oleh dalam penyusunan laporan ini adalah Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB Provinsi Kalimantan Timur mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta perguruan tinggi, dilakukan dengan mekanisme "penilaian diri sukarela" (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat TPB Provinsi Kalimantan Timur.

Pemantauan dan pelaporan dilakukan terhadap pelaksanaan RAD TPB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dan disajikan sesuai dengan Pedoman Teknis Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – edisi II.

3. Sistematika Pelaporan

Laporan ini terdiri atas 5 (lima) bagian, sebagai berikut: Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan serta gambaran awal terkait progres pelaksanaan pencapaian TPB di Provinsi Kalimantan Timur, metodologi penyusunan laporan, serta sistematika laporan.

Bab Kedua tentang ringkasan status pencapaian TPB, memberikan gambaran ringkas mengenai status pencapaian untuk indikator yang terdapat pada masing-masing tujuan di dalam TPB.

Bab Ketiga tentang tinjauan status dan upaya percepatan pencapaian TPB, menjelaskan tentang kecenderungan dan tren atas pencapaian target pada setiap tujuan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tantangan dan pembelajaran, kebijakan dan strategi, serta upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian target TPB.

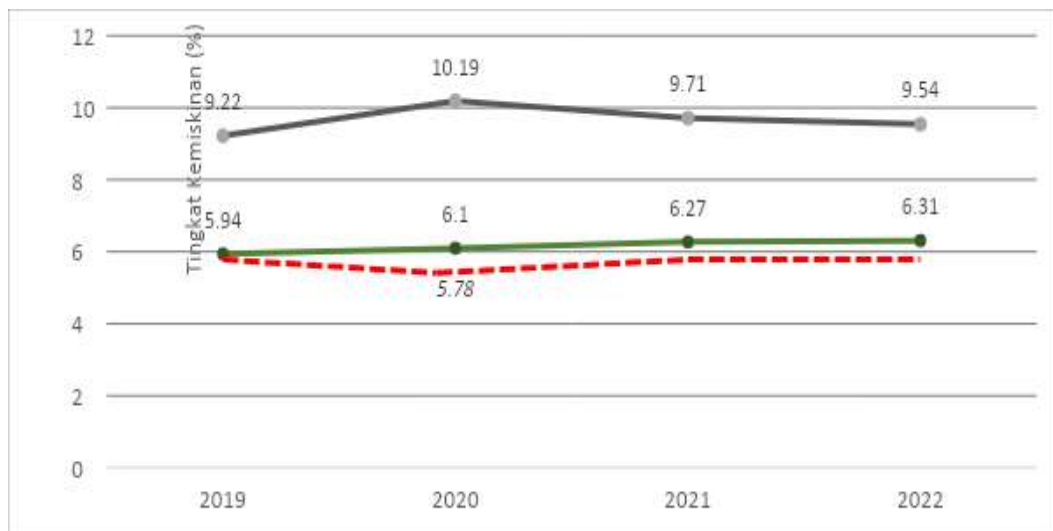
Bab Keempat tentang praktik-praktik baik, memberikan ulasan singkat tentang pengalaman implementasi kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka pencapaian TPB.

Bab Kelima tentang penutup, berisikan kesimpulan hasil evaluasi yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan guna pencapaian TPB.

BAB II RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGs

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan, terutama terhadap persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi (indikator 1.2.2*), di mana terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan masih berada di atas target yang ditetapkan. Demikian halnya dengan indikator Tujuan 1 lainnya masih belum mencapai target, walaupun trennya menunjukkan akan tercapai. Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target untuk kepesertaan sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan formal (1.3.1.(b)), yaitu mencapai 84,39% dari target 80% kepesertaan.



Gambar II.1. Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengentaskan kemiskinan, menunjukkan capaian yang membaik, walaupun belum mencapai target. Peningkatan capaian ditunjukkan dalam hal mengentaskan kemiskinan ekstrim (indikator 1.1.1*) dengan capaian 1,5% menuju target 0%. Dalam upaya melindungi perlindungan sosial bagi penduduk, Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan kondisi yang membaik, yang ditunjukkan dengan peningkatan penerima program perlindungan sosial (1.3.1*) yang mencapai 68,16% dari target 80%, serta peningkatan kepesertaan sistem jaminan sosial, baik bidang kesehatan (1.3.1.(a) yang mencapai 82% dari target 100%,) maupun bidang ketenagakerjaan, dan untuk bidang ketenagakerjaan informal (1.3.1.(b)), dan 15,71% dari target 80%. Sementara, akses terhadap layanan dasar (1.4.1*) telah mencapai

62% dari target 80% dan kepemilikan hak atas tanah (1.4.2*) yang didasari oleh dokumen hukum dengan capaian 40,70% dari target 100%.

Berkaitan upaya membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana, dari kejadian bencana tahun 2022, yaitu bencana banjir di Kota Bontang, terdapat korban terdampak bencana (1.5.1*) sejumlah 160,17 per 100.000 penduduk, namun tidak terjadi kerugian akibat bencana (1.5.2*). Upaya untuk membangun ketangguhan kabupaten/kota melalui adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana (1.5.4*) telah dilakukan oleh 4 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota (40%).

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 menargetkan “Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan”. Masyarakat membutuhkan akses pangan yang lebih baik serta promosi pertanian berkelanjutan yang lebih luas. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani skala kecil menjadi prioritas untuk memastikan setiap orang memperoleh konsumsi pangan yang cukup dan berkualitas untuk menjalani hidup sehat. Pada tahun 2022 Tujuan 2, Kalimantan Timur telah mencapai target pada 4 (empat) indikator, yaitu Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (2.2.1*), Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani (2.3.1.(a).), Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi (2.5.1*), dan Indikator anomali harga pangan (2.c.1*). Sementara, 2 (dua) indikator masih memerlukan perhatian khusus, yaitu: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (2.1.1*), dan Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (2.4.1.(a)). Sementara 2 (dua) indikator masih belum diperoleh data, yaitu: Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani (2.3.1*), dan rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil (2.3.2*).

Tahun 2022 penurunan stunting telah tercapai, mencapai 14,9% di bawah target 27,4%. Di Kalimantan Timur terdapat 4 Kabupaten dan Kota yang memiliki angka stunting paling rendah persentase rerata Provinsi yakni Kutai Barat (15,8%), Kota Balikpapan (17,6%), Mahakam Ulu (20,3%) dan Samarinda (21,6%). Sedangkan untuk 6 Kabupaten/kota lainnya Kutai Timur (27,5%), PPU (27,3%), Kukar (26,4%), Bontang (26,3%), Berau (25,7%) dan Paser (23,6%), yang memiliki persentase stuntingnya masih berada di atas rerata Provinsi. Pencapaian juga didapat dari indikator nilai

tambah pertanian per tenaga kerja tahun 2022 yang mencapai 175,58 juta rupiah dari target 59,8 juta rupiah, serta telah terdapat 17 unit sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi dari target 15 unit, dan anomali harga pangan berada pada angka 0,14 dari target 0,50.

Sementara upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of undernourishment*) masih perlu perhatian, di mana realisasi masih di atas target yaitu 12,56% dari 5,01%. Demikian halnya dengan upaya untuk meningkatkan proporsi luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang juga masih berada pada 0,25% dari target 39,87%.

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan di tahun 2022 akan tercapai dengan realisasi 4,29% dari target 4,12%. Masih terdapat 274 desa di Kalimantan Timur masih termasuk dalam kategori rawan pangan.

Tabel II.1. Jumlah Desa Rawan Pangan Berdasarkan Hasil FSVA Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Desa Rawan Pangan	Persentase Per Kabupaten/ Kota	Persentase Provinsi
1	Paser	10	144	35	24.31	12.77
2	Penajam Paser Utara	4	54	11	20.37	4.01
3	Kutai Kartanegara	18	237	60	25.32	21.9
4	Kutai Barat	16	194	50	25.77	18.25
5	Kutai Timur	18	141	44	31.21	16.06
6	Berau	13	110	19	17.27	6.93
7	Mahakam Ulu	5	50	21	42,00	7.66
8	Balikpapan	6	34	16	47.06	5.84
9	Samarinda	10	59	26	44.07	9.49
10	Bontang	3	15	5	33.33	1.82
Total		102	1038	274	26.40	100

Indikator Tujuan 2 lainnya berada pada kondisi akan tercapai. Capaian kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor PPH mengalami peningkatan dari tahun 2021 82,6% menjadi 85,9% di tahun 2022,

Prevalensi anemia pada ibu hamil tahun 2022 sebesar 15,61%, kondisi ini lebih baik daripada kondisi tahun 2021 yaitu sebesar 25,23%.

Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 di Kalimantan Timur menunjukkan 17 dari 29 indikator telah tercapai, yaitu: Angka Kematian Ibu (AKI) (3.1.1*), Angka Kematian Balita (AKBa) (3.2.1*(a)), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (3.2.1*(b)), Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup (3.2.2*), Kejadian Malaria per 1000 orang (3.3.3*), Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk (3.3.4*), Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis) (3.3.5*), Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta) (3.3.5*), Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta(3.3.5.(a)), Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi (3.3.5.(b)), Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (3.4.1.(a)), Prevalensi tekanan darah tinggi (3.4.1.(b)), Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi (3.5.1.(b)), Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis (3.5.1.(a)), Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern (3.7.1*), Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama (3.7.2*), Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan (3.b.3*).

Satu indikator masih menghadapi banyak tantangan, terutama terhadap persentase merokok pada penduduk usia ≥ 15 tahun (indikator 3.a.1*), di mana masih berada jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 22,21% dari target 8,7%, serta satu indikator belum tersedia data, yaitu proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan (3.8.2*).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan usaha-usaha dalam mengurangi rasio kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, termasuk perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih (3.1.2*) dan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas Kesehatan (3.1.2*), yang menunjukkan perbaikan. Dalam mengurangi jumlah kematian akibat penyakit yang timbul akibat obesitas di Kalimantan Timur, menunjukkan tercapai, yakni sebesar 28.69% dari target 21.8%.

Dalam menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan

integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program Nasional, menunjukkan kondisi akan tercapai, yakni Total Fertility Rate (TFR) (3.7.2.(a)) sebanyak 2,67 per 1.000 orang dari target 2,4 orang per 1.000 orang, cakupan pelayanan kesehatan esensial (3.8.1*) sebesar 3.261.781 dari target 5.103.399 dan Unmet need pelayanan kesehatan (3.8.1.(a)) sebesar 2,61 % dari target 0%.

Dalam memerangi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, maka penting sekali melakukan pendataan Proporsi Target populasi yang telah memperoleh vaksin program Nasional (3.b.1*) untuk memastikan agar vaksin dapat dilakukan dan diakses secara merata oleh pemerintah Kalimantan Timur. Masyarakat Kalimantan Timur yang telah mendapatkan vaksin sebanyak 79,75% dari target 90%.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 adalah menjamin kualitas pendidikan inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat serta menjamin semua anak usia sekolah mendapatkan layanan dan fasilitas pendidikan. Selain itu juga, tujuan 4 dibentuk untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar bagi semua orang. Pendidikan memberikan pelajaran untuk meningkatkan daya kreativitas dan membangun karakter anak bangsa dengan berbagai aktivitas.

Aktivitas membaca dan kemampuan numerisasi merupakan edukasi pendidikan bagi anak-anak sejak masuk usia sekolah. Pada tahun 2022 kemahiran membaca dan matematika anak-anak dan remaja di Provinsi Kalimantan Timur terbilang baik (4.1.1.(a)). Usia 5 tahun mencapai 54,12% dari target yang telah ditetapkan (55%), dan usia 8 tahun melebihi target diangka 55,16%. Selain itu juga upaya Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung capaian lulusan jenjang pendidikan anak menunjukkan tren positif mencapai angka 100 untuk tingkat SD/ sederajat dan SMP/sederajat. Untuk tingkat SMA/sederajat masih dikisaran 70%.

Kemahiran dibidang membaca juga didukung dengan angka melek aksara di Kalimantan Timur. Angka melek aksara pada usia 15 tahun ke atas di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 98,95 persen lebih baik dibandingkan tahun 2021 diangka 98,90 persen (4.6.1). Akan tetapi angka melek aksara mengalami penurunan setiap tahunnya (2018-2022), walaupun demikian angka penurunan tersebut tidak terlalu signifikan dan masih mendekati angka 100 persen sesuai target yang ditetapkan, artinya penduduk usia 15 tahun keatas di Kalimantan Timur memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Adapun angka untuk anak tidak sekolah pada jenjang SD/ sederajat di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 sangat baik mendekati angka nol persen pada kisaran 0,40% walaupun angkanya relatif turun sedikit setiap tahunnya. Yang paling tinggi anak tidak sekolah pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 12,97%. Angka ini menunjukkan ada 13% anak usia sekolah pada jenjang SMA/ sederajat yang tidak terdaftar pada satuan jenjang pendidikan tersebut (4.1.2.(a)).

Selain itu juga, untuk melihat angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menggunakan angka partisipasi kasar (APK). Nilai APK bisa lebih dari angka 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak diluar batas sekolah. Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kondisi baik pada angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan SD atau sederajat mencapai 103,52%, sedangkan pada tingkat jenjang pendidikan Perguruan Tinggi masih rendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SMP atau SMA. Walaupun dibilang rendah, angka partisipasi pada jenjang Perguruan Tinggi dibilang cukup baik dikarenakan melebihi target pada tahun 2022 mencapai 40,35%. Secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMALB/SMK dengan target 94% dan realisasi 96,77% dengan capaian kinerjanya 111,38%. Rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang Perguruan Tinggi salah satunya disebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meringankan biaya pendidikan khususnya bagi siswa miskin dan berprestasi adalah dengan adanya beasiswa KALTIM TUNTAS (<https://beasiswa.kaltimprov.go.id/>).

Tabel II.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan di Kalimantan Timur

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) atau sederajat	101,22 %	106,24 %	106,84 %	103,52 %
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat	101,21 %	92,17%	93,1 %	94,12 %

3	.Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat	96,14 %	95,23 %	95, 52 %	96,25 %
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	28,4 %	39,16 %	33,86 %	40,35 %

Sumber BPS Kalimantan Timur 2022

Mengukur kesenjangan antar kelompok untuk mengakses pendidikan bisa dilihat dari Rasio Angka Pendidikan Murni (APM). Semakin mendekati 100, berarti kesenjangan antar kelompok dalam mengakses pendidikan semakin kecil. Provinsi Kalimantan Timur terbilang sangat baik angka APM pada jenjang SD atau sederajat yang mendekati angka 100. Akan tetapi pada jenjang pendidikan di atasnya SMP, SMA dan Perguruan Tinggi jauh mendekati angka 100. Tahun 2022, APM di Kaltim pada jenjang SD 99,93%, SMP 81,30%, SMA 69,30% dan Perguruan Tinggi 30%.

Tabel II.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan di Kalimantan Timur

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) atau sederajat	101,21 %	98,44 %	98, 44 %	99,93 %
2	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat	96,14 %	81,28 %	81,28 %	81,30 %
3	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar SMA atau sederajat	75,25%	69 %	69 %	69,30 %
4	Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi (PT).	-	-	22,83 %	30 %

Sumber BPS Kalimantan Timur 2022

Dalam hal keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, proporsi ini diukur dari usia remaja (15-24 tahun) dan dewasa (15-59 tahun). Kemampuan atau Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada usia remaja lebih baik mencapai angka 95, 78% dibandingkan usia dewasa sekitar 81% di Provinsi Kaltim. Walaupun demikian angka kedua usia tersebut (remaja dan dewasa) menunjukkan tren positif selalu meningkat

setiap tahunnya. Persentase kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pemuda dan dewasa yang memiliki keterampilan TIK di Provinsi Kalimantan Timur (4.4.1).

Upaya lain yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah sumber daya manusia melalui standarisasi kompetensi guru yang ada. Pada tahun 2022 capaian standar kompetensi guru di Kaltim sebagai pengajar terbilang baik sekitar 95,74 persen dan hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Harapannya indikator ini mampu meningkatkan pembangunan manusia yang ada di Kaltim lebih baik lagi dan mampu bersaing pada era saat ini yang mengalami perubahan sosial begitu cepat dibarengi dengan teknologi yang modern (4.c.1).

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Tujuan 5 adalah Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam mengembangkan bakat dan potensinya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus menjamin akses perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, bermasyarakat serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang politik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat mendukung kebijakan responsif gender melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Partisipasi penuh perempuan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan perlu diakomodasi dikarenakan partisipasi perempuan di Indonesia masih di bawah 30 persen. Untuk di Kalimantan Timur, partisipasi perempuan yang aktif dan terlibat dalam politik maupun posisi manajerial mengalami kemajuan. Dalam bidang politik, proporsi perempuan di tingkat parlemen pusat pada tahun 2022 mencapai 23,2 persen naik sekitar 2,83 persen dari tahun 2021. Demikian pula proporsi perempuan dalam manajerial pada tahun 2022 mencapai 33 persen.

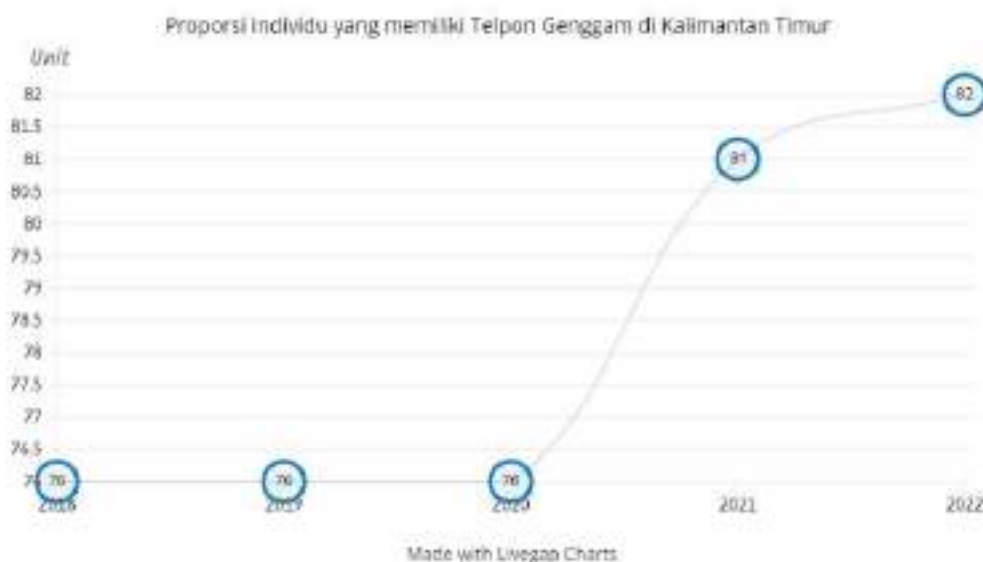
Tabel II.4. Partisipasi perempuan di parlemen pusat dan manajerial

No	Indikator	Satuan	2021	2022
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat	%	20,37	23,2

2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah.	%	30,38	31
---	--	---	-------	----

Sumber BPS Kalimantan Timur 2022

Kesetaraan gender bukan hanya berbicara peran aktif dalam keterlibatan posisi manajerial dan politik saja, namun juga kemampuan untuk memanfaatkan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Penguasaan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi melalui akses terhadap jaringan seluler. Pada tahun 2022, proporsi individu yang memiliki telepon genggam di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan efek pandemi Covid 19 yang menyebabkan kegiatan lebih banyak dirumah dan berinteraksi menggunakan media sosial atau secara daring. Pada tahun 2020 mencapai 76,71%, 2021 sebanyak 81,10% dan 2022 sebanyak 82,37%.



Gambar II.2. Proporsi individu memiliki telepon genggam di Kalimantan Timur
(Sumber BPS Kaltim 2022)

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan target-target pencapaian untuk pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya air, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Dengan ketersediaan air dan sanitasi yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat yang pada akhirnya secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi secara positif. Dari 11

indikator, 8 indikator telah mencapai target, 2 indikator perlu perhatian khusus, dan 1 indikator masih belum tersedia data. Indikator yang telah tercapai adalah: 88,5% rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (6.1.1.*), 34% rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (6.2.1*), 0,19% rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) (d) (6.2.1.*), 0,19% rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja (e) (6.2.1.*), proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya pada air permukaan (6.4.2.(a)) sebesar 5,04% dan air tanah (6.4.2.(b)) sebesar 74%,Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dengan skor 82 (6.5.1.*), dan perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu (6.6.1.*) sebesar 54,3% dari target 53,8%.

Meskipun indikator 6.2.1* telah berada di bawah target, yaitu 34% dari 60% rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, namun secara tren menunjukkan angka yang meningkat dari tahun sebelumnya (30%). Sedangkan indikator yang masih memerlukan perhatian khusus adalah rumah tangga yang menggunakan sanitasi yang dikelola secara aman (b) (6.2.1*) dan limbah industri cair yang diolah secara aman (6.3.1.(a)).

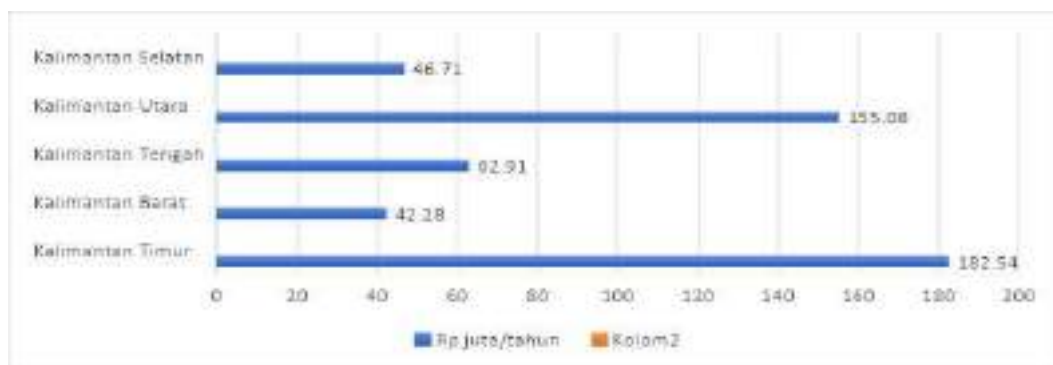
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 di Kalimantan Timur menunjukkan 4 indikator yang dimana 2 indikator telah tercapai yaitu Rasio Elektrifikasi (7.1.1*), Konsumsi Listrik Per Kapita (7.1.1.(a)) dan 2 indikator yang masih perlu perhatian khusus yaitu Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (7.1.2(a)), Rasio penggunaan gas rumah tangga (7.1.2.(b)).

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah berhasil karena memenuhi capaian dari target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari Rasio Elektrifikasi (7.1.1*) dimana terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 92,29 dari target 92,00 dan (Indikator 7.1.1(a*)) dengan capaian 1.103 dari target 1.100. Demikian halnya dengan indikator Tujuan 7 lainnya dimana masih ada indikator belum mencapai target yang ditetapkan yaitu (Indikator (7.1.2.(a)) yaitu mencapai 62.735 dari target 89,062 dan (Indikator 7.1.2.(b)) yaitu mencapai 4,96 dari target 7,0026.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pemulihan pasca terjadinya Covid-19. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita (indikator 8.1.1.*) sebesar 3,53% hingga triwulan III tahun 2022. Capaian ini melampaui target yang diestimasikan sebesar 2,51%. Indikator lain yang menunjukkan pemulihan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ditunjukkan dengan tercapainya nilai PDRB per kapita (indikator 8.1.1.(a)) yang kembali meningkat pada tahun 2021 mencapai Rp 182,54 juta. Bahkan, nilai PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.



Gambar II.3. Nilai PDRB per Kapita (Sumber: BPS, 2022)

Semakin membaiknya perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, juga mendorong tingginya persentase proporsi lapangan kerja informal (indikator 8.3.1.*) pada tahun 2021 yaitu sebesar 46,49%, dimana angka ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RAD yaitu 27,50%. Sementara, indikator lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka (indikator 8.5.2.*) telah mencapai 5,71% dari target 5,1% dan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (indikator 8.6.1*) telah mencapai 21,56% dari target 15,4%. Berikutnya mengenai jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa di Provinsi Kalimantan Timur (indikator 8.10.1*), yaitu pada tahun 2022 tercatat 111 unit dari target 100 unit.

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyediakan pekerjaan layak dan menumbuhkan ekonomi, menunjukkan capaian membaik walaupun belum mencapai target. Peningkatan capaian ditunjukkan melalui laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (indikator 8.2.1.*) pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur yang tumbuh positif 0,84% dari target 2,05% setelah pada tahun sebelumnya sempat tumbuh negatif. Indikator lainnya yaitu penurunan tingkat setengah pengangguran (indikator 8.5.2.(a)) sebesar 4,81% dari target 2,7% dan upah rata-rata per jam pekerja (indikator 8.5.1.*) yang mencapai 23,94 ribu rupiah dari target

35,82 ribu rupiah. Capaian tujuan pemulihan ekonomi lainnya pasca pandemi Covid-19, diketahui jumlah kunjungan wisatawan nusantara (indikator 8.9.1.(b)) tahun 2021 yang datang ke Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,7 juta orang dari target 6,5 juta orang.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian yang sangat baik dari beberapa indikatornya. Capaian ini dihasilkan melalui komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan infrastruktur yang berkualitas. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari kondisi mantap jalan nasional (indikator 9.1.1(a.)), di mana pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 75,8% dari target 68,04%. Peningkatan konektivitas infrastruktur lainnya dapat dilihat melalui jumlah bandara (indikator 9.1.2.(a)) yang telah dibangun Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 2022 sebanyak 9 unit dari target 10 unit. Selain itu, dukungan pembangunan infrastruktur transportasi laut dan sungai juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah pelabuhan penyeberangan (indikator 9.1.2.(b)) yang dibangun sebanyak 6 unit dari target 6 unit. Peningkatan infrastruktur transportasi laut juga diketahui melalui jumlah pelabuhan strategis (indikator 9.1.2.(c)) yang telah dibangun sebanyak 14 unit dari target 14 unit.

Seiring pembangunan dan bertambahnya jumlah infrastruktur yang berkualitas, memberikan efek kepada peningkatan jumlah penumpang dan barang yang keluar masuk di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi (indikator 9.1.2.*(a)) yang telah mencapai 8 juta orang dari target 6 juta orang. Sementara, terkait jumlah barang berdasarkan moda transportasi (indikator 9.1.2.*(b)) telah mencapai 328 juta kilogram/koli dari target 337 juta kilogram/koli.

Pemulihan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pasca Covid 19, turut berimbas pada peningkatan industri manufaktur. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mencapai 19,86% dari target 8,96%. Sedangkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (indikator 9.2.1.(a)) mencapai 2,29% dari target 5,4%. Angka pertumbuhan ini berangsur positif mengingat adanya perbaikan kinerja industri manufaktur pasca Covid-19.

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menurunkan gas rumah kaca yang bersumber dari industri menunjukkan capaian yang membaik, walaupun belum mencapai target. Indikator mengenai rasio emisi CO₂/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur (indikator 9.4.1.*) mencapai 43,23% dari target 48,94%.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai Tujuan 10 menunjukkan hasil yang membaik, walaupun ada indikator belum mencapai target. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini (indikator 10.1.1.*) pada tahun 2022 menunjukkan capaian 0,327% dari target 0,308%. Sementara itu, persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional (indikator 10.1.1.(a)) telah mencapai 6,31% dari target 5,78%. Indikator lainnya mengenai proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, diketahui menunjukkan capaian 1,13% dari target 1,50%.

Dalam upaya meningkatkan status kemandirian daerah dan desa, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah berhasil karena memenuhi capaian dari target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah desa tertinggal (indikator 10.1.1.(b)) dengan capaian 40 unit dari target 40 unit, jumlah desa mandiri (indikator 10.1.1.(c)) dengan capaian 19 unit dari target 19 unit dan jumlah daerah tertinggal (indikator 10.1.1.(d)) yang telah mencapai 4 unit dari target 4 unit.

Berkaitan dengan upaya menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kebijakan yang diskriminatif, indeks kebebasan (indikator 10.3.1.(a)) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah mencapai angka 10 dari rasio target 9,3. Sama halnya dengan jumlah kebijakan yang diskriminatif (indikator 10.3.1.(d)) dimana telah mencapai 10 dari yang ditargetkan 10 paket. Sementara itu, terkait proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (indikator 10.4.1.(b)) menunjukkan capaian 53,95% dari target 80%.

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, dengan target untuk perumahan yang layak, sistem transportasi, dan risiko bencana. Dari 15 indikator, 7 indikator telah mencapai dan melampaui target, 3 indikator akan tercapai, 2 indikator memerlukan perhatian khusus dan 3 indikator belum tersedia data. Indikator yang telah mencapai atau melampaui target adalah: persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (11.1.1.(a)), proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik (11.2.1.(a)), rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk 11.3.1.(a), Indeks Kualitas Udara (11.6.2.(b)), proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS (11.a.1.(a)), persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal (11.c.1.(a)), dan proporsi kerugian ekonomi

langsung akibat bencana relatif terhadap PDB 11.5.2.(a). Indikator yang memerlukan perhatian khusus adalah orang yang terdampak bencana (11.5.1*) dan persentase pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana, di mana baru 4 kabupaten/kota yang memiliki kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yaitu melalui penurunan sisa makanan sepanjang produksi 12.3.1.(a) yang telah mencapai target dan didukung pula oleh keseriusan untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah pesisir (12.b.1.(a)) yang menjadi peluang ekonomi sehingga perlu dikembangkan dengan memperkenalkan produk lokal yang ramah lingkungan serta budaya masyarakat yang berada di masing-masing destinasi wisata. Pengendalian kualitas lingkungan juga tetap dilakukan terutama untuk mengurangi limbah B3 (12.4.2.*(a)) untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, di mana salah satu strategi yang dilakukan Kalimantan Timur adalah penetapan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1.(a)) yang di dalamnya juga berupaya untuk memberi perhatian khusus dalam penanganan limbah B3 (12.4.2.*(a)) terutama di sektor pertambangan batubara dan pabrik kelapa sawit.

4 (empat) indikator dalam Tujuan 12 telah tercapai, yaitu Persentase Sisa Makanan (12.3.1.(a)) dengan angka 45,42% dari target 40%, Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (12.5.1.(a)) sebesar 987.718,64 ton, Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1.(a)) sebanyak 107 perusahaan, dan Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1.(a)) sebanyak 3 unit. Namun demikian, masih terdapat 2 (dua) indikator yang memerlukan perhatian khusus, yaitu indikator 12.4.2.*(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita dan indikator 12.4.2.*(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, dengan target ketahanan dan adaptasi terkait iklim dan bencana alam. Pencapaian tujuan 13 dengan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi (13.1.1.*) masih perlu ditindaklanjuti, hal ini disebabkan jumlah korban masih tinggi yaitu 14000 jiwa. Keseriusan

pemerintah daerah mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan (13.1.3*) perlu diperkuat dalam rangka memperkuat aksi adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi dampak ekonomi akibat bencana. Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pada indikator 13.2.2.(a). potensi penurunan emisi GRK 36,4 Juta tCO₂e dan emisi GRK 51,46 Juta tCO₂e (13.2.2.*). Potensi penurunan emisi GRK diakibatkan oleh sekuestrasi dari sektor lahan.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Tujuan 14 adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan, dengan target melestarikan wilayah pesisir, menghentikan penangkapan ikan secara illegal, dan memberikan perlindungan untuk nelayan. Kalimantan Timur dalam Tujuan 14 berperan dalam Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan. Tingkat penerapan kerangka hukum (14.b.1.*) sudah tercapai untuk menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar dengan capaian 4 di mana jumlah nelayan yang terlindungi (14.b.1.(b)) sudah pada capaian target 3.450 pada tahun 2022, kemudian untuk mendukung hal tersebut juga didasarkan oleh kepatuhan pelaku usaha (14.6.1.(a)) yang menunjukkan capaian 36,4% di atas baseline 33,6%.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Tujuan 15 adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dengan target pelestarian, restorasi dan pemanfaatan ekosistem daratan yang berkelanjutan. Kalimantan Timur memiliki Kawasan Hutan dengan luas 8,3 juta hektare (65,5%). Salah upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan luasan tutupan lahan dari deforestasi dan degradasi hutan melalui penetapan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dengan luas 101.500 hektare yang berada di APL. Kalimantan Timur juga memiliki 14 Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan ekosistem di luar kawasan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Melihat dampak KEE terhadap konservasi cukup signifikan

maka sejak tahun 2022 pengelolaan KEE difokuskan pada 2 KEE yaitu KEE Wehea - Kelay di Kabupaten Kutai Timur hingga Kabupaten Berau, kemudian KEE Mesangat - Suwi di Kabupaten Kutai Timur yang telah beroperasi penuh hingga saat ini, sedangkan 12 KEE telah dipetakan untuk tindak lanjut program pengembangan pada 2022.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum merupakan salah satu indikator kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya mengurangi segala bentuk kejahatan yang terjadi dengan kecenderungan semakin menurunnya tingkat pelaporan kejahatan yang dilaporkan setiap tahunnya. Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar, pada proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dalam pencapaiannya akan mencapai target yang ditetapkan yaitu 58.95% dengan target sebesar 55.42%. (indikator 16.1.4*) walaupun pada Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir melampaui dari target yang ditetapkan (indikator 16.1.1 (a)) dan menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya sedangkan untuk kematian yang disebabkan oleh kondisi konflik dapat mencapai tujuan dan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 0% (Indikator 16.1.2a), untuk proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir menurun cukup signifikan dari periode tahun sebelumnya walaupun pada kenyataannya masih melebihi dari target yang sudah ditetapkan (Indikator 16.1.3).

Dalam hal menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, Pemerintah Kalimantan Timur memastikan kesejahteraan anak sebagai prioritas perencanaan pembangunan berkelanjutan. Sementara pada proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir perlu mendapatkan perhatian khusus karena melebihi target yang ditetapkan (indikator 16.2.1 (a)) termasuk dengan prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami satu bentuk kekerasan atau lebih sepanjang hidup dengan capaian target 3% dari baseline 5% (indikator 16.2.1 (b)) dan untuk proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi mencapai 0 dengan target 30.

Terkait dengan Misi 5 Pemerintah Kalimantan Timur dalam RPJMD 2019-2023 yaitu Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik, pada indikator 16.6.1(a) persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) mencapai target 100% termasuk juga dengan indikator 16.6.1.(b) mengenai persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B telah mencapai 89.19% dengan target 79% sedangkan pada persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B akan mencapai target 75% dari capaian 68.1% (indikator 16.6.1.(c)). Untuk jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik berjumlah 4 dan ini telah mencapai target yang ditetapkan (Indikator 16.6.2.(a))

Terkait misi 1 Pemerintah Kalimantan Timur dalam RPJMD 2019-2023 yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia terutama perempuan dan penyandang disabilitas, peran serta perempuan semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Dilihat dari persentase keterwakilan perempuan di (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat tercapai 23,2% dari target 20,5% dan (b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi tercapai 20% dari target 9,09% dan akan tercapai untuk (c) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 16,42% dari target 30% (Indikator 16.7.1.(a) dan demikian pula pada persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) akan mencapai target dengan hasil capaian 10,79% dari target 18% (Indikator 16.7.1.(b)).

Masih terkait dengan Misi I Kaltim, sesuai dengan tujuan dan sasaran I pada dokumen RPJMD untuk Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur merupakan publikasi yang memberikan gambaran kondisi demokrasi Indonesia melalui 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Pada capaian kaltim untuk Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi sangat baik sesuai dengan target yang ditetapkan (Indikator 16.7.2.(a)) begitu juga dengan Indeks Aspek Kebebasan sebesar 96,13 dari target 92,49 (Indikator 16.7.2.(b)) artinya hampir tidak ada hambatan di dalam kebebasan, berbeda dengan Indeks Kesetaraan walaupun masih belum mencapai target dengan capaian 74,56 dari target 90 (Indikator 16.7.2.(c)) tetapi Pemerintah Kaltim terus berupaya untuk memberdayakan semua unsur terutama perempuan hal ini perlu mendapatkan dukungan terutama pejabat publik dan Lembaga-Lembaga Demokrasi untuk menjaga capaian agar semakin baik kedepannya. Serta merawat kinerja demokrasi dan meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan praktik-praktik demokrasi di Kalimantan Timur.

Persentase anak balita yang memiliki akta kelahiran terus meningkat meski peningkatannya cukup lambat, yaitu dari 84.83% di tahun 2019 menjadi

85.78% di tahun 2020 kemudian menurun menjadi 83.08% di tahun 2021 sedangkan target yang ditetapkan yaitu 98% (Indikator 16.9.1). Sedangkan Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah mencapai 90.4% dari target 99% (Indikator 16.9.1.(a)) dan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun mencapai 93.16% dari 99% target yang ditetapkan (Indikator 16.9.1.(b)). Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kelahiran kepada instansi pelaksana setempat. Dengan adanya akta kelahiran tersebut merupakan pengakuan anak dihadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak tidak terjadi.

Di Kalimantan Timur jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional (Indikator 16.b.1.(a)) telah mencapai target yang ditetapkan. Pada indikator ini melihat adanya hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan.

Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media (6.10.1.(a.)) mencapai target dari 2 yang ditargetkan hanya 1 yang tercatat, sedangkan jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif akan mencapai target (16.10.2.(a)).

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2021 berdampak positif terhadap kinerja fiskal Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tercatat bahwa total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya (indikator 17.1.1.*) mencapai 121,57% dari yang ditargetkan 100%. Selain itu, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (17.1.1.(a.)) mencapai 2,74% dari target 0,74%. Sedangkan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik (indikator 17.1.2.*) telah mencapai 46,45% dari target sebesar 49,56%.

Positifnya kinerja fiskal Kalimantan Timur turut memberikan dampak kepada pertumbuhan ekspor produk nonmigas (indikator 17.11.1.(a)) yang menyumbang sebesar 87,12% dari target 90%. Ekspor non migas Kalimantan Timur didominasi oleh komoditas batu bara. Sempat tumbuh negatif pada tahun 2019 dan 2020, ekspor produk non migas Kalimantan Timur mampu *rebound* tumbuh positif 87,12% di tahun 2021. Selain karena pengaruh *low base effect*, level pertumbuhan yang tinggi ini juga disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasokan batu bara sebagai sumber energi bagi industri dan pembangkit listrik oleh negara-negara mitra

dagang Kalimantan Timur memasuki masa normal baru pandemi Covid-19, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global.

Untuk mencapai pembangunan yang progresif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan kerja sama baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak-pihak yang mempunyai pengalaman serta strategi pembangunan. Hal ini tercermin dalam Dokumen Daftar Rencana Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (DRK KPBU) yang diterbitkan setiap tahun (indikator 17.17.1.(a)), dalam hal ini terdapat 1 unit dokumen yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dokumen ini berkenaan dengan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah Manggar di Kota Balikpapan. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait indikator lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki data terkait jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (indikator 17.17.1.(b)) dan jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi (indikator 17.17.1.(c)). Indikator lain yang juga penting namun belum memiliki data mengenai proporsi *Official Development Assistance* (ODA) terhadap PDB dan PNB (indikator 17.2.1.(a)).

Capaian selanjutnya mengenai dukungan Tujuan 17 yaitu tersedianya data untuk melakukan pengukuran atas pembangunan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020 (indikator 17.19.2.(a)) yang telah terlaksana di Kalimantan Timur sebanyak 1 kali. Sedangkan dukungan data lainnya melalui registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*) (indikator 17.19.2.(b)) telah dikumpulkan dan tersedia di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Upaya lain dalam mendukung Tujuan 17 yaitu persentase pengguna internet (indikator 17.8.1.*) di Provinsi Kalimantan Timur. Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur mencatat bahwa proporsi individu pengguna internet pada tahun 2022 telah mencapai 80,56% dari target 80%. Angka ini bahkan melebihi dari capaian tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar 60-70% individu yang menggunakan internet. Capaian ini juga menandakan bahwa hampir semua penduduk Kalimantan Timur telah memiliki akses pada jaringan internet.

BAB III TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGs

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

a. Keadaan dan Kecenderungan

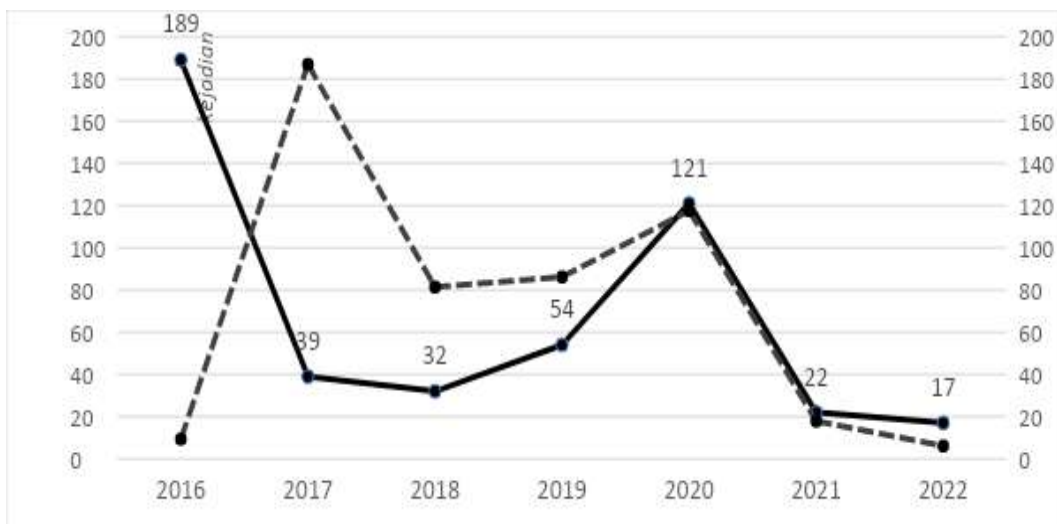
Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin, seiringan dengan peningkatan jumlah penduduk di Kalimantan Timur. Bila dilihat pada Gambar 2, kenaikan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur tidak serupa dengan kondisi yang terjadi secara nasional, di mana tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan. Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan naik sebanyak 2.31 ribu orang dan di perdesaan naik sebanyak 0,81 ribu orang dari September 2021. Jumlah penduduk miskin terbesar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar Rp 728.208 per kapita per bulan, naik 3,55% dari September 2021 dan 5,69% dari Maret 2021, dengan sumbangan terbesar garis kemiskinan adalah makanan.



Gambar III.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur
(sumber: BPS Kaltim, 2022)

Perlindungan sosial, baik melalui program perlindungan sosial maupun sistem jaminan sosial mengalami peningkatan target program maupun kepesertaan sistem jaminan sosial. Walaupun demikian kepesertaan sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan sektor informal masih belum terlalu besar ((15,61%).

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kriteria rawan bencana tinggi atau berpotensi terjadi bencana. Ancaman bencana yang ada di Provinsi Kaltim adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan gelombang ekstrim dan abrasi. Berdasarkan indeks risiko bencana di Pulau Kalimantan pada tahun 2021, Provinsi Kalimantan Timur berada di posisi kedua dan memiliki risiko bencana dengan indeks 153,28. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana (DIBI BNPB), frekuensi kejadian bencana di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan menurun, demikian halnya dengan jumlah korban terdampak bencana. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) juga semakin meningkat, di mana sudah ada 4 kabupaten/kota yang memiliki KRB maupun RPB.



*Gambar III.2. Jumlah kejadian bencana dan korban terdampak bencana di Kalimantan Timur
(sumber: Data Informasi Bencana Indonesia BNPB, 2023)*

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tujuan 1 menargetkan pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, adanya jaminan sosial bagi penduduk miskin, kepastian sumber ekonomi dan layanan dasar, serta ketangguhan terhadap bencana pada kelompok miskin. Tantangan dalam mencapai Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan adalah posisi Kalimantan Timur sebagai provinsi kedua di Indonesia sebagai provinsi tujuan migrasi dari wilayah lain. Terkait sistem jaminan sosial, terutama untuk bidang ketenagakerjaan sektor informal, juga dipengaruhi oleh migrasi yang terjadi. Ketersediaan data yang terbaru terhadap kelompok penduduk miskin, menjadi tantangan lainnya yang

dihadapi. Proses integrasi data dan peta juga dilakukan oleh Bappeda Kaltim sebagai salah satu alat analisa perencanaan pembangunan.

Sementara, tantangan terkait ketangguhan terhadap bencana adalah kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama dari sisi perencanaan, keahlian, maupun pengorganisasian dalam penanggulangan bencana. Penetapan sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai wilayah ibukota nusantara (IKN), juga memberikan pengaruh terhadap masuknya warga baru, serta di sisi lain, Kalimantan Timur memperoleh dukungan dari berbagai pihak untuk menunjang persiapan IKN. Dalam upaya meningkatkan ketangguhan terhadap bencana, Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa kabupaten/kota telah melakukan kajian risiko bencana (KRB) dan melakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional berkontribusi terhadap kepemilikan sertifikat oleh masyarakat, sehingga memberikan jaminan terhadap keamanan tanah bagi masyarakat.

c. Kebijakan dan Strategi

Strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan tanpa kemiskinan dilakukan melalui pengelolaan data yang terintegrasi, akurat dan terbaharukan (update), meningkatkan kolaborasi antar sektor antara pihak, serta meningkatkan keahlian dan kapasitas dari para pihak.

Pengelolaan data dilakukan sejalan dengan pelaksanaan Satu Data Satu Peta di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk meningkatkan akurasi data dan data terpilah gender, sehingga bisa menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan, terutama untuk menentukan target dan sasaran kegiatan yang dilakukan. Interoperabilitas data menjadi hal yang perlu dilakukan, agar efisiensi dan kecepatan data dapat dilakukan.

Kolaborasi menjadi hal yang penting dilakukan, terutama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak non pemerintah, termasuk swasta. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan, agar dapat meningkatkan capaian peningkatan ekonomi kelompok penduduk miskin, serta memastikan adanya jaminan sosial, baik bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan. Kolaborasi juga penting dilakukan dalam upaya meningkatkan ketangguhan terhadap bencana, terutama dengan melibatkan secara aktif kelompok relawan dan akademisi dalam perencanaan, penanggulangan, serta peningkatan kapasitas pegiat kebencanaan.

Peningkatan keahlian dan kapasitas para pihak, termasuk upaya-upaya peningkatan keahlian teknis dan bisnis bagi penduduk miskin melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk miskin dan kelompok minoritas. Peningkatan keahlian dan kapasitas juga dilakukan berkaitan dengan kebencanaan, diantaranya Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA), hingga pengelola Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB).

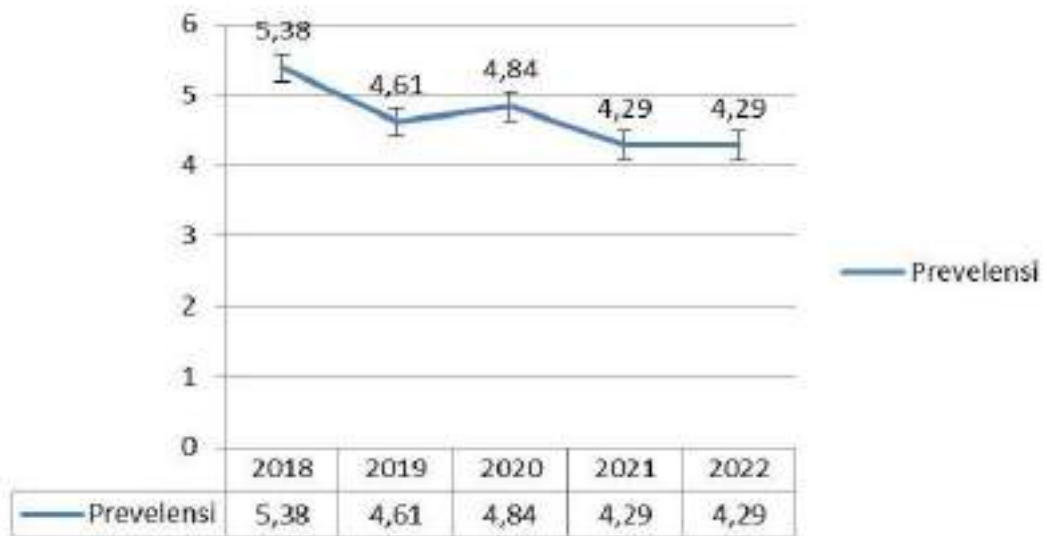
d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan pencapaian Tujuan 1 dilakukan melalui pelaksanaan forum TPB yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setiap tahunnya. Berkaitan dengan strategi penguatan pengelolaan data, dilakukan melalui Forum Satu Data Kalimantan Timur dan Jaringan Informasi Geospasial. Proses integrasi dan monitoring program dan kegiatan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan sektor juga dilakukan, selain juga memperluas peran non-pemerintah sebagai mitra pembangunan melalui program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan, maupun program dan kegiatan oleh lembaga non-pemerintah dan lembaga kerja sama internasional di Kalimantan Timur.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

e. Keadaan dan Kecenderungan

Provinsi Kalimantan Timur mengalami perbaikan dalam pencapaian Tujuan 2. Upaya untuk menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun, telah menunjukkan kecenderungan akan tercapai, walaupun indikator ketidakcukupan konsumsi pangan masih memerlukan perhatian khusus. Hingga tahun 2022, masih ada sebanyak 4,29 persen penduduk Provinsi Kalimantan Timur dengan kerawanan pangan sedang atau berat. Angka ini cenderung dibandingkan tahun 2020 (4,84 persen), sekaligus terendah sepanjang periode tahun 2018-2022.

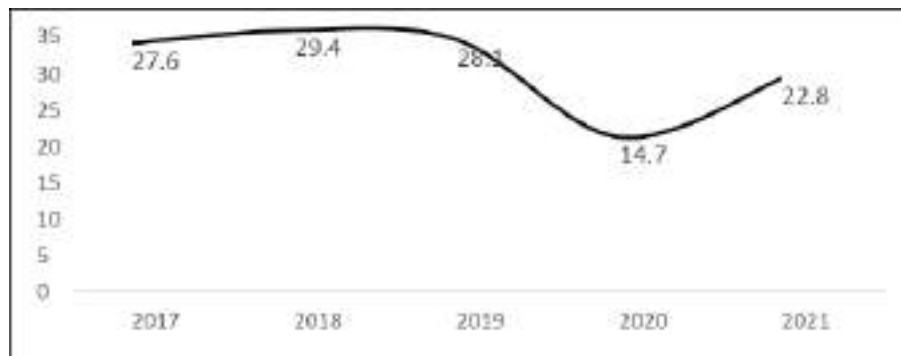


Gambar III.3. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan pangan di Provinsi Kalimantan Timur (%)

Upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manual, memiliki kecenderungan mencapai dan melebihi target. Pada tujuan 2 terdapat indikator yang menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur di masa depan, yaitu indikator prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (2.2.1*) dan indikator Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (2.2.2*). Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Sedangkan *wasting* merupakan kondisi dimana berat badan anak menurun, sangat kurang, atau bahkan berada di bawah rentang normal. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Sementara itu, balita yang menderita *wasting* (kurus/sangat kurus) sangat rawan terhadap penyakit infeksi dan memiliki risiko kematian lebih besar. Kedua indikator tersebut menunjukkan betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, khususnya yang masih balita.

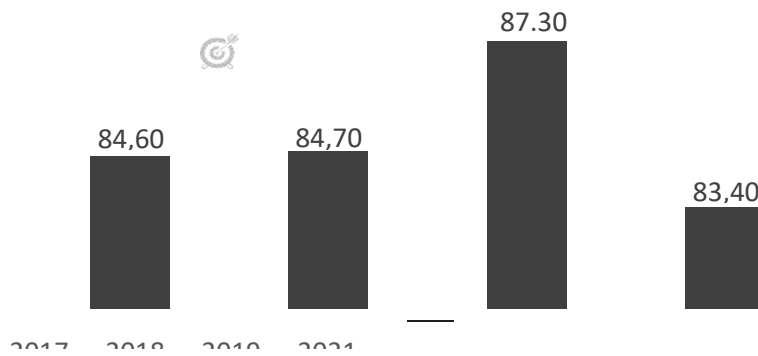
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 Provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6% pada tahun 2017 meningkat menjadi

29,40% pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10%, namun masih diatas rata-rata nasional (27%) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20%. Rata-rata prevalensi stunting menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2021 masih tinggi yaitu diatas 20%, kecuali Kabupaten Kutai Barat dan Kota Balikpapan yang masing-masing sudah mencapai 15,8% dan 17,6%. Hasil Riskesdas tahun 2018 angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 29,20% sementara Hasil SSGBI tahun 2019 sebesar 28,10 persen dan hasil ePPGBM sebesar 14,70% dari 36,62 persen yang diukur. Untuk wasting sendiri hasil Riskesdas 2018 sebesar 7,60% dan dari ePPGBM 7,2% dari target 9%.



Gambar III.4. Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021 berdasarkan Hasil Survei SSGI (Sumber: Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, 2022)

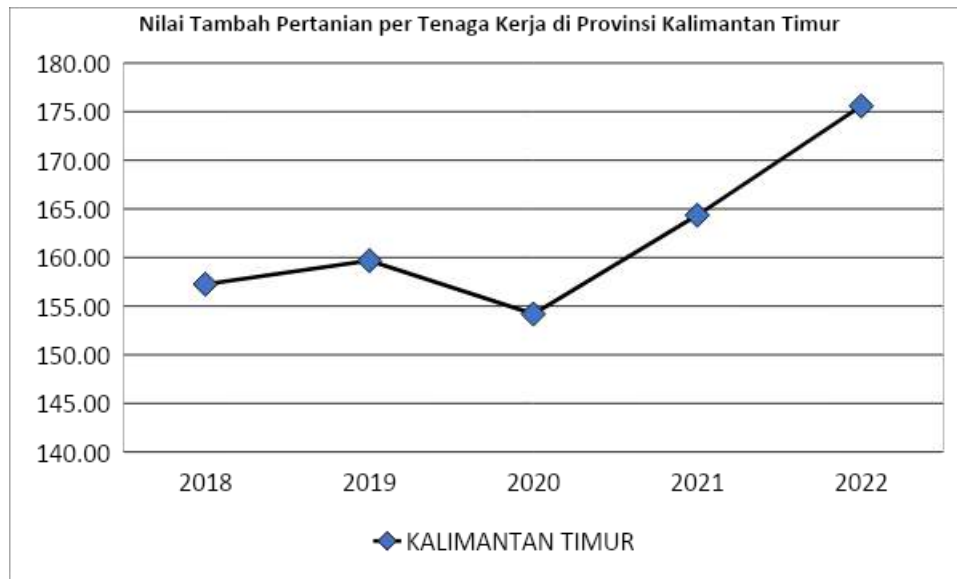
Upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan, di mana pada tahun 2021 , skor Pola Pangan Harapan di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 83,40 persen, yang berarti konsumsi pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup beragam serta bergizi seimbang. Angka tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik. Namun, capaian ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 (87,30%), bahkan juga lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2017 (84,60%) dan 2018 (84,70 %). Ini menunjukkan adanya penurunan keragaman dan keseimbangan gizi konsumsi harian masyarakat Kalimantan Timur.



Gambar STYLEREF 1 \s III. SEQ Gambar * ARABIC \s 1 5. Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan

(Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Keamanan Pangan (BKP), dan Kementerian Pertanian)

Nilai Tambah Pertanian per tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada periode 2018-2021 yaitu sebesar 175,58 Juta. Nilai Tambah Pertanian per tenaga kerja sempat turun menjadi 154,19 juta rupiah per orang pada tahun 2020. Hal ini juga sebagai imbas dari merebaknya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang mengakibatkan turunnya kinerja berbagai aspek perekonomian secara global, tanpa terkecuali Kalimantan Timur. Namun pada tahun 2021, memasuki era normal baru, Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan mampu kembali naik ke level 164,35 juta rupiah per orang pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 175,58 juta rupiah per orang, sekaligus menjadi yang tertinggi sepanjang periode 2018-2021.



Gambar III.6. Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur

f. Tantangan dan Pembelajaran

Pola konsumsi yang relatif sama pada antar-individu, antar-waktu dan antar-daerah mengakibatkan adanya masa-masa defisit dan lokasi-lokasi defisit pangan. Sehingga, mekanisme-mekanisme pasar dan distribusi pangan antar lokasi dan antar waktu dengan mengandalkan stok akan berpengaruh pada kesetimbangan antara ketersediaan dan konsumsi serta pada harga yang terjadi di pasar. Faktor harga sangat terkait dengan daya beli rumah tangga terhadap pangan. Sehingga, meskipun komoditas pangan tersedia di pasar namun jika harganya tinggi sementara daya beli rumah tangga rendah akan menyebabkan rumah tangga tidak bisa mengaksesnya. Kondisi ini memicu timbulnya kerawanan pangan.

Mengingat permintaan kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan di Provinsi Kalimantan Timur, maka peluang dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap, secara umum masih cukup terbuka peluang potensi sumber daya (alam, SDM, budaya, teknologi dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan peningkatan cadangan pangan; mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

g. Kebijakan dan Strategi

Persoalan pangan menjadi isu strategis yang akan terus diperjuangkan untuk diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebutuhan pangan daerah sebagian besar masih dipasok dari daerah lain. Produksi pangan Kalimantan Timur, belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi masyarakat. Pemerintah Provinsi terus berupaya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan produksi pangan daerah. Terutama, dalam hal pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditas pangan dan pertanian. Kaltim memiliki banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan pangan. Dalam aturan tata ruang daerah, Kaltim memiliki alokasi kawasan pangan seluas 380 ribu hektare, namun, baru sekitar 40% yang sudah digunakan. Sementara, sisanya masih berupa lahan tidur yang belum terpakai. Penggunaan lahan untuk kawasan pangan juga bisa dimanfaatkan dari perhutanan sosial. Pelaksanaan program perhutanan sosial di Provinsi Kaltim sudah mencapai 273.000 Hektare atau telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023 yakni 165.000 Hektare. Sekitar 130 hektare izin perhutanan sosial telah diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemerintah daerah kini tengah menyusun strategi penguatan menuju kedaulatan pangan. Dimulai dari pemanfaatan lahan, komoditi, sistem produksi, hingga kebijakan yang mendukung strategi penguatan pangan daerah. Jadi permasalahan utama terkait pangan ini, adalah lahan dan produksi. Lahan kita terbatas, tapi sudah mulai kita upayakan pemanfaatan lahan lainnya. Untuk meningkatkan produksi, kita perlu teknologi transgenik. Yang tadinya produksi 1 ton bisa menjadi 10 ton. Masyarakat Kaltim, harus mampu melakukan transformasi pangan pokok bahwa kebutuhan karbohidrat tidak hanya berasal dari beras. Namun bisa dari komoditi pangan lain, seperti jagung, singkong, umbi-umbian dan pisang. Sehingga kebutuhan pangan beras di Kaltim dapat terdiversifikasi dengan komoditi pangan lainnya. Program perhutanan sosial kini juga mulai diarahkan untuk lahan produksi pangan. Perhutanan sosial, boleh digunakan untuk menanam komoditi pangan seperti jagung, padi dan tanaman lain. Termasuk untuk kawasan peternakan sapi sebagai pemenuhan pangan dari protein hewani.

h. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menurunkan kasus gangguan perkembangan gizi buruk pada anak dalam rangka mewujudkan wilayah bebas stunting pada tahun 2024. Saat ini prevalensi stunting di Provinsi Kaltim tercatat sebesar 22,8%. Angka itu, sudah di bawah angka nasional yang tercatat sebesar 24,4%. Pemerintah pusat menargetkan

angka stunting nasional dapat ditekan hingga 14% pada tahun 2024 mendatang.

Upaya percepatan penurunan stunting ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini sekaligus menjadi dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Di Kalimantan Timur, regulasi itu diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Dalam pelaksanaannya ada dua hal pokok yang menjadi indikator upaya penurunan kasus stunting. Pertama, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal. Kedua, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Adapun jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan di desa antara lain:

A. Ketersediaan pangan di desa:

a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa:

- 1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
- 2) Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non produktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
- 3) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
- 4) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- 5) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- 6) Pengembangan pakan ternak alternatif;
- 7) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
- 8) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
- 9) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;

- 10) Pembangunan kandang komunal;
 - 11) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) Pengadaan alat-alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 13) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 14) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 15) Pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama;
 - 16) Pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - 17) Penetapan kawasan lahan pertanian/perkebunan/perikanan/kehutanan dalam rencana tata ruang Desa; dan
 - 18) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa:
- 1) Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Lumbung Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa (akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air, dan lain-lain); dan
 - 3) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
- c. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa:
- 1) Pendataan potensi dan sumberdaya pangan Desa;
 - 2) Pendataan produksi dan konsumsi pangan pada tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa;
 - 3) Pemutakhiran data pangan di Desa;
 - 4) Penyusunan peta digital kerawanan pangan di desa;
 - 5) Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data pangan di Desa; dan
 - 6) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan

Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

d. Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal:

- 1) Pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan Pangan Lokal;
- 2) Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- 3) Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- 4) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan; dan
- 5) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Keterjangkauan pangan di desa:

a. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa:

- 1) Pemasaran, promosi, dan distribusi produk pangan desa melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 2) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- 3) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- 4) Pengembangan usaha/unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal;
- 5) Fasilitasi BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Lembaga ekonomi lainnya dalam peran sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 6) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 7) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan;
- 8) Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal; dan
- 9) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat:

- 1) Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi anak usia di bawah lima tahun;
- 2) Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi lansia;

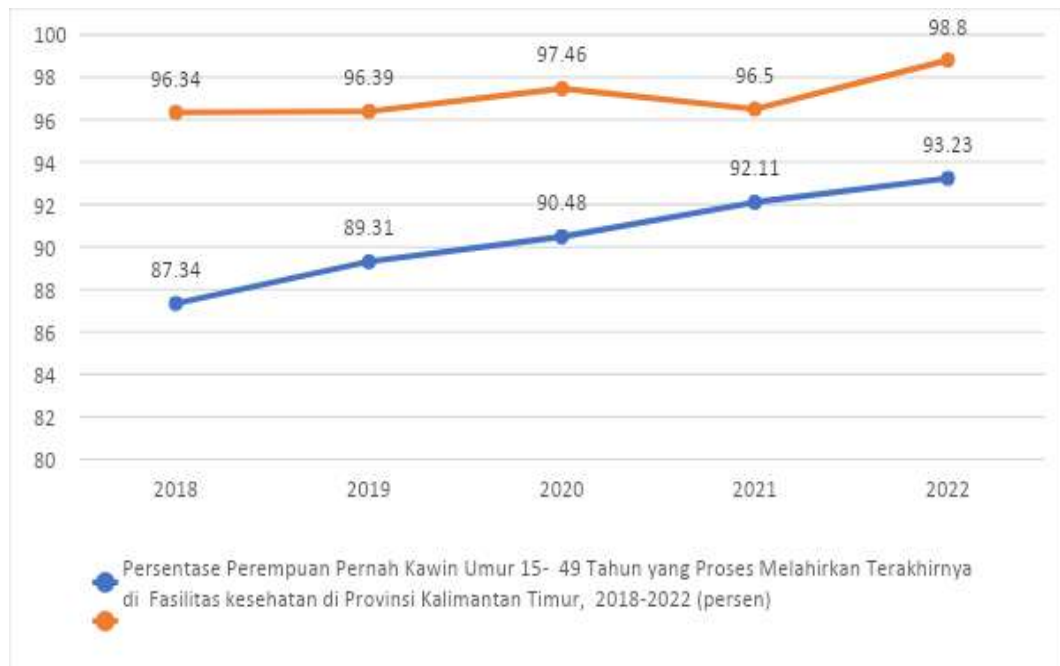
- 3) Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat; dan
 - 4) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- C. Pemanfaatan pangan di desa:
- a. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal:
 - 1) Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
 - 2) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal;
 - 3) Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal; dan
 - 4) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat:
 - 1) Edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - 2) Pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga desa bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - 3) Sosialisasi keamanan pangan terhadap Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
 - 4) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

a. Keadaan dan Kecenderungan

Sepanjang periode 2018-2022, proses kelahiran yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan atau ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022,

proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (3.1.2*(b)) dan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (3.1.2*(a)) masing-masing mencapai 93,23% dan 98,80%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

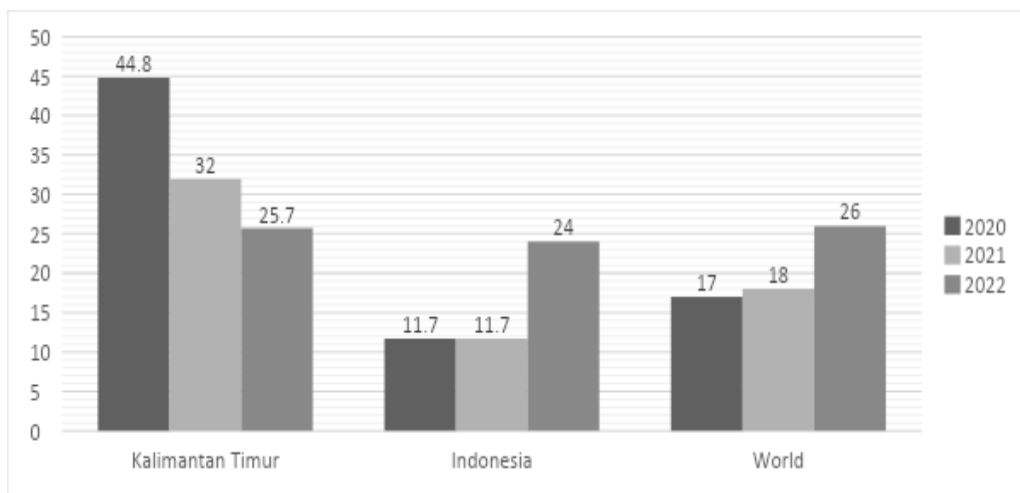


Gambar III.7. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan (b) di fasilitas kesehatan.

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) (3.1.1*) sudah berhasil, hal ini terbukti dengan angka capaian 64, yakni berada di bawah angka 75 yang telah ditargetkan. Angka Kematian Balita (AKBa) (3.2.1.*(a)) juga sudah tercapai bersamaan dengan pencapaian Angka Kematian Ibu (AKI). Pemerintah Kalimantan Timur sudah berhasil menurunkan AKBa dari 65 menjadi 26 per 1000 balita. Tren kecenderungan menurun pada pencapaian ini didukung pula oleh AKBa per 1000 kelahiran hidup (3.2.1 (b)) yakni sebanyak 342 balita dari target 570 per 1000 balita.

Tren Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup (3.2.2*) juga tercatat telah menurun, yakni dari 430 target yang ditetapkan hanya tercatat sebanyak 257 kasus sepanjang tahun 2022. Proses persalinan yang aman yaitu ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penurunan AKI, AKBa dan AKN. Oleh karena itu terobosan dan inovasi kebijakan

dengan daya ungkit tinggi harus dilakukan, terutama kebijakan yang spesifik wilayah dan tingkat sosial-ekonomi masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan hipertensi sebagai kondisi yang terjadi ketika tekanan sistol terukur lebih dari 140 mmHg, dan tekanan diastol terukur lebih dari 90 mmHg. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kejadian atau prevalensi hipertensi akan terus meningkat. Diprediksi sebanyak 25 persen orang dewasa di seluruh dunia, akan mengalami hipertensi di tahun 2025 mendatang. Penyakit ini juga telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun, di mana 1,5 juta kematian terjadi di Asia Tenggara, yang sepertiga populasinya menderita hipertensi. Adapun hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, diabetes, gagal ginjal, kebutaan dan meningkatkan angka Kematian Neonatal. Namun di Kalimantan Timur, Prevalensi tekanan darah tinggi (3.4.1(b)) sudah mengalami penurunan jauh dari capaian tahun sebelumnya yakni 34.1% menjadi 10.57%. hal ini juga yang berpengaruh pada penurunan tren pada Angka Kematian Neonatal (AKN).



Gambar III.8. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup (%)

Data: Mortality Rate, Neonatal per 1000 live births, :

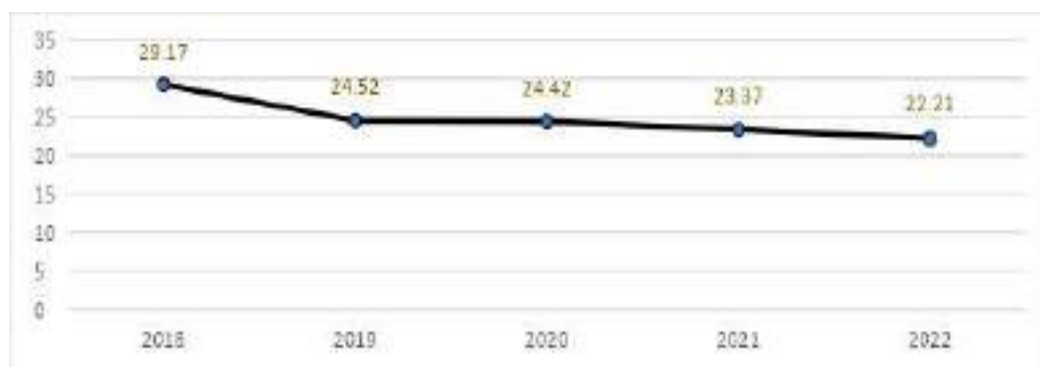
<https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.NMRT>

Kalimantan Timur dengan ekosistem hutan hujan tropis, memiliki masalah penyakit endemik yang sama dengan negara 2 musim lainnya, yakni malaria dan penyakit dengan vektor dari serangga terutama nyamuk. Namun, sepanjang tahun 2022 tercatat Kejadian Malaria per 1000 orang (3.3.3*) hanya 0,57 atau nyaris tidak tercatat. Begitu juga dengan Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk (3.3.4*) yang capaiannya hanya 0,27. Namun, Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria (3.3.3(a)) baru mencapai 4 Kabupaten/Kota dan diperkirakan akan

membalik sebab angka ini sudah naik dari capaian di tahun 2021 yakni 3 Kabupaten/Kota. Masyarakat yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis/Kaki Gajah) (3.3.5*) dan yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta) (3.3.5*) sudah mencapai target yang telah ditetapkan yakni 100%, serta sudah dilakukan di 10 Kabupaten/Kota untuk eliminasi Kusta (3.3.5.(a)) dan eliminasi endemis filariasis (3.3.5(b)).

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur terus meningkatkan upaya *war on drugs* di berbagai bidang. Dalam upayanya BNN Kaltim mengusung empat strategi antara lain *Soft Power Approach*, *Hard Power Approach*, *Smart Power Approach* dan *Cooperation*. Dalam rangka memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan maka perlu peningkatan pada Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi (3.5.1(b)) dan Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis (3.5.1(a)) dan terbukti BNN Kaltim berhasil meningkatkan capaiannya 434 orang yang mengakses layanan pasca rehabilitasi dan 68 orang penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis. Capaian ini jauh melebihi dari target yang sudah ditentukan. Dalam hal ini tren kecenderungan adalah naik dan naiknya angka pada masyarakat yang sadar akan berbahayanya narkoba merupakan suatu pencapaian yang positif.

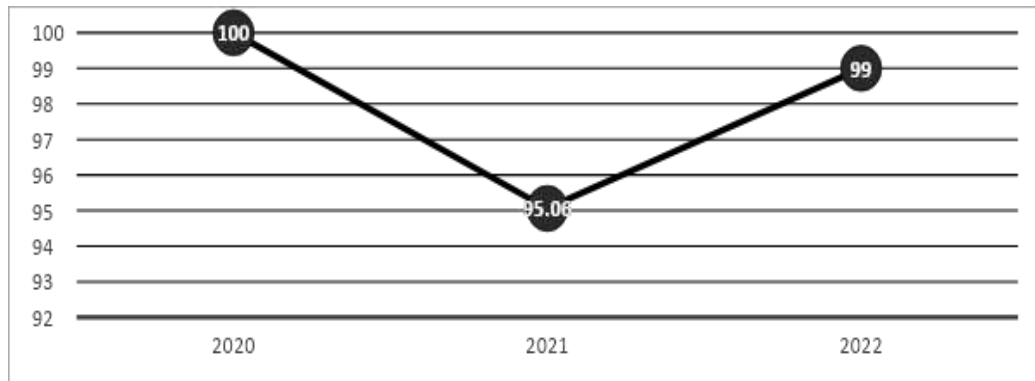
Merokok merupakan salah satu masalah kesehatan karena tingkat penggunaannya masih tinggi di Indonesia. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (3.4.1(a)), meskipun sudah tercapai (6,3%), namun Pemerintah Kalimantan Timur juga masih menggiatkan kampanye agar tidak ada peningkatan.



Gambar III.9. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun (%)

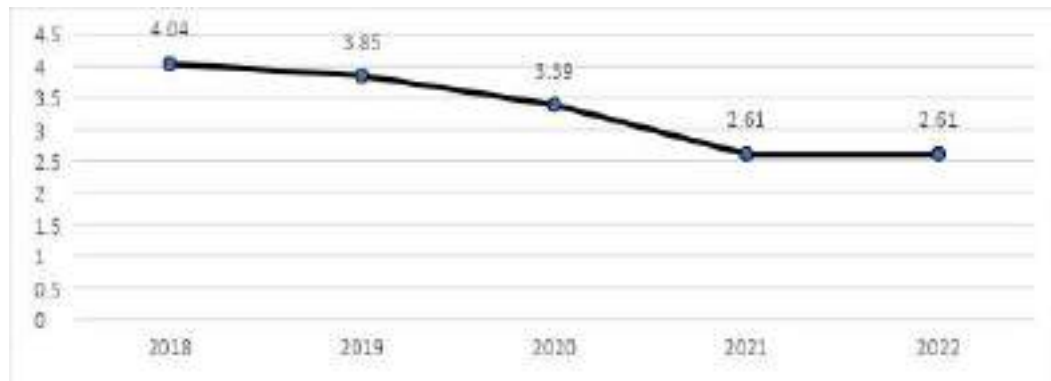
Dalam cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif,

berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang di Kalimantan Timur maka penting sekali memastikan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (3.8.2(a)). Untuk Kalimantan Timur sendiri sudah tercapai yakni sebanyak 99% dan capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni 95%. Hal ini semakin meyakinkan bahwa cakupan layanan JKN sudah sangat merata di masyarakat Kalimantan Timur.



Gambar III.10. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa masih sangat banyak penduduk di Kalimantan Timur yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat, mencapai 97,39% pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti tidak punya biaya berobat, tidak punya biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, atau karena waktu tunggu pelayanan yang lama sehingga berat hati untuk berobat, maupun sebab lainnya.



Gambar III.11. Unmet need pelayanan kesehatan

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tujuan 3 yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Maka dari itu ada 4 aspek penting yang perlu mencari perhatian, yakni :

- 1) Peningkatan kualitas SDM kesehatan yang belum merata.
Sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, pedesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan pulau terdepan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan lingkungan, pembalakan hutan, kerusakan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan.
- 2) Kesehatan Ibu dan Anak
Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi ibu, calon pengantin, serta remaja; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan antenatal dan pengasuhan anak; 4) peningkatan peran masyarakat melalui penguatan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat seperti Desa Siaga, Program Perencanaan Persalinan dan Komplikasi Pencegahan (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi/P4K) dan Pos Kesehatan Terpadu (Posyandu); dan 5) peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan, termasuk manfaat imunisasi.

3) Tenaga Kesehatan

Tantangan pemenuhan tenaga kesehatan di antaranya: 1) menempatkan tenaga kesehatan di wilayah DTPK dan tidak diminati; 2) meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan untuk promotif dan preventif seperti tenaga kesehatan masyarakat, gizi dan kesehatan lingkungan; dan 3) meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan epidemiologi dan teknologi Kesehatan.

4) Kesehatan Reproduksi

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah.

5) Farmasi dan Alat Kesehatan

Tantangan ke depan adalah: 1) meningkatkan penggunaan obat rasional (POR); 2) memperbaiki sistem pengadaan (*procurement*), penyimpanan dan distribusi terutama untuk DTPK; dan 3) mendorong kemandirian industri farmasi dalam negeri.

6) Kriminalitas yang Semakin Meningkat

Peredaran NAPZA yang semakin meningkat dan gaya hidup yang tidak sehat semakin banyak

7) Regulasi

Proses klaim ke Institusi Penerima Wajib Laport Kemenkes terlalu rumit/sulit (banyak persyaratan) dalam hal ini adalah perawatan rehabilitasi pengguna NAPZA.

c. Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka pencapaian target Tujuan 3, arah dan kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil;
- 2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
- 5) Memastikan seluruh pengguna NAPZA dapat mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang mumpuni dan merata.

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam percepatan pencapaian Tujuan 3 diperlukan upaya sebagai berikut:

- 1) Untuk menekan angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita perlu digalakkan Konsep *safe motherhood* yang mencakup serangkaian upaya, praktik, protokol, dan panduan pemberian pelayanan yang didesain untuk memastikan perempuan menerima layanan ginekologis, layanan keluarga berencana, serta layanan prenatal, delivery, dan postpartum yang berkualitas, dengan tujuan untuk menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas tenaga dan alat kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a) Memperkuat kemampuan kepemimpinan (*leadership*) Puskesmas;
 - b) Penguatan program Unit Kesehatan Masyarakat
 - c) Peningkatan jumlah dan distribusi Fasyankes melalui pelibatan aktif peran swasta nasional dan asing
 - d) Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan harus diiringi dengan penambahan kuantitas SDM Kesehatan yang berkualitas
 - e) Penguatan sistem rujukan
 - f) Peningkatan kualitas dan mutu layanan fasilitas pelayanan kesehatan
- 3) Dalam upaya percepatan Kalimantan Timur dalam memberantas narkoba, BNN Kalimantan Timur memiliki satu Program Kegiatan yang khusus menangani Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba, yakni Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

a. Keadaan dan Kecenderungan

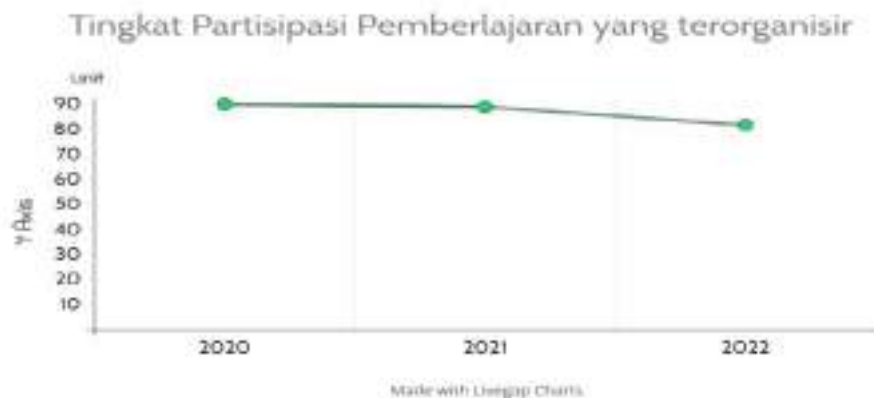
Provinsi Kalimantan Timur dikatakan memiliki ketimpangan pendidikan dengan kategori sedang diukur dari angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini juga didukung dari capaian indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur tercatat berstatus tinggi. Status ini menandai capaian pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan sudah sangat baik (*lihat Gambar III. 1*).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya untuk menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses bagi seluruh anak usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) yang berasal dari kelompok usia SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 mencapai 83,3 persen dari target APM sebesar 82 persen. Kecenderungan ini sangat positif bagi capaian partisipasi anak untuk terus bersekolah di setiap tingkatan jenjang pendidikan .

Pada usia anak Sekolah Dasar dinilai telah merata distribusinya dilihat dari angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan SD atau sederajat mencapai 103,52%. Yang menjadi perhatian adalah capaian pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Walaupun trennya positif melebihi target, akan tetapi masih perlu didorong dikarenakan persaingan pada sektor ketenagakerjaan banyak membutuhkan lulusan terampil di jenjang Perguruan Tinggi, belum lagi dengan hadirnya IKN yang akan memperketat persaingan sumber daya manusia bagi penduduk Kalimantan Timur. Tingkat partisipasi pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) mengukur angka partisipasi usia 6 tahun dalam program pendidikan yang terorganisir. Pada tahun 2022, capaian indikator ini turun dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar STYLEREF 1 \s III. SEQ Gambar * ARABIC \s 1 12. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur



Gambar III.13. Tingkat Partisipasi Pembelajaran yang Terorganisir

Selain itu juga untuk mengukur kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah dilihat dari rata-rata lama sekolah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki tren yang baik dari data rata-rata lama sekolah setiap tahunnya. Pada 2020 dari target rata-rata lama sekolah 9,5 tahun, ternyata terealisasi selama 9,8 tahun, pada 2021 dari target selama 9,6 tahun, terealisasi selama 9,8 tahun, dan pada 2022 dari target selama 9,7 tahun, namun realisasinya mencapai 9,9 tahun.

Tabel III.1. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	8,22	8,54	8,55	8,79	8,80
2	Kutai Barat	8,07	8,34	8,47	8,70	8,78
3	Kutai Kartanegara	8,84	9,10	9,22	9,23	9,24
4	Kutai Timur	9,08	9,18	9,19	9,43	9,44
5	Berau	8,98	9,25	9,52	9,53	9,54
6	Penajam Paser Utara	8,03	8,16	8,28	8,36	8,51
7	Mahakam Ulu	7,69	7,89	7,97	8,18	8,36
8	Balikpapan	10,65	10,67	10,68	10,91	10,92
9	Samarinda	10,46	10,47	10,48	10,49	10,71
10	Bontang	10,72	10,73	10,79	10,80	10,81

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan terletak pada faktor internal dan eksternal satuan kerja perangkat daerah. Dari sisi internal pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola manajemen kinerja belum tertata dengan baik dan adanya keterbatasan sumber daya pegawai

yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi. Selain itu juga adanya keterbatasan kewenangan dari Provinsi yang menangani langsung soal pendidikan.

Dari sisi faktor eksternal, letak geografi wilayah Kalimantan Timur menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya daerah seperti Kab. Mahakam ulu. Akses terhadap pendidikan sangat penting untuk mengukur capaian angka partisipasi sekolah setiap jenjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Kab. Mahakam ulu paling rendah dibandingkan dengan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya infrastruktur pendidikan di Kab. Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Tantangan lain yang mestinya harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan adalah belum meratanya tuntas wajar pendidikan selama 12. Belum semua jenjang pendidikan dasar dan menengah memenuhi SPM (Standar Pendidikan Minimal). Selain itu juga masih ada penduduk Kalimantan Timur yang buta aksara. Dalam upaya pengelolaan pendidikan yang lebih baik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha untuk mencapai Standar Pendidikan Minimal. Selain itu juga MoU atau kerja sama dengan para pihak menjadi agenda penting untuk pengembangan kualitas tenaga pendidik dan peserta didik. Beberapa Kab/Kota telah banyak melakukan proses kolaborasi dengan para pihak terutama untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan dikarenakan keterbatasan anggaran.

1) Kurikulum *Dual Track*

Kurikulum *Dual Track* Tetap Kuat Kaltim merupakan inovasi di bidang pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran reguler dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) berdampingan dengan pengayaan yang berbasis *life skills* dan *soft skills* utamanya diperuntukkan bagi para siswa yang memiliki kecenderungan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Kurikulum *Dual Track* Tetap Kuat merupakan langkah inovasi yang konkret dan akan disegerakan implementasinya pada 20 SMA sebagai sekolah piloting (sekolah model) yang tersebar beberapa kabupaten/kota di Kaltim.

Kurikulum *Dual Track* Tetap Kuat tetap mengacu pada Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), saat ini Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang pertama kali di Indonesia menyatakan diri menjadi pelaksana Kurikulum Merdeka 100 persen. Konten kurikulum ini mengedepankan konteks kebudayaan dan lingkungan dalam muatan lokal di jenjang pendidikan SMA atau sederajat. Harapannya generasi muda Kalimantan Timur tidak kehilangan jati diri sebagai pewaris

sekaligus penerus bangsa yang memiliki kebanggaan terhadap daerahnya.

2) Pengembangan Literasi Digital

Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menggandeng Aksaramaya sebagai platform teknologi digital. Peta jalan pengembangan perpustakaan digital sekolah untuk mendukung kegiatan belajar siswa sebagai langkah inovasi di bidang pendidikan di Kaltim. Sosialisasi kegiatan ini diperuntukkan untuk pengembangan SDM Perpustakaan Sekolah pada tingkat SMA/SMK se- Kalimantan Timur.

Roadmap pengembangan Perpustakaan Digital Sekolah/Universitas dilakukan secara bertahap diawali dengan pengembangan aplikasi perpustakaan digital, penyediaan koleksi eksternal dan internal, *Learning Management System (LMS)*, integrasi layanan dan *Smart Class*. Data yang terbentuk dikumpulkan dan diolah untuk menjadi laporan dan analytics sehingga membentuk *Knowledge Management* bagi perkembangan sekolah dan performa belajar siswa.

c. Kebijakan dan Strategi

Salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan Kalimantan Timur dalam rangka untuk pencapaian Tujuan 4 adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri. Hal tersebut menjadi isu strategis yang diprioritaskan penyelesaiannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 guna meningkatkan daya saing sumber daya vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan industri hilir pengolahan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan revitalisasi sekolah vokasi yang disesuaikan dengan potensi daerah dan menargetkan 147 jurusan/program keahlian dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung kawasan industri. Selain itu juga untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan bagi anak di usia sekolah, upaya yang dilakukan pemerintah Kaltim adalah dengan pemberian beasiswa bagi anak miskin dan berprestasi melalui beasiswa Kaltim Tuntas. Pemberian beasiswa bagi anak miskin dan berprestasi ditargetkan sampai tahun 2023 sebanyak 31.700 anak.

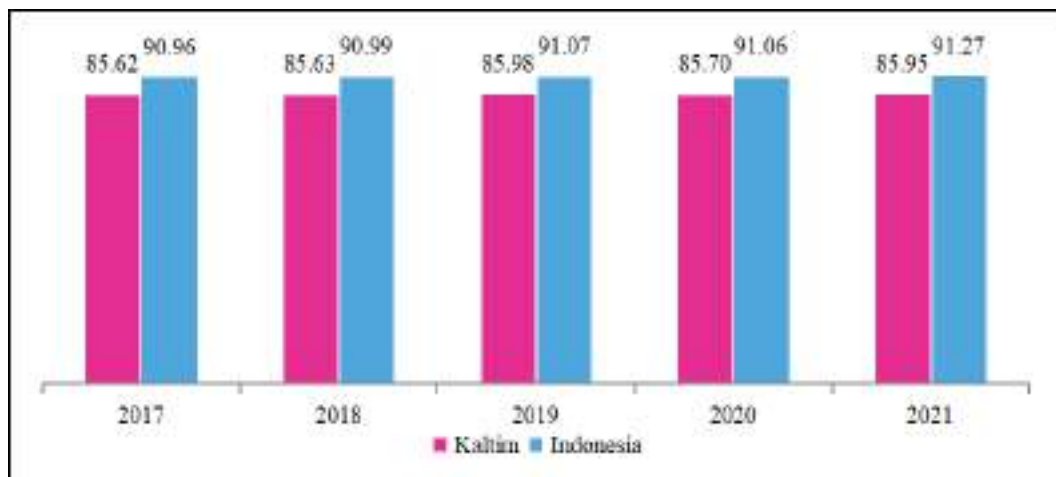
d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan pencapaian Tujuan 4 dilakukan melalui pelaksanaan forum TPB dua tahun sekali. Pemerintah Provinsi Kaltim mengajak lembaga non pemerintah untuk terlibat dalam pencapaian TPB. Kolaborasi para pihak di Provinsi Kalimantan Timur menjadi penting untuk dilakukan dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program terkait mendukung capaian Tujuan 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan inklusif dan merata. Kolaborasi ini merupakan proses integrasi dan pemantauan program dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga memperluas peran non-pemerintah sebagai mitra pembangunan melalui program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan, maupun program dan kegiatan oleh lembaga non-pemerintah dan lembaga kerja sama internasional di Kalimantan Timur.

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

a. Keadaan dan Kecenderungan

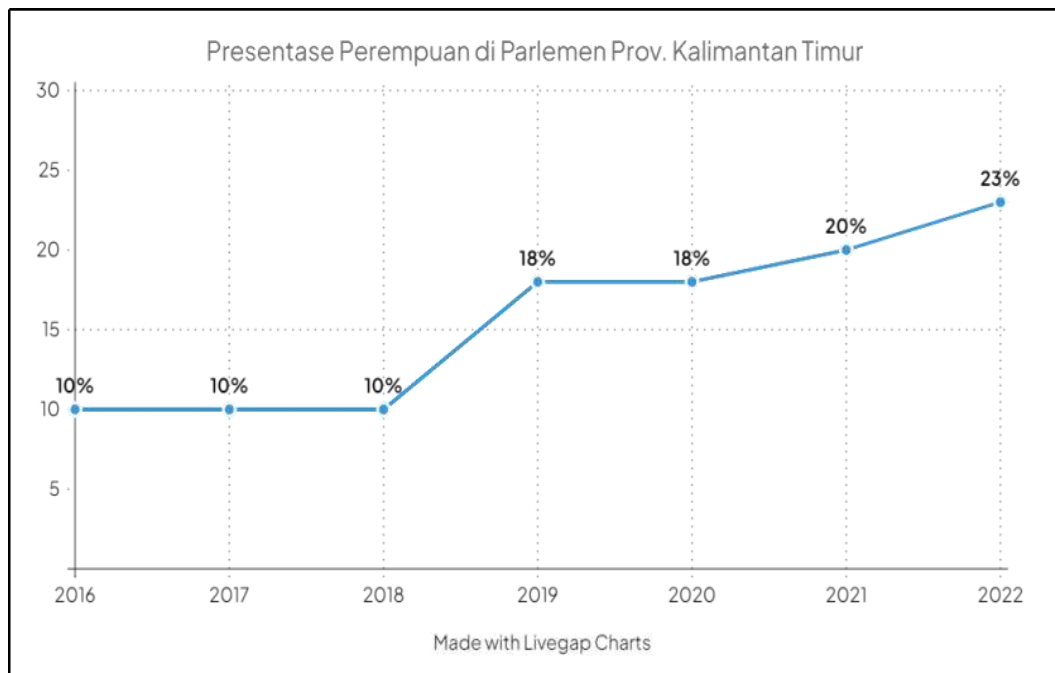
Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa Kaltim masih mengalami ketimpangan gender. hal ini tergambarkan dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender yang masih rendah.



Gambar III.14. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber BPS Kaltim 2022)

Angka IPG dan IDG Kaltim berada di urutan ke-3 terbawah se-Indonesia atau peringkat ke 32 dari 34 Provinsi. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu empat tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi di tahun 2019 sebesar 85,98. Dan capaian terakhir pada tahun 2021 Namun

menurun di tahun 2020 menjadi 85,70. Hal ini juga tergambar dari persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen. Keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan di legislatif pada kurun waktu 3 periode mulai dari periode 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024 sangat fluktuatif dan rata-rata hanya mencapai 15,5% di DPRD Kaltim. Untuk tahun 2022, keterwakilan perempuan di parlemen baru mencapai 23,2 persen, sehingga masih ada peluang bagi perempuan di Kaltim untuk memenuhi kuota 30 persen sesuai dengan undang-undang.



Gambar III. 15 Persentase Perempuan di Parlemen Provinsi Kalimantan Timur (Sumber BPS Kaltim 2022)

Kecenderungan masyarakat menganggap perempuan berada dalam posisi lebih rendah daripada laki-laki sehingga membuat perempuan terkonsentrasi dalam sektor kecil saja, seperti pada pekerjaan mendapatkan posisi lebih rendah daripada laki-laki atau kepemilikan aset dan pengambilan keputusan penting tidak terlalu dilibatkan. Padahal peran perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan juga sangat penting untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kaltim maupun legislatif untuk mendorong peran aktif perempuan dalam aspek politik supaya kebijakan yang berkaitan dengan perempuan mampu diakomodir.

b. Tantangan dan Pembelajaran

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks pemberdayaan Gender di Provinsi Kalimantan Timur berada di urutan ke 3 terbawah se-Indonesia.

Hal ini menunjukkan Kalimantan Timur masih mengalami ketidaksetaraan gender. Tingginya ketimpangan gender menjadi tantangan, sehingga dibutuhkan komitmen berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan responsif gender.

Tantangan lain adalah peran aktif perempuan dalam ruang strategis masih kurang serta dihadapkan dengan tantangan lainnya, yang di mana sektor publik masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini juga diakibatkan dari pendidikan politik oleh perempuan masih minim, yang di mana bahwa hak perempuan sangat penting untuk berkontribusi menentukan kebijakan pemerintah, dan masih rendahnya pemahaman terkait kesetaraan gender.

c. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender telah didukung oleh regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender juga tertuang dalam RPJMD yang memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

Strategi lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan kolaborasi dengan mitra terkait. Organisasi Pemerhati Perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur diakomodasi dengan tujuan memberikan dukungan dalam pelaksanaan program dan pemahaman atas responsif gender. Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan dalam keluarga diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan bagi perempuan. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Kaltim telah meluncurkan Kaltim PEKA Gender dalam membangun Strategi Peningkatan Anggaran Responsif Gender Provinsi Kaltim. Harapannya, strategi ini mampu meningkatkan anggaran yang responsif gender serta terimplementasinya pengaruh utama gender guna mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan.

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam upaya percepatan pencapaian Tujuan 5 tentang mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan melalui inisiasi regulasi peraturan gubernur 85/2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dilakukan upaya bimbingan teknis kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur untuk menyusun rencana aksi masing-masing dengan tujuan menghasilkan peningkatan komitmen dan peran POKJA PUG Kabupaten/Kota.

Kesepakatan pelaksanaan PUG akan difokuskan pada prioritas pembangunan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Memberi ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan, meminimalkan konflik dan menguatkan modal sosial antara para pemangku kepentingan. Kemudian menyediakan ide serta sumber daya yang bervariasi diantaranya dengan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi antara instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Upaya lain yang dilakukan seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas pengetahuan dan kualitas hidup perempuan serta melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya berupa jenjang karir yang lebih tinggi baik dalam pemerintahan maupun swasta, dan melindungi perempuan dari tindakan kekerasan seksual.

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

a. Keadaan dan Kecenderungan

Penanganan air bersih dan sanitasi layak tetap dilakukan melalui program kerja pemerintah provinsi, kabupaten dan sektor. dengan tercapainya layanan air minum yang dikelola secara aman yaitu 88,5% maka akan berdampak terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Upaya untuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu mencapai angka 82 sehingga berdampak pada perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu sebesar 54,3% dari target 53,8%. Upaya untuk mengurangi praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya perubahan kualitas lingkungan walaupun tren yang ada menunjukkan ada peningkatan sebesar 4% dari sebelumnya. Upaya dalam meningkatkan penggunaan sanitasi yang dikelola secara aman dan limbah cair yang diolah secara aman tetap dilakukan sehingga bisa membawa Kalimantan Timur kepada kondisi yang lebih baik dan nyaman.

b. Tantangan dan Pembelajaran

Keberadaan sarana prasarana sanitasi yang memadai mutlak diperlukan, mengingat penduduk membutuhkan kehidupan dan lingkungan yang bersih dan sehat. Kebutuhan dasar terkait air dan sanitasi antara lain adalah ketersediaan sumber air minum yang bersih, ketersediaan sarana untuk mandi, mencuci, dan kakus (MCK) yang memadai, dan sarana pengelolaan limbah yang baik. Jika sumber air minum tercemar dan lingkungannya penuh sampah atau limbah, maka akan membahayakan kesehatan penduduk di lingkungan tersebut. Pemenuhan kebutuhan air bersih dalam bentuk baku untuk penyediaan kapasitas air baku, kondisi saat ini adalah sebesar 7.922 liter/detik, sehingga masih perlu untuk ditetapkan menjadi

prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur dalam.

Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting, terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam mendukung IKN. Untuk sanitasi layak masih terdapat Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dalam memperbaiki sarana pembuangan air limbah yang ramah lingkungan yang sudah dilakukan di kabupaten/kota.

c. Kebijakan dan Strategi

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah penyediaan jaringan irigasi teknis yang menjadi kewenangan provinsi dan penyediaan kapasitas air baku. Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten/Kota berpedoman pada mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang juga diikuti oleh Kabupaten/Kota seperti di kota Bontang yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Penanganan yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) air limbah provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

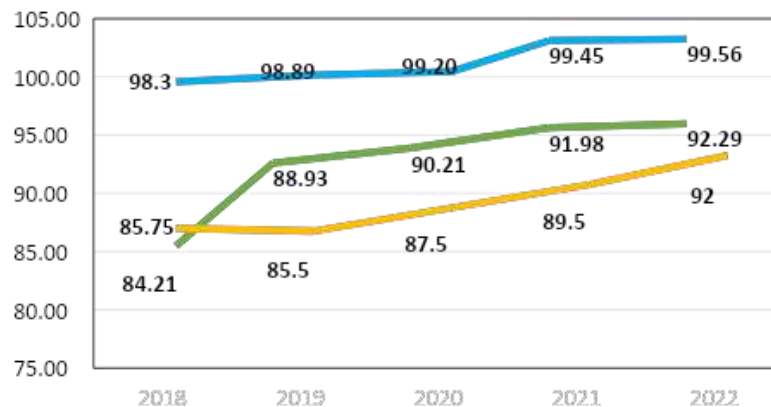
Peningkatan infrastruktur sumber daya air perlu ditindaklanjuti sehingga bisa berdampak pada peningkatan sarana dan prasarana air baku,

kemudian juga bisa diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum melalui jaringan PDAM di Kalimantan Timur, sehingga pembagian dan pemerataan layanan air bersih terutama untuk air minum maupun pengelolaannya perlu ditingkatkan. Kemudian sosialisasi kepada rumah tangga juga perlu ditindaklanjuti dalam meningkatkan pemahaman terhadap tata kelola air bersih dan sanitasi layak, kemudian isu-isu yang berkaitan TPB 6 harus menjadi skala prioritas di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Sinkronisasi pada aspek perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan, antar daerah dan antar dokumen perencanaan tetap dilakukan, sehingga sinergi dan sinkronisasi menjadi kunci pencapaian target nasional sehingga capaian target nasional pada dasarnya adalah akumulasi dan capaian di masing-masing daerah dengan didukung oleh ketersediaan peta, karakter penduduk, yang akan diintervensi program tersebut yang didasari oleh aturan hukum yang berlaku.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

a. Keadaan dan Kecenderungan

Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi (RE) di Kalimantan Timur terus menunjukkan kemajuan sangat berarti. Peningkatan rasio elektrifikasi didorong oleh infrastruktur ketenagalistrikan yang terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan pembangunan pembangkit-pembangkit baru serta penambahan kapasitas produksi listrik. (Indikator 7.1.1*) Tahun 2019 rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur masih sekitar 85,75%. Tahun berikutnya angka rasio elektrifikasi terus meningkat menjadi 88,93% dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 90,21%. Kenaikan kembali berlanjut pada tahun 2021 menjadi 91,98%. Tahun 2022 target rasio elektrifikasi 93%.



Gambar III.14. Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur

Peningkatan rasio elektrifikasi didorong oleh infrastruktur ketenagalistrikan yang terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan pembangunan pembangkit-pembangkit baru serta penambahan kapasitas produksi listrik. Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen.

Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan. Pada periode 2019-2022, Rasio penggunaan jaringan gas rumah tangga di Kalimantan Timur pada tahun 2019 (4,44%) tahun 2020 (6,65%) juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 (6,52%) dan tahun 2022 (4,96%) yang mengalami penurunan. Ini menunjukkan sudah hampir meratanya pemanfaatan listrik dan penggunaan gas di Provinsi Kalimantan Timur.

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang dihadapi dalam energi bersih dan terjangkau antara lain: (1) Akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata dan luasnya wilayah (terutama wilayah yang desanya belum terkoneksi dengan transportasi darat (jalan) maupun air yang memadai) (2) Terkendalanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembebasan/pinjam pakai lahan pada area perkebunan, kehutanan dan pertambangan. (3) Belum optimalnya kerjasama Pemerintah, PLN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah/wilayah yang belum terjangkau oleh PLN (khususnya sektor Perkebunan). (4) Masih adanya masyarakat miskin yang tidak mampu membiayai pemasangan

instalasi dan biaya penyambungan listrik PLN. (5) Kurangnya kesadaran tentang keselamatan dan lingkungan ketenagalistrikan (K2) pada Pelaku Usaha Ketenagalistrikan.

Tantangan lainnya yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 7 adalah belum seluruh masyarakat dapat mengakses listrik dari PLN, efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, serta proses pengembangan listrik pedesaan memerlukan dukungan infrastruktur dan pendanaan yang tidak sedikit, walaupun potensi energi terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan. Hal lain adalah: belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kalimantan Timur, belum meratanya jaringan listrik antar wilayah yang dapat menjangkau daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan, belum berkembangnya kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik.

c. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan energi bersih dan terjangkau dengan pemerataan infrastruktur penyaluran tenaga listrik untuk daerah/desa yang belum terjangkau PLN, penyediaan pembiayaan pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN untuk masyarakat tidak mampu, dan melakukan pembinaan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta pengembangan sumber energi terbarukan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan listrik pada desa belum berlistrik PLN (sebanyak 199 desa pada tahun 2021), akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat di desa tersebut, serta penyambungan listrik ke desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting.

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai fasilitator melaksanakan koordinasi rencana pembangunan lanjutan dari jaringan gas untuk rumah tangga kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, meningkatkan penganggaran kegiatan terkait dengan pembangunan infrastruktur tenaga listrik terutama di pedesaan (Program Listrik Pedesaan), dan mendorong PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Timur. Juga dilakukan upaya untuk mendukung dan membantu koordinasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bagi Badan Usaha Swasta yang mempunyai usaha penyediaan tenaga listrik yang terkoneksi dengan PLN dan mendorong Pemerintah dan Perusahaan Swasta untuk membangun sambungan Listrik PLN di rumah, peningkatan penganggaran dari Pemerintah Pusat selaku Pembina Usaha ketenagalistrikan PT. PLN (Persero), serta memberi bantuan pemasangan listrik yang bersumber dari

PLN melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat perusahaan pertambangan.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Keadaan dan Kecenderungan

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif setelah adanya pandemi Covid-19. Hal ini juga serupa dengan laju pertumbuhan nasional yang grafiknya cenderung naik (gambar 2). Sampai dengan triwulan III tahun 2022, laju pertumbuhan PDB per kapita Kalimantan Timur telah mencapai 3,53%. Walaupun sempat berkontraksi negatif pada tahun 2020, namun secara perlahan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan laju pertumbuhan PDB per kapita, juga diiringi dengan meningkatnya nilai PDB per kapita pada tahun 2021 sebesar 182,54 juta/tahun dibandingkan tahun 2020 sebesar 161,8 juta/tahun.

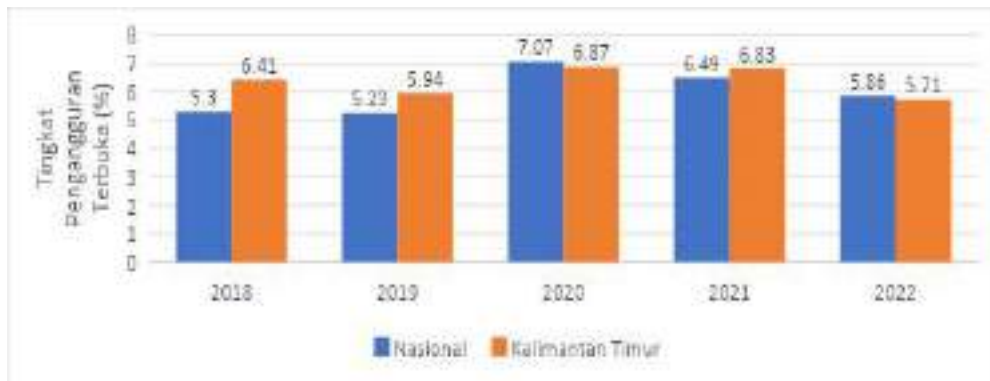


Gambar III.15. Laju Pertumbuhan PDB per Kapita Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 juga diikuti sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang laju pertumbuhannya positif (BPS Kaltim, 2022). Kabupaten Paser memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan capaian 5,41%. Sedangkan kabupaten yang masih mengalami pertumbuhan negatif adalah Kabupaten Kutai Timur yaitu -1,01% dan Kabupaten Penajam Paser Utara minus -1,69%.

Seiring meningkatnya laju pertumbuhan PDB per kapita, turut berdampak pada menurunnya angka pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur, dari 6,83% pada tahun 2021 menjadi 5,71% pada tahun 2022 (gambar 3). Penurunan angka pengangguran terbuka ini serupa dengan grafik penurunan angka pengangguran terbuka nasional. Namun jika dilihat dari angka pencapaian, angka penurunan pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Timur lebih besar dibandingkan angka pengangguran terbuka

nasional (5,86%). Sama halnya dengan tingkat setengah pengangguran, pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai sebesar 4,81% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 5,97% (BPS Kaltim, 2022).



Gambar III.16. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tujuan 8 menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan layak untuk semua. Tantangan terbesar Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan masih besarnya dominasi kategori pertambangan dan penggalian. Kontribusi pertambangan dan penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40% dari total PDRB Kaltim. Melihat besarnya kontribusi ini, maka pengaruh pasar global sangat menentukan harga komoditi pertambangan dan penggalian yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga jika harga komoditi di pasar global menurun, turut berimbas kepada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Sementara itu, adanya pandemi Covid 19 menyebabkan banyaknya penduduk Kalimantan Timur yang terkena PHK. Oleh karenanya, angka pengangguran pada tahun 2020 cukup tinggi. Terkait pemenuhan kesempatan bekerja dan pekerjaan layak, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Terkait hal ini, sektor pertanian dan sektor perdagangan serta jasa merupakan sektor yang menyerap jumlah kerja terbanyak. Untuk itu perlu peningkatan produktivitas tenaga kerja yang merupakan sasaran paling

strategis karena mampu meningkatkan produktivitas faktor produksi lainnya seperti modal, bahan baku, energi dan lainnya.

c. Kebijakan dan Strategi

Strategi transformasi ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan pembangunan dengan cara meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sumber daya alam yang ada selama ini. Dengan melihat semakin menurunnya ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan, maka Pemprov Kaltim melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang, antara berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan, yang dilakukan secara sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan rencana pembangunan di Kalimantan Timur sejalan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan strategi pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan disertai upaya mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota di Kaltim.

Kebijakan lainnya yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran yaitu melalui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan mendata para pencari kerja ke dalam database Disnaker. Caranya para pencari kerja membuat Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu Kuning yang didalamnya tercantum nomor pencari kerja, nomor kartu identitas atau KTP dan legalisasi dari Disnaker setempat. Lamaran kerja serta berkas yang diserahkan pencari kerja ke Disnaker akan dimasukkan ke dalam database pencari kerja. Database ini nantinya akan dikelompokkan menurut pendidikan dan keahlian. Perusahaan yang mencari pekerja ke Disnaker akan diberikan data pencari kerja sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja juga memiliki pusat informasi lowongan pekerjaan serta perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Arah kebijakan strategis lainnya untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 yang termuat dalam RPJMD 2018-2023 meliputi kebijakan:

1. Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi;
2. Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat;
3. Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis;
5. Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan;

6. Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat;
7. Pemanfaatan anjungan Kaltim sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata Kaltim;
8. Optimalisasi peran Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat

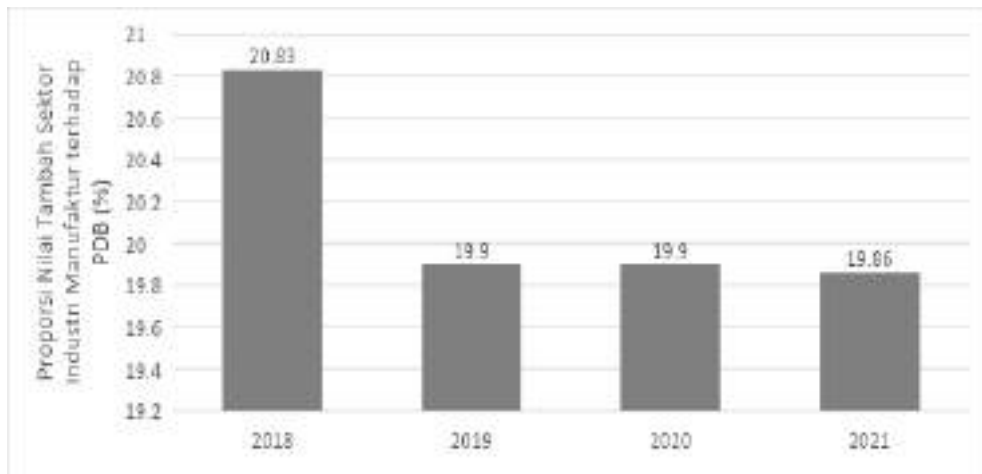
d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan dalam mencapai Tujuan 8 dilakukan melalui transformasi ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan menjadi sumber daya alam terbarukan secara perlahan. Transformasi ekonomi ini sudah mulai dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan memanfaatkan peluang dana karbon yang berasal dari hutan. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menerima dana insentif dari World Bank atas setiap pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca yang berbasis lahan selama periode 2020-2024 dalam skema Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF). Selain itu, telah dibangunnya beberapa kawasan industri pengolahan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur dan Kawasan Industri Khusus (KIK) Kariangau Buluminung di Kota Balikpapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang lebih progresif. Pembangunan 2 (dua) kawasan ekonomi dan industri ini juga diharapkan mampu memberikan peningkatan pekerjaan kepada penduduk di Kalimantan Timur.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

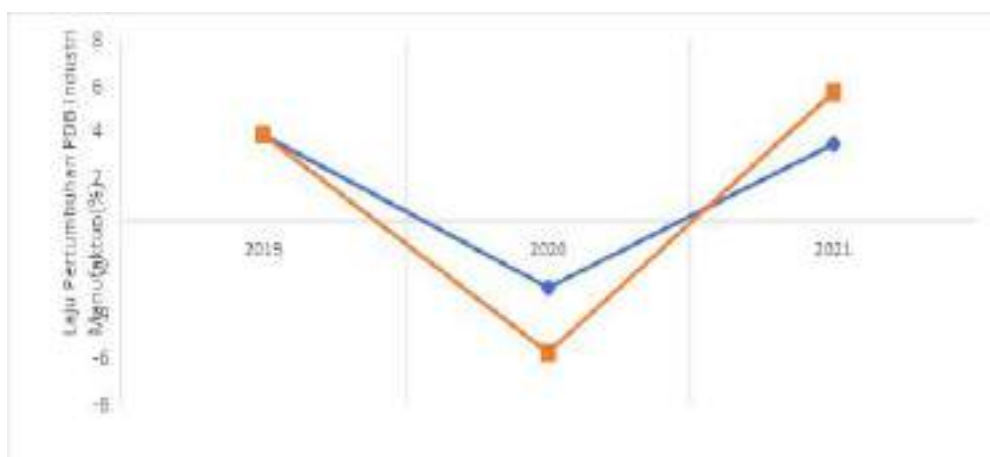
a. Keadaan dan Kecenderungan

Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 hanya sebesar 19,86 persen. Ini menandakan output dari industri pengolahan belum mampu berkontribusi secara maksimal dalam mendukung perekonomian Kalimantan Timur, mengingat masih sangat bergantungnya PDRB Provinsi Kalimantan Timur dengan sektor pertambangan dan penggalian, khususnya komoditas batubara. Sejalan dengan itu, penurunan proporsi nilai tambah dari industri manufaktur disebabkan adanya peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit.



Gambar III.17. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

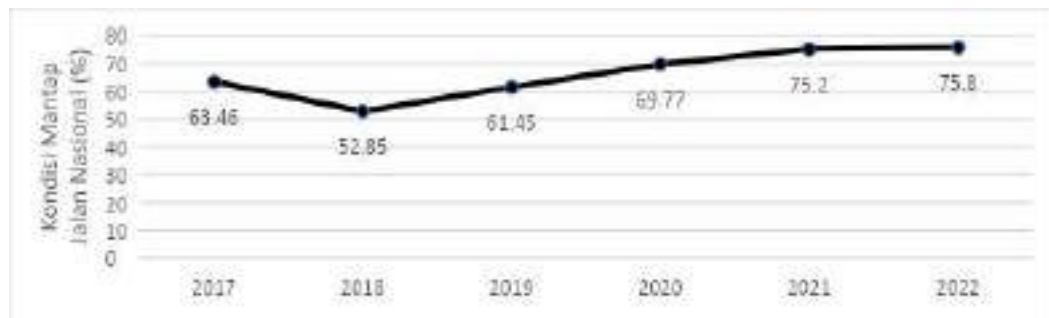
Di sisi lain, laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mampu tumbuh positif sebesar 2,29%, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh negatif 2,86% di tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja industri manufaktur di Kalimantan Timur pada tahun 2021, dimana perekonomian sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali normal. Angka pertumbuhan positif ini serupa dengan grafik pertumbuhan nasional imbas pandemi Covid-19 dan mulai bergeliatnya kembali dunia industri manufaktur.



Gambar III.18. Laju Pertumbuhan Industri Manufaktur Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Dukungan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan capaian yang peningkatan setiap tahunnya. Terutama mengenai kondisi tingkat kemandapan jalan, dimana pada tahun 2022 telah

mencapai 75,80% dari tahun 2017 yang berkisar 63,46%. Adanya peningkatan kemantapan jalan ini juga diharapkan mampu mendukung Provinsi Kalimantan Timur dalam mempersiapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya dan menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas - ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb – Talisayan yang mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana – Sebulu yang mendukung Pertanian.



Gambar III.19. Kondisi Mantap Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tujuan 9 menargetkan meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan, penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan, serta meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah. Tantangan dalam mencapai Tujuan 9 berkenaan dengan infrastruktur dasar perhubungan adalah penyebaran penduduk yang tidak merata, di mana masih ditemukan dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung. Selain itu, keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas Kalimantan. Diperlukan dukungan pendanaan dari pihak swasta untuk guna mencapai konektivitas antar daerah. Permasalahan penyediaan lahan pembangunan infrastruktur, menjadi tantangan lainnya yang dihadapi. Fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung merupakan hambatan dalam penyediaan lahan pembangunan infrastruktur.

Tantangan lainnya dalam meningkatkan nilai tambah serta daya saing komoditi unggulan daerah adalah lemahnya efisiensi usaha dalam

mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumber daya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional. Selain itu, adanya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (*borderless*) menyebabkan banyaknya barang dari luar negeri membanjiri pasar dalam negeri, termasuk Kalimantan Timur.

c. Kebijakan dan Strategi

Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan peningkatan layanan infrastruktur terutama jalan dilakukan dengan mengkoneksikan terhadap rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Besarnya pendanaan yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur IKN dari Pemerintah Pusat, turut berimbas kepada wilayah penyangga IKN dimana ini merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, pembangunan ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda yang kedepannya akan diteruskan hingga ke Kota Bontang menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat konektivitas antar daerah. Tak kalah pentingnya, perpanjangan pembangunan ruas jalan antara Kutai Kartanegara dan Kutai Barat terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Untuk membangun infrastruktur dan konektivitas, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan tujuan Tujuan 9 di antaranya:

1. Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur udara dan laut;
2. Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan;
3. Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah.

Untuk mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kontribusinya terhadap PDB, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan Tujuan 9 di antaranya:

1. Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan, khususnya pertanian, migas dan pertambangan;
2. Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas;
3. Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor;
4. Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi;
5. Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi.

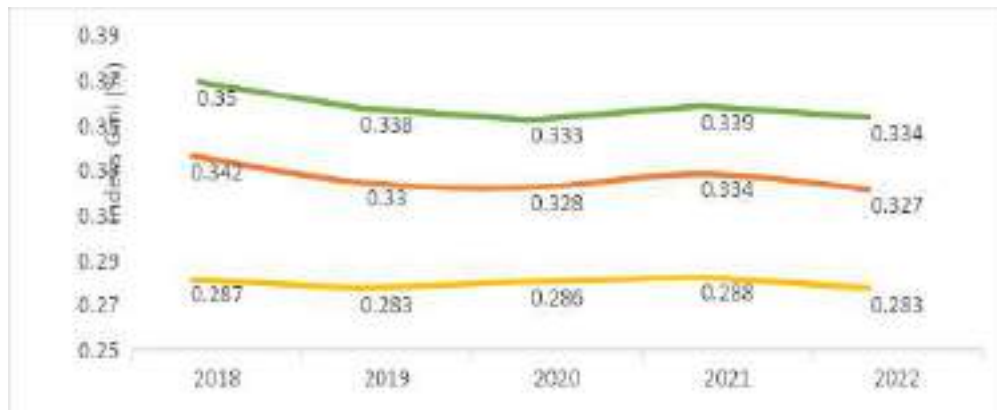
d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan pencapaian Tujuan 9 dilakukan melalui penerbitan regulasi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur 2019-2039. Regulasi tersebut diperkuat lagi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda tersebut. Penerbitan peraturan ini semakin memberikan pedoman terhadap berbagai pelaksanaan pembangunan industri di Kalimantan Timur. Hal lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi industri-industri kecil dan menengah (UMKM) yang nantinya dapat menjadi penopang perekonomian Kalimantan Timur.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

a. Keadaan dan Kecenderungan

Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini. Indeks gini Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka fluktuatif setiap tahunnya. Rasio gini di Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah menunjukkan penurunan sebesar 0,327%, yang memberikan gambaran pertumbuhan adaptif pasca pandemi Covid-19. Angka tersebut menjadi faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran roda perekonomian, sehingga terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Timur. Secara umum, capaian indeks gini Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren yang menurun dari tahun 2018-2022. Hal ini diiringi juga dengan tren penurunan indeks gini perkotaan dan pedesaan, yang mana diketahui di perkotaan dengan capaian 0,334% dan pedesaan dengan capaian 0,283% pada tahun 2022.



Gambar III.20. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.

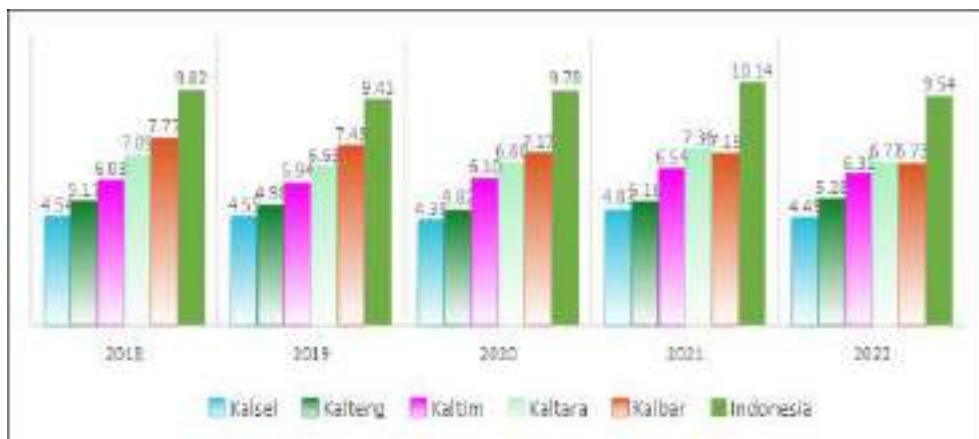


Gambar III.21. Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia 2018-2022
(Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31%. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi untuk

memenuhi kecukupan pangan/makanan. Penurunan angka kemiskinan terjadi karena mulai pulihnya perekonomian sehingga memberikan pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha.

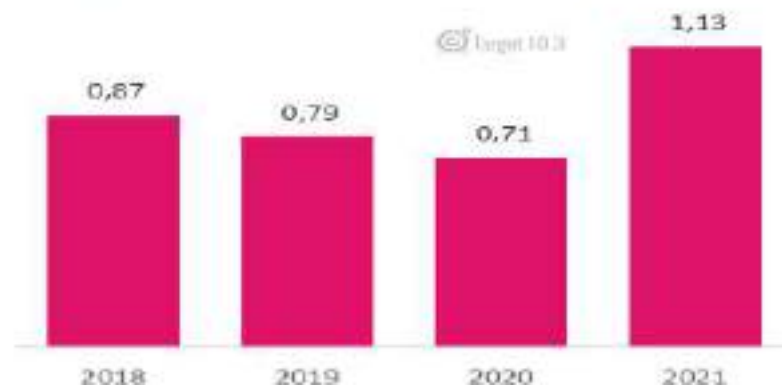
Apabila dibandingkan dengan Regional Kalimantan, tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan tengah meningkat sebanyak 0,12 poin, sementara Kalimantan Timur menurun sebanyak 0,23 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,54%.



Gambar III.22. Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional 2018-2022 (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Mengenai proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren penurunan pada periode 2018-2020. Namun pada tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 1,13%. Peningkatan pada indikator ini mengindikasikan bahwa penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Hal ini bisa terjadi mengingat pemulihan ekonomi pasca Covid-19 belum menyentuh pada kelompok yang berpendapatan rendah.

Proporsi Penduduk Yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2021 (Persen)



Gambar III.23. Proporsi Penduduk Yang Hidup di Bawah 50% Median Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia yang menggunakan metode baru memotret demokrasi politik, ekonomi dan sosial yang lebih luas dengan menggunakan beberapa aspek seperti kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Provinsi Kalimantan Timur pada aspek kebebasan memiliki angka pencapaian yang cukup tinggi sebesar 89,46%. Hal ini menandakan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur telah terjamin kebebasan secara individu maupun organisasi. Selain itu, kebebasan pers juga telah terjamin untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan kaidah-kaidah pers.

Tabel III.2. Aspek Kebebasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Aspek Kebebasan		89,46	TINGGI
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	92,65	-
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	63,27	-
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100,00	-
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	90,91	-
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	97,97	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	95,00	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	82,27	-

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tujuan 10 menargetkan mengurangi kesenjangan pendapatan berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, status ekonomi atau status lainnya di suatu wilayah. Tantangan dalam mencapai Tujuan 10 adalah persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur serta kepadatannya tidak merata. Tumbuhnya jumlah penduduk di kota/kabupaten seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara yang cukup besar mempengaruhi juga tingkat pendapatan penduduknya. Selain itu, sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam seperti Mahakam Ulu semakin meningkatkan angka ketimpangan dengan kota/kabupaten besar lainnya. Hal lainnya yang mempengaruhi ketimpangan kesenjangan pendapatan dikarenakan belum meratanya kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Timur, terutama pada kabupaten yang relatif jauh dari pusat perekonomian seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

Sementara itu, terkait kesenjangan proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan dipengaruhi oleh migrasi yang terjadi. Ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan IKN, turut berimbas kepada pendatang yang berasal dari luar Kalimantan Timur khususnya para pekerja bangunan IKN. Adanya migrasi ini memberikan tantangan kepada penyediaan data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, mengingat proses perpindahan administrasi penduduk yang tidak sebentar. Integrasi data kependudukan dengan data ketenagakerjaan perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

c. Kebijakan dan Strategi

Strategi yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan di Provinsi Kalimantan Timur dengan menciptakan lapangan usaha baru dan meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Lapangan usaha baru dapat diciptakan melalui percepatan pembangunan industri yang telah dicanangkan seperti KEK Maloy di Kabupaten Kutai Timur dan KIK Kariangau di Kota Balikpapan. Terkait bantuan sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adanya regulasi ini diharapkan semakin meningkatkan nilai bantuan sosial setiap tahunnya kepada masyarakat miskin guna mengurangi kesenjangan.

Untuk mengurangi kesenjangan, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan tujuan Tujuan 10 di antaranya:

1. Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa;

2. Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa;
3. Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam membangun desa berkualitas;
4. Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.
5. Pengembangan demokrasi di daerah.

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya yang dilakukan dalam percepatan pencapaian TPB/SDGs yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas. Upaya ini dilakukan untuk menambah daya saing sehingga mampu memperoleh pendapatan yang sesuai dengan kapasitasnya. Sementara itu, penambahan pelatihan yang diperlukan di dunia kerja dan usaha juga dilakukan agar terdapat serapan-serapan tenaga kerja baru serta penambahan usaha-usaha baru yang berkelanjutan termasuk penyandang disabilitas.

Selain itu, pengintegrasian data kependudukan dan ketenagakerjaan dilakukan ke dalam rencana pembangunan guna memperoleh kebijakan yang tepat dalam mengurangi kesenjangan. Hal penting lainnya yaitu dengan memperluas peran non-pemerintah sebagai mitra pembangunan melalui program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan, maupun program dan kegiatan oleh lembaga non-pemerintah dan lembaga kerja sama internasional di Kalimantan Timur.

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

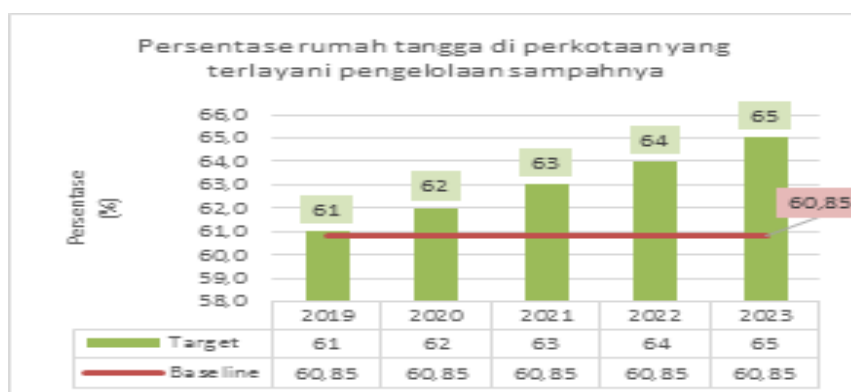
a. Keadaan dan Kecenderungan

Capaian target pada indikator 11.1.1.(a) meningkat dari tahun 2015-2018 dari 92,9%-95,7% dan berada di atas rata-rata 76,9%, kemudian pada tahun 2019-2022 berada pada kisaran 56,5%-60,7%, masih di bawah rata-rata. Perbedaan capaian target pada indikator 11.1.1.(a) pada tahun 2015-2018 dan 2019-2022 disebabkan karena sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita; 2) memiliki akses terhadap air minum layak; 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak; 4) ketahanan bangunan.



Gambar III.24. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

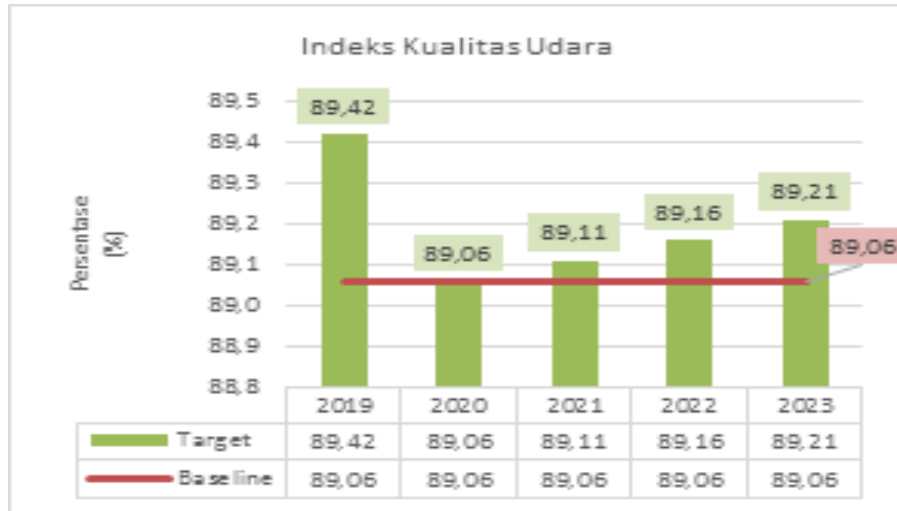
Pada indikator (11.6.1.(a)) capaian target pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan 61% pada tahun 2019, kemudian bertambah 1% setiap tahun. Kebutuhan rumah tangga terhadap indikator (11.6.1.(a)) sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur, bersama sektor swasta telah meningkatkan sarana dan prasarana seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak, dan lainnya.



Gambar III.25 Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya

Untuk indikator (11.6.2.(b)) pada tahun menunjukkan capaian target di atas baseline 89,06%, di mana pada tahun 2019 memiliki capaian tertinggi yaitu 89,42 dan capaian terendah pada tahun 2020 yaitu 89,06%. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada indicator (11.6.2.(b)) menunjukkan capaian target di atas baseline. Nilai IKU dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain keadaan iklim, arah angin, topografi dan sumber pencemar udara akibat aktivitas

manusia, baik dari sumber tidak bergerak seperti emisi cerobong pada industri maupun dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor.



Gambar III.26. Indeks Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Timur

b. Tantangan dan Pembelajaran

Permasalahan persampahan merupakan permasalahan yang krusial. Sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak, dan lainnya menjadi hal krusial agar semua dapat terproses dengan baik. Pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep *circular economy* sudah dilakukan oleh sektor pemerintah dan swasta. Berbagai penanganan telah dan sedang dilakukan untuk menyelesaikannya dan teknologi pengolahan merupakan salah satu solusi yang sangat baik dalam mendukung upaya Kaltim Bersih Sampah 2025, di Balikpapan telah diresmikan TPA Manggar oleh Presiden Joko Widodo disebut sebagai TPA terbaik di Indonesia untuk *sanitary landfill*. Ke depan, tempat serupa akan dikembangkan pula di lokasi lain. Salah satu rencana akan dibuat TPA di Samboja mengingat daerah tersebut segera menjadi penyangga ibu kota negara (IKN).

Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kalimantan Timur mencapai angka lebih dari 80, hal ini dikarenakan aktivitas industri skala besar sudah menerapkan standar industri hijau yang juga bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan energi, yang sekaligus akan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

c. Kebijakan dan Strategi

Akses hunian layak huni dan terjangkau dari aspek kebijakan ada dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tahun 2020-2025 sudah ada dituangkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2020.

Dukungan dari kabupaten/kota telah dilakukan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, ada 9 kabupaten/kota yang telah memiliki Perda yang dimaksud, salah satunya di kota Balikpapan telah menerbitkan Perda Nomor 13 Tahun 2015 merupakan dasar kebijakan untuk pengelolaan sampah.

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Konsep pembangunan berkelanjutan pada Tujuan 11 perlu mengubah pola sebaran hunian rumah tangga dari horizontal (menyebar) menjadi vertical (terpusat) yang akan memudahkan untuk mencapai target jangka panjang untuk memenuhi capaian target berdasarkan baseline seperti yang diminta pada masing-masing indikator dan juga bisa mengatasi permasalahan lingkungan yang lain. Upaya meningkatkan layanan transportasi umum untuk penduduk masih jauh di bawah target sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan seperti pergantian sarana transportasi umum yang tidak layak pakai. Penanganan pengelolaan sampah rumah perlu meningkatkan upaya daur ulang dengan menggunakan teknologi tepat guna. Penanganan bencana dengan mengadopsi dan menerapkan strategi yang selaras dengan nasional sudah dilakukan, hanya perlu juga melihat dampak yang ditimbulkan tidak sama dengan di luar kaltim khususnya daerah yang rawan bencana dengan kepadatan penduduk yang lebih besar sehingga perlu ada upaya pelatihan peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan pemahaman penyusunan program kerja dalam penanganan kebencanaan.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

a. Keadaan dan Kecenderungan

Berdasarkan 10 indikator pada Tujuan 12, yang menunjukkan tercapai ada 4, perlu perhatian khusus ada 1 dan tidak ada data ada 5 indikator. Untuk 4 indikator tercapai terdiri dari persentase sisa makanan (12.3.1.(a)) yaitu 45,42%, kemudian jumlah timbulan sampah yang didaur ulang mencapai 0,9 juta ton, selanjutnya untuk sertifikasi SNI ISO 14001 telah diberi kepada 107 perusahaan di berbagai sektor, di sektor pariwisata telah menetapkan 3 lokasi yang layak untuk diterapkan pada pembangunan pariwisata berkelanjutan (12.b.1.(a)).

b. Tantangan dan Pembelajaran

Kalimantan Timur memiliki aktivitas di berbagai sektor, di mana sektor lahan memiliki aktivitas dominan, kemudian sektor energi, sektor limbah, dan pertanian yang berkontribusi besar menghasilkan produk yang bernilai ekonomis dan produksi limbah dari aktivitas yang dilakukan. Upaya untuk meningkatkan kualitas produk yang ramah lingkungan masih membutuhkan langkah strategis yang berkelanjutan. Komitmen para pihak untuk mewujudkan konsumsi dan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab pada indikator 12.3.1.(a) dan (12.b.) harus diimbangi dengan pengendalian lingkungan seluruh sektor yang melakukan aktivitas produksi. Persyaratan standarisasi dari pemerintah dan lembaga independen menjadi tantangan sektor swasta untuk untuk mengurangi limbah B3 (12.4.2.*(a)) secara serius sehingga berpengaruh juga terhadap sertifikasi ISO SNI 14001 (12.6.1.(a)) yang di dalamnya juga berupaya untuk memberi perhatian khusus dalam penanganan limbah B3 (12.4.2.*(a))

c. Kebijakan dan Strategi

Kalimantan Timur telah berupaya untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yaitu melalui penurunan sisa makanan sepanjang produksi 12.3.1.(a) yang telah mencapai target dan didukung pula oleh keseriusan untuk mengembangkan potensi pariwisata (12.b.) telah dituangkan ke dalam Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037 dengan tujuan (1) Menetapkan destinasi pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan pariwisata di daerah; (2) Menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata di daerah; (3) Menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota yang memiliki peluang ekonomi sehingga perlu dikembangkan dengan memperkenalkan produk lokal yang ramah lingkungan serta budaya masyarakat yang berada di masing-masing destinasi wisata. Pengendalian kualitas lingkungan juga tetap dilakukan

terutama untuk mengurangi limbah B3 (12.4.2.*(a)) untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, di mana salah satu strategi yang dilakukan Kalimantan Timur adalah penetapan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk memperoleh sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1.(a)) yang di dalamnya juga berupaya untuk memberi perhatian khusus dalam penanganan limbah B3 (12.4.2.*(a)) terutama di sektor pertambangan batubara dan pabrik kelapa sawit dalam bentuk proper seperti terlampir pada SK Gubernur Nomor 660.2/K.358/2022 tentang Penetapan Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022 dengan jumlah perusahaan yang mendapat peringkat emas dan hijau mencapai 107.

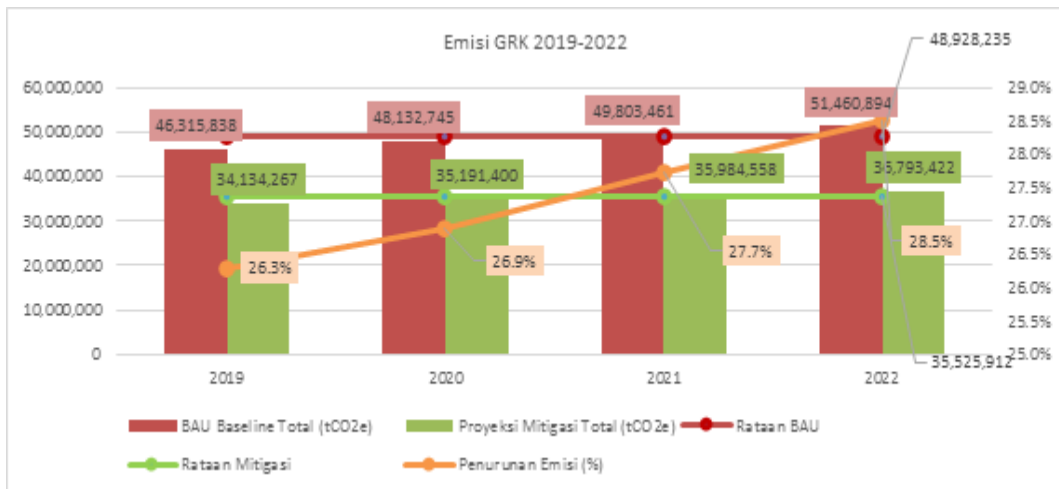
d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Ada beberapa alternatif yang tersedia dalam pengolahan sampah melalui transformasi fisik, pembakaran (incinerate), pembuatan kompos (composting), dan energi recovery dengan prinsip pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan, sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan, karena dengan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan akan terciptanya lingkungan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan dapat memengaruhi tercapainya target SDGs, terutama SDGs ke 3, 7, 13, 14, dan 15.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

a. Keadaan dan Kecenderungan

Emisi GRK pada kondisi BAU dan pasca mitigasi menunjukkan adanya peningkatan penurunan emisi. Pada tahun 2019 penurunan emisi 26,3%, tahun 2020 menjadi 26,9%, tahun 2021 meningkat menjadi 27,7%. Pada tahun 2023 persentase penurunan emisi akan meningkat menjadi 28,5%. Aksi mitigasi di sektor lahan berpengaruh besar terhadap penurunan emisi di Kalimantan Timur, pada tahun 2021-2022 penurunan emisi mencapai 36,4 juta tCO_{2e}, kontribusi sebesar ini terjadi karena adanya sekuestrasi di sektor lahan., di mana perubahan pertumbuhan tegakan/pohon di hutan alam berkontribusi dalam penyerapan CO₂.



Gambar III.27. Emisi GRK tahun 2019-2022



Indikator 3.2.2 Jumlah emisi GRK per tahun mencapai 51,46 juta tCO₂e merupakan salah satu bagian untuk memenuhi target 13.2 dengan mengintegrasikan Tindakan antisipasi perubahan iklim yang sejalan dengan strategi dan perencanaan Nasional. Provinsi Kalimantan Timur berkontribusi di dalam penurunan emisi GRK melalui aksi mitigasi di sektor lahan.

b. Tantangan dan Pembelajaran

Bencana akibat perubahan iklim merupakan isu penting yang perlu ditangani secara berkelanjutan dengan melihat karakteristik wilayah mulai dari tingkat desa dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, kendati minim risiko ancaman bencana vulkanologi dan geologi, wilayah Kalimantan Timur masih memiliki ancaman bencana dari faktor cuaca, mengingat cuaca ekstrem sudah sering terjadi yang bisa mengakibatkan aktivitas ekonomi terganggu akibat banjir dan menimbulkan penyakit

kepada masyarakat. Upaya untuk melakukan penurunan emisi GRK sudah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dari sektor lahan mengingat Kalimantan Timur masih memiliki tutupan hutan hujan tropis dengan luas mencapai 7 juta hektare yang selalu berkontribusi dalam penyerapan CO₂, sehingga hal ini juga perlu diimbangi oleh sektor lain, yaitu energi-transportasi, pertanian-peternakan, dan limbah melalui adaptasi dalam bentuk alih teknologi.

c. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pengelolaan hutan maupun perkebunan sudah banyak mengarah pada substansi berkelanjutan, kesiapan Pemerintah Kalimantan Timur untuk menurunkan emisi melalui skema REDD+ sudah dilakukan dan pada tahun 2019-2021 deforestasi dan degradasi hutan menurun sehingga emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan menurun sehingga perlu ada penguatan kebijakan dalam upaya mitigasi melalui rencana kerja dan rencana aksi.

Rencana kerja dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, kemudian di sektor perkebunan telah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024.

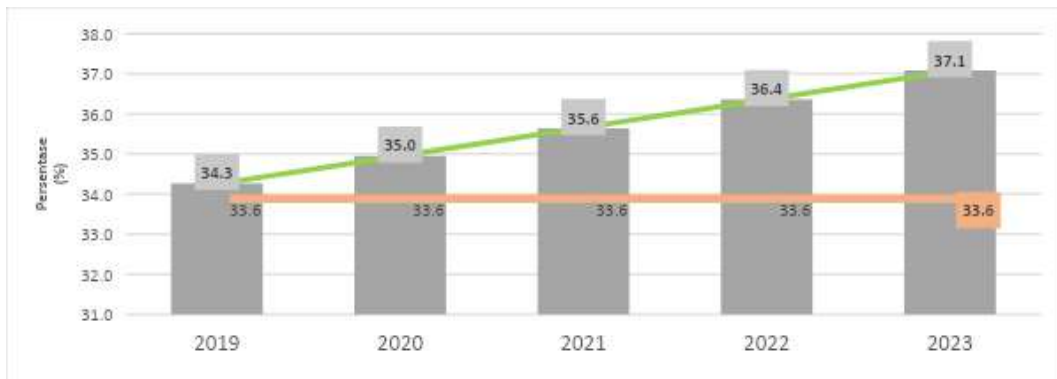
d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Penguatan perencanaan program berbasis lingkungan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa masih tetap menjadi langkah strategis ke depan, salah satu yang sedang berjalan yaitu memasukkan program pembangunan rendah karbon ke dalam RPJMD. Meningkatkan kesadaran dan kemauan semua komponen para pihak terkait kebencanaan dan aksi adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi secara vertikal dan horizontal dalam percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

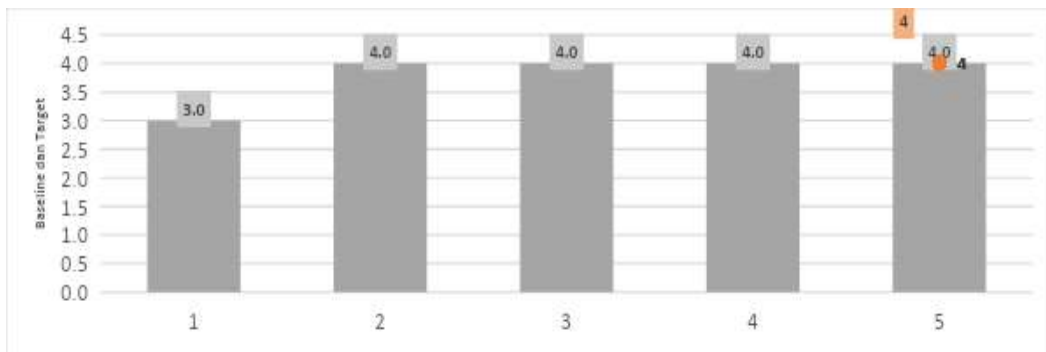
a. Keadaan dan Kecenderungan

Kepatuhan pelaku usaha (14.6.1.(a)) dalam pengelolaan ekosistem lautan menunjukkan capaian target dengan tren linier dari tahun 2019-2023. Dalam rangka memperkuat pembangunan berkelanjutan maka perlu dilakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas termasuk upaya sertifikasi terhadap produk sehingga bisa mengembangkan UMKM yang ada.



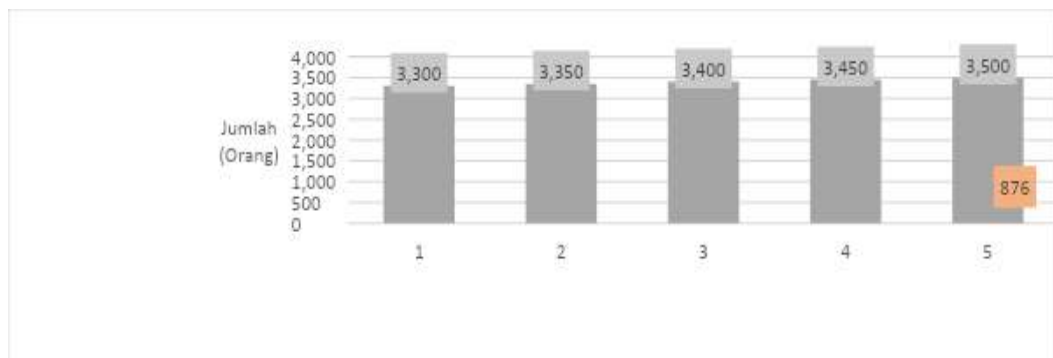
Gambar III.28. Persentase kepatuhan pelaku usaha

Konsistensi penerapan kerangka hukum (14.b.1.*) sudah memenuhi capaian konsisten dengan nilai 4,0. Hal ini perlu dilaksanakan untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum di dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan ekosistem lautan di Kalimantan Timur. Fungsi pengawasan di lapangan oleh aparat penegak hukum harus tetap dilaksanakan.



Gambar III.29. Penerapan kerangka hukum

Jumlah nelayan terlindungi sejak tahun 2019 di atas baseline yaitu 3.300, kemudian pada tahun 2020 menjadi 3.350, selanjutnya tahun 2021 hingga 2023 bertambah 50 per tahun. Upaya peningkatan perlindungan nelayan tetap ditingkatkan mengingat risiko yang dihadapi dalam beraktivitas besar, kemudian kurangnya sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan.



Gambar III.30. Jumlah nelayan terlindungi

b. Tantangan dan Pembelajaran

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas, baik laut seluas 3,99 juta ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar bahkan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan pengembangan kemaritiman nasional. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan. Produksi perikanan merupakan sektor strategis untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat secara luas, sehingga berbagai upaya telah dilakukan oleh para pihak untuk tetap menjaga produksi tetap stabil, sehingga sinkronisasi program perikanan berkelanjutan perlu digalakkan di berbagai wilayah perairan di Kalimantan Timur., sehingga paradigma ruang laut sebagai modal sosial (social capital) dan sumberdaya bersama (common pool resources) harus dipertimbangkan dalam pengelolaan ruang laut IKN. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan yang perlu diimplementasikan secara khusus lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan untuk mengatasi ancaman dari aktivitas manusia yaitu: (1) pengambilan sumber daya hayati yang berlebihan (eksploitasi); (2) perubahan fisik habitat pesisir dan laut; (3) pencemaran pesisir dan laut; (4) masuknya spesies asing dan (5) perubahan iklim global. Strategi pengelolaan ekosistem lautan Kalimantan Timur harus menerapkan konsep zonasi spasial, berbasis masyarakat, dan terintegrasi mengingat Laut Indonesia termasuk Kalimantan Timur memiliki biodiversitas pada tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem tertinggi di dunia sehingga bisa memperkuat pengelolaan dan pengendalian Kawasan konservasi perairan laut. Kebijakan perlindungan hukum terhadap nelayan

dan kepastian usaha perlu diperkuat sehingga bisa menciptakan iklim investasi yang nyaman dan berkelanjutan.

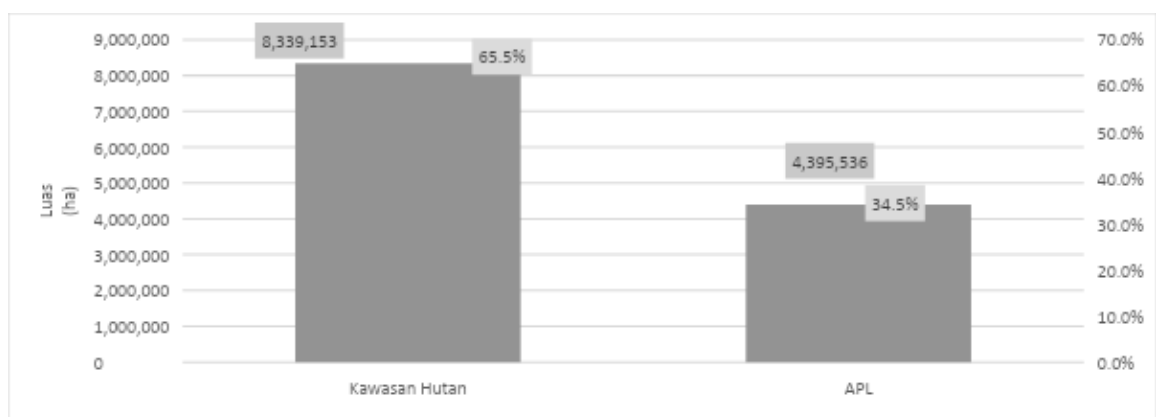
d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pencapaian TPB lebih difokuskan pada koordinasi dan komunikasi lintas sektor yang memiliki program kerja di sektor perikanan Kalimantan Timur, memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan menjadi satu hal yang harus diwujudkan guna memantapkan percepatan pencapaian TPB. Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dari aksi yang telah dilakukan guna memperkuat database perlu diwujudkan dan sebaiknya melibatkan BPS Kalimantan Timur dalam hal penguatan data pada masing-masing indikator TPB 14. Peningkatan kualitas perekonomian kerakyatan yang berkeadilan dan penanganan permasalahan pengelolaan lingkungan khususnya kawasan konservasi perairan dalam upaya menurunkan emisi karbon perlu dilakukan untuk memperkuat TPB.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

a. Keadaan dan Kecenderungan

Luas Kawasan Hutan di Kalimantan Timur dari tahun 2016-2020 tidak ada perubahan yaitu 65% dari luas Kaltim, hal ini perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola ekosistem daratan secara berkelanjutan melalui tata kelola hutan dan lahan melalui aksi mitigasi melalui KPH yang juga berkontribusi dalam menurunkan deforestasi dan degradasi hutan. Sektor Perkebunan juga telah berkontribusi dalam pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dengan luas 101.500 hektare, di mana memberi dampak terhadap penurunan laju deforestasi hutan.



Gambar III.31. Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang dihadapi adalah mempertahankan kualitas dan kuantitas kawasan hutan, hal mudah yang bisa dilakukan adalah kondisi perubahan

iklim, di mana siklus el Nino dan la Nina yang semakin tidak mudah diproyeksikan, sehingga memerlukan peningkatan kesiapan para pihak dalam menghadapi kondisi tersebut. Berkaitan dengan el Nino, kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat pada periode tahun terjadinya el Nino, sehingga kesiapan personil pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, disertai dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai, masih terus dilakukan baik oleh Dinas Kehutanan dan KPH, Dinas Perkebunan, maupun BPBD. Pembelajaran baik yang ada di Kalimantan Timur adalah dengan meningkatnya luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, serta meningkatnya luasan perhutanan sosial, yang menjadikan konflik tenurial semakin menurun dan disertai dengan menurunnya deforestasi.

c. Kebijakan dan Strategi

Luas Kawasan Hutan di Kalimantan Timur sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 hektare (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 hektare dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 hektare. Setelah ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, luas ekosistem daratan mengalami pengurangan tetapi tidak signifikan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial yang mempunyai suatu tujuan dalam hal melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yang meliputi lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.

Penetapan KBKT sudah dilakukan yang didasarkan pada kriteria yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi, kemudian untuk pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi sudah mengacu kepada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan.

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Penetapan Kawasan Hutan baik dari sebaran spasial maupun luasan merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk memperkuat pengelolaan Kawasan Hutan dan APL maka sinkronisasi kebijakan sektor kehutanan, perkebunan, pemberdayaan masyarakat sudah diimplementasikan melalui program pembangunan hijau yang juga mengakomodir sektor perkebunan yang beraktivitas di Areal Penggunaan Lain (APL). Upaya mempertahankan tutupan hutan alam pada

kawasan lindung tetap dilakukan karena berhubungan langsung dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati (flora dan fauna). Dukungan pendanaan kepada KPH yang telah berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan termasuk gambut, percepatan implementasi perhutanan sosial, dan mengendalikan manajemen hutan secara teknis.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

a. Keadaan dan Kecenderungan

Tujuan 16 mencakup sebagian besar dimensi sipil dan politik hak asasi manusia. Tujuan ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan, hak atas kebebasan informasi, hak atas partisipasi politik, hak atas kepribadian hukum (*legal personality*), serta hak atas akses keadilan. Semua hak ini dinyatakan di dalam Deklarasi Universal HAM (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta berbagai instrumen HAM internasional lainnya, yang sebagian besar telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Konvensi melawan Penyiksaan (*Convention against Torture/CAT*) dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*). Mayoritas hak sipil dan politik tersebut juga dinyatakan di dalam UUD 1945, dan juga UU No.39/1999 tentang HAM. Lebih lanjut, terkait hak atas akses keadilan, Indonesia telah mengesahkan UU Bantuan Hukum (UU No.16/2011) yang telah dilaksanakan secara resmi sejak 2013. UU tersebut menetapkan bantuan hukum sebagai hak dan menjamin hak atas bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Indonesia dan khususnya Kalimantan Timur masih berjuang menyelesaikan berbagai isu terkait perlindungan hak sipil dan politik warganya.

Sedangkan arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi di Provinsi Kalimantan Timur, peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur .

Provinsi Kalimantan Timur mengalami belum berkembangnya layanan publik ramah anak. Dari 10 kabupaten/kota, 9 daerah sudah menjadi pengembang kota/kabupaten layak anak. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda memiliki jumlah pekerja anak yang cukup besar.

Tabel III.3. Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

No	KABUPATEN	PEKERJA ANAK (5-14 Thn)
1	Paser	49
2	Kutai Barat	95
3	Kutai Kartanegara	133
4	Kutai Timur	113
5	Berau	32
6	Penajam Paser Utara (Ppu)	58
7	Mahakam Ulu	41
8	Balikpapan	65
9	Samarinda	159
10	Bontang	56
TOTAL		801

Sumber: Basis Data Terpadu, TNP2K 2017

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tujuan 16 dilaksanakan untuk melahirkan masyarakat yang inklusif dan damai didasarkan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Peraturan Hukum, Tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel. Peraturan Penegakan hukum merupakan kunci terlaksananya pembangunan, tantangan bagi aparat penegak hukum sangat berat. Kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum semakin banyak. Salah satu pemicunya adalah kebebasan berekspresi yang jauh lebih longgar dibandingkan masa lalu. Hukum akan berwibawa jika ditegakkan secara konsekuen sesuai ketentuan yang berlaku. Jajaran Pengadilan Tinggi merupakan aparat penegak hukum yang menjadi tumpuan masyarakat pencari keadilan.

Demikian juga dalam pelaksanaan sistem tata pemerintahan yang baik masih banyak tantangan dan hambatan yang membuat tata pemerintahan tidak berjalan dengan baik, hambatan ini meliputi penyalahgunaan wewenang dan anggaran, kesewenang-wenangan terhadap sesama manusia, tingkat partisipasi di komunitas yang kecil, dan kepastian hukum yang kurang. Penyalahgunaan wewenang dan anggaran salah satunya adalah korupsi, suap dan gratifikasi. Korupsi merupakan permasalahan serius yang membutuhkan upaya yang luar biasa dalam pemberantasannya. Kejahatan ini dapat mengganggu perekonomian daerah, menghambat program kesejahteraan warga, bahkan mengganggu pemenuhan HAM dan akses terhadap kebutuhan dasar warga negara. Pemberantasan korupsi paling efektif adalah melalui pencegahan. Namun opini masyarakat memandang, jika tidak ada operasi tangkap tangan (OTT), KPK seperti tidak bekerja. Hingga September 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 91 laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

c. Kebijakan dan Strategi

Strategi yang dilakukan dalam upaya untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kerjasama Pengadilan Tinggi Kaltim dengan Pemerintah Provinsi Kaltim maupun dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di masyarakat serta meningkatkan kepercayaan pada pemerintah dan meningkatkan tata pemerintahan yang “good governance”. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah perlunya Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Asas Transparansi, melalui keterbukaan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Tanpa adanya transparansi, maka partisipasi tidak dapat berjalan begitu pun sebaliknya. Hal tersebut harus didukung pula oleh komitmen antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Sehingga transparansi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik.

Terkait isu perempuan dan anak, karena merupakan cross cutting issues. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perempuan dan anak tentunya dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua

pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat. Serta membangun komitmen dan memperkuat jejaring koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan inilah yang diharapkan mampu melakukan pendampingan dan penanganan dalam setiap penyelesaian kasus kekerasan.

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

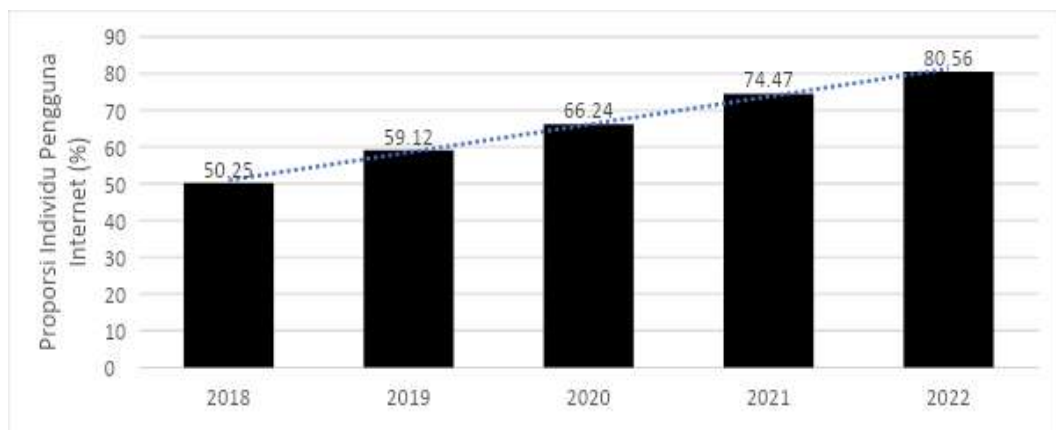
Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 16 TPB, program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan meningkatkan upaya untuk menopang pembangunan sosial, mengendalikan kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan domestik serta meningkatkan keamanan yang tercermin dari rendahnya jumlah konflik horizontal dan kejahatan. Tersedianya perlindungan dari berbagai kekerasan dan perbuatan jahat lain dengan mengoptimalkan mekanisme preventif, penanganan dan rehabilitatif bagi anak, perempuan dan kelompok marginal. Penguatan sistem perlindungan anak, termasuk upaya untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, pengabaian dan perilaku buruk lainnya. Serta meningkatkan kualitas pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*); meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

a. Keadaan dan Kecenderungan

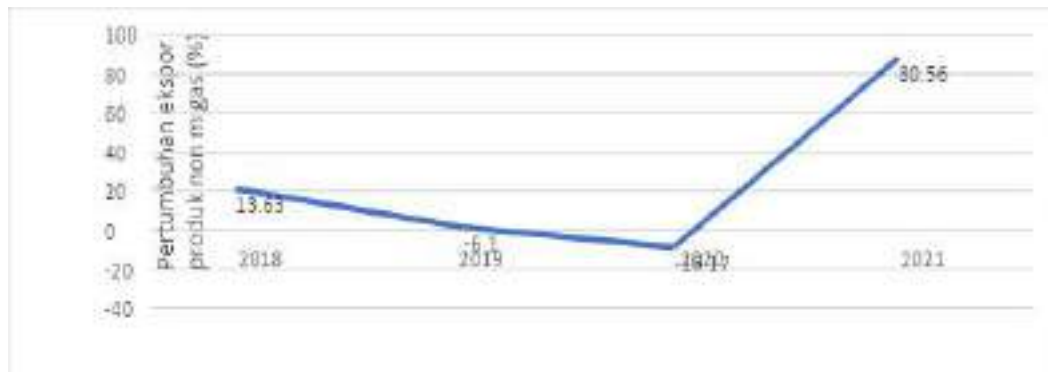
Provinsi Kalimantan Timur memiliki tren kenaikan jumlah proporsi individu pengguna internet setiap tahunnya. Angka ini naik setiap tahunnya dari tahun 2018 yang mencapai 50,25% hingga pada tahun 2022 mencapai 80,56%. Kenaikan jumlah pengguna internet ini disebabkan adanya mobilitas individu yang menggunakan internet yang menggunakan perangkat apa saja baik dari komputer, perangkat mobile atau perangkat lainnya, bahkan yang merupakan milik sendiri atau bukan. Persentase kenaikan jumlah pengguna internet ini juga merupakan imbas pandemi Covid-19, yang lebih banyak memberikan individu aktivitas melalui online (*daring*) baik untuk bekerja, sekolah, kuliah bahkan pertemuan-pertemuan besar lainnya. Tingginya kasus Covid-19 di Kalimantan Timur menyebabkan banyaknya aktivitas individu yang dilakukan di rumah dengan menggunakan internet.

Dari hasil pendataan potensi desa, tercatat bahwa masih ada 47 desa/kelurahan yang masih belum menerima sinyal internet telepon seluler di Kalimantan Timur pada tahun 2021. Jumlah ini turun dari 77 desa/kelurahan pada 2020. Kabupaten dengan desa terbanyak yang masih belum menerima sinyal internet telepon seluler ini adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, keduanya sama-sama memiliki 15 desa/kelurahan yang tidak terjangkau sinyal internet telepon seluler. Tercatat, baru ada empat kabupaten/kota yang seluruh desa/kelurahannya telah menerima sinyal internet telepon seluler, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar III.32. Persentase Proporsi Individu Pengguna Internet di Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Sementara itu, terkait pertumbuhan ekspor produk non migas Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2021 mencapai 87,12% yang pada tahun-tahun sebelumnya sempat tumbuh negatif. Adanya pandemi Covid-19 dan menurunnya permintaan pasokan batu bara dari pasar global sebagai bahan energi pabrik industri menyebabkan produksi barang-barang non migas menjadi terhambat. Namun, pasca pemulihan ekonomi secara nasional maupun daerah produktivitas pabrik industri kembali bergeliat dan berimbas kepada pertumbuhan ekspor. Pada tahun 2021, diketahui juga bahwa nilai ekspor produk non migas Provinsi Kalimantan Timur sebesar 38 juta US\$. Angka ini tentunya sangat jauh peningkatannya dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebesar 11 juta US\$, tahun 2019 sebesar 14 juta US\$ dan tahun 2018 sebesar 15 juta US\$. Oleh karenanya ekspor produk non migas menjadi sumber ekonomi baru bagi Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar III.33. Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2022)

b. Tantangan dan Pembelajaran

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tantangan dalam mencapai Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai tujuan yaitu kapasitas pemerintah yang belum signifikan dalam menyerap kerja sama maupun kemitraan investasi yang masuk di Provinsi Kalimantan Timur. Padahal, pembangunan industri merupakan salah satu bagian penting dari transformasi ekonomi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan industri tanpa adanya investor yang masuk akan membebani APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, belum optimalnya kinerja pajak Provinsi Kalimantan Timur terlihat dari minimnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Kalimantan Timur sebesar 0,64% pada tahun 2020, padahal target dari Peraturan Presiden mencapai lebih dari 12%. Angka tersebut mengindikasikan kondisi perpajakan dan kapasitas sistem perpajakan daerah perlu ditingkatkan kinerjanya. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait permasalahan ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, komitmen dan koordinasi antar lembaga Negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas negara. Hal yang lebih sulit adalah meningkatkan wajib pajak perorangan daripada wajib pajak besar, yang meskipun nilainya per individu memang kecil, tetapi jumlah wajib pajaknya dan sumber penarikan pajaknya sangat banyak. Oleh karenanya dipertimbangkan penting untuk mencari pola insentif dan disinsentif tepat guna meningkatkan penerimaan pajak

c. Kebijakan dan Strategi

Provinsi Kalimantan Timur memiliki arah kebijakan yang selaras untuk mencapai target-target Tujuan 17 seperti peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya

alam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur. Pergub ini mengisyaratkan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan kemitraan, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan Tujuan 17 diantaranya:

1. Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi;
2. Peningkatan pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pembinaan perusahaan;
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan kebijakan investasi di kawasan strategis daerah;
4. Mengembangkan kajian potensi investasi daerah;
5. Pengembangan standarisasi pelayanan investasi;
6. Peningkatan promosi efektif;
7. Peningkatan pendekatan bisnis dan penandatanganan kerjasama baik di luar negeri maupun dalam negeri;
8. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kanwil DJP Kaltimara serta mendorong Dinas/Kementerian terkait dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk peningkatan penerimaan PBB-P3.

Mengenai penjangkauan internet ke desa-desa terpencil, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Program Internet Desa di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Paser sebanyak 11 desa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 12 desa, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 8 desa, Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 4 desa dan terakhir Kabupaten Kutai Timur sebanyak 3 desa. Program ini merupakan program prioritas untuk mengatasi akses telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur.

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya yang dilakukan dalam percepatan pencapaian Tujuan 17 yaitu dengan meningkatkan kemitraan dalam berbagai hal yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Semangat kemitraan ini terefleksi dalam pelibatan berbagai stakeholder dalam forum-forum perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur. Beberapa asosiasi perusahaan (baik

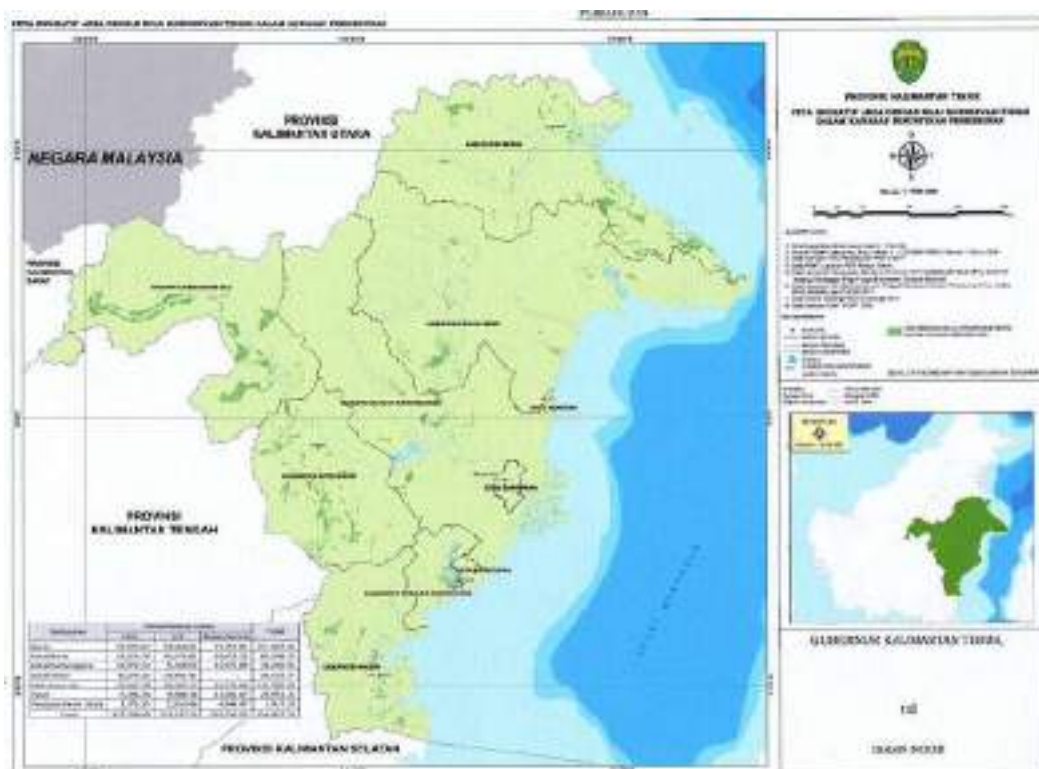
kehutanan dan perkebunan, dll.), mitra pembangunan (LSM), akademisi (perguruan tinggi) hingga masyarakat turut dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pelibatan ini dimaksudkan untuk menghimpun sumber daya baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun para stakeholder guna mempercepat tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelatihan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Pelatihan ini diperuntukkan bagi pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai bidang konstruksi sehingga dihasilkan SDM yang kompeten dan berintegritas dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur bidang konstruksi yang handal, dalam menerapkan pola investasi sesuai dengan karakteristik dan siklus penyediaan infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

BAB IV PRAKTIK-PRAKTIK BAIK

1. Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan

Dalam upaya pencapaian Tujuan 15, terutama terhadap indikator 15.1.2.(a), dengan indikator luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV), di mana pada tahun 2022 terdapat 119.243 hektare yang telah divalidasi dari indikatif luasan 417.505 hektare. Upaya mendorong adanya pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi di area perkebunan ini didasarkan pada Pasal 55-58 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Area Perkebunan. Di tahun 2022 proses validasi dilanjutkan, disertai dengan pertemuan teknis pengelolaan ANKT di usaha perkebunan.



Gambar IV.1. Peta Indikatif Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan

2. Pembangunan Pembangkit Listrik Komunal

Untuk mencapai Tujuan 7 berkaitan dengan energi bersih dan terjangkau, terutama untuk mencapai indikator 7.1.1.*.Rasio elektrifikasi dan indikator 7.1.1.(a).Konsumsi listrik per kapita, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membangun sembilan unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di sejumlah wilayah pedalaman Kaltim sejak tahun 2020, dan direncanakan akan terus berlanjut hingga program tahun 2024. PLTS terpusat tahun 2020 telah dibangun di tiga desa yakni Desa Rantau Buta di Kabupaten Paser dengan jumlah rumah dan fasilitas umum terpasang 51 unit dengan kapasitas 24,00 kwp, Desa Sandaran di Kabupaten Kutai Timur jumlah rumah listrik terpasang 130 unit rumah dengan kapasitas 65,34 kwp, dan Dusun Labuan Bili Sandaran, Kabupaten Kutai Timur jumlah listrik terpasang 54 unit dengan kapasitas 27,72 kwp.

Pada tahun 2021 dibangun di enam desa, yakni: Desa Tadoan, Kutai Timur dengan unit terpasang 203 rumah dan kapasitas 58,80 kwp, Desa Enggelam, Muara Wis, Kutai Kartanegara dengan unit terpasang 201 rumah dan kapasitas 83,16 kwp, Dusun Ketibeh Desa Enggelam, Kutai Kartanegara unit terpasang 91 rumah dengan kapasitas 47,04 kwp, Desa Long Lamcin, Kelay Kabupaten Berau unit terpasang 67 rumah dengan kapasitas 29,40 kwp, Desa Rantau Layung, Kabupaten Paser unit terpasang 79 rumah dan kapasitas 33,6 kwp, dan Desa Tanjung Soke, Bongan, Kabupaten Kutai Barat dengan unit terpasang 49 rumah dengan kapasitas 29,4 kwp.

Pada tahun 2022, pembangunan PLTS dibangun di lima desa, yaitu: Desa Selengot Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, dengan jumlah unit listrik yang terpasang untuk 293 rumah dengan kapasitas 73,65 kwp, Desa Pegat Batumpuk Pulau Derawan, Kabupaten Berau, dengan jumlah unit terpasang listrik 135 rumah dengan kapasitas 40,45 kwp, Desa Menamang Kanan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah unit terpasang listrik 208 rumah dengan kapasitas 65,54 kwp, Desa Menamang Kiri, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan jumlah unit terpasang listrik 141 rumah dengan kapasitas 37,45 kwp, dan Desa Long Duhung, Kabupaten Berau dengan jumlah unit terpasang listrik 69 rumah dengan kapasitas 21,89 kwp.

Sedangkan untuk tahun 2023, direncanakan PLTS Terpusat akan dibangun di Desa Pegat Batumpuk, Pulau Derawan dan Desa Long Sului di Kabupaten Berau, Desa Lemper dan Desa Deraya, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Desa Mata Libaq di Kabupaten Mahakam Ulu dan Desa Tanjung Mangkalihat di Kutai Timur atau salah satu desa di Long Iram, Kutai Barat.

3. Percepatan Perhutanan Sosial

Berdasarkan kesepakatan pada forum pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 disepakati bahwa Sektor Kehutanan akan berkontribusi pada Pilar Lingkungan Hidup (Pilar 3) dalam rangka pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan pembangunan rendah karbon, agar pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan sosial dan ekonomi tetap dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah menjaga emisi GRK yang rendah, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, dan ketangguhan menghadapi bencana pada umumnya. Misi keempat ini juga menjadi pilar penting agar pelaksanaan misi-misi yang lain tetap dalam koridor membangun pilar-pilar keberlanjutan (sustainability) secara keseluruhan melalui aspek pembangunan ekonomi-sosial-lingkungan hidup yang menuju pertumbuhan hijau, dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Tujuan 3) dan meningkatkan peran sektor pertanian (dalam arti luas) (sasaran 10) melalui indikator kinerja berupa kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, Sektor Kehutanan juga dapat berperan pada pilar lainnya selain di Pilar Lingkungan Hidup, yaitu Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Ekonomi melalui Perhutanan Sosial.

Peran Perhutanan Sosial dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, antara lain:

Tujuan 1: Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti Agroforestry, budidaya madu untuk dijual guna peningkatan pendapatan masyarakat.

Tujuan 2: Dengan menanam tanaman pangan di kawasan perhutanan sosial untuk dimanfaatkan sebagai tambahan pangan masyarakat di sekitar hutan.

Tujuan 6: Menjaga tubuh air (sungai, danau) di dalam Kawasan HKm dengan tidak melakukan kegiatan di sekitar sempadan sungai. Misalnya melakukan penanaman di Kawasan penyangga sungai dengan jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan tetapi juga tetap menjaga kualitas air bersih.

Tujuan 8: Adanya KUPS yang sesuai dengan potensi yang ada di Perhutanan Sosial dalam rangka membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Tujuan 10: Melibatkan seluruh aspek masyarakat dalam kegiatan pengelolaan perhutanan sosial

Tujuan 12: Tidak melakukan penebangan pohon dan melakukan kegiatan pemanfaatan secara ramah lingkungan

Tujuan 16: Pemberian status hukum bagi masyarakat hutan adat dapat

Tujuan 17: KPS bersama dengan KPH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan pihak ketiga lainnya akan mewujudkan dukungan manajemen dan kegiatan teknis lainnya.

Pelaksanaan program perhutanan sosial di Provinsi Kaltim sudah mencapai 273.000 hektare atau telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023 yakni 165.000 Hektare. Sekitar 130 hektare izin perhutanan sosial telah diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Target perhutanan sosial telah melampaui target RPJMD Kaltim 2019-2023, program perhutanan sosial ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada di Kalimantan Timur pada tahun 2022 adalah sebanyak 35 KUPS, dengan rincian KUPS dengan produksi madu kelulut ada 4 KUPS, produksi udang windu tiger ada 1 KUPS, produksi getah karet ada 4 KUPS, produksi durian ada 3 KUPS, produksi nangka ada 1 KUPS, produksi buah naga ada 3 KUPS, produksi kepiting bakau ada 2 KUPS, produksi perikanan (ikan bandeng, makanan dimsum, rumput sango-sango) ada 4 KUPS, produksi HHBK lainnya (buah jambu kristal, buah lai, buah salak, cabai acar, cempedak, daun sop, elai, lumpia salak, salak, sawi, terong bulat) ada 6 KUPS, produksi lada ada 4 KUPS, produksi HHK lainnya (empon-empon, sahang) ada 1 KUPS, dan produksi silvofishery (amplang ikan bandeng) ada 2 KUPS.

Program perhutanan sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program perhutanan sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan adanya program perhutanan sosial, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan, dan hasil panen dari perkebunan yang dihasilkan dapat dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya

sehari-hari, maupun untuk peningkatan kesejahteraan. Selain itu, melalui program perhutanan sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan, maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan.

Perhutanan sosial, adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

4. Pendampingan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina Trans Kontinental

Perusahaan PT. Pertamina Trans Kontinental ikut serta berkontribusi dalam Acara atau Bakti Sosial dan event keagamaan yang rutin dilakukan. Pada tahun 2022, di kota Balikpapan sering terjadi kebakaran di kawasan perumahan. Untuk mencegah terjadinya kebakaran dan untuk menanggulangnya dengan cepat, PSTB memberikan pendampingan kepada warga Kelurahan Kariangau Balikpapan, bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Warga RT 08, RT 09, dan RT 15, Kariangau serta perwakilan guru SDN 021 Balikpapan Barat dan SMP 21 Balikpapan dipilih karena lokasinya yang cukup jauh dari jangkauan pemadam kebakaran terdekat, yaitu sekitar 12 km dengan waktu tempuh paling cepat 30 menit. Dengan diberikannya pendampingan ini, diharapkan warga dapat lebih siap dan sigap apabila terjadi bencana, terutama kebakaran.

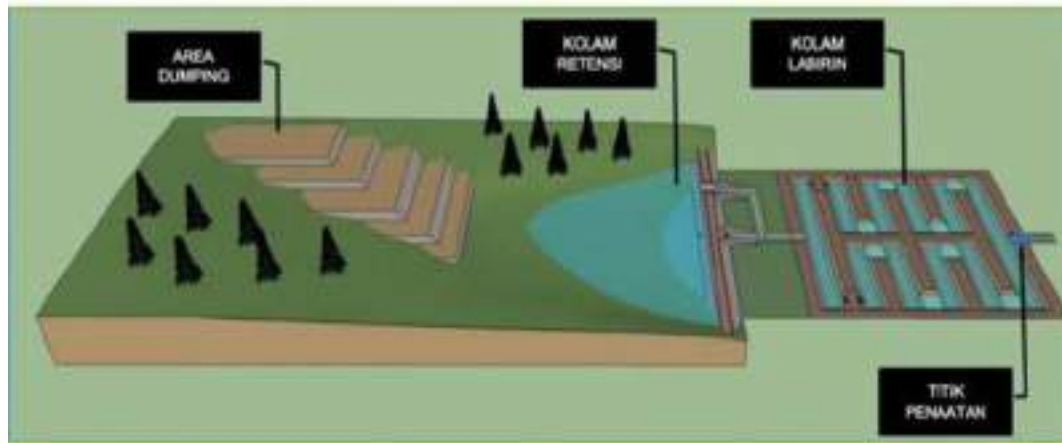


5. Program Konfigurasi Kolam Pengendap – Solusi Cerdas Cegah Pencemaran – Tingkatkan Produksi Pangan yang dilaksanakan oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC)

Program inovasi sosial PT. Kaltim Prima Coal (KPC) terdapat dalam Program “Konfigurasi kolam pengendap – Solusi cerdas cegah pencemaran – Tingkatkan produksi pangan” yang merupakan program pengelolaan air tambang oleh PT. KPC, pengontrolan kualitas air dan pemanfaatan air tambang untuk kegiatan masyarakat terutama petani merupakan salah satu best practices untuk tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan. PT. Kaltim Prima Coal (KPC) selaku pemegang izin eksploitasi lahan tambang di Kecamatan Bengalon melakukan antisipasi dalam pengelolaan dampak lingkungan. Kegiatan penambangan batubara PT KPC dapat mempengaruhi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengalon, KPC mengelola air untuk mengendalikan beban terhadap badan air permukaan melalui penyaliran air tambang untuk mengendalikan limpasan air dari aktivitas penggalian bantuan penutup kedalam kolam pengendap sebelum dialirkan ke badan sungai menggunakan sistem drainase.

Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah terganggunya aktivitas penambangan akibat adanya air dalam jumlah yang berlebihan, terutama pada musim hujan. Pembangunan kolam pengendap merupakan salah satu komitmen PT KPC dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari operasi penambangan batubara PT KPC. Pembangunan kolam pengendap dan

sistem drainase tambang dibangun sesuai prosedur standar operasi PT KPC.



Lahan pertanian di sebagian besar desa Sepaso Barat mengandalkan air dengan sistem tadah hujan dan air dari sungai Segadur. Saat musim kemarau, air sangat sulit didapatkan dan sebaliknya saat musim penghujan, air melimpah namun seringkali debit yang tidak terkontrol menjadi sumber masalah bagi petani yakni banjir. Selain itu, lahan pertanian kurang subur dimana pH tanah antara 3.5 - 3.8, nilai pH juga dipengaruhi sistem irigasi yang mengandalkan air limpasan rawa yang asam. Produktivitas pada lahan sawah rata-rata 4,5 ton GKP/ha dan panen hanya bisa dilakukan setahun sekali tergantung curah hujan. Selain lahan sawah, produktivitas tanaman hortikultura juga rendah karena faktor yang sama dan pada beberapa lahan memiliki kondisi yang berbukit sehingga pengairan sulit terjangkau. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi KPC, sehingga KPC pada tahun 2018 memberikan bantuan kapur pertanian sebanyak 12 ton untuk meningkatkan pH tanah. Namun, karena sumber air yang digunakan masih belum optimal, usaha ini tidak begitu memberikan dampak pada kualitas tanah pertanian.



Gambar 3 Saluran irigasi pada lahan pertanian. Gambar 4 Pintu irigasi untuk mengatur debit air

Lahan pertanian di sekitar aliran sungai dikelola oleh 3 kelompok tani yakni KT. Bina Warga, KT. Harapan Jaya, dan KT. Harapan baru dengan luas lahan pertanian sawah sebesar 75 Ha (potensi 100 Ha) dan lahan hortikultura sebesar 6 Ha. Jumlah petani dari 3 kelompok tersebut sebanyak ± 100 petani aktif. Bak peribahasa Pucuk dicinta Ulam Pun Tiba, air yang menjadi salah satu masalah utama bagi petani di "jawab" PT KPC dengan memberikan sumber air dari pond Kecubung yang telah terkelola dan sesuai baku mutu. Sejak tahun 2020, melalui pond Kecubung, air dialirkan ke sungai Segadur dengan debit yang dikontrol dan kualitas air yang dijaga dengan rutin melakukan pengujian air. Kualitas air pada pengujian tahun 2021 telah memenuhi baku mutu air dengan kandungan logam Fe (0,10 mg/L), Mn (0,55 mg/L), Total Suspended Solid (2,83 mg/L) dan pH (7,27). Kondisi tersebut memenuhi baku mutu untuk pertanian. Sungai Segadur juga dilakukan normalisasi pada beberapa titik untuk menjaga debit air agar terkontrol. Pembangunan jalur-jalur irigasi pada lahan pertanian terutama sawah dilakukan PT KPC bersama stakeholder terkait agar air dapat menjangkau seluruh lahan pertanian. Pembangunan pintu air pada beberapa titik juga dilakukan untuk mengatur debit air yang masuk ke lahan pertanian. Air yang keluar dari pond Kecubung tidak hanya dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian saja, air juga dimanfaatkan untuk aktivitas warga seperti kebutuhan MCK, bahkan salah satu warga menggunakan air untuk budidaya ikan koi.

Dengan sumber air yang terkontrol dan sesuai baku mutu tersebut, saat ini petani di Sepaso Barat khususnya di area sungai Segadur dapat melakukan kegiatan Bertani sepanjang musim. Petani padi sawah yang sebelumnya hanya dapat menanam dan panen setahun sekali, kini bisa hingga 5 kali dalam 2 tahun. Selain itu, KPC rutin membantu petani di Sepaso Barat dengan monitoring rutin dan pendampingan teknis bersama PPL UPT P4 Bengalon, bantuan stimulan kepada petani seperti pemberian bibit tanaman dan pupuk kepada petani, program pelatihan pembuatan pupuk kompos menggunakan limbah pertanian dan bahan-bahan yang tidak digunakan di sekitar lahan, pelatihan pembuatan Mikroorganisme Lokal (MOL) untuk dijadikan pupuk organik dan insektisida organik yang aman bagi tanaman, serta pembuatan demplot sawah yang menggunakan perlakuan organik, dari bibit, pupuk hingga insektisida sehingga menghasilkan beras organik yang lebih sehat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain, pemanfaatan air pasca pengendapan, KPC berjalan tidak sendirian, namun berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten melalui UPT P4 Bengalon, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kelompok tani dan warga Sepaso Barat dengan tujuan Bersama yakni meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung program ketahanan pangan di desa Sepaso Barat.

6. Program Desa Bersinar yang dilaksanakan oleh BNNP Kaltim

Program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba yang dicanangkan Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilai cukup ampuh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Program Desa Bersinar kata dia merupakan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Di dalamnya banyak program mulai pencegahan, rehabilitasi, hingga memberikan keterampilan dasar hidup bekerjasama dengan Dharma Wanita memberi kemampuan dan pengetahuan bagi penyalahguna narkoba agar berdaya. Desa diharap memiliki kemampuan untuk menolak masuknya narkoba, melakukan rehabilitasi mandiri jika ada kemampuan, hingga meningkatkan kemampuan masyarakatnya desanya sendiri. Boleh dikatakan seperti desa satelit.

Pendekatannya dimulai ketahan keluarga dari penyalahgunaan narkoba sebagai lingkungan paling kecil. Jika berhasil akan membentuk ketahanan desa, ketahanan kelurahan, dan ketahanan kecamatan. Memang sebaiknya semua desa dicanangkan sebagai Desa Bersinar karena semua rawan. Tidak ada yang tidak rawan penyalahgunaan narkoba. Dengan Desa Bersinar dari awalnya level bahaya diharap turun waspada, dan aman.

BNNP Kaltim sendiri diakui sejak 2021 mencanangkan Desa Bersinar di Provinsi Kaltim, yakni Tahun 2021 BNNP Kaltim di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Kutai Kartanegara, BNNK Balikpapan di Kelurahan Manggar dan Sepinggian, dan BNNK Bontang di Kelurahan Tanjung Laut dan Kelurahan Tanjung Laut Indah. Tahun 2022 BNNP Kaltim di Desa Bangun Mulya dan Kelurahan Teluk Lingga, BNNK Balikpapan di Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Mekar Sari, dan Kelurahan Klandasan Ilir, serta BNNK Bontang di Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Api-Api.



PROGRAM DESA BERSINAR

	BNNP KALTIM	BNNK SAMARINDA	BNNK BALIKPAPAN	BNNK BONTANG
TAHUN 2021	1. Desa Bangun Rejo	1. Kelurahan Dadi Mulya 2. Kel Temindung Permai	1. Kelurahan Manggar 2. Kelurahan Sopinggan	1. Kelurahan Tanjung Laut 2. Kelurahan Tanjung Laut Indah
TAHUN 2022	1. Desa Bangun Mulya di Kecamatan Waru Kab PPU dengan jumlah kader 11 orang 2. Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kab Kutai Timur dengan jumlah kader 15 orang 3. Desa Kelurahan Singa Gewe Kecamatan Sangatta Selatan Kab Kutai Timur dengan jumlah kader 15 orang	1. Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan jumlah kader 10 orang 2. Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Iir dengan jumlah kader 10 orang 3. Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan jumlah kader 10 orang Launching Desa Bersinar tanggal 25 Agustus 2022 di taman Wadah Bekesah Kota Samarinda	1. Kelurahan Batu Ampar dengan jumlah kader 17 orang 2. Kelurahan Klandasan Iir dengan jumlah kader 17 orang 3. Kelurahan Mekar Sari dengan jumlah kader 15 orang Launching Desa Bersinar dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 yang dipusatkan kelurahan Batu Ampar	1. Desa Berbas Tengah dengan jumlah kader 20 orang 2. Desa Berbas Pantai dengan jumlah kader 26 orang 3. Desa Api-Api dengan jumlah kader sebanyak 27 orang

7. Simpator (Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor)

Inovasi ini memiliki keselarasan dalam upaya pemerintah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tak jarang masyarakat menganggap ketika berhadapan dengan urusan pelayanan publik tidak efektif dan efisien, serta kurang transparan. Wajib Pajak (WP) bisa mengakses layanan ini kapan dan di mana saja. Sehingga kehadiran Percaya Intip KB melalui Simpator memberikan jawaban atas keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang mudah, efisien, cepat, transparan, dan aman. Sebelum diluncurkan inovasi ini, penerimaan PKB dan BBNKB di Kaltim belum bisa diakses secara luas dan tersaji realtime. Hanya tersedia dalam periode waktu tertentu. Hasil evaluasi kinerja dari tiap UPTD pemungut pajak juga memerlukan waktu lama. Hal ini disebabkan laporan penerimaan masih menggunakan proses manual. Proses identifikasi kendaraan juga masih memerlukan waktu cukup lama baik untuk petugas di lapangan maupun masyarakat. Inovasi ini menjadi inovatif karena saat ini seluruh kebutuhan informasi tersebut dapat diakses secara aktual dan faktual, terbuka untuk siapa saja dalam sebuah aplikasi web yang menyajikan informasi penerimaan secara realtime.

Dengan hadirnya Simpator, segala informasi mengenai pajak kendaraan bermotor dapat tersaji dalam genggaman. Masyarakat hanya perlu mengakses simpator.kaltimprov.go.id lewat mesin pencarian di telepon genggam atau komputer personalnya. Di dalam website tersebut terdapat beberapa menu yang berisi informasi seperti realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) harian secara realtime untuk wilayah Kaltim. Kemudian informasi mengenai target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang terdiri dari PKB Pokok, PKB Denda, BBNKB Pokok, dan BBNKB Denda. Masyarakat juga dapat mengetahui informasi PKB dengan mengentri nomor polisi kendaraan. Misal dengan memasukkan KT 1234 ABC, dalam hitungan detik akan tersaji informasi mulai dari nama pemilik, alamat, kode bayar, merek kendaraan, tipe kendaraan, tahun rakitan, nomor mesin, nomor rangka, jumlah kepemilikan kendaraan, masa pajak, masa berlaku STNK, biaya pokok PKB, biaya denda PKB, biaya pokok SWDKLLJ, biaya denda SWDKLLJ, PNBPN STNK, PNBPN Plat, dan total bayar. keseluruhan hal inilah yang memudahkan masyarakat hingga stakeholder terkait untuk memperoleh informasi dengan cepat dan efisien.



8. Digitasi (Data dan Informasi Digital Tanaman Koleksi) Kebun Raya Balikpapan

Inovasi DIGITASI dengan membarcode semua tanaman koleksi dan menyajikan data detail di dalam website Kebun Raya Balikpapan ini berkontribusi untuk capaian Nasional Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yakni pada pendidikan berkualitas dengan salah satu targetnya yakni pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan. Sangat membantu dalam memberi penjelasan semua tanaman koleksi yang ada hanya dengan melakukan barcode di plang yang ada, dimana tanpa pendampingan pembantu dari Kebun Raya Balikpapan, pihak pengajar atau guru sudah bisa membantu menjelaskan kepada anak didiknya atau



anak didik yang telah dibekali smartphone oleh orangtuanya bisa langsung melakukan barcode tanaman koleksi secara online atau offline. Kemudahan pengaksesan data ini bermanfaat bagi semua peneliti, akademisi serta pengunjung wisata yang berkunjung langsung ke Kebun Raya Balikpapan, sebagai upaya peningkatan pengenalan semua tanaman koleksi dari nama tanaman berserta familinya, diskripsi tanaman, kondisi aktual tanaman serta manfaat dari tanaman tersebut. Cara ini diharapkan menjadi efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data, informasi dan pengembangan kapasitas lingkungan. Inovasi ini diharapkan menjadi efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi revolusi 4.0

9. Samarinda Siaga 112

Ada banyak nomor panggilan darurat, ada 110 untuk kepolisian, 119 untuk ambulans, 113 untuk pemadam kebakaran, dan nomor Panjang lainnya yang sangat sulit untuk dihapal. Beberapa call center nasional seperti 113 sudah tidak bisa diakses di kota Samarinda, dan yang lainnya kurang responsif. Kota samarinda mengintegrasikan layanan kedaruratan melalui 1 nomor tunggal yaitu 112. Masyarakat tidak perlu menghafal nomor lain, cukup 112. Layanan 112 kota Samarinda didukung agen call taker yang bekerja 3 shift sehari, 24/7 tidak ada libur. agen Call taker yang selanjutnya mengkoordinasikan ke stakeholder kedaruratan



untuk menindaklanjuti telepon darurat warga. Maret 2020 Samarinda Siaga 112 ditunjuk menjadi hotline tunggal penanganan Covid-19 Kota Samarinda, dan terbukti sentralisasi panggilan darurat memudahkan warga dalam mendapatkan layanan terkait Covid-19. Keunikan layanan panggilan darurat 112 kota Samarinda dengan Kabupaten Kota lain adalah pelibatan relawan sebagai agen Call Taker, Dispatcher, dan penghubung lapangan. Agen yang direkrut merupakan perwakilan satuan relawan bencana dan kebakaran yang ada di Kota Samarinda. Selain itu Samarinda Siaga 112 juga melibatkan relawan sebagai penunjang kegiatan operasional perangkat daerah teknis seperti tugas pemadaman kebakaran, penanganan hewan buas dan berbisa, sampai tracing dan edukasi Covid-19 melalui panggilan darurat 112. Dalam kasus Covid-19, Agen Call Taker bertugas sebagai Asesor tingkat awal (seluruh agen telah mendapat pelatihan dan peningkatan pemahaman mengenai Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda), sehingga agen call taker bisa meminimalisir

kontak antara suspek dengan tenaga Kesehatan. Kebijakan ini terbukti dapat mengurangi tingkat kunjungan pasien ke faskes tingkat pertama karena telah mendapat edukasi dari agen call taker 112.

10. Simenawan Hati (Sistem Informasi Rekomendasi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Handal dan Informatif)

Inovasi SIMENAWAN HATI merupakan inovasi yang menghasilkan solusi dalam penjaminan keamanan produk hewan. Inovasi ini sangat inovatif karena idenya muncul di saat pandemi covid-19 untuk mempermudah memberikan pelayanan sertifikasi NKV dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan agar lebih mudah, efektif, akurat dan transparan. Pelaku usaha dapat mengajukan melalui website yaitu <https://simenawan.kaltimprov.go.id> dan atau simenawan mobile melalui playstore.



Inovasi ini memberikan 2 (dua) pelayanan dan dikembangkan dalam 1 (satu) aplikasi melalui aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam proses pengajuan NKV dan Rekomendasi pemasukan pengeluaran produk hewan yang mengandung unsur kebaruan yaitu:

1. Inovasi pelayanan sertifikasi NKV merupakan aplikasi berbasis web satu-satunya di provinsi di Indonesia dan saat ini belum ada baik di instansi vertikal maupun instansi horizontal. Inovasi ini merupakan wujud implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020.
2. Inovasi pelayanan rekomendasi produk hewan merupakan aplikasi berbasis web satu-satunya di tingkat provinsi, hingga saat ini belum ada dinas peternakan provinsi yang melakukan pelayanan rekomendasi produk hewan secara online, sesuai amanat PP nomor 95 tahun 2012 tentang kesmavet dan kesrawan dan PP no 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko.

11. Iman Karlabun (Inisiatif Model Kemitraan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun)

Sektor pertanian dalam arti luas merupakan sektor andalan yang diharapkan mampu menopang perekonomian Kalimantan Timur di masa mendatang. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi sub sektor perkebunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen dan memprioritaskan pengembangan sub sektor perkebunan sebagai komoditas unggulan yang nantinya akan menjadi sumber daya devisa. Tentunya juga sebagai penggerak perekonomian Kalimantan Timur di masa



mendatang menggantikan peran hasil hutan, minyak dan gas alam serta hasil tambang lainnya. Dalam pelaksanaannya, perkebunan dihadapkan pada isu kerusakan lingkungan. Kebakaran lahan sering kali dikaitkan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit, korporasi dan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, karena dianggap cara paling gampang dan murah. Kebakaran lahan menjadi isu paling sensitif beberapa waktu lalu terutama pada bulan September – Oktober 2019 lalu. Fenomena ini terjadi setiap tahun di musim kemarau, khususnya di Kalimantan Timur. Pelaksanaan Inovasi Iman Karlabun melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi efektif. Yang membuat inovasi ini menjadi inovatif adalah adanya upaya pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran di lahan kebun. Hal ini karena adanya kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan kelompok masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan milik perusahaan yang selanjutnya disebut Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

12. Kabupaten PPU - Inovasi Serbu Gas

Pada tahun 2020, Bapelitbang Kabupaten PPU mengkoordinir penilaian inovasi yang dilakukan oleh berbagai perangkat daerah Lingkup Kabupaten PPU. Hasilnya pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PPU melalui inovasi Serbu Gass (Seratus Bank Sampah Unit dan Gerakan Sedekah Sampah) mendapatkan penghargaan Kompetisi Inovasi



Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional oleh Kementerian PAN RB, yang selanjutnya juga mendapatkan nominasi top 5 replikasi inovasi pelayanan publik tahun 2021. Serbu Gass ini dicetuskan sebagai upaya untuk mengurangi sampah di lingkungan masyarakat, baik masyarakat tingkat RT, tingkat desa maupun kelurahan, sehingga saat ini di PPU sudah terdapat lebih dari 100 bank sampah unit. Keberadaan bank sampah unit di masyarakat merupakan solusi untuk mengurangi sampah, sekaligus untuk memanfaatkan sampah yang punya nilai ekonomis

13. Kabupaten PPU - Inovasi Anjungan SIAPKerja

Guna mendukung berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Kementerian Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada bulan November 2022 meresmikan Anjungan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPKerja) dalam rangka mendekatkan dan memberikan pelayanan bidang ketenagakerjaan bagi masyarakat lokal Kabupaten PPU dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Hadirnya Anjungan SIAPKerja ini akan semakin mendekatkan layanan bagi

para pencari kerja khususnya bagi masyarakat lokal di Kabupaten PPU, tak terkecuali bagi seluruh masyarakat Kaltim.



Anjungan SIAPKerja ini akan memberikan pelayanan bidang ketenagakerjaan bagi masyarakat yang mengintegrasikan, baik kepada para pencari kerja dan lembaga penyalurnya yang didalamnya mencakup seluruh layanan seperti pelatihan, sertifikasi hingga penempatan berdasarkan kualifikasi dan bidang kompetensi yang dimiliki.

Anjungan SIAPKerja ini kiranya semakin membantu Pemerintah Daerah dan menjadi solusi terkait penyediaan ketenagakerjaan di Kalimantan Timur, terutama di daerah Kabupaten PPU yang menjadi titik sentral pembangunan IKN Indonesia baru sehingga sumber daya manusia (SDM) lokal dapat terakomodir dan tidak menjadi penonton seiring pembangunan IKN. Lebih lanjut, dengan adanya anjungan SIAPKerja sangat diharapkan dapat mengatasi persoalan pengangguran mengingat hingga saat ini kurang lebih 3000 para pencari kerja yang memerlukan lapangan kerja sehingga kedepan sarana ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam menyiapkan diri.

14. Kabupaten Paser- Inovasi E-Buen (Elektronik Bikin Urusan Enak & Nyaman)

E-Buen (Elektronik Bikin Urusan Enak & Nyaman) adalah inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis android yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Layanan berbasis android ini diciptakan untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Paser dalam rangka mengakses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Aplikasi berbasis Android E-Buen dapat diunduh di Play Store, Google Play

15. Kabupaten Paser - DASHBOARD EKSEKUTIF (<https://dashboard.paserkab.go.id/>)

Dashboard Eksekutif adalah penyajian data dari berbagai perangkat daerah untuk disajikan kepada pimpinan, sehingga data yang ingin dilihat oleh pimpinan tersaji dengan cepat dan proses pengambilan keputusan tepat sasaran. Selama ini pengambilan data masih menerapkan proses manual dalam bentuk dokumentasi fisik ataupun telah menggunakan sistem informasi namun terbatas pada masing-masing Perangkat Daerah. Inovasi ini digagas dan dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

16. Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK Kukar)

Inovasi RBPK, ditujukan untuk membangun kolaborasi pembangunan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan penurunan kemiskinan ekstrem, dengan 3 pilar utama yakni penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kualitas layanan dasar pada kantong-kantong kemiskinan, RBPK mengakomodasi hal tersebut, dengan mengarah pada target pemasaran 3 pilar



tersebut dalam perspektif satu data, dan menjadi bagian dari portal daerah dalam menginformasikan program-program daerah yang dapat diintegrasikan dengan pihak non pemerintah. Selanjutnya kondisi ini diharapkan menjadi sebuah proses akselerasi dan transformasi layanan publik secara actual, transparan, focus, akuntabel dan berdampak pada pencapaian prioritas nasional khususnya prioritas pertama, berdampak pada prioritas kedua dan kelima yakni Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan

Berdaya Saing, Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. dengan target penurunan kemiskinan ekstrem secara gradual.

17. JELITA (Jemput , Beli dan Tabung Sampah Anorganik)



Inovasi JELITA (Jemput, Beli dan Tabung Sampah Anorganik) merupakan salah satu inovasi unggulan Kota Bontang yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bontang dan diluncurkan pada Desember 2019 lalu. Inovasi ini bertujuan untuk menumbuhkan perilaku masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya dengan cara

pemilahan dan pengurangan

memilah sampah organik dan anorganik. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah masyarakat dapat memperoleh pendapatan pasif melalui pemilahan sampah, mendorong aktifnya kembali unit bank sampah yang tidak aktif, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. Sedangkan manfaat yang dirasakan pemerintah adalah adanya pengurangan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan peningkatan kebersihan lingkungan. Hingga saat ini sudah terbentuk 32 Unit Bank Sampah.

18. PAKAR Berau (Pelayanan Perekaman KTP-EL Khusus Pelajar)



PAKAR (Pelayanan Perekaman KTP-EL Khusus Pelajar) adalah sebuah kegiatan inovasi pelayanan perekaman KTP-Elektronik khusus pelajar yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Berau. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan pemerintah Kabupaten Berau melihat para pelajar yang harus melakukan

perekaman KTP-EL di kantor Disdukcapil pada jam-jam sekolah, yang mengakibatkan terganggunya proses belajar-mengajar mereka di sekolah. PAKAR telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan merupakan salah satu program inovasi unggulan dari Pemerintah Kabupaten Berau. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pelajar yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Tujuan jangka panjangnya adalah sebagai bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau dalam memberikan pelayanan prima yang aktif kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Berau.

19. Probabaya (Pelaksanaan Program Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat)

Walikota Samarinda, Dr. H. Andi Harun mencanangkan program unggulan Samarinda yakni Program Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat atau PROBEAYA sejak tahun 2021 dan baru dilaksanakan sejak tahun 2022. Program ini menysasar RT, Kelurahan hingga Kecamatan di dalam lingkup wilayah Kota Samarinda. Program ini dimaksudkan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kewilayahan. Program ini



berbentuk alokasi anggaran sebesar 100 – 300 juta rupiah per Rukun Tetangga yang dianggarkan khusus untuk pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut. Pembangunan ini meliputi perbaikan akses jalan rumah penduduk, drainase, pengadaan sound system, aula serta pengembangan kegiatan warga melalui program pertanian dan perikanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini sebenarnya memiliki konsep dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

BAB V PENUTUP

Simpulan

- 1) Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan telah menuju pencapaian TPB dan telah berjalan dengan baik. Dari 234 indikator yang ada, 107 indikator (45,73%) telah tercapai, 79 indikator (33,76%) akan tercapai, dan 19 indikator (8,12%) perlu perhatian khusus, sedangkan 29 indikator (12,39%) belum tersedia datanya.
- 2) Terhadap indikator yang memerlukan perhatian khusus dan belum tersedia data, telah dirumuskan langkah tindak lanjut dan upaya tambahan yang diperlukan.

Rencana Tindak Lanjut

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Pokja TPB Kaltim akan melakukan penyusunan RAD TPB Kaltim untuk periode selanjutnya, sebagai upaya untuk memastikan adanya panduan di dalam upaya pencapaian target TPB. Selain itu, langkah-langkah krusial yang dapat diambil diantaranya adalah:

- 1) Melanjutkan aksi dalam upaya mencapai target Angka Partisipasi Kasar (APK)
- 2) Melakukan pemantauan dan peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, serta meningkatkan produktivitas pertanian.
- 3) Memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk pencapaian TPB, terhadap swasta dan mitra pembangunan yang ada di Kalimantan Timur.

LAMPIRAN

Form 1

No	Pilar	Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
1	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	0	2022	0	1.55	 Akan Tercapai
2	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi Nasional.	1.2.1*.Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	6.03	2022	5.78	6.31	 Tercapai
3	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi Nasional.	1.2.2*.Persentase laki- laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	5.78	6.31	 Akan Tercapai
4	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.3. Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	%	98.6	2022	100	82	 Akan Tercapai
5	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.3. Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a).Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	80	84.39	 Akan Tercapai
6	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.3. Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	80	15.61	 Akan Tercapai
7	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.3. Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%	1.5	2022	80	68.155	 Akan Tercapai
8	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.4.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022	80	62	 Akan Tercapai
9	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.4.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.2*.Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	100	40.70	 Akan Tercapai
10	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.5.Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah orang / 100000	3806.54	2022	0	160,1266729	 Akan Tercapai

11	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.5.Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2*.Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Proporsi tanpa satuan	0	2022	0	0,00	 Tercapai
12	Sosial	1. TANPA KEMISKINAN	1.5.Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.4*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	30	2022	100	40	 Akan Tercapai
13	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.1.Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	5.01	12.56	 Perlu Perhatian Khusus
14	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.1.Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*.Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	4.12	4.29	 Akan Tercapai
15	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.2.Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	22.8	2022	27.4	14.9	 Tercapai
16	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.2.Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*.Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	82.6	2022	90	85.9	 Akan Tercapai
17	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.2.Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	7.42	2022	8	8.3	 Akan Tercapai
18	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.2.Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.3.Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	16.31	2022	11	15.61	 Akan Tercapai
19	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.3.Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.2*.Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	Rp (juta)		2022	59.8	175.58	 Tercapai
20	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.3.Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1.(a).Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur			2022			Tidak ada data

21	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.3.Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1*.Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur		0	2022		0	Tidak ada data
22	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.4.Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1.(a).Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	39.87	0.25	▼ Perlu Perhatian Khusus
23	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.5.Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	2.5.1*.Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan	Unit (jumlah)	15	2022	15	17	● Tercapai
24	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.a.Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	2.a.1*.Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (index)	0	2022	100	90.63	▶ Akan Tercapai
25	Sosial	2. TANPA KELAPARAN	2.c.Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.	2.c.1*.Indikator anomali harga pangan.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (index)	0	2022	0.5	0.14	● Tercapai
26	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*.Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 10000	168	2022	75	64	● Tercapai
27	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	93.32	2022	100	62.5	▶ Akan Tercapai
28	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	93.32	2022	100	63.2	▶ Akan Tercapai
29	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000	53	2022	62	26	● Tercapai
30	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000	703	2022	509	342	● Tercapai
31	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.2*.Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000	558	2022	308	257	● Tercapai

32	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*.Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	3	2022	2	4	 Akan Tercapai
33	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a).Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000	0.64	2022	-1	0.57	 Akan Tercapai
34	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4*.Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 100000	1.5	2022	-7.1	0.27	 Akan Tercapai
35	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*.Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	10	2022	10	10	 Tercapai
36	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*.Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	10	2022	10	10	 Tercapai
37	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(a).Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	 Tercapai
38	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b).Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	 Tercapai
39	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a).Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	6.3	2022	8.7	6.3	 Tercapai
40	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b).Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	10.57	2022	32	10.57	 Tercapai
41	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c).Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	28.69	2022	15,4	28.69	 Akan Tercapai
42	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.5.Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(b).Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur	Orang	136	2022	60	68	 Tercapai
43	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.5.Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(a).Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur	Orang	100	2022	240	434	 Tercapai
44	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program Nasional.	3.7.1*.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	BKKBN Kalimantan Timur	%	50.8	2022	10,28	54	 Tercapai
45	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program Nasional.	3.7.2*.Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1001		2022	2,4	2.67	 Akan Tercapai
46	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program Nasional.	3.7.2.(a).Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000		2022	15,43	13.21	 Akan Tercapai

47	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*.Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022	0	2,61	Tidak ada data
48	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1*.Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (index)		2022	5.103.399	3.261.781	 Akan Tercapai
49	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a).Unmet need pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	95.44	2022	100	99	 Akan Tercapai
50	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a).Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			Tidak ada data
51	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.a.Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*.Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	28.91	2022	100/0	22,21	 Perlu Perhatian Khusus
52	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.b.Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1*.Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program Nasional	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	86.7	2022	90	79.75	 Akan Tercapai
53	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.b.Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.3*.Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	100	114,0776455	 Tercapai
54	Sosial	3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.c.Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*.Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000	6.71	2022	6.8	6.65	 Akan Tercapai
55	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a).Proporsi anak-anak dan remaja di (a) kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	43	2022	55	54.12	 Akan Tercapai

56	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a).Proporsi anak-anak dan remaja di (b) kelas 8, yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	43	2022	55	55.16	 Tercapai
57	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a).Proporsi anak-anak dan remaja di (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	 Tercapai
58	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2*.Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0,03	 Akan Tercapai
59	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2*.Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0,0011	 Akan Tercapai
60	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2*.Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0,001142	 Akan Tercapai
61	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0,0016	 Akan Tercapai
62	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang SD/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	 Tercapai
63	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang SMP/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	 Tercapai
64	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	 Tercapai
65	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.2.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.2.1*.Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	76	2022	86	84.5	 Akan Tercapai
66	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.2.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.2.2*.Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	75	2022	84	82	 Akan Tercapai
67	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1*.Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	35.64	2022	28.4	40.35	 Tercapai
68	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	108.02	2022	101.22	103.52	 Tercapai

69	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Umum/Sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	92.57	2022	101.21	94.12	 Akan Tercapai
70	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	96.08	2022	96.14	96.25	 Tercapai
71	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	62	2022	75	72.33	 Akan Tercapai
72	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	84.46	92,8	 Tercapai
73	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1.(a).Proporsi orang dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	84.46	93	 Tercapai
74	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1a) SD/MI/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	95.41	2022	96.14	101	 Tercapai
75	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (1b)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	106.42	2022	28,4	28,16	 Tercapai
76	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (1c)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	113	33,86	 Akan Tercapai
77	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (1d4)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	115	117.12	 Tercapai
78	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (2a) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	100	100	 Tercapai
79	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (2b)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	118	29	 Perlu Perhatian Khusus

80	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (2c)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	103	2022	101	102.24	 Tercapai
81	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (2d)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	105.23	2022	100	101.98	 Tercapai
82	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (3a) SMA/SMK/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	103.19	2022	100	1,4	 Perlu Perhatian Khusus
83	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4a) Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	90	2022	96.14	93.14	 Akan Tercapai
84	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (3b)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	101.76	2022	96.14	93,22	 Akan Tercapai
85	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Pedesaan dan Perkotaan (4b)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100.25	2022	101.21	101	 Akan Tercapai
86	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (3c)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	105	2022	101.21	99.76	 Akan Tercapai
87	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (3d)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	106	2022	101.21	99.84	 Akan Tercapai
88	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (4c)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	106	2022	101.21	99.92	 Akan Tercapai
89	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (4d)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	103.6	2022	96.14	101.03	 Tercapai

90	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.6.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a).Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	98.96	2022	99	100		Tercapai
91	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.*.Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	20	2022	15	16		Tercapai
92	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.*.Proporsi sekolah SMP/MTS/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	25	2022	17	20		Tercapai
93	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.*.Proporsi sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	22	2022	15	17		Tercapai
94	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.(a).Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SD atau sederajat)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	72.72	2022	80	84		Tercapai
95	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.(a).Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SMP atau sederajat)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	87.5	2022	91	92.5		Tercapai
96	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.(a).Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SMA/SMK atau sederajat)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	79.59	2022	84	85.3		Tercapai
97	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.c.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama interNasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1.*.Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (1. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	88.3	2022	97	95.25		Akan Tercapai
98	Sosial	4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.c.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama interNasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1.*.Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (2. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/SMK/	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	40	2022	95	95,74		Tercapai
99	Sosial	5. KESETARAAN GENDER	5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1.*.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	20,512	23,2		Tercapai
100	Sosial	5. KESETARAAN GENDER	5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1.*.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	20,512	18,85		Akan Tercapai
101	Sosial	5. KESETARAAN GENDER	5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2.*.Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/ Kepemimpinan di Pemerintahan	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	31	31		Tercapai

102	Sosial	5. KESETARAAN GENDER	5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2.*.Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/ kepemimpinan di perusahaan publik/swasta	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	31	30	 Akan Tercapai
103	Sosial	5. KESETARAAN GENDER	5.6.Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.2.*.Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			Tidak ada data
104	Sosial	5. KESETARAAN GENDER	5.6.Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			Tidak ada data
105	Sosial	5. KESETARAAN GENDER	5.a.Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum Nasional.	5.a.1.*(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0		Tidak ada data
106	Sosial	5. KESETARAAN GENDER	5.a.Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum Nasional.	5.a.1.*(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0		Tidak ada data
107	Sosial	5. KESETARAAN GENDER	5.b.Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1.*.Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	74.3	2022	99	82.37	 Akan Tercapai
108	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	82,75	2022	88.25	88.25	 Tercapai
109	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (a)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	0,17	2022	0,19	0,19	 Tercapai
110	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman (b)	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	0,17	2022	0,19	0,19	 Tercapai
111	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Presentase rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (C)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%	69.02	2022			Tidak ada data
112	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Presentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) (d)	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	2.73	2022	7.5	4.71	 Perlu Perhatian Khusus
113	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Presentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja (e)	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	30	2022	60	34	 Akan Tercapai

114	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.3.Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan	6.3.1.(a).Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	4.6	2022	260044086.6	11857356.2		Akan Tercapai
115	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.4.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.2.(a).Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (a) Air Permukaan	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	5.04	5.04		Tercapai
116	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.4.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.2.(b).Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (b) Air Tanah	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	74		Akan Tercapai
117	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.5.Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepastasan.	6.5.1.*.Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0- 100)	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	Skor	80	2022	82	82		Tercapai
118	Lingkungan	6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.6.Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.*.Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Tren Perubahan (%) 5 sub indikator	0	2022	53.8	54.3		Tercapai
119	Ekonomi	7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1.*.Rasio elektrifikasi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	KWh/Kapita		2022	1100	1103		Tercapai
120	Ekonomi	7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1.(a).Konsumsi listrik per kapita	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	%	90	2022	92	99,99		Tercapai
121	Ekonomi	7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(a).Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	62735	2022	89,062	62735		Tercapai
122	Ekonomi	7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(b).Rasio penggunaan gas rumah tangga	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (rasio 0-1)	0.05	2022	7,026	4.96		Akan Tercapai
123	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.1.Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi Nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.*.Laju pertumbuhan PDB per kapita	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Ribu Rp / Kapita	174,882	2022	180,26	182,54		Tercapai
124	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.1.Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi Nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a).PDB per kapita	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	0,6	2022	2,51	3,53		Tercapai
125	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.10.Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.*.Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia Kalimantan Timur	Unit per 100000 Penduduk		2022	100	111		Tercapai
126	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.2.Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1.*.Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Ribu Rp / Kapita		2022	2,05	0,84		Akan Tercapai
127	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.3.Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap	8.3.1.*.Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	32.17	2022	26.2	46,49		Tercapai
128	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.5.Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1.*.Upah rata-rata per jam pekerja	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022	37,968	23,94		Akan Tercapai
129	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.5.Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.*.Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	4.22	2022	2.7	4.81		Tercapai

130	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.5.Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a).Tingkat setengah pengangguran	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	6.6	2022	5.1	5,71	 Tercapai
131	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.6.Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1.*.Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022	15.4	21,56	 Tercapai
132	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.7.Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1.(a).Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			Tidak ada data
133	Ekonomi	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.9.Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b).Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	Orang	2015000	2022	7000000	2511419	 Perlu Perhatian
134	Ekonomi	9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(a).Kondisi mantap jalan nasional	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	76.15	2022	68,04	75.8	 Tercapai
135	Ekonomi	9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses	9.1.2.(a).Jumlah bandara.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	9	2022	10	9	 Akan Tercapai
136	Ekonomi	9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b).Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	6	2022	6	6	 Tercapai
137	Ekonomi	9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(c).Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	14	2022	14	14	 Tercapai
138	Ekonomi	9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.*(a).Jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Orang	4677228	2022	6000000	8097130	 Tercapai
139	Ekonomi	9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.*(b).Jumlah barang berdasarkan moda transportasi	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Kg/Jumlah Koli Barang	323233820	2022	337000000	328213324	 Akan Tercapai
140	Ekonomi	9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi Nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.*.Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	3.39	2022	5,4	2,29	 Akan Tercapai
141	Ekonomi	9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi Nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	8,96	19,86	 Tercapai

142	Ekonomi	9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.4.Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1.*.Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	ton CO2 eq / Miliar Rp	0	2022	48,94	43.23	 Akan Tercapai
143	Ekonomi	10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.*.Rasio Gini	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	6.03	2022	5.78	6.31	 Akan Tercapai
144	Ekonomi	10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.(b).Jumlah Desa Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	150	2022	4	40	 Tercapai
145	Ekonomi	10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.(c).Jumlah Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	7	2022	19	19	 Tercapai
146	Ekonomi	10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.(d).Jumlah Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	4	2022	4	4	 Tercapai
147	Ekonomi	10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.(a).Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	tanpa satuan (rasio 0-1)	0.34	2022	0,327	0,334	 Akan Tercapai
148	Ekonomi	10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.2.Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1.*.Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022	1,50	1,13	 Akan Tercapai
149	Ekonomi	10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.3.Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a).Indeks Kebebasan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (rasio 0-1)	0	2022	9,3	10	 Tercapai
150	Ekonomi	10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.3.Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d).Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur		0	2022	10	10	 Tercapai
151	Ekonomi	10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.4.Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	80	53.95	 Akan Tercapai
152	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.1.Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a).Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	60,68	2022	85	73.18	 Tercapai
153	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.2.Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a).Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	%	73	2022	75	75.18	 Tercapai

154	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.2.Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(b).Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	%	24.24	2022	46	30.07	 Akan Tercapai
155	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.3.Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(a).Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (rasio 0-1)	0	2022	0	0	Tidak ada data
156	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.4.Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a).Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Rp/Kapita		2022			Tidak ada data
157	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	jiwa	3806.54	2022	0	14000	 Perlu Perhatian Khusus
158	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a).Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Tidak ada data
159	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a).Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	75	2022	64	59.3	 Akan Tercapai
160	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b).Persentase sampah nasional yang terkelola	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	75	2022	73	67	 Akan Tercapai
161	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.2.(b).Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	ppm/jiwa	0	2022	0	0	Tidak ada data
162	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.2.(a).Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (indeks 0-1)	89,06	2022	89,16	89,21	 Tercapai
163	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.7.Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.2.(a).Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			Tidak ada data
164	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.a.Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan Nasional	11.a.1.(a).Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	76.6	 Tercapai
165	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.b.Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penangan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Seandai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi Nasional penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	20	2022	100	40	 Perlu Perhatian Khusus



166	Lingkungan	11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.c.Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1.(a).Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	60	2022	70	70	 Tercapai
167	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.3.Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen.	12.3.1.(a).Persentase Sisa Makanan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	49.3	2022	40	45.42	 Tercapai
168	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.*(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	4	0	Tidak ada data
169	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.*(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Tidak ada data
170	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1.(b).Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Rasio (0-1)	150000	2022	200000	34879656	 Perlu Perhatian Khusus
171	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1.(a).Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	45	 Perlu Perhatian Khusus
172	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.5.Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a).Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Ton	954.654,36	2022	987.718,64	987.718,64	 Tercapai
173	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.6.Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.*.Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022	107	107	 Tercapai
174	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.6.Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a).Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	0	Tidak ada data
175	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.8.Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(b).Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			Tidak ada data
176	Lingkungan	12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.b.Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.	12.b.1.(a).Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	2	2022	3	3	 Tercapai
177	Lingkungan	13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1.*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	jiwa	3806.54	2022	0	14000	 Perlu Perhatian
178	Lingkungan	13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.3.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	30	2022	10	40	 Tercapai

179	Lingkungan	13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan Nasional.	13.2.2.*.Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	juta ton CO2 eq	3.2	2022	15	36		Tercapai
180	Lingkungan	13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan Nasional.	13.2.2.(a).Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	ton CO2 eq / Miliar Rp	0,0000	2022	0,0000	0,0000		Tidak ada data
181	Lingkungan	13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan Nasional.	13.2.2.(b).Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	juta ton CO2 eq	0	2022		51,46		Tercapai
182	Lingkungan	13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.3.Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	13.3.1.(a).Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	90		Tercapai
183	Lingkungan	14. EKOSISTEM LAUTAN	14.1.Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	14.1.1.(a).Persentase penurunan sampah terbuang ke laut	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	74	2022	73	0		Tidak ada data
184	Lingkungan	14. EKOSISTEM LAUTAN	14.2.Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan laut yang sehat dan produktif.	14.2.1.*.Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Ada/Tidak	6613145	2022	10	10		Tercapai
185	Lingkungan	14. EKOSISTEM LAUTAN	14.5.Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1.*.Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Ha	4810820	2022	289.049	289.049		Tercapai
186	Lingkungan	14. EKOSISTEM LAUTAN	14.6.Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO).	14.6.1.(a).Persentase kepatuhan pelaku usaha	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	36.36	36.36		Tercapai
187	Lingkungan	14. EKOSISTEM LAUTAN	14.b.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.*.Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	%	30	2022	40	40		Tercapai
188	Lingkungan	14. EKOSISTEM LAUTAN	14.b.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.(a).Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Orang (Jumlah)	876	2022	3450	0		Perlu Perhatian Khusus
189	Lingkungan	14. EKOSISTEM LAUTAN	14.b.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.(b).Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Ada/Tidak	8	2022	4	8		Tercapai
190	Lingkungan	15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.*.Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	65.98	65.74		Tercapai
191	Lingkungan	15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.2.(a).Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Ha	100622	2022	101.500	119243		Tercapai
192	Lingkungan	15. EKOSISTEM DARATAN	15.2.Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(a).Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	1	2022	1	5		Tercapai

193	Lingkungan	15. EKOSISTEM DARATAN	15.3.Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.*.Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	%	2	2022	1.25	0.12	 Akan Tercapai
194	Lingkungan	15. EKOSISTEM DARATAN	15.4.Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.1.*.Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	0	Tidak ada data
195	Lingkungan	15. EKOSISTEM DARATAN	15.4.Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.2.*.Indeks tutupan hijau pegunungan.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	13.98	12.21	 Akan Tercapai
196	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a).Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022	0	24	 Perlu Perhatian Khusus
197	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a).Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Orang per 100000 Penduduk	0	2022	0	0	Tidak ada data
198	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4.*.Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	1,39 (BPS, 2017)	2022	0	102	 Perlu Perhatian Khusus
199	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a).Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	55,42	2022	100	58.95	 Perlu Perhatian Khusus
200	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiaksan terhadap anak.	16.2.1.(a).Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)	0	2022	2	1	 Akan Tercapai
201	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiaksan terhadap anak.	16.2.2.*.Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)	0	2022	2	1	 Akan Tercapai
202	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiaksan terhadap anak.	16.2.1.(b).Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	51,03	 Perlu Perhatian Khusus
203	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat Nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(b).Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%	5	2022	3		Tidak ada data
204	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat Nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a).Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Orang per 100000 Penduduk (satuan %)		2022			Tidak ada data
205	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.5.Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a).Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Orang per 100000 Penduduk	0	2022	30	0	 Perlu Perhatian Khusus
206	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a).Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			Tidak ada data

207	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b).Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-5)		2022				Tidak ada data
208	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a).Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100		Tercapai
209	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c).Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur	%	71.05	2022	79	89.19		Tercapai
210	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a).Persentase keterwakilan perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	75	68,1		Akan Tercapai
211	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a).Persentase keterwakilan perempuan di (b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Provinsi	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	4		Tercapai
212	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a).Persentase keterwakilan perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	9,09	20		Tercapai
213	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b).Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	20,5	23,2		Tercapai
214	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.2.(a).Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	30	16,42		Akan Tercapai
215	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.2.(b).Indeks Aspek Kebebasan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	18	10,79		Akan Tercapai
216	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.2.(c).Indeks Kesetaraan	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)	0	2022	19	19		Tercapai
217	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.*.Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)	0	2022	92,49	96,13		Tercapai
218	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a).Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)		2022	90	74,56		Akan Tercapai
219	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b).Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	99	90,4		Akan Tercapai

220	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan Nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1.(a). Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	%		2022	99	93,16	 Akan Tercapai
221	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan Nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(a). Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	98	83,8	 Akan Tercapai
222	Pembangunan	16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	-2	-2	 Tercapai
223	Ekonomi	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.*. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	0.74	2022	0.71	2.74	 Tercapai
224	Ekonomi	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a). Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	1,58	121.57	 Tercapai
225	Ekonomi	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2.*. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	92.83	2022	49.56	46.45	 Akan Tercapai
226	Ekonomi	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.2. Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance ODA) termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari pendapatan nasional bruto untuk pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0.15 sampai 0,2 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/ GNI untuk negara kurang berkembang.	17.2.1.(a). Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022	90	87,12	 Akan Tercapai
227	Ekonomi	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.3. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.2.(a). Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	1	 Akan Tercapai
228	Ekonomi	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.8. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.*. Persentase pengguna internet	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	0	Tidak ada data
229	Ekonomi	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1.(a). Pertumbuhan ekspor produk nonmigas	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Rp	0	2022	0	0	Tidak ada data
230	Ekonomi	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(c). Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur	Ada/Tidak	1	2022	1	1	 Tercapai
231	Ekonomi	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b). Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur	Ada/Tidak	0	2022	1	1	 Tercapai

232	Ekonomi	17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a).Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Tidak ada data
233	Ekonomi	17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.19.Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(a).Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	0	2022	0	20	 Perlu Perhatian Khusus
234	Ekonomi	17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.19.Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b).Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	75	80,56	 Tercapai

Form 2b Provinsi

Tujuan	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Target Tahun 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
								Sem 1	Sem 2		Sem 1	Sem 2			
10. BERKURANGNYA KESENIANGAN	10.3.1.(a). Indeks Kebebasan	05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2022	Orang	10	5	5	459907000	98200000	284071000	Samarinda	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
10. BERKURANGNYA KESENIANGAN	10.3.1.(d). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM InterNasional	05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2022	Orang	10	5	5	459907000	98200000	284071000	Samarinda	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.2.(a). Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2022	Orang	19	11	8	1003713000	384532000	619181000	Samarinda	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.2.(b). Indeks Aspek Kebebasan	02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2022	Orang	16	8	8	1173058000	328270000	884788000	Samarinda	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.b.1.(a). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2022	Orang	17	8	9	817615000	358471000	459144000	Samarinda	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
1. TANPA KEMISKINAN	1.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2022	Dokumen	12	6	6	294321000	52306650	137981200	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1. TANPA KEMISKINAN	1.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	2022	Orang	30	30	0	266412000	23229900	224356520	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1. TANPA KEMISKINAN	1.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2022	Laporan	12	6	6	416212000	205041043	170007560	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1. TANPA KEMISKINAN	1.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2022	Orang	398	240	158	546519207	178397400	186974493	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1. TANPA KEMISKINAN	1.5.2*. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	2022	Dokumen	5	1	4	678360000	208376602	343258841	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1.TANPA KEMISKINAN	1.5.4.*Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	2022	Dokumen	1	0	1	1206580800	92593945	606549493	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1.*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2022	Dokumen	12	6	6	294321000	52306650	137981200	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1.*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	2022	Orang	30	6	0	266412000	23229900	224356520	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1.*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2022	Laporan	12	6	6	416212000	205041043	170007560	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1.*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2022	Orang	398	240	158	546519207	178397400	186974493	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.2.(a).Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	2022	Dokumen	5	1	4	678360000	208376602	343258841	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.b.2.*Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi Nasional penanggulangan bencana	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2022	Kawasan	12	9	3	448909000	225391394	177608824	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.b.2.*Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi Nasional penanggulangan bencana	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	2022	Dokumen	1	0	1	156031900	8520000	27449600	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2022	Dokumen	12	6	6	294321000	52306650	137981200	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	2022	Orang	30	30	0	266412000	23229900	224356520	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2022	Laporan	12	6	6	416212000	205041043	170007560	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2022	Orang	398	240	158	546519207	178397400	186974493	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.3.*Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	2022	Dokumen	1	0	1	1206580800	92593945	606549493	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.2.(a).Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2022	Laporan	12	6	6	416212000	205041043	170007560	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	APBD murni dan Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2022	Dokumen									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2022	Dokumen & Laporan									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2022	Laporan									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2022	Laporan									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2022	Laporan									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	2022	Dokumen Ketetapan									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2022	Laporan									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2022	Dokumen									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	2022	Dokumen SSPD									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2022	Dokumen Surat Persetujuan/P enolakan									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2022	Dokumen LHP & Laporan									Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.4.2.(b).Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (b) Air Tanah	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	2022	Titik	2022	36	38	165150000	67392900	156567900	provinsi Kalimantan timur	APBD dan APBDP	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.2.(a).Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	2022	Dokumen									Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.2.(a).Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	2022	Dokumen									Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.2.(a).Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	2022	Dokumen										Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.2.(a).Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	2022	Laporan	2022	3	2	16800000	8400000	8400000	Baikpapan, Samarinda, Bontang, Kukar, PPU	APBD	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.*.Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HutanLindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	2022	Ha	167429.56	0	0	1380388450	0	0	Kalimantan Timur	APBD / DBH SDA DR	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.*.Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HutanLindung dan Hutan Produksi	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2022	Dokumen									Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.*.Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HutanLindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan KerusakanKawasan Hutan	2022	Ha									Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.*.Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	2022	Dokumen									Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	
15.EKOSISTEM DARATAN	15.2.1.(a).Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan HutanKonservasi (KPHK)	Penyusunan Rencana Pengelolaan KesatuanPengelolaan Hutan	2022	Dokumen	0	0	0	6947945900	0	0	Kalimantan Timur	APBD / DBH SDA DR	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	
15.EKOSISTEM DARATAN	15.3.1.*.Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung WilayahDAS	2022	Dokumen	0	0	0	1280099500	0	0	Kalimantan Timur	APBD / DBH SDA DR	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.8.1.*.Persentase pengguna internet	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2022	Laporan	2	1	1	100000000	100000000	100000000	Samarinda	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.2.(a).Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2022	Laporan	2022			1726783400	242200000	1294098680	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.2.(b).Indeks Kualitas Udara	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2022	Laporan	2022			1726783400	242200000	1294098680	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.a.1.(a).Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	2022	Dokumen	2022			463263000	158112500	398641430	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.6.1.(a).Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2022	Lokasi	2022			995801000	463747038	742265678	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.6.1.*.Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2022	Lokasi	2022			995801000	463747038	742265678	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.2.(a).Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkugan Hidup	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2022	Dokumen	2022			705464000	101721600	543860412	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.2.(b).Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkugan Hidup	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2022	Dokumen	2022			705464000	101721600	543860412	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	

13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.2.*Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2022	Dokumen	2022				705464000	101721600	543860412	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
14. EKOSISTEM LAUTAN	14.1.1.(a).Persentase penurunan sampah terbuang ke laut	11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	2022	Dokumen	2022				411972000	112313200	346420011	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.6.1.*Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu.	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2022	Laporan	2022				1726783400	242200000	1294098680	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.4.1.*Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2022	Dokumen	2022				705464000	101721600	543860412	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
2. TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2022	Dokumen	8	4	5		608608565	288275000	896883565	Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
2. TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2022	Laporan	6	3	3		556157700	193111697	347629010	Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
2. TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	2022	Laporan	1	0	1		564512300	187768300	356666407	Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.b.1.(a).Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2022	Lokasi	2	0	2		3684415240	275913400	1910267223	3 Danau	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.b.1.(a).Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2022	Unit	3	0	3		405828000	56511000	56511000	3 Danau	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.9.1.(b).Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2022	Dokumen										Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.9.1.(b).Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2022	Laporan										Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.(b).Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2022	Dokumen	1	0	1		722508000		421434738	Kariangau Balikpapan	APBD TA.2022	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.(c).Jumlah pelabuhan strategis	03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	2022	Unit	2	0	2		1618125000		775841232	Kalimantan Timur	APBD TA.2022	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.*Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	2022	Dokumen	5	0	5		1530650000		700062865	Kalimantan Timur	APBD TA.2022	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.*Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pembangunan Gedung Terminal	2022	Unit	1	0	1		900386090		628662793	Timbau Tenggarong Kukar	APBD TA.2022	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.*Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	2022	Unit	5	0	5	3251861616		1158939336	Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau	APBD TA.2022	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.*Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.1 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	2022	Dokumen	1	0	1	693330000		492751200	Kalimantan Timur	APBD TA.2022	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.*Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.1 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	2022	Dokumen	1	0	1	124276000		62455440	Samarinda	APBD TA.2022	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.*Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2022	Dokumen	2	0	2	251040000		156732000	Kalimantan Timur	APBD TA.2022	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2022	Dokumen	3	2	1	209718000	57702304	77249304	Samarinda, Balikpapan dan Penajam Paser Utara	APBD	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2022	Dokumen	1	1	0	115012000	31192800	64486232	Balikpapan	APBD	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2022	Dokumen	5	0	0	4725462647	200833600	662369500	Kabupaten/Kota Se Kaltim	APBD	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2022	Dokumen	1	0	1	139188000	24241800	77899816	Balikpapan	APBD	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a).Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2022	Ha	102500	###	120371	740930000	364971370	721598770	Kab. Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Hulu, Kutai Kertanegara, Paser, Penajam Paser Utara	APBD	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
2.TANPA KELAPARAN	2.5.1*.Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernyadari Daerah Provinsi Lain	2022	Ekor	116	0	24	1999733400	69668828	359530762	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan
2.TANPA KELAPARAN	2.5.1*.Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	2022	Laporan	15	0	17	188938938	68286213	185758528	Kalimantan Timur	APBD	Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.3.1.(a).Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2022	Ha									Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.c.1.(a).Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	2022	Dokumen										Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.*.Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) LintasKabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	2022	SR	34.49	28.24	34.49	1,67249E+11	11707441694.48	1,67249E+11	Baikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat	APBD	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) (d)	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem AirLimbah Domestik Regional	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	2022	Kelompok Masyarakat	1.86	1.08	1.86	1009085482	504542741	1009085482	Samarinda	APBD	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja (e)	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem AirLimbah Domestik Regional	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	2022	Kelompok Masyarakat	1.86	1.65	1.86	1009085482	504542741	1009085482	Samarinda	APBD	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman (b)	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem AirLimbah Domestik Regional	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	2022	Kelompok Masyarakat	7.5	3.02	4.71	1009085482	504542741	1009085482	Samarinda	APBD	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman (b)	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem AirLimbah Domestik Regional	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	2022	Kelompok Masyarakat									Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.4.2.(a).Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya. (a) Air Permukaan	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendungan	2022	Bendungan									Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.5.1.*.Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0- 100)	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan BangunanPenampung Air Lainnya	2022	Dokumen									Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1.(a).Kondisi mantap jalan nasional	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan	2022	KM	69.91	75.2	75.2	3,07826E+11	5592000	1,10554E+13	Berau, Kutim, Kukar,	APBD	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada TahapPemantapan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	2022	Satuan Permukiman	1	1	1	75000000	30229553	115370124	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2022	Laporan	1	0	1	100000000	13440000	59930000	KALIMANTAN TIMUR (SELURUH KABUPATEN KOTA)	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2022	Perkara	1	0	1	161700000	50348150	311222375	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	2022	Perusahaan	20	0	20	6757800	0	55065550	SAMARINDA, KALTIM	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	

1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2022	Perkara	1	0	1	74630000	42076400	45996400	KALIMANTAN TIMUR (SELURUH KABUPATEN KOTA)	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	2022	Asosiasi dan Serikat Pekerja	1	0	0	52960500	0	54133600	KALIMANTAN TIMUR (SELURUH KABUPATEN KOTA)	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama/Tripartit Daerah Provinsi	2022	Lembaga	4	1	1E+08	168418000	16180000	1	KALIMANTAN TIMUR (SELURUH KABUPATEN KOTA)	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	2022	Perusahaan	20	10	10	67578800	7680000	53895050	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	2022	Perusahaan	33	32	75	520000000	136799850	374086143	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan diPerusahaan	2022	Kasus	33	23	65	400000000	99071850	255243550	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diPerusahaan	2022	Perusahaan	34	24	48	453773992	161693750	499111668	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	2022	Kawasan Transmigrasi	1	1	2	113010000	13409000	16709000	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Penyediaan Tanah untuk PembangunanKawasan Transmigrasi	2022	Hektar	1	0	2	75000000	0	53592047	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2022	Dokumen	1	0	2	75000000	3877500	52432800	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2022	Laporan	1	3	3	80000000	38907671	106088048	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik. Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	2022	Dokumen	1	1	1	40000000	37221400	37651400	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	2022	Kepala Keluarga	1	1	1	40000000	0	29752000	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKSsecara Terintegrasi	2022	Lembaga	10	0	13	149991900	8482000	18451664	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2022	Lembaga	10	0	13	149991900	4310000	22660664	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada TahapPemantapan	Penguatan SDM dalam rangka PemantapanSatuan Permukiman	2022	Kepala Keluarga	40	0	0	75000000	32520112	61581812	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
10.BERKURANGNYA KESEJANGAN	10.4.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	2022	Surat Keputusan	1	0	1	235157800	125139100	385193775	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
10.BERKURANGNYA KESEJANGAN	10.4.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK)	2022	Surat Keputusan	10	0	10	140620000	0	86169125	SAMARINDA, BALIKPAPAN, BONTANG, PASER, BERAU, KUTAI TIMUR, KUTAI KARTANEGARA, MAHAKAM ULU, PENAJAM PASER	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi orang dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas DaerahKabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	2022	Orang	10	0	12	124999900	13021600	13021600	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi orang dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) diDaerah Provinsi	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia PurnaPenempatan	2022	Orang	120	120	120	600441500	207165082	255749838	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi orang dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan. Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan. Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	2022	Orang	40	0	40	149988500	36464724	47136724	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan KlasterKompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja BerdasarkanKlaster Kompetensi	2022	Orang	100	0	32	749867742	67536164	639988364	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan KlasterKompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2022	Lembaga	10	0	0	399957750	30467927	50330573	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada LembagaPelatihan Kerja	2022	LPK	10	0	10	120000000	10066252	38431120	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.03 Konsultasi Produktivitas pada PerusahaanMenengah	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	2022	Perusahaan	90	10	30	79784000	17607630	84599561	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan KlusterKompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja BerdasarkanKluster Kompetensi	2022	Orang	160	48	48	585998606	585998606	585998606	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan KlusterKompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2022	Lembaga	10	10	10	3045600	3045000	3045000	BALIKPAPAN	PAD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan KlusterKompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja BerdasarkanKluster Kompetensi	2022	Orang	48	40	40	500281500	500281500	500281500	BONTANG	PAD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan KlusterKompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2022	Lembaga	5	5	5	52040000	52040000	52040000	BONTANG	PAD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan KlusterKompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	2022	Unit	6	6	6	135660000	135660000	135660000	BONTANG	PAD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas DaerahKabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagiPencari Kerja	2022	Orang	80	0	40	164100500	13630000	66018166	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar KerjaOnline	2022	Orang	50000	###	19391	149675000	10282800	41657853	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2022	Dokumen	1	1	1	149991800	20790800	29545924	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair /Bursa Kerja	2022	Orang	600	0	100	299686000	13046790	134688590	KALIMANTAN TIMUR	APBD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.1.(a).Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2022	Laporan	2022	0	0	0	0	0	KALIMANTAN TIMUR	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.1.(b).Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	2022	Dokumen	2022	0	0	0	0	0	KALIMANTAN TIMUR	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.1.(c).Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	2022	Dokumen	2022	0	0	0	0	0	KALIMANTAN TIMUR	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur

FORM 5 Provinsi

Tujuan SDGs	Indikator SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah / Non Pemerintah
		Kategori	Deskripsi		
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Data	Penyampaian Data Sarana Hubungan Industrial dari Kabupaten/Kota terlambat dan tidak rutin per Bulan	Akan dilakukan Rapat Koordinasi bersama Kabupaten Kota terkait pendataan saran Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Kelembagaan	Pelaksanaan Verifikasi SP/SB oleh Kabupaten/Kota masih terlambat dan masih adanya perbedaan Persepsi terkait Tata Cara Verifikasi SP/SB di Kabupaten/Kota	Akan dilakukan Rapat Koordinasi tentang cara pencatatan maupun Verifikasi SP/SB di Kabupaten Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Sosialisasi	Berkas Permohonan dan Persyaratan Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PKB masih belum lengkap dan tidak sesuai Peraturan yang berlaku	Akan dilakukan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan, Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PKB kepada Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	sumber daya manusia	Keterlambatan penyampaian Data oleh Kabupaten Kota	Akan dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten Kota terkait pendataan Saran Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Pembinaan	Adanya berkas pengaduan yang tidak lengkap/sesuai sehingga menghambat proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Melakukan Pembinaan, Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang baik agar dapat mengurangi jumlah kasus sehingga terbina Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Operasional	Alokasi Anggaran yang masih kurang untuk tim Deteksi Dini dan Pemetaan terhadap Isu-isu Ketenagakerjaan di Daerah belum Optimal	Mengusulkan Alokasi Anggaran untuk tim Seleksi Dini dan Melakukan Rapat Koordinasi bersama tim Seleksi Dini membahas Isu-isu Ketenagakerjaan di Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Pembinaan	Kurangnya Sosialisasi Tata Cara pembuatan Peraturan Perusahaan	Melakukan Pembinaan Sosialisasi Tata Cara pembuatan Peraturan Perusahaan agar dapat meningkatkan jumlah pengesahan Peraturan di Perusahaan sebagai pedoman baik bagi Pekerja maupun Pengusaha agar terbina Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Pembinaan	Kurangnya Sosialisasi Tata Cara pembuatan Perjanjian Kerja Bersama	Melakukan Pembinaan Sosialisasi Tata Cara pembuatan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama agar dapat meningkatkan jumlah pencatatan Perjanjian Kerja Bersama di Perusahaan sehingga terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis dan Harmonis di Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Koordinasi	Sinergi baik antara K/L terkait di pusat maupun antara pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan transmigrasi masih lemah	Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Koordinasi	Pemahaman ketentuan pelaksanaan KSAD oleh Kab. Serang yang masih belum maksimal	Diskusi dan Koordinasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Keuangan	Refocusing Anggaran	Meningkatnya Jumlah Transmigran yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Administrasi	Permasalahan tidak selalu timbul di internal OPD, melainkan sebagian permasalahan dikarenakan kondisi dilapangan yang melibatkan pihak masyarakat	Membuat rencana kerja lebih baik dengan melibatkan pihak-pihak terkait khususnya masyarakat transmigrasi dipermukiman dan masyarakat setempat	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Kesepakatan Bersama	Perbedaan kepentingan terkait manajemen waktu	Menyiapkan Materi Kesepakatan Bersama dan Rancangan Perjanjian Kerja Sama	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Koordinasi	Kurangnya kerjasama tim, atau setiap bagian lebih mementingkan tujuan bagiannya tanpa memperhatikan bidang lainnya	Hasil Koordinasi Persiapan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Monev	Belum Optimalnya pelaksanaan kegiatan monev seperti kekurangan dan ancaman yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Monev	Hasil Monitoring dan Evaluasi Penataan Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Koordinasi	Belum Maksimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait	Melakukan Pemetaan Potensi Daerah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	sumber daya manusia	Belum terbitnya SK HPL yang menjadi persyaratan pengurusan penerbitan SHM dan adanya oknum lahan transmigran oleh masyarakat lokal, tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan dan tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan	Pendataan jumlah transmigrasi yang sudah menerima SHM dan rapat koordinasi percepatan penerbitan SHM	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	Keuangan	Terbatasnya alokasi anggaran untuk bantuan sarana produksi pertanian	Melakukan Koordinasi ke Kemendes, PDT dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Koordinasi	Mandatori terhadap pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ada NSPK dalam penyelenggaraan Transmigrasi. Masih kurangnya jumlah Pegawai di Bidang Transmigrasi dan Keterampilan SDM di Bidang Transmigrasi terutama terkait Pemetaan	Focus Group Discussion (FGD) dengan lintas sektor terkait	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Pembinaan	Masih dalam suasana Pandemi Covid, Letak geografis perusahaan yang sulit ditempuh serta Terbatasnya Anggaran dan keterbatasan jumlah Pengawas Spesialis Ketenagakerjaan	Meningkatkan sosialisasi ke perusahaan, Tetap melaksanakan pembinaan Norma k3 dan Memaksimalkan anggaran yang diberikan dan berharap ada penambahan jumlah pengawas spesialis ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	sumber daya manusia	Keterbatasan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) pada bidang Kedaruratan dan Logistik di bagian Tim Reaksi Cepat (TRC), Personil Pusdalops PB, Personil Logistik dan Peralatan.	Melakukan upaya peningkatan dan penguatan jumlah dan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) pada bagian Tim Reaksi Cepat (TRC), Personil Pusdalops PB, Personil Logistik dan Peralatan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Kelembagaan	SK. TRC Prov. Kaltim produk tahun 2012, Kelembagaan Pusdalops PB beberapa Kab/Kota belum terbentuk	Perlu Revisi/update SK. TRC Prov. Kaltim dan memperkuat Pusdalops PB Kab/Kota dengan penguatan kelembagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Keuangan	Anggaran yang teralokasi masih kurang memadai	Meningkatkan alokasi anggaran kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1.TANPA KEMISKINAN	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Regulasi	Belum ada pembaharuan SK TRC prov. Kaltim dan perlu dorongan pembentukan TRC Kab/Kota	Melakukan pembaharuan dan penetapan SK oleh surat keputusan Gub, Bupati/Walikota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Operasional	Belum ada dukungan sarana prasarana yang memadai	Penyediaan Sarana prasarana yang memadai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Politik	Bencana urusan bersama	Pentahehix	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.2*.Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	sumber daya manusia	Di Kabupaten/Kota belum semua terbentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.2*.Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	Kelembagaan	Selama ini Tim JITUPASNA hanya lingkup di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota belum melibatkan SKPD terkait	Membentuk Tim JITUPASNA lintas SKPD terkait dan di sahkan dengan Kepala Daerah sehingga apabila dimutasi masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.2*.Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	Keuangan	Anggaran yang tersedia masih belum memadai untuk pelaksanaan kegiatan	Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.2*.Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	Regulasi	Tidak semua bencana yang terjadi memiliki status tanggap darurat bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah	Status tanggap darurat yang jelas apabila terjadi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.2*.Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	Operasional	Multi sektor	Sinkronasi data dari lintas sektor berdasarkan perhitungan kaji cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASANA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.2*.Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	Politik	Penentuan status Tanggap Darurat Bencana	Kebijakan pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.4*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	sumber daya manusia	Terbatasnya SDM yang memiliki potensi sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen kebencanaan	Tender penyusunan dokumen dilakukan secara terbuka apabila dilakukan lelang, apabila dilakukan swakelola melibatkan akademisi dan pihak atau instansi terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1.TANPA KEMISKINAN	1.5.4*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	Kelembagaan	Koordinasi masih belum maksimal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.4*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	Kuangan	Belum tersedia anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan	Tersedia anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.4*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	Regulasi	Belum dapat dilaksanakan apabila dokumen kebencanaan belum disusun	Menyusun dokumen kebencanaan dan setelah itu dilakukan pengesahannya oleh kepala daerah sebagai acuan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.4*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	Operasional	operasional kegiatan akan berjalan dengan lancar apabila tersedia anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Sosial	Masih terbatasnya anggaran bantuan bagi seluruh LKS se kaltim sehingga penyaluran bantuan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang tersedia	Menganggarkan kembali bantuan kepada LKS Kab/Kota yang belum memperoleh bantuan secara bertahap	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Sosial	Beberapa LKS Disabilitas/Panti Swasta mengharapkan bantuan untuk merenovasi/perbaikan bangunan LKS/Panti Swasta yang tidak layak.	Menyarankan pengurus LKS/Panti Swasta menggunakan mekanisme bantuan sosial/hibah kepada Pemprov. Kaltim berdasarkan Pergub No. 23 tahun 2021 ttg. Tata Cara Pemberian Hibah & Bantuan Sosial.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Sosial	Beberapa LKS belum memperpanjang ijin operasional LKS nya sehingga oleh Dinas Sosial Kab/Kota tidak di rekomendasikan untuk menerima bantuan tersebut	Merencanakan Aplikasi SILAKAS data LKS LU, LKSA Dan LKS Disabilitas	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Sosial	Beberapa penerima bantuan di dalam LKS Lansia telah meninggal dunia sehingga bantuan belum bisa disalurkan sambil menunggu ahli waris/pengganti penerima bantuan	Koordinasi dengan dinsaos kab/kota untuk melakukan perubahan penerima bantuan melalui berita acara perubahan penerima / ahli waris	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
10.BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.4.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Regulasi	Alokasi Anggaran yang masih kurang untuk Kegiatan LKS Tripartit sehingga Kegiatan Rapat-rapat membahas masalah Ketenagakerjaan masih kurang Optimal	Mengusulkan penambahan alokasi Anggaran kegiatan LKS Tripartit	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
10.BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.4.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Regulasi	Peraturan yang berubah terkait perubahan Formula penghitungan Upah Minimum	Konsultasi Koordinasi dengan Kemnaker terkait penetapan Upah Minimum	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
10.BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.4.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Regulasi	Peraturan yang berubah terkait perubahan Formula penghitungan Upah Minimum dan keterlambatan penyampaian Rekomendasi Bupati/Walikota ke Gubernur terkait penetapan UMK	Akan dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten Kota dan Kemnaker terkait persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
10.BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.3.1.(a).Indeks Kebebasan	sumber daya manusia	Semua target tercapai	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
10.BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.3.1.(d).Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	sumber daya manusia	Semua target tercapai	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	sumber daya manusia	Keterbatasan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) pada bidang Kedaruratan dan Logistik di bagian Tim Reaksi Cepat (TRC), Personil Pusdalops PB, Personil Logistik dan Peralatan.	Melakukan upaya peningkatan dan penguatan jumlah dan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) pada bagian Tim Reaksi Cepat (TRC), Personil Pusdalops PB, Personil Logistik dan Peralatan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Kelembagaan	SK. TRC Prov. Kaltim produk tahun 2012, Kelembagaan Pusdalops PB beberapa Kab/Kota belum terbentuk	Perlu Revisi/update SK. TRC Prov. Kaltim dan memperkuat Pusdalops PB Kab/Kota dengan penguatan kelembagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Keuangan	Anggaran yang teralokasi masih kurang memadai	Meningkatkan alokasi anggaran kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Regulasi	Belum ada pembaharuan SK TRC prov. Kaltim dan perlu dorongan pembentukan TRC Kab/Kota	melakukan pembaharuan dan penetapan SK oleh surat keputusan Gub, Bupati/Walikota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Operasional	Belum ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai	Penyediaan sarana dan prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Politik	Bencana urusan bersama	Pentahelix	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.2.(a).Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	sumber daya manusia	Di Kabupaten/Kota belum semua terbentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.2.(a).Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Kelembagaan	Selama ini Tim JITUPASNA hanya lingkup di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota belum melibatkan SKPD terkait	Membentuk Tim JITUPASNA lintas SKPD terkait dan di sahkan dengan Kepala Daerah sehingga apabila dimutasi masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.2.(a).Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Keuangan	Anggaran yang tersedia masih belum memadai untuk pelaksanaan kegiatan	Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.2.(a).Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Regulasi	Tidak semua bencana yang terjadi memiliki status tanggap darurat bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah	Status tanggap darurat yang jelas apabila terjadi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.2.(a).Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Operasional	Multi sektor	Sinkronasi data dari lintas sektor berdasarkan perhitungan kaji cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASANA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.2.(a).Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Politik	Penentuan status Tanggap Darurat Bencana	Kebijakan pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.b.2.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi Nasional penanggulangan bencana	sumber daya manusia	SDM Aparatur masih terbatas yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan, SDM masyarakat terkait pemahaman tentang kebencanaan masih secara umum, masyarakat masih belum begitu memahami masalah terkait pra bencananya, lebih kepada tanggap daruratnya saja	Peningkatan kompetensi SDM Aparatur dengan mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan, Sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.b.2.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi Nasional penanggulangan bencana	Kelembagaan	Antara instansi terkait mempunyai kegiatan penguatan kelembagaan masing masing di tingkat desa/kelurahan, Belum terbentuknya Forum Relawan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat desa/kelurahan	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, Membentuk Forum Relawan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat desa/kelurahan yang disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.b.2.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi Nasional penanggulangan bencana	Keuangan	Anggaran yang tersedia masih belum memadai untuk pelaksanaan kegiatan	Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.b.2.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi Nasional penanggulangan bencana	Regulasi	Belum terbentuknya Forum Relawan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat desa/kelurahan sehingga belum dapat disahkan oleh Kepala Desa / Lurah	Membentuk Forum Relawan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat desa/kelurahan yang disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	sumber daya manusia	Keterbatasan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) pada bidang Kedaruratan dan Logistik di bagian Tim Reaksi Cepat (TRC), Personil Pusdalops PB, Personil Logistik dan Peralatan.	Melakukan upaya peningkatan dan penguatan jumlah dan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) pada bagian Tim Reaksi Cepat (TRC), Personil Pusdalops PB, Personil Logistik dan Peralatan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Kelembagaan	SK. TRC Prov. Kaltim produk tahun 2012, Kelembagaan Pusdalops PB beberapa Kab/Kota belum terbentuk	Perlu Revisi/update SK. TRC Prov. Kaltim dan memperkuat Pusdalops PB Kab/Kota dengan penguatan kelembagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Keuangan	Anggaran yang teralokasi masih kurang memadai	Meningkatkan alokasi anggaran kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Regulasi	Belum ada pembaharuan SK TRC prov. Kaltim dan perlu dorongan pembentukan TRC Kab/Kota	melakukan pembaharuan dan penetapan SK oleh surat keputusan Gub, Bupati/Walikota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Operasional	Belum ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai	Penyediaan sarana dan prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Politik	Bencana urusan bersama	Pentahelix	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.3.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	sumber daya manusia	Terbatasnya SDM yang memiliki potensi sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen kebencanaan	Tender penyusunan dokumen dilakukan secara terbuka apabila dilakukan lelang, apabila dilakukan swakelola melibatkan akademisi dan pihak atau instansi terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.3.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Kelembagaan	Koordinasi masih belum maksimal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.3.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Keuangan	Belum tersedia anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan	Tersedia anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.3.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Regulasi	Belum dapat dilaksanakan apabila dokumen kebencanaan belum disusun	Menyusun dokumen kebencanaan dan setelah itu dilakukan pengesahannya oleh kepala daerah sebagai acuan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.3.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Operasional	operasional kegiatan akan berjalan dengan lancar apabila tersedia anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14.EKOSISTEM LAUTAN	14.b.1.*.Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Regulasi	Perlunya sistem pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan yang ramah lingkungan dan memperhatikan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga membawa dampak keberlangsungan ekosistem lautan.	Meningkatkan pelestarian dan reklamasi kawasan konservasi kelautan dan perikanan melalui peningkatan jumlah kawasan yang direhabilitasi serta meningkatkan minat investasi terhadap jasa kelautan	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
14.EKOSISTEM LAUTAN	14.b.1.*.Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	sumber daya manusia	Terbatasnya SDM pengelolaan data baik perikanan tangkap maupun budidaya, Kurangnya Petugas Pengawas Perikanan yang tersertifikasi.	Pelatihan, Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk mengoptimalkan kemampuan SDM.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Regulasi	1. Belum ada regulasi secara khusus pengelolaan ANKT di area perkebunan ditingkat nasional menyebabkan tidak sinerginya pelaksanaan program kegiatan oleh Pemerintah (K/L), Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan sehingga target luas Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang akan dipertahankan secara nasional seluas 70 juta Ha pada tahun 2024 di khawatirkan tidak akan tercapai 2. Penyebaran Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Kabupaten dengan lokasi sulit terjangkau seluruhnya	1. Mengusulkan rekomendasi membuat Peraturan Presiden tentang pengelolaan ANKT (menaungi pengelolaan ANKT pada seluruh sektor berbasis lahan) dan membuat peraturan Menteri Pertanian tentang petunjuk teknis pengelolaan ANKT pada perkebunan kelapa sawit/karet 2. Perlu adanya kolaborasi antara Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi ANKT yang tidak dapat dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.2.(a).Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	sumber daya manusia	Keterbatasan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) pada bidang Kedaruratan dan Logistik di bagian Tim Reaksi Cepat (TRC), Personil Pusdalops PB, Personil Logistik dan Peralatan.	Melakukan upaya peningkatan dan penguatan jumlah dan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) pada bagian Tim Reaksi Cepat (TRC), Personil Pusdalops PB, Personil Logistik dan Peralatan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.2.(a).Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kelembagaan	SK. TRC Prov. Kaltim produk tahun 2012, Kelembagaan Pusdalops PB beberapa Kab/Kota belum terbentuk	Perlu Revisi/update SK. TRC Prov. Kaltim dan memperkuat Pusdalops PB Kab/Kota dengan penguatan kelembagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.2.(a).Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Keuangan	Anggaran yang teralokasi masih kurang memadai	Meningkatkan alokasi anggaran kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.2.(a).Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Regulasi	Belum ada pembaharuan SK TRC prov. Kaltim dan perlu dorongan pembentukan TRC Kab/Kota	melakukan pembaharuan dan penetapan SK oleh surat keputusan Gub, Bupati/Walikota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.2.(a).Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Operasional	Belum ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai	Penyediaan sarana dan prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.2.(a).Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Politik	Bencana urusan bersama	Pentahelix	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.2.(a).Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	sumber daya manusia	Semua target tercapai	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.2.(b).Indeks Aspek Kebebasan	sumber daya manusia	Semua target tercapai	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.b.1.(a).Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	sumber daya manusia	Semua target tercapai	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.8.1.*.Persentase pengguna internet	Operasional	Kondisi Geografi berpengaruh pada coverage layanan internet	Diskominfo bisa membantu dalam pemodaln pendirian BTS	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.1.(a).Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Belum adanya Usulan dari Perangkat Daerah Terkait Kerjasama dengan Skema KPBU	Tidak ada tawaran dari pihak Ke-3 atau Badan Usaha untuk melakukan Kerjasama dengan KPBU	Perlu adanya Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Kerjasama dengan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPBU	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.1.(b).Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Belum adanya Usulan dari Perangkat Daerah Terkait Kerjasama dengan Skema KPBU	Tidak ada tawaran dari pihak Ke-3 atau Badan Usaha untuk melakukan Kerjasama dengan KPBU	Perlu adanya Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Kerjasama dengan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPBU	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.1.(c).Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Belum adanya Usulan dari Perangkat Daerah Terkait Kerjasama dengan Skema KPBU	Tidak ada tawaran dari pihak Ke-3 atau Badan Usaha untuk melakukan Kerjasama dengan KPBU	Perlu adanya Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Kerjasama dengan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPBU	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur

2.TANPA KELAPARAN	2.5.1*.Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Regulasi	Permasalahan PMK membuat pengadaan bibit ternak tidak bisa dari luar daerah. Untuk mencegah menyebarnya PMK, maka terbit aturan baru untuk membatasi lalulintas hewan ternak.	Melakukan vaksinasi PMK dan memastikan pemasukan ternak ke Kalimantan Timur dari provinsi lain bebas dari penyakit PMK dan sudah dilakukan vaksinasi.	Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	sumber daya manusia	Kurangnya pengetahuan terkait Pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di tingkat rumah tangga	Melakukan penyuluhan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sampai dengan tingkat rumah tangga	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Kelembagaan	Penganekaragaman konsumsi pangan memerlukan keterlibatan dari semua pihak baik dalam promosi penganekaragaman pangan maupun dalam action di lapangan	Akan dilakukan koordinasi lebih intens dengan semua pihak terkait dan memonitoring program dan kegiatan yang dilaksanakan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Keuangan	Penganekaragaman konsumsi pangan memerlukan keterlibatan dari kabupaten/kota di Kaltim, namun anggaran di Kabupaten/kota sangat terbatas untuk baik untuk promosi penganekaragaman konsumsi pangan maupun action di lapangan	Menghimbau Dinas Pangan Kabupaten/Kota untuk lebih giat lagi mengusulkan anggaran baik dari APBD maupun APBN. Apabila memungkinkan, menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.5.1.(a).Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Regulasi	Proses klaim ke IPWL Kemenkes terlalu rumit/sulit (banyak persyaratan).	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi / Kab / Kota	Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.5.1.(b).Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Nihil	Nihil	Nihil	Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	sumber daya manusia	Pemangkasan anggaran, kurangnya minat masyarakat pada kejuruan tertentu	Melaksanakan pemagangan yang kejuruannya sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Kelembagaan	Tidak ada penghambat yang signifikan, MOU yang menjadi output sesuai dengan jumlah paket kegiatan pemagangan	Koordinasi dengan Lembaga dan sektor swasta dapat dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Kelembagaan	Terbatasnya jumlah assessor sehingga kesulitan untuk menyesuaikan jadwal visitasi	Melaksanakan kegiatan ini pada tahun berikutnya sebagai bentuk pembinaan kepada LPK swasta	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	sumber daya manusia	Penyerapan / Penempatan yang belum optimal	meningkatkan kerjasama yang baik antara Disnaker, SMK / Universitas(BKK) dengan perusahaan terkait hal penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	sumber daya manusia	Adanya Pemotongan anggaran	Sosialisasi kegiatan ke Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	sumber daya manusia	Karena kurangnya minat tenaga kerja lokal untuk menempati posisi menjadi pemanen	Dinas Tenaga Kerja Prov. Kaltim akan melakukan survey lapangan langsung agar tenaga kerja yang akan didatangkan dari luar daerah atau dalam daerah mendapatkan tempat tinggal yang layak	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Kelembagaan	Kurangnya Laporan dalam LPTK yang Terdata	Melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	sumber daya manusia	Tidak diperpanjangnya Hosting dan Domain sehingga website tidak dapat diakses di triwulan akhir	Perpindahan Hosting dan Domain memakan waktu karena harus melakukan koordinasi terlebih dahulu ke Diskominfo	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	sumber daya manusia	Dana yang diberikan tidak cukup untuk melaksanakan secara mandiri	Mencoba melaksanakan melalui kerja sama dengan dinas lain namun tidak terealisasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi orang dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	sumber daya manusia	Masih terbatasnya keterampilan masyarakat transmigrasi untuk berwirausaha	Memprogramkan kegiatan pelatihan kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi orang dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	sumber daya manusia	Masalah SDM yang belum memiliki ketrampilan dalam pemanfaatan SDA yang tersedia	Mengadakan kegiatan sosialisasi tentang peningkatan SDM masyarakat transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.1.(a).Proporsi orang dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Keuangan	Terbatasnya alokasi anggaran untuk bantuan jaminan hidup	Melakukan Koordinasi ke Kemendes, PDT dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.4.2.(b).Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (b) Air Tanah	Regulasi	pengambilan air baku bersumber dari ketersediaannya air tanah, tidak mencapai target maksimal dikarenakan pemberian perijinan terhadap penggunaan air tanah dibatasi oleh regulasi kewenangan berdasarkan wilayah sungai, sehingga pencapaian target 100 rekomendasi teknis yang dikeluarkan semula berdasarkan cekungan air tanah yang mencakup wilayah kalimantan timur tidak terpenuhi, sejak dikeluarkannya regulasi Kepmen 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tanggal 19 Oktober 2022	sesuai kewenangan, pemberian perijinan penggunaan air tanah agar dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan target pengambilan air baku yang bersumber dari air tanah, dibagi berdasarkan wilayah sungai (WS. Karangan) yang meliputi kutai timur, bontang dan kutai kertanegara bagian pesisir utara, sehingga jumlah target akan berkurang sesuai kewenangan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (C)	Regulasi	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki data	Indikator TPB 6.2.1* untuk dapat dialihkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.2.(a).Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Keuangan	Tidak adanya pembangunan lanjutan jaringan gas di wilayah Kalimantan Timur terutama di 5 Kabupaten/Kota yang telah terbangun (Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kukar, PPU), sedangkan animo atau kebutuhan masyarakat akan gas yang lebih murah dan praktis dalam pemakaiannya masih sangat tinggi	Dinas ESDM akan berupaya sebagai fasilitator untuk membantu mengkoordinasikan rencana pembangunan lanjutan dari jaringan gas untuk rumah tangga kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dikarenakan anggaran pembangunan jaringan untuk rumah tangga berada di Kementerian ESDM melalui APBN	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	sumber daya manusia	SDM kurang mendukung peningkatan industri manufaktur	Peningkatan Sumber Daya Industri melalui pendidikan vokasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Kelembagaan	Koordinasi antar lembaga belum maksimal dilaksanakan	Menginisiasi koordinasi antar lembaga / SKPD terkait	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Keuangan	Dukungan anggaran belum maksimal untuk mendorong pengembangan industri manufaktur	Menentukan skala prioritas dalam menetapkan program dan kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Regulasi	Rencana Pengembangan Industri kab/kota belum menjadi Perda yang menjadi acuan pengembangan industri ke depannya	Terus melakukan pendampingan kepada kab/kota agar RPIK tersebut segera diwujudkan dalam bentuk Perda .r	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur

9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Operasional	Kawasan industri yang dibentuk belum memberi dampak peningkatan industri olahan secara umum maupun manufaktur secara khusus	Menetapkan program kegiatan yang bertujuan mendorong kawasan industri berorientasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Politik	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.(a).Jumlah bandara.	Kelembagaan	Kewenangan di Instansi Pusat	Memperkuat Koordinasi dengan semua stakeholder	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.(b).Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Kelembagaan	Kewenangan di Instansi Pusat	Memperkuat Koordinasi dengan semua stakeholder	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.(c).Jumlah pelabuhan strategis	Kelembagaan	Kewenangan di Instansi Pusat	Memperkuat Koordinasi dengan semua stakeholder	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Form 2b Kab/Kota

Tujuan	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
								Sem 1	Sem 2		Sem 1	Sem 2			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	204 Administrasi Pendapatan Daerah KewenanganPerangkat Daerah	3.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2022	Laporan	2022						Berau	APBD	Balitbang Kabupaten Berau
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2022	Orang	20	15	10	5432568	4800000		Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2022	Orang	40	11	25	3612886	2877600		Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
2.TANPA KELAPARAN	2.1.2*.Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	202 Penanganan Kerawanan Pangan KewenanganKabupaten/Kota	2.Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	2022	Dokumen	1		1	11759440	11759440		Kab. Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
2.TANPA KELAPARAN	2.c.1*.Indikator anomali harga pangan.	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	201 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	4.Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2022	Dokumen	1		1	21161022	4524022	15221422	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.Penyediaan Permaknaan	2022	Orang	40	15	10	13445760	339823	2979823	4 Kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	9.Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2022	Orang	915		40	7502600	495000	4147400	4 Kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantiSosial	10.Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2022	Orang	30		10	3511600			4 Kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	203 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana	3.Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2022	Orang	100		25	27400000		27400000	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantiSosial	13.Pemberian Layanan Rujukan	2022	Orang	20	5	8	5432568	4060400	1137600	4 Kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.2*.Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	204 Penataan Sistem Dasar PenanggulanganBencana	6.Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	2022	Dokumen	1		1	481145125		3,13E+08	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	1.Pendataan Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	2022	Orang	36045	###		8648338	8185000		4 Kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.2*.Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	2.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	2022	Keluarga	35475	###		17356636	6780436	6384000	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.b.2.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi Nasional penanggulangan bencana	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	202 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2022	Orang	30	15	15680000	6880000	Kab. Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.2.(a).Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2022	Dokumen	35	20	28951692180	1,37E+10	Dinas Kesehatan Kab Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.b.1*.Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program Nasional	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2022	Dokumen	12	6	19747200	18605000	Dinas Kesehatan Kab Penajam Paser Utara	DAK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.2*.Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2022	Keluarga	150	100	5348000	4952100	4 Kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2022	Orang	2752	2752	2146560000	2,15E+09	4 Kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2022	Orang	2841	1839	79673066	8610500	4 Kecamatan	APBD & APBN	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.a.1*.Persentase morokot pada penduduk umur ≥15 tahun	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2022	Orang	102638	2658	48472660	44850660	Dinas Kesehatan Kab Penajam Paser Utara	DAK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.1.(b).Prevalensi tekanan darah tinggi	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2022	Orang	10250	1735	16043830	16043830	Dinas Kesehatan Kab Penajam Paser Utara	DAK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	203 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2022	Orang	100	25	351588979	1,23E+08	Kab. Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.3*.Kejadian Malaria per 1000 orang	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	22	6	190956000	12450000	Dinas Kesehatan Kab Penajam Paser Utara	DAK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.4*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	202 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	9.Penyusunan Rencana Kontijensi	2022	Dokumen	1	1	31914000		Kab. Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.3*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	201 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	2022	Orang	30		24475000		Kab. Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.5.2.*.Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	201 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan UnitKompetensi	1.Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkanKlaster Kompetensi	2022	Orang	36	36	600011510	6E+08	BPVP Samarinda	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.2.(b).Indeks Kualitas Udara	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	201 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut	2022	Dokumen	1	1	15600000	6240000	6240000	Kab. Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.1.(b).Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	213 Penataan Organisasi	3.Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2022	Dokumen	21	19	77000000	18000000	47932112	Kab PPU	APBD Kab. PPU	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizimasyarakat	2022	Dokumen	8	4	4	1138751000	9,85E+08	Dinas Kesehatan Kab Penajam Paser Utara	DAK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.2.(a).Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepuasan pelayanan publik kategori baik	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	213 Penataan Organisasi	2.Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2022	Laporan	2	1	130917387	18142579	1,12E+08	DPMP TSP dan Disdukcapil Kab. PPU	APBD Kab. PPU	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.1.(c).Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	213 Penataan Organisasi	3.Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2022	Dokumen	15	10	77000000	15000000	50932112	Kab PPU	APBD Kab. PPU	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.9.1.(b).Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	201 Pelayanan Pencatatan Sipil	1.Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2022	Dokumen	6000	3064	37500000	28433000		Disdukcapil	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (a)	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2022	Rumah Tangga	400	761	4154336000	2,88E+09		Kecamatan Penajam & Babulu	DAK 2022	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman (b)	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2022	Rumah Tangga	400	761	4154336000	2,88E+09		Kecamatan Penajam & Babulu	DAK 2022	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (C)	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2022	Rumah Tangga	400	761	4154336000	2,88E+09		Kecamatan Penajam & Babulu	DAK 2022	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) (d)	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2022	Rumah Tangga	400	761	4154336000	2,88E+09		Kecamatan Penajam & Babulu	DAK 2022	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.*.Persentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja (e)	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2022	Rumah Tangga	400	761	4154336000	2,88E+09		Kecamatan Penajam & Babulu	DAK 2022	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.b.3*.Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untukUKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.Pengadaan Obat, Vaksin	2022	Paket	150	85	1157084580			Dinas Kesehatan Kab Penajam Paser Utara	DAK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.4.2.(a).Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (a) Air Permukaan	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota	3.Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perkotaan	2022	Liter/Detik	10	10	9705430400	5,51E+09		Kecamatan Babulu & Sepaku	APBD II Kab. Penajam Paser Utara	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.9.1.*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	201 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2022	Dokumen	4777	2156	37500000	14781100		Disdukcipil	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1.(a).Kondisi mantap jalan nasional	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.Rekonstruksi Jalan	2022	KM	15,17	12,6	1,46513E+11	7,58E+09	9,38E+10	tersebar 4 Kecamatan	DAK 2022, Bankeu 2022 dan APBD II	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.3.1.(a).Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	201 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2022	Sistem Jaringan	4	4	4	6336918805	5,62E+08	3,41E+09	tersebar 4 Kecamatan	APBD II Kab. Penajam Paser Utara	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.5.1.*.Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.Pembangunan Bendungan	2022	Bendungan	1	1	1924100000		1,77E+09	Kecamatan Penajam	APBD II Kab. Penajam Paser Utara	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
2.TANPA KELAPARAN	2.c.1*.Indikator anomali harga pangan.	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	201 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1.Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2022	Laporan	1	1	32074658	2538000	23903010	Kab. Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2022	Keluarga	10803	6496	4861350000		1,61E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(a).Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2022	Dokumen	51683	###	25001080600		2,5E+10	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2022	Liter/Detik								Balitbang Kota Bontang	
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2022	SR	215	215	4065843632		4,07E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2022	Unit Rumah	80	80	2435232775		2,44E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2022	Unit	5	5	1131676052		1,13E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	203 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2022	Orang	50	50	303122500		3,03E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	203 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2022	Orang	1588	1588	297400527		2,97E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	

2.TANPA KELAPARAN	2.1.1*.Prevalensi Ketidakecukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	202 Pengelolaan dan Keseimbangan CadanganPangan Kabupaten/Kota	3.Pengadaan Cadangan Pangan PemerintahKabupaten/Kota	2022	Ton	15	15	283269808	2,83E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GiziMasyarakat	2022	Dokumen	1	1	637450191	6,37E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.c.1.(a).Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	201 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, sertaimplementasi SIMBG	2022	Dokumen	1	1	601602457	49582440	2,32E+08	Kecamatan Penajam	APBD II Kab. Penajam Paser Utara	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota	3.Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perkotaan	2022	Liter/Detik	10	10	9705430400	5,51E+09	Kecamatan Babulu & Sepaku	APBD II Kab. Penajam Paser Utara	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	201 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2022	Dokumen	6	3	78423145	7410050	41981750	Bapenda PPU	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.Penyediaan Permakanan	2022	Orang	88	88	1904681675	1,9E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
2.TANPA KELAPARAN	2.1.2*.Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	201 Penyusunan Peta Kerentanan dan KetahananPangan Kecamatan	1.Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan	2022	Dokumen	1	1	65927942	65927942	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2*.Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GiziMasyarakat	2022	Dokumen	1	1	637450191	6,37E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
2.TANPA KELAPARAN	2.2.3.Prevalensi anemia pada ibu hamil.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2022	Orang	3558	3558	182107041	1,82E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.1*.Angka Kematian Ibu (AKI).	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	Orang	3396	3396	80100000	80100000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.2*.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	Orang	3396	3396	80100000	80100000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.2*.Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2022	Orang	15999	###	84578047	84578047	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.1*(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	2022	Orang	3298	3298	92525000	92525000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang	

3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.3*.Kejadian Malaria per 1000 orang	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan ResponWabah	2022	Dokumen	1		1	172521450	1,73E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.2*.Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	2022	Orang	3298		3298	92525000	92525000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.3.(a).Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan ResponWabah	2022	Dokumen	1		1	172521450	1,73E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.3*.Kejadian Malaria per 1000 orang	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	1		1	353020000	3,53E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.3.(a).Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	1		1	353020000	3,53E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.4*.Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	1		1	353020000	3,53E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.5*.Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis)	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	1		1	353020000	3,53E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.5.(a).Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	1		1	353020000	3,53E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.5.(b).Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	1		1	353020000	3,53E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.1.(a).Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	202 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif/Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2022	Dokumen	1		1	515520211	5,16E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.1.(b).Prevalensi tekanan darah tinggi	05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	202 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif/Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2022	Dokumen	1		1	5125442050	5,13E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.1.(b).Prevalensi tekanan darah tinggi	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	1		1	353020000	3,53E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.1.(c).Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	202 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif/Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2022	Dokumen	1		1	5125442050	5,13E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.5.1.(a).Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	201 Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4.Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2022	Orang	100		100	331575750	3,32E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang

7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.1.*.Rasio elektrifikasi	09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	201 Penyelenggaraan Penataan Bangunan danLingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2022	Kawasan	4	1	1	2841579227	1213800	2,01E+09	Kecamatan Penajam	APBD II Kab. Penajam Paser Utara	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.5.1.(a).Jumlah penyalahguna narkoba yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	13.Pemberian Layanan Rujukan	2022	Orang	15		15	56600000		56600000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.5.1.(b).Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	12.Pemberian Layanan Rujukan	2022	Orang	15		15	56600000		56600000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	2.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	2022	Keluarga									Bappeda Kota Samarinda
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.2.(a).Total Fertility Rate (TFR)	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2022	Dokumen	3		3	70640920		70640920	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(a).Proporsi peserta Jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2022	Dokumen									Bappeda Kota Samarinda
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	202 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di DaerahKabupaten/Kota	1.Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2022	Perkara									Bappeda Kota Samarinda
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	202 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di DaerahKabupaten/Kota	2.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2022	Perkara									Bappeda Kota Samarinda
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.1*.Cakupan pelayanan kesehatan esensial	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2022	Orang	3558		3558	182107041		1,82E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.1*.Cakupan pelayanan kesehatan esensial	05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	202 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif/Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2022	Dokumen	1		1	515520211		5,16E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.1*.Cakupan pelayanan kesehatan esensial	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	Orang	3396		3396	80100000		80100000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.1*.Cakupan pelayanan kesehatan esensial	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2022	Orang	15999		###	84578047		84578047	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.1.(b).Prevalensi tekanan darah tinggi	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2022	Orang	12661		###	83320000		83320000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.1*.Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	1.Pendataan Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	2022	Orang	49914		###	349999993		3,5E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.1*.Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	2.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	2022	Keluarga	2957		2957	178159445		1,78E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang

4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (1b)	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2022	Unit	8	8	1686812636	1,69E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (1b)	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	12.Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2022	Unit	8	8	840053182	8,4E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (2d)	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.Pengadaan Perlengkapan Siswa	2022	Unit			1783988237	1,78E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.Pengadaan Perlengkapan Siswa	2022	Unit			1938029282	1,94E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2022	Unit	1	1	195870900	1,96E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2022	Orang	700	700	8425247000	8,43E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
2.TANPA KELAPARAN	2.3.1.(a).Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	201 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.Pengembangan Kapasitas Kolembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2022	Unit						Bappeda Kabupaten Kutai Timur	
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN	17.8.1.*.Persentase pengguna internet	03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	202 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2022	Dokumen	1	1	159340836	1,59E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.2*.Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2022	Orang	8815	8815	349999993	3,5E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN	17.17.1.(a).Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	202 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2022	Dokumen	1		40606375	4980000	Kab PPU	APBD Kab. PPU	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.2*.Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2022	Keluarga	4480	4480	178159445	1,78E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN	17.19.2.(b).Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	201 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2022	Laporan	2	2	1742306571	1,74E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN	17.1.2.*.Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	201 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2022	Laporan	9	4 5	74393500	10446600 39887200	Bapenda PPU	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN	17.19.2.(a).Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	201 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2022	Dokumen	2	2	3232002	3232002	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN	17.1.2.*.Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	201 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2022	Laporan	13	6 7	29161000	10119300 12957200	Bapenda PPU	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN	17.1.2.*.Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	201 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2022	Laporan	9	4 5	25019000	4770000 6957500	Bapenda PPU	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	201 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2022	Obyek Pajak	46000	4600	740140688	7,4E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.2.*Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	201 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.Penetapan Wajib Pajak Daerah	2022	Dokumen	22	10 12	25019000	12835000 11130000	Bapenda PPU	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.9.1.(b).Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	201 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2022	Dokumen	2	2	540292228	5,4E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.2.*Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	201 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan PajakDaerah	2022	Dokumen	9	4 5	32932000	32928500	Bapenda PPU	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.9.1 (a).Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	201 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2022	Dokumen	2	2	540292228	5,4E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	201 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2022	Obyek Pajak	2	1 1	145708272	1,13E+08 6577500	Bapenda PPU	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.2.(c).Indeks Kesetaraan	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	4.Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	2022	Perangkat Daerah	31	31	295032988	2,95E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.5.1.(a).Indeks Perilaku Anti Korupsi (PAK).	03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	202 Pendampingan dan Asistensi	3.Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi	2022	Kegiatan	16	16	122540000	1,23E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.3.1.(b).Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	203 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.Fasilitasi Bantuan Hukum	2022	Kasus	3	3	888883188	8,89E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.2.1.(b).Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	202 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagiPerempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Orang	40	40	430685138	4,31E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.2.1.(a).Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	202 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yangMelibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Dokumen	40	40	150392184	1,5E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
15.EKOSISTEM DARATAN	15.4.1.*.Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	201 Pengelolaan Keanekaragaman HayatiKabupaten/Kota	5.Pengelolaan Taman Keanekaragaman HayatiLainnya	2022	Ha	1	1	50000000	50000000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.2.(b).Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	201 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2022	Dokumen	1	1	6325000	6325000	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.2.(b).Indeks Kualitas Udara	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	201 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut	2022	Dokumen	1	1	161440000	1,61E+08 1,61E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.5.1.(a).Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	201 Pengelolaan Sampah	2.Pengurangan Sampah dengan MelakukanPembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2022	Laporan	1	1	434450000	4,34E+08 4,34E+08	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang

12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.2.*(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengeloalaannya	05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	201 Penyimpanan sementara Limbah B3	1.Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik	2022	Dokumen	1	1	7222500000	7,22E+09	7,22E+09	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.c.1.(a).Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	201 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, sertaImplementasi SIMBG	2022	Dokumen	100	100	7000000000	7E+08		Kota Bontang	APBD Kota Bontang	Balitbang Kota Bontang
10.BERKURANGNYA KESEJANGKARAN	10.3.1.(a).Indeks Kebebasan	03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemant	5.Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	2022	Laporan	12	6	4540000			4 kecamatan	apbd	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
10.BERKURANGNYA KESEJANGKARAN	10.3.1.(a).Indeks Kebebasan	04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2022	Laporan	12	6	34040100			4 kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
10.BERKURANGNYA KESEJANGKARAN	10.3.1.(a).Indeks Kebebasan	05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4.Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2022	Orang	6	4	4030000			4 kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.2.(a).Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemant	4.Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah	2022	Orang	3	3	19178000			4 kecamatan	apbd	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
10.BERKURANGNYA KESEJANGKARAN	10.3.1.(d).Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM InterNasional	06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial	5.Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	2022	Laporan	12	6	7720000			4 kecamatan	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (2b)	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	202 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	37.Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2022	Satuan Pendidikan												Bappeda Kota Samarinda
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (1b)	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2022	Satuan Pendidikan												Bappeda Kota Samarinda
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	2022	Satuan Pendidikan												Bappeda Kota Samarinda
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.3.1.(a).Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	201 Penyimpanan sementara Limbah B3	2.Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	2022	Laporan												Bappeda Kota Samarinda
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.2.*(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengeloalaannya	05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	201 Penyimpanan sementara Limbah B3	2.Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	2022	Laporan												Bappeda Kota Samarinda
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.5.1.(a).Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	201 Pengelolaan Sampah	3.Penganganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2022	Ton												Bappeda Kota Samarinda
13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1.*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	201 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	2022	Dokumen												Bappeda Kota Samarinda
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (2c)	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	2022	Satuan Pendidikan												Bappeda Kota Samarinda
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.2*.Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional	02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	2022	Dokumen	1				1		20410000		20095144	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1*.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2022	Dokumen	24				4	20	9600000	2584000	6319818	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1*.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2022	Dokumen	1				1		25000000		24947250	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1*.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2022	Dokumen	3				1	2	70640000	33000000	17000000	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1'.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2022	Laporan	10	10	100650000	43763840	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara		
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1'.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	2022	Laporan	14	1	13	78229520	7061920	64182125	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1'.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4.Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2022	Orang	354	354	259182030		1,3E+08	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1'.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2022	Kampung	37	37	79650000	73897280	3035520	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1'.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4.Pembinaan Terpadu Kampung KB	2022	Laporan	6	6	463320000		3,16E+08	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
5.KESETARAAN GENDER	5.5.1'.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2022	Organisasi	21	2	19	100112200	15159962	29099481	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
5.KESETARAAN GENDER	5.5.1'.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah.	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2022	Organisasi	21	2	19	100112200	15159962	29099481	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
5.KESETARAAN GENDER	5.5.2'.Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/ Kepemimpinan di Pemerintahan	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2022	Organisasi	21	2	19	100112200	15159962	29099481	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
5.KESETARAAN GENDER	5.5.2'.Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/ kepemimpinan di perusahaan publik/swasta	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2022	Organisasi	21	2	19	100112200	15159962	29099481	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1'.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	2022	Dokumen	1	1	20410000		20095144	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1'.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2022	Dokumen	24	4	20	9600000	2584000	6319818	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

5.KESETARAAN GENDER	5.6.1.*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2022	Dokumen	1	1	25000000	24974250	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara		
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1.*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2022	Dokumen	3	1	2	70640000	16500000	33500000	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1.*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2022	Laporan	10	10	100650000	43763840	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara		
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1.*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	2022	Laporan	14	1	13	78829520	7061920	64182125	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1.*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB)	4.Penggerakan Kader Institusi MasyarakatPedesaan (IMP)	2022	Orang	354	354	259182030	1,3E+08	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara		
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1.*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komasyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2022	Kampung	37	37	79650000	73897280	3035520	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1.*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komasyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4.Pembinaan Terpadu Kampung KB	2022	Laporan	6	6	463320000	3,16E+08	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara		
5.KESETARAAN GENDER	5.6.2.*.Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	04 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	201 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga	2.Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2022	Unit	9	9	147000000	1,46E+08	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara		

5.KESETARAAN GENDER	5.6.2.*.Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	201 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2022	Kelompok	8347		8300	789200000		1,9E+08	Penajam Paser Utara	DAK NON FISIK	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.1.(a).Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	202 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Layanan	34	7	20	39756000			Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.1.(b).Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	202 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	1.Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2022	Orang	34	7	20	25756950	9200000	13188450	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.2.*.Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	202 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	1.Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2022	Orang	34	7	20	25756950	9200000	13188450	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.1.(a).Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	202 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Layanan	3		3	13263000			Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.1.(a).Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	202 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	1.Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2022	Orang	34	7	20	25756950	9200000	13188450	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.1.(b).Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	201 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2022	Dokumen	21		1	22880165		22826748	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.1.(b).Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	202 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Layanan				39756000			Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.1.(a).Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	2.Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2022	Dokumen				15560900			Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.7.1.(a).Persentase keterwakilan perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat.	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2022	Organisasi	21		21	100112200	15159962	29099481	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.7.1.(a).Persentase keterwakilan perempuan di (b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Provinsi	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2022	Organisasi	21		21	100112200	15159962	29099481	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.1.(a).Persentase keterwakilan perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan (c) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2022	Organisasi	21		21	100112200	15159962	29099481	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.2.(c).Indeks Kesetaraan	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Dokumen	21	17	4	30500000	15699000	2522700	Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.2.(c).Indeks Kesetaraan	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga/penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Orang				1792000			Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2022	Dokumen									Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.1.2*.Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	201 Penyusunan Peta Kerentanan dan KetahananPangan Kecamatan	1.Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan	2022	Dokumen	1		0,25	30363700	9325000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.1.2*.Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	202 Penanganan Kerawanan Pangan KewenanganKabupaten/Kota	1.Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2022	Laporan	1		0,25	63431800	22440000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.1.2*.Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	202 Penanganan Kerawanan Pangan KewenanganKabupaten/Kota	2.Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	2022	Dokumen	20		15	735800200	4,86E+08		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	204 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	1.Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2022	Dokumen	1		0,25	14248000	2795000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	204 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	2.Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2022	Laporan	2		1	693469320	1,56E+08		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	204 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	3.Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	2022	Laporan	40		20	44247500	15160000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	201 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2022	Laporan	1		0,5	21445500	6395500		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	202 Pengelolaan dan Keseimbangan CadanganPangan Kabupaten/Kota	2.Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2022	Dokumen	1		0,5	41275000	19632400		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.9.1.(b).Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	201 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2022	Lokasi	1			19305000	1935000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser

2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	201 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2022	Orang											Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	8.Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2022	Laporan											Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	2022	Orang											Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	203 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/ Kota	1.Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsian Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2022	Ton											Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	7.Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	2022	Orang											Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.Peningkatan Kesertaan Penggunaaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2022	Orang											Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB)	4.Penggerakan Kader Institusi MasyarakatPedesaan (IMP)	2022	Orang											Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2*.Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GiziMasyarakat	2022	Dokumen											Bappeda Kabupaten Paser
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.2.*(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	201 Penyimpanan sementara Limbah B3	1.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik	2022	Dokumen	100	25		110000000	13519700		Kabupaten Paser		APBD	Bappeda Kabupaten Paser	
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.1*.Angka Kematian Ibu (AKI).	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2022	Orang	5052	2364		416138986	19512000		Kab. Paser		APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser	
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.2.*(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengeloalaannya	05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	201 Penyimpanan sementara Limbah B3	2.Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	2022	Laporan	20	5		60000000	18650000		Kabupaten Paser		APBD	Bappeda Kabupaten Paser	
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.2.(a).Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2022	Dokumen	100	24,7		42075000895	1,34E+10		Kab. Paser		APBD	Bappeda Kabupaten Paser	
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.b.3*. Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untukUKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.Pengadaan Obat, Vaksin	2022	Paket	151	39		4383910018	73987731		Kab. Paser		APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser	

11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.1.1.(a).Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	201 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2022	Unit Rumah	100	100	2500000000	2,35E+09	PUPR provinsi	apbd provinsi	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.1.1.(a).Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	201 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2022	Unit Rumah	459		13211531550	3,07E+08	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.a.1.(a).Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2022	Unit Rumah	40		1121584200	10270000	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.1.1.(a).Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2022	Ha	33,68		4619105235	98499806	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.2.1.(a).Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	203 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2022	Unit	19310	###	342831340	1,07E+08	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.1.1.(a).Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	201 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2022	Lokasi	14		2,49513E+11	4,58E+09	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	1.Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan BangunanPenampung Air Lainnya	2022	Dokumen							Bappeda Kabupaten Paser
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	2.Penyusunan Rencana Teknis dan DokumenLingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	2022	Dokumen							Bappeda Kabupaten Paser
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	6.Pembangunan Embung dan Penampung AirLainnya	2022	Unit							Bappeda Kabupaten Paser
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	7.Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	2022	Titik							Bappeda Kabupaten Paser
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	8.Pembangunan Unit Air Baku	2022	KM							Bappeda Kabupaten Paser
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	11.Pembangunan Pintu Air/Bendung PengendaliBanjir	2022	Unit							Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.5.1*.Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	205 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.Pengawasan Peredaran dan SertifikasiBenih/Bibit Ternak	2022	Ekor							Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.*Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	212 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.Pengoperasian dan Pemeliharaan PelabuhanPengumpan Lokal	2022	Unit	1500	76		336366650	1,17E+08		Kec. Tanah Grogot, Kec. Kuaro, Kec. Tanjung Harapan	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.(b).Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	213 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	3.Pengoperasian dan Pemeliharaan PelabuhanSungai dan Danau	2022	Unit	3	3		333497030	680000		Kec. Tanah Grogot, Kec. Kuaro	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.2.*Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	203 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2022	Unit	19310	####		342831340	1,07E+08		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	201 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang FungsiHunian	2022	Lokasi	14			2,49513E+11	4,58E+09		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	203 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2022	Unit	19310	####		342831340	1,07E+08		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1.(a).Kondisi mantap jalan nasional	05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	201 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang FungsiHunian	2022	Lokasi	14			2,49513E+11	4,58E+09		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(a).Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	1.Pendataan Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	2022	Orang									Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.Penyediaan Permaknaan	2022	Orang	15	15		25810000	12927000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.Penyediaan Alat Bantu	2022	Orang	33	33		96948500	70440400		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2022	Orang	15	15		30650000	14013600		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser

1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	6.Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2022	Orang	6			32425903	15295000	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser	
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2022	Orang	45			26884800	11040000	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser	
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2022	Liter/Detik	10	10		9705430400	5,51E+09	Kecamatan Babulu dan Sepaku	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1.(a).Kondisi mantap jalan nasional	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2022	Dokumen								Bappeda Kabupaten Paser	
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1.(a).Kondisi mantap jalan nasional	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.Rekonstruksi Jalan	2022	KM								Bappeda Kabupaten Paser	
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1.(a).Kondisi mantap jalan nasional	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	9.Rehabilitasi Jalan	2022	KM								Bappeda Kabupaten Paser	
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1.(a).Kondisi mantap jalan nasional	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	19.Pemeliharaan Rutin Jembatan	2022	M								Bappeda Kabupaten Paser	
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1.(a).Kondisi mantap jalan nasional	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.Rekonstruksi Jalan	2022	KM								Bappeda Kabupaten Paser	
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2022	Dokumen	100	24,7		42075000895	1,34E+10	Kab. Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser	
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.2*.Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	202 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	36.Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2022	Peserta Didik	19171	###		21961078800	2452000	5,09E+09	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.2*.Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2022	Satuan Pendidikan	27	27		9945629630	2,24E+09	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.2.2*.Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2022	Peserta Didik	247	247		36795805	11832340	24963465	TKN Pembina Penajam dan Babulu	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.1*.Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	204 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	17.Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan	2022	Satuan Pendidikan	7	3		340700000	3,41E+08	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	

4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.c.1.*.Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (2. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.)	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2022	Orang	1956	1467	3997636000	1,78E+09	1,64E+09	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.c.1.*.Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (2. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.)	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	202 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2022	Orang	7500	5625	9479245500	4E+09	3,57E+09	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.c.1.*.Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (2. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.)	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2022	Orang	6108	4581	12332920000	5,6E+09	4,99E+09	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(a).Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2022	Dokumen	100	24,7	42075000895	1,34E+10		Kab. Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2022	Orang	5234	2061	898072878	51342000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	Orang	5052	2364	416138986	19512000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2022	Orang	5053	2282	86401000			Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2022	Orang	24096	###	1059312850	29067875		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2022	Orang	32457	1612	495689597			Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2022	Orang	17654	3917	194217000	2760000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser

14.EKOSISTEM LAUTAN	14.b.1.(b).Jumlah nelayan yang terlindungi.	03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	201 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2022	Unit			2500000000			Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2022	Orang	81552	3381	29621120			Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2022	Orang	6482	720	9635000			Kab. Paser	DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2022	Orang	463	235	81255000			Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2022	Orang	1071	813	170845808	7380000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV	2022	Orang	11938	3315	137320000			Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2*.Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	2022	Orang	5053	2282	86401000			Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.2*.Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2022	Orang	24096	####	1059312850	29067875		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
2.TANPA KELAPARAN	2.2.3.Prevalensi anemia pada ibu hamil.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2022	Orang	5234	2061	898072878	51342000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.2*.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlihat	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	Orang	5052	2364	416138986	19512000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.1*. (a) Angka Kematian Balita (AKBa)	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2022	Orang	24096	####	1059312850	29067875		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.1*. (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	2022	Orang	5053	2282	86401000			Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.3*.Kejadian Malaria per 1000 orang	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	80	51,4	2162288744	34600000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.3.(a).Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	80	51,4	2162288744	34600000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser

3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.4*.Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	80	51,4		2162288744	34600000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.5*.Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis)	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	80	51,4		2162288744	34600000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.5*.Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	80	51,4		2162288744	34600000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.1.(b).Prevalensi tekanan darah tinggi	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2022	Orang	81552	3381		29621120			Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.a.1*.Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2022	Dokumen	50	20		910887440	24372500		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.b.1*.Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program Nasional	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2022	Dokumen	80	51,4		2162288744	34600000		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.1.(c).Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2022	Dokumen	50	20		910887440	24372500		Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2022	Orang	189859	###		86464000			Kab. Paser	APBD dan DAK NF	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantiSosial	13.Pemberian Layanan Rujukan	2022	Orang	33	8		150230000	46305418		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantiSosial	12.Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2022	Orang	15	3		41405000	15205000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser

1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	203 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	5.Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2022	Sertifikat											Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	4.Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2022	Orang											Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2022	Orang	15	15	30650000	14013600		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.Penyediaan Permakanan	2022	Orang	15	15	25810000	12327000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.Penyediaan Alat Bantu	2022	Orang	33	33	96948500	70440400		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantiSosial	14.Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2022	Dokumen								Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	201 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.Panjangkauan Anak-Anak Terlantar	2022	Orang	3	3	19971600	6076000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	201 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	2.Rujukan Anak-Anak Terlantar	2022	Orang	3	3	19875000	9180000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	201 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	3.Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	2022	Orang	3		9900000	1975000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	201 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2022	Orang	20	4	42155600	5903600		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantiSosial	3.Penyediaan Permakanan	2022	Orang	6	6	482820000	2,09E+08		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	201 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil(KAT)	1.Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	2022	Keluarga	10	5	48227400	23585000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	201 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil(KAT)	2.Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	2022	Keluarga	10	5	48227400	23585000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	203 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Orang	10		25631750	6355000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	203 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Orang	10	5	48403900	13745000		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser			

1.TANPA KEMISKINAN	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	202 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di DaerahKabupaten/Kota	5.Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2022	Orang	32268		###	1626307200	1,63E+09	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.5.1.*.Upah rata-rata per jam pekerja	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	201 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	2022	Laporan	40	21		51772800	1972630	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.5.2.*.Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	201 Pelayanan antar Kerja di DaerahKabupaten/Kota	2.Pelayanan antar Kerja	2022	Orang	500	382		23080100	17160000	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.5.2.(a).Tingkat setengah pengangguran	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	201 Pelayanan antar Kerja di DaerahKabupaten/Kota	5.Perluasan Kesempatan Kerja	2022	Orang	30	30		47189620	1360000	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.6.1.*.Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	201 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan UnitKompetensi	1.Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkanKlaster Kompetensi	2022	Orang	16			314522837		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
10.BERKURANGNYA KESEJANGKAN	10.4.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	202 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di DaerahKabupaten/Kota	5.Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2022	Orang	32268			1626307200		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.6.1.(a).Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	202 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di DaerahKabupaten/Kota	3.Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	2022	Asosiasi dan Serikat Pekerja	40	11		25023000	4942000	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.3.1.*.Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	203 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar KerjaOnline	2022	Orang	50	25	50	28717700	11190000	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1*.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2022	Laporan	45	38		72904500	28560000	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.1*.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2022	Orang	1000			236105900		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.2*.Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	8.Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2022	Laporan						Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.2*.Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	10.Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2022	Orang	100			46950140		Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.2.(a).Total Fertility Rate (TFR)	02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	2022	Dokumen	1	1		58400800	48000000	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.2.(a).Total Fertility Rate (TFR)	02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	2022	Dokumen	1			93539100	27202300	Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.2.(a).Total Fertility Rate (TFR)	02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2022	Dokumen						Kabupaten Paser	APBD	Bappeda Kabupaten Paser

5.KESETARAAN GENDER	5.6.1*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	2022	Laporan										Bappeda Kabupaten Paser
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	8.Pengendalian Program KKBPK	2022	Laporan	100		40000000			Kabupaten Paser	APBD			Bappeda Kabupaten Paser
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB)	2.Penyediaan Sarana Pendukung OperasionalPKB/PLKB	2022	Unit	50		141145650	9761150		Kabupaten Paser	APBD			Bappeda Kabupaten Paser
5.KESETARAAN GENDER	5.6.1*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB)	4.Penggerakan Kader Institusi MasyarakatPedesaan (IMP)	2022	Orang	288	100	691200000	1,96E+08		Kabupaten Paser	APBD			Bappeda Kabupaten Paser
5.KESETARAAN GENDER	5.6.2*.Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	203 Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Lembaga	10	3	29993750	6897450		Kabupaten Paser	APBD			Bappeda Kabupaten Paser
5.KESETARAAN GENDER	5.6.2*.Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	203 Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2022	Orang	150		29219500			Kabupaten Paser	APBD			Bappeda Kabupaten Paser
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Umum/Sederajat	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.Penambahan Ruang Kelas Baru	2022	Ruang										Bappeda Kabupaten Paser
16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.6.1.(a).Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	202 Koordinasi dan Pengelolaan PerbendaharaanDaerah	11.Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2022	Orang	36		80250000	34463306		Badan Keuangan dan Aset Daerah	APBD			Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.2*.Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional	03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	201 Pengembangan Prasarana Pertanian	1.Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2022	Dokumen	1		559924449	70975000		Kabupaten Paser	APBD Kabupaten Paser			Bappeda Kabupaten Paser
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	3.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2022	Perangkat Daerah	55	26	36985980	26184480		Kabupaten Paser	APBD			Bappeda Kabupaten Paser

FORM 3 Filantropi

Tujuan	Indikator	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Tahun	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi		Alokasi Anggaran Tahun 2022 (Rp. Juta)	Realisasi Anggaran		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksanaan
								Sem 1	Sem 2		Sem 1	Sem 2			
7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.2.(a). Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Energi Baru Terbarukan.Energi Baru Terbarukan	Identifikasi potensi EBT	Rekomendasi Tahapan KPBU Jaringan	2022	1	1	0	1	74000000	37000000	37000000	Kabupaten Kutai Timur	Denmark	GGGI
7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.1.: Rasio elektrifikasi	Energi Baru Terbarukan.Energi Baru Terbarukan	Identifikasi potensi EBT	Penilaian peluang dedesifikasi PLN	2022	1	1	0	1	74000000	30000000	44000000	Kabupaten Kutai Timur	Denmark	GGGI
2. TANPA KELAPARAN	2.3.1.(a). Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani terapan/pertanian/perikanan/tebuan	Program penciptaan insentif untuk model bisnis yang baik.Program penciptaan insentif untuk model bisnis yang baik	Mendorong kerjasama sektor swasta dengan petani swadaya pengelola komoditas berbasis lahan (Kakao)	Kerjasama (MoU) dengan perusahaan (buyer) pengolah komoditi kakao	2022	Kerjasama	3		1	50000000		25000000	Propinsi	USAID	USAID SEGAR
16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAAN YANG TANGGUH	16.8.2.(a). Jumlah instansi pememintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Program peningkatan efektivitas sistem monitoring & respon.Program peningkatan efektivitas sistem monitoring & respon	Penyusunan dan pengesahan Rencana Aksi SP4N LAPOR	Jumlah Lembaga/Instansi Pemerintah yang menerapkan SP4N LAPOR dengan baik	2022	Lembaga/Instansi	1	1		100000000	35000000	60000000	Kutai Timur	USAID	USAID SEGAR
16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAAN YANG TANGGUH	16.6.1.(b). Persentase instansi pememintah dengan akur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pememintah (SAKIP) 2 B	Program peningkatan efektivitas sistem monitoring & respon.Program peningkatan efektivitas sistem monitoring & respon	Mendorong penerapan indikator TERPERCAYA di tingkat kabupaten	Kutai Timur menjadi pilot TERPERCAYA bersama 5 kabupaten lain di Indonesia	2022	Kabupaten	1	1		50000000		50000000	Kutai Timur	USAID	USAID SEGAR
15. EKOSISTEM DARATAN	15.2.1.(a). Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Kajian Tutupan Lahan dan Identifikasi Potensi Biofarmaka pada Hutan Adat Himesa Beriang	Laporan Informasi Tutup dan Potensi Biofarmaka	2022	1	1	0	0	50000000	20000000	30000000	Kabupaten Kutai Barat	Norway	GGGI
15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a). Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Program peningkatan kapasitas Perencanaan Pusat & Daerah.Program peningkatan kapasitas Perencanaan Pusat & Daerah	Pendampingan dan dukungan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup (DDOTLH dan RPPLH)	Dhasilkannya sejumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	2022	dokumen	5	0	1	250000000	1,26E+08	1E+08	Kalimantan Timur (Mahakan Ulu, Kutai Timur, Berau)	USAID	USAID SEGAR
15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a). Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Facilitasi Penyusunan Kebijakan ANKT Kutai Timur	Kontribusi pada Kebijakan Penetapan Areal ANKT Kutim	2022	Peraturan/Kebijakan	1	0	1	50000000	40000000	10000000	Kabupaten Kutai Timur	GEF	KaFor - KLHK/UNDP (Kalimantan Timur)
15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a). Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Facilitasi Penyusunan Kebijakan Untuk Melindungi Areal Berhutan di Luar Kawasan Hutan.	Kebijakan Desa untuk Melindungi Areal Berhutan di wilayah Desa Kabupaten Kutai Timur	2022	Peraturan/Kebijakan	1	0	1	150000000	1E+08	50000000	Desa	GEF	KaFor - KLHK/UNDP (Kalimantan Timur)
15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a). Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Program penerapan standar oleh sektor swasta.Program penerapan standar oleh sektor swasta	Meningkatkan kepatuhan sektor swasta (perkebunan) dalam perlindungan dan pengelolaan HCV	Pelatihan penghtungan HCV yang hilang dan kompensasi & remediasinya akibat pembukaan perkebunan	2022	Perusahaan	3	3		50000000		50000000	Kutai Timur dan Berau	USAID	USAID SEGAR
15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a). Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Program penerapan standar oleh sektor swasta.Program penerapan standar oleh sektor swasta	Pendampingan pada perusahaan dalam menerapkan standar yang mendukung pgunaan lahan berkelanjutan	MoU dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)	2022	Perusahaan	5	2		50000000		25000000	Propinsi	USAID	USAID SEGAR
15. EKOSISTEM DARATAN	15.2.1.(a). Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	Program pengembangan insentif.Program pengembangan insentif	Optimalisasi program MBKM pada perguruan tinggi untuk mendukung pengelolaan Perhutanan Sosial	Meningkatkan kapasitas penyuluh Perhutanan Sosial	2022	Perguruan Tinggi	1	1		100000000		25000000	Propinsi	USAID	USAID SEGAR
15. EKOSISTEM DARATAN	15.3.1.: Proporsi lahan yang terdapat pada terhadap luas lahan keseluruhan	Program peningkatan kapasitas Perencanaan Pusat & Daerah.Program peningkatan kapasitas Perencanaan Pusat & Daerah	Facilitasi analisis perubahan tutupan lahan	Status tutupan lahan	2022	Tahun	2	1		50000000		10000000	Berau	USAID	USAID SEGAR
15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.: Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Program peningkatan kapasitas Perencanaan Pusat & Daerah.Program peningkatan kapasitas Perencanaan Pusat & Daerah	Kajian pembangunan berbasis perencanaan sektor kawasan ekosistem penting habitat badak sumatera	Rancangan pembangunan berbasis perencanaan di sekitar kawasan ekosistem penting habitat badak sumatera (dokumen)	2022	studi	3	1		250000000		50000000	Mahakan Ulu	USAID	USAID SEGAR
15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a). Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Program peningkatan kapasitas Unit Manajemen.Program peningkatan kapasitas Unit Manajemen	Penguatan status legal KEE di Kab. Kutai Timur	Draft SK Bupati tentang Kawasan Ekosistem Penting	2022	Kawasan	2	1		100000000		50000000	Kutai Timur	USAID	USAID SEGAR
15. EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a). Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Program penguasaan lahan yang efisien dan berkelanjutan oleh petani swadaya.Program penguasaan lahan yang efisien dan berkelanjutan oleh petani swadaya	Mendukung implementasi pendaftran komoditas berbasis lahan (Surat Tanda Daftar Budidaya/STDB)	Pendaftaran budidaya petani swadaya	2022	STDB	100	2		100000000		25000000	Propinsi	USAID	USAID SEGAR
13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.2.(a). Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Program Pengurangan Emisi berbasis Lahan.Program Pengurangan Emisi berbasis Lahan	Penyusunan Laporan Pengurangan Emisi	Program Pengurangan Emisi Dilaporkan Tepat Waktu	2022	1	1	0	0	0	0	0	Provinsi Kalimantan Timur	0	GGGI
13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.2.: Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Program pengembangan insentif.Program pengembangan insentif	Pedampingan kebijakan daerah mengembangkan insentif berbasis lingkungan melalui sumber dana DBH-DR	Tersusunnya peraturan bupati tentang Penetapan, Jumlah dan pengurangan dana DBH-DR	2022	Regulasi	3	0	1	100000000	40000000	35000000	Kalimantan Timur (Mahakan Ulu, Kutai Timur, Berau)	USAID	USAID SEGAR
13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.2.2.: Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Program penerapan standar oleh sektor swasta.Program penerapan standar oleh sektor swasta	Pendampingan pada perusahaan dalam menerapkan standar yang mendukung pgunaan lahan berkelanjutan	Jumlah perusahaan yang menerapkan standar pengelolaan lahan berkelanjutan	2022	Perusahaan	2	0	2	100000000	50000000	50000000	Kalimantan Timur (Mahakan Ulu, Kutai Timur)	USAID	USAID SEGAR

FORM4 Pelaku Usaha

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Evaluasi target		
	Kode POJK	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kode Indikator	Nama Indikator	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Waktu	Target	Capaian	Sumber Data
1	-	-	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	Pembukaan Lowongan untuk desa sekitar	Pengurangan Jumlah Pengangguran	Orang	1 tahun	21	5	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
2	-	-	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	1	Bantuan Posyandu	Bantuan diterima oleh Puskesmas	Bulan	1 tahun	12	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
3	-	-	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	1	Perbaikan akses jalan / jembatan	Dapat dilalui Mobil LV /Dumpruck	Paket	1 tahun	9	4	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
4	-	-	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	2	Bantuan Transportasi	Permintaan bantuan terpenuhi	Paket	1 tahun	12	14	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
5	-	-	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	3	Bahan bakar listrik dan air	Bantuan sudah diterima oleh desa	x 100 Liter	1 tahun	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
6	-	-	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	1	Penyuluhan pertanian menetap	Pencegahan pembukaan lahan baru	Kali	1 tahun	2	0	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
7	-	-	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	1	Beasiswa	Pemberian Beasiswa	Desa	1 tahun	40	40	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
8	-	-	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat	2	Penghargaan siswa berprestasi	Pemberian Apresiasi	Desa	1 tahun	72	84	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
9	-	-	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	1	Bantuan kegiatan olahraga dan kesenian	Pemberian Bantuan	Paket	1 tahun	8	10	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
10	-	-	13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	1	Penerapan RIL	Laporan Monev RIL	Kali	1 tahun	1	1	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
11	-	-	13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	2	Pengukuran Kualitas Air	Hasil uji kualitas air sesuai baku mutu	Kali	1 tahun	2	2	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
12	-	-	13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	3	Pengukuran Kualitas Tanah	Hasil uji kualitas tanah sesuai baku mutu	Kali	1 tahun	1	1	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
13	-	-	15.1.1.*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Pencegahan kerusakan/gangguan hutan	Kali	1 tahun	1	1	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
14	-	-	15.1.1.*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	2	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Pencegahan kerusakan/gangguan hutan	Kali	1 tahun	12	11	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
15	-	-	15.1.1.*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	3	Patroli Pengendalian Kebakaran	Pencegahan kebakaran hutan	Kali	1 tahun	12	11	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
16	-	-	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	1	Pemantauan NKT didalam RKT	Analisa vegetasi di Area Produksi	Kali	1 tahun	1	1	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
17	-	-	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	1	Pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada Semua Karyawan	Orang	Persentase	1 tahun	100	100	PT Pucuk Jaya
18	-	Penyuluhan Tanggap Darurat Bencana	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	Penyuluhan Tanggap Darurat Bencana Masyarakat RT 08,09,15 Kariangau	Tidak terdapat korban saat terjadi bencana di wilayah RT 08,09,15 Kariangau	orang	1 tahun	0	0	PT Pertamina Trans Kontinental
19	-	-	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	4	Bantuan solar kendaraan	Bantuan sudah diterima oleh desa	x 1000 Liter	1 tahun	0	52.38	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
20	-	-	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	2	Pemantauan Satwa	Analisa satwa di kawasan lindung	Kali	1 tahun	1	1	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
21	-	-	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	3	Sosialisasi Rencana Kerja/Penyuluhan	Masyarakat memahami apa yang disampaikan	Kali	1 tahun	2	2	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
22	-	-	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	NKK	Terjalan kerjasama dengan masyarakat	x 100 bibit	1 tahun	4	4	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
23	-	-	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	4	Survey Sosial	Laporan Sosial	Kali	1 tahun	1	1	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
24	-	-	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	2	Mendukung kegiatan Penelitian, Magang dan PKL	Akses pendidikan dan penelitian di area kerja	Paket	1 tahun	2	3	PT Sumalindo Lestari Jaya IV

25	-	Program Ekonomi Kreatif masyarakat melalui Hibah Besi Tua	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	Program Ekonomi Kreatif masyarakat melalui Hibah Besi Tua	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1 tahun	5	5	PT. Karya Nusa Eka Daya Pks 1
26	-	Program Ekonomi Kreatif masyarakat melalui pemberian bantuan alat perontok padi	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	Program ekonomi kreatif masyarakat melalui pemberian bantuan alat perontok padi	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1 tahun	5	5	PT. Karya Nusa Eka Pks 2
27	-	Program Ekonomi Kreatif masyarakat melalui Hibah Besi Tua	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	Program Ekonomi Kreatif masyarakat melalui Hibah Besi Tua	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1 tahun	5	5	PT. Karya Nusa Eka Pks 2
28	-	Mengentaskan Kemiskinan	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	Penerimaan Tenaga Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja dengan upah sesuai UMR	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
29	-	Mengentaskan Kemiskinan	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	2	Kemitraan pembangunan perkebunan masyarakat sekitar (Plasma dan PPMD)	Penyerapan petani sawit	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
30	-	Keikutsertaan jamsostek	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	3	Mengikutsertakan seluruh karyawan sebagai peserta jamsostek	Jumlah peserta jamsostek	tahun	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
31	-	Menyediakan tunjangan pangan / beras bagi seluruh karyawan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	4	Pemberian tunjangan Beras/ Makan	Jumlah penerima tunjangan beras	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
32	-	Penyuluhan Ibu Hamil dan Penyediaan Tenaga Kesehatan yang Handal	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	5	Menekan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
33	-	Penyediaan tenaga bidal yang handal	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	6	Penyediaan tenaga bidan terlatih untuk proses persalinan	Ibu hamil yang ditolong	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
34	-	Penyediaan Fasilitas Kesehatan	3.2.1*	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1,000 kelahiran hidup	7	Penyediaan Fasilitas untuk proses persalinan	Ibu hamil yang ditolong	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
35	-	Kegiatan posyandu dan penyediaan makanan bergizi	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	8	Kegiatan posyandu dan penyediaan makanan bergizi	Angka Kematian Balita (AKBa)	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
36	-	Penyuluhan mengenai pola hidup sehat	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	9	Penyuluhan mengenai pola hidup sehat	Angka kematian karena pravelensi tekanan darah tinggi	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
37	-	Penyuluhan kesehatan dan penyediaan kontrasepsi modern	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	10	Penyuluhan kesehatan dan penyediaan kontrasepsi modern	Total pasangan usia subur	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
38	-	Pelayanan Kesehatan yang Handal	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	11	Pelayanan Kesehatan yang Handal	Unmet need pelayanan kesehatan	kasus	1 tahun	0	0	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill

39	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	12	Penyediaan Fasilitas Sekolah TK/ PAUD	Pembangunan Sekolah TK/ PAUD	unit	1 tahun	11	11	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
40	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	13	Penyediaan Fasilitas Sekolah SD	Pembangunan Sekolah SD	unit	1 tahun	10	10	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
41	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	14	Penyediaan Fasilitas Sekolah SMP	Pembangunan Sekolah SMP	unit	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
42	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.c.1.*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (1. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ederajat, (iii) SMP/ederajat, (iv) SMA/ SMK/ederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.)	15	Persentase penyediaan guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi	%	1 tahun	15	15	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
43	-	Kesetaraan Kesempatan Kerja Bagi Perempuan	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial/ Kepemimpinan di Pemerintahan	16	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial	Jumlah karyawan perempuan posisi manajerial	orang	1 tahun	70	70	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
44	-	Penetapan Kebijakan Hak Asasi Manusia	5.6.2.*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	17	Kebijakan terkait dengan kesetaraan gender	Kebijakan/ IM/ SOP	Kebijakan	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
45	-	Penyediaan Fasilitas air bersih bagi perumahan karyawan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	18	Penyediaan Fasilitas air bersih	Jumlah rumah yang mendapatkan fasilitas air bersih	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
46	-	Biogas	7.1.1.*	Rasio elektrifikasi	19	Energi terbarukan Biogas untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat	Jumlah Desa dan KK yang dialiri listrik terbarukan	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
47	-	Biogas	7.1.1.*	Rasio elektrifikasi	20	Energi terbarukan Biogas untuk pemenuhan kebutuhan listrik Internal perusahaan	Pemenuhan kebutuhan listrik internal Perusahaan	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
48	-	Penyediaan Lapangan Kerja	8.3.1.*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	22	Penerimaan Tenaga Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja dengan Upah sesuai UMR	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
49	-	Penyediaan Bank dan Mesin ATM di lingkungan Perumahan dan Kantor	8.10.1.*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	23	Penyediaan Fasilitas Bank dan Mesin ATM	Jumlah Bank dan ATM untuk memenuhi kebutuhan karyawan	unit	1 tahun	3	3	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
50	-	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	9.4.1.*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	24	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Pabrik Kelapa Sawit	Penurunan Emisi GRK	tCO2eq	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
51	-	Penyediaan Fasilitas Perumahan	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	25	Penyediaan Fasilitas Perumahan layak huni	Jumlah rumah layak huni	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
52	-	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	26	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Jumlah Rumah yang dikelola	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
53	-	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang dikelola	27	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Sampah yang dikelola	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill

54	-	Pengelolaan LB3	12.4.2.*	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolannya	28	Pengelolaan LB3 yang dihasilkan dari Perumahan	Jumlah LB3 yang dikelola	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
55	-	Program Bank Sampah	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang daur ulang	29	Daur ulang sampah domestik melalui program Bank Sampah	Timbulan sampah yang di daur ulang	%	1 tahun	99.99	20	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
56	-	Laporan Tahunan Sustainability	12.6.1.*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	30	Laporan Tahunan Sustainability	Publikasi Laporan Sustainability	Laporan	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
57	-	Sertifikasi ISO 14001	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	31	Sertifikasi ISO 14001:2015	Sertifikasi ISO 14001:2015	unit	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
58	-	Program Penurunan Emisi GRK	13.2.2.*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	32	Peayusunan Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan Penurunan GRK	Laporan	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
59	-	Program Penurunan Emisi GRK	13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	33	Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Penurunan Emisi GRK	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
60	-	Pengelolaan Area HCV	15.1.1.*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	34	Pengelolaan Area HCV	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	%	1 tahun	16.48	16.48	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
61	-	Pengelolaan Area HCV	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	35	Pengelolaan Area HCV	Luas Area HCV yang dikelola dengan baik	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
62	-	Mengentaskan Kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	Penerimaan Tenaga Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja dengan upah sesuai UMR	orang	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
63	-	Mengentaskan Kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	2	Kemitraan pembangunan perkebunan masyarakat sekitar (Plasma dan PPMd)	Jumlah penyerapan petani sawit	orang	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
64	-	Mengentaskan Kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	1. Penerimaan Tenaga Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja dengan upah sesuai UMR	Orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
65	-	Mengentaskan Kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	2	2. Kemitraan pembangunan perkebunan masyarakat sekitar (Plasma dan PPMd)	Jumlah penyerapan petani sawit	Orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
66	-	Keikutsertaan Jamsostek	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	3	Mengikutsertakan seluruh karyawan sebagai peserta Jamsostek	Jumlah peserta jamsostek	orang	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
67	-	Keikutsertaan Jamsostek	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	3	1. Mengikutsertakan seluruh karyawan sebagai peserta Jamsostek	Jumlah peserta jamsostek	Orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
68	-	Menyediakan Tunjangan Pangan/ Beras Bagi Seluruh Karyawan	2.1.1.*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	4	Pemberian tunjangan Beras/makan	Jumlah penerima tunjangan beras	orang	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
69	-	Menyediakan Tunjangan Pangan/ Beras Bagi Seluruh Karyawan	2.1.1.*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	4	1. Pemberian tunjangan Beras/ Makan	Menyediakan Tunjangan Pangan/ Beras Bagi Seluruh Karyawan	Orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
70	-	Penyuluhan Ibu Hamil dan Penyediaan Tenaga Kesehatan yang Handal	3.1.1.*	Angka Kematian Ibu (AKI).	5	Menekan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	orang	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
71	-	Penyediaan Tenaga Bidan Yang Handal	3.1.2.*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	6	Penyediaan Tenaga Bidan Terlatih Untuk Proses Persalinan	Ibu Hamil yang ditolong	persen	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
72	-	Penyuluhan Ibu Hamil dan Penyediaan Tenaga Kesehatan yang Handal	3.1.1.*	Angka Kematian Ibu (AKI).	5	1. Menekan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Orang	1 tahun	0	0	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
73	-	Penyediaan Fasilitas Kesehatan	3.1.2.*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan.	7	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Untuk Proses Persalinan	Ibu Hamil yang ditolong	Persen	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
74	-	Penyediaan Tenaga Bidan Yang Handal	3.1.2.*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	6	1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Untuk Proses Persalinan	Ibu Hamil yang ditolong	Orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
75	-	Kegiatan Posyandu dan Penyediaan Makanan Bergizi	3.2.1.*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	8	1. Kegiatan Posyandu dan Penyediaan Makanan Bergizi	Angka Kematian Balita (AKBa)	Orang	1 tahun	99.99	0	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
76	-	Penyuluhan Mengenai Pola Hidup Sehat	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	9	1. Penyuluhan Mengenai Pola Hidup Sehat	Angka Kematian Karena Pravelensi Tekanan Darah Tinggi	Orang	1 tahun	99.99	0	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
77	-	Penyuluhan Kesehatan dan Penyediaan Kontrasepsi Modern	3.7.1.*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	10	1. Penyuluhan Kesehatan dan Penyediaan Kontrasepsi Modern	Total Pasangan Usia Subur	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
78	-	Pelayanan Kesehatan yang Handal	3.8.1.*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	11	1. Pelayanan Kesehatan yang Handal	Unmet need pelayanan kesehatan	Kasus	1 tahun	99.99	0	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill

79	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	12	1. Penyediaan Fasilitas Sekolahn TK/ PAUD	Pembangunan Sekolahn TK/ PAUD	Unit	1 tahun	11	11	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
80	-	Kegiatan Posyandu dan Penyediaan Makanan Bergizi	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	8	Kegiatan Posyandu dan Penyediaan Makanan Bergizi	Angka Kematian Balita (AKBa)	AKBa	1 tahun	0	0	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
81	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	13	2. Penyediaan Fasilitas Sekolahn SD	Pembangunan Sekolahn SD	Unit	1 tahun	10	10	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
82	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	14	3. Penyediaan Fasilitas Sekolahn SMP	Pembangunan Sekolahn SMP	Unit	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
83	-	Penyuluhan Mengenai Pola Hidup Sehat	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	9	Penyuluhan Mengenai Pola Hidup Sehat	Angka Kematian Karena Pravelensi Tekanan Darah Tinggi	Kasus	1 tahun	0	0	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
84	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.c.1.*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (1. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.)	15	1. Persentase penyediaan guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi	%	1 tahun	99.99	15	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
85	-	Penyuluhan Kesehatan dan Penyediaan Kontrasepsi Modern	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	10	Penyuluhan Kesehatan dan Penyediaan Kontrasepsi Modern	Total Pasangan Usia Subur	Persen	1 tahun	70	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
86	-	Penyediaan Fasilitas Kesehatan	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan.	7	1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Untuk Proses Persalinan	Ibu Hamil yang ditolong	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
87	-	Pelayanan Kesehatan yang Handal	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	11	Pelayanan Kesehatan yang Handal	Unmet need pelayanan kesehatan	Kasus	1 tahun	0	0	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
88	-	Kesetaraan Kesempatan Kerja Bagi Perempuan	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/ Kepemimpinan di Pemerintahan	16	1. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Jumlah karyawan perempuan posisi managerial	Orang	1 tahun	70	70	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
89	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	12	Penyediaan Fasilitas Sekolahn TK/ PAUD	Pembangunan Sekolahn TK/ PAUD	Unit	1 tahun	1	1	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
90	-	Penetapan Kebijakan Hak Asasi Manusia	5.6.2.*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	17	1. Kebijakan terkait dengan kesetaraan gender	Kebijakan/ IM/ SOP	Unit	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill

91	-	Penyediaan Fasilitas air bersih bagi perumahan karyawan	6.2.1.*	Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (a)	18	1. Penyediaan Fasilitas air bersih	Jumlah rumah yang mendapatkan fasilitas air bersih	Rumah	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
92	-	Biogas	7.1.1.*	Rasio elektrifikasi	19	1. Energi terbarukan Biogas untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat	Pemenuhan kebutuhan listrik internal Perusahaan	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
93	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	13	Penyediaan Fasilitas Sekolah SD	Pembangunan Sekolah SD	Unit	1 tahun	1	1	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
94	-	Penyediaan Fasilitas Belajar Bagi Anak Usia Sekolah	4.c.1.*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (1. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.)	14	Persentase penyediaan guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi	Guru	1 tahun	20	20	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
95	-	Biogas	7.1.1.*	Rasio elektrifikasi	20	2. Energi terbarukan Biogas untuk pemenuhan kebutuhan listrik Internal perusahaan	Pemenuhan kebutuhan listrik internal Perusahaan	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
96	-	Penetapan Kebijakan Hak Asasi Manusia	5.6.2.*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	15	Kebijakan terkait dengan kesetaraan gender	Kebijakan/ IM/ SOP	Kebijakan	1 tahun	1	1	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
97	-	1. Pembangunan sumber energi terbarukan Biogas	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	21	1. Pembangunan sumber energi terbarukan Biogas	Biogas	Megawat	1 tahun	7	7	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
98	-	Penyediaan Lapangan Kerja	8.3.1.*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	22	1. Penerimaan Tenaga Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja dengan Upah sesuai UMR	Orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
99	-	Penyediaan Fasilitas air bersih bagi perumahan karyawan	6.2.1.*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman (b)	16	Penyediaan Fasilitas air bersih	Jumlah rumah yang mendapatkan fasilitas air bersih	Rumah	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
100	-	Penyediaan Bank dan Mesin ATM di lingkungan Perumahan dan Kantor	8.10.1.*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	23	1. Penyediaan Fasilitas Bank dan Mesin ATM	Jumlah Bank dan ATM untuk memenuhi kebutuhan karyawan	Unit	1 tahun	3	3	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
101	-	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	9.4.1.*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	24	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Pabrik Kelapa Sawit	Penurunan Emisi GRK	tCO2eq	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
102	-	Biogas	7.1.1.*	Rasio elektrifikasi	17	Energi terbarukan Biogas untuk pemenuhan kebutuhan listrik Internal perusahaan	Pemenuhan kebutuhan listrik internal Perusahaan	Persen	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
103	-	Penyediaan Fasilitas Perumahan	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	25	1. Penyediaan Fasilitas Perumahan layak huni	Jumlah perumahan layak huni	Unit	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
104	-	Biogas	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	18	Pembangunan sumber energi terbarukan Biogas	Biogas	Mega Watt	1 tahun	0	0	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
105	-	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	26	1. Pengelolaan sampah rumah tangga	Jumlah Rumah yang terkelola	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
106	-	Penyediaan Lapangan Kerja	8.3.1.*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	19	Penerimaan Tenaga Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja dengan Upah sesuai UMR	Orang	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
107	-	Penyediaan Bank dan Mesin ATM di lingkungan Perumahan dan Kantor	8.10.1.*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	20	Penyediaan Fasilitas Bank dan Mesin ATM	Jumlah Bank dan ATM untuk memenuhi ... karyawan	Unit	1 tahun	1	1	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
108	-	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	27	1. Pengelolaan sampah rumah tangga terkelola	Sampah yang dikelola	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
109	-	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	9.4.1.*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	21	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Pabrik Kelapa Sawit	Penurunan Emisi GRK	tCO2eq	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
110	-	Penyediaan Fasilitas Perumahan	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	22	Penyediaan Fasilitas Perumahan layak huni	Jumlah perumahan layak huni	Rumah/ unit/ pintu	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
111	-	Program Bank Sampah	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang daur ulang	29	1. Daur ulang sampah domestik melalui program Bank Sampah	Timbulan sampah yang di daur ulang	Ton	1 tahun	5	5	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill

112	-	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	23	Pengelolaan sampah rumah tangga	Jumlah Rumah yang terkelola	Persen	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
113	-	Laporan Tahunan Sustainability	12.6.1.*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	30	1. Laporan Tahunan Sustainability	Publikasi Laporan Sustainability	Laporan	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
114	-	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	24	Pengelolaan sampah rumah tangga	Sampah yang dikelola	Persen	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
115	-	Sertifikasi ISO 14001	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	31	1. Sertifikasi ISO 14001:2015	Sertifikat ISO 14001:2015	Sertifikat	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
116	-	Pengelolaan LB3	12.4.2.*	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penganganannya / pengolahannya	25	Pengelolaan LB3 yang dihasilkan dari Perumahan	Jumlah LB3 yang dikelola	Persen	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
117	-	Program Penurunan Emisi GRK	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	32	1. Peyusunan Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan Penurunan GRK	Laporan	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
118	-	Program Penurunan Emisi GRK	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	33	1. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Penurunan Emisi GRK	ICO2eq	1 tahun	1	1	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
119	-	Program Bank Sampah	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	26	Daur ulang sampah domestik melalui program Bank Sampah	Timbulan sampah yang di daur ulang	Ton	1 tahun	5	0	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
120	-	Laporan Tahunan Sustainability	12.6.1.*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	27	Laporan Tahunan Sustainability	Publikasi Laporan Sustainability	Laporan	1 tahun	1	1	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
121	-	Pengelolaan Area HCV	15.1.1.*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	34	1. Penerimaan Tenaga Kerja	Proporsi kawasan huta terhadap total luas lahan	%	1 tahun	16.48	16.48	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
122	-	Sertifikasi ISO 14001	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	28	Sertifikasi ISO 14001:2015	Sertifikat ISO 14001:2015	Sertifikat	1 tahun	1	1	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
123	-	Pengelolaan Area HCV	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	35	1. Pengelolaan Areal HCV	Luas Area HCV yang terkelola dengan baik	Ha	1 tahun	99.99	99.99	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
124	-	Pengelolaan Flora dan Fauna yang masuk dalam Red List Index	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	36	1. Pengelolaan Flora dan Fauna yang masuk dalam Red List Index	Jenis Flora dan Fauna yang dilindungi	Spesies	1 tahun	12	12	PT. Rea Kaltim Plantations-Perdana Oil Mill
125	-	Program Penurunan Emisi GRK	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	29	Peyusunan Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan Penurunan GRK	Laporan	1 tahun	1	1	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
126	-	-	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	1	Program Efisiensi Energi - Penurunan Konsumsi Energi Listrik	%	%	1 tahun	0.2	0.2	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
127	-	-	12.4.2.*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	2	Program Pengurangan Limbah B3	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
128	-	-	7.1.1.*	Rasio elektrifikasi	1	BEST	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Mahakam
129	-	-	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	3	Program Pengurangan Limbah Non B3	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
130	-	-	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	4	Program Pemanfaatan Limbah Non B3	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
131	-	-	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	2	Wasteco	%	%	1 tahun	0.02	0.02	PT. Pertamina Hulu Mahakam
132	-	-	12.4.2.*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	3	MUKZIZAT, SPU Pengurangan Drilling Cutting, BSP Pengurangan Drilling Cutting, TPH Monitoring, E-CEMIL, RISOL, IBU EMAK, Pengelolaan Data Geofisika, BSP Optimasi Start-Up, BESI, Sistem Administrasi Online, Nelayanku Hebat	%	%	1 tahun	0.01	0.01	PT. Pertamina Hulu Mahakam
133	-	-	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	5	Program Penurunan Emisi GRK dan Gas Konvensional	%	%	1 tahun	0.2	0.2	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
134	-	-	6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (b) Air Tanah	6	Program Efisiensi Air Bersih	%	%	1 tahun	0.02	0.02	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
135	-	-	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	4	Optimasi Penggunaan Ban, Selfamo, Pengelolaan Kertas, Pengelolaan sampah Organik, Kardus Layak Pakai, Kaleng Bekas untuk Estetika, Petani Maju 4.0, CPU Beberseh Kampong, BSP Juragan sampah	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Mahakam
136	-	-	14.5.1.*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	7	Program Keanekaragaman Hayati	%	%	1 tahun	0.01	0.01	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
137	-	-	15.3.1.*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	8	Program Keanekaragaman Hayati	%	%	1 tahun	0.31	0.31	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
138	-	-	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	9	Program Pemberdayaan Masyarakat	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
139	-	-	2.2.1.*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	10	Program Pemberdayaan Masyarakat	%	%	1 tahun	0.12	0.12	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)

140	-	-	8.3.1.*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	11	Program Pemberdayaan Masyarakat	%	%	1 tahun	2.05	2.05	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
141	-	-	9.4.1.*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	5	Optimasi Compressor, Optimasi Generator, SUPER HeRO, SeMeDi, How Are You, Efisiensi Marine Transport, Petani Maju 4.0, Wasteco, Patra Amanah, BEST, Nelayanku Hebat, Bekantan Sei Hitam, Beberseh Kampong, Kembang Bersinar	%	%	1 tahun	3.38	3.38	PT. Pertamina Hulu Mahakam
142	-	-	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	12	Program Pemberdayaan Masyarakat	%	%	1 tahun	0.01	0.01	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
143	-	-	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (a) Air Permukaan	6	CPA Efisiensi Drilling Water, BSP Efisiensi Drilling Water, SUNTZU, BSP Efisiensi Domestic Water, BSP Kran Air Tekan, Petani Maju 4.0, Berkah Air Dondang	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Mahakam
144	-	-	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	1	Program Efisiensi Energi - Penurunan Konsumsi Energi Listrik	%	%	1 tahun	0.24	0.24	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
145	-	-	12.4.2.*	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolannya	2	Program Pengurangan Limbah B3	%	%	1 tahun	0.01	0.01	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
146	-	-	15.1.1.*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	6	Green Belt, K-FE Center, Rehabilitasi DAS Kendilo, SETAPUNG	%	%	1 tahun	0.03	0.03	PT. Pertamina Hulu Mahakam
147	-	-	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	3	Program 3R Limbah Non B3	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
148	-	-	14.5.1.*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	7	Nelayan Pesisir Unggul	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Mahakam
149	-	-	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	4	Program Pemanfaatan Limbah Non B3	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
150	-	-	9.4.1.*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	5	Program Penurunan Emisi GRK dan Gas Konvensional	%	%	1 tahun	0.26	0.26	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
151	-	-	6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (b) Air Tanah	6	Program Efisiensi Air Bersih	%	%	1 tahun	0.04	0.04	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
152	-	-	15.1.1.*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	7	Program Keanekaragaman Hayati	%	%	1 tahun	0.06	0.06	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
153	-	-	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri	8	Program Pemberdayaan Masyarakat	%	%	1 tahun	0.07	0.07	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
154	-	-	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	9	Program Pemberdayaan Masyarakat	%	%	1 tahun	0	0	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
155	-	-	1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	10	Program Pemberdayaan Masyarakat	%	%	1 tahun	1	1	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
156	-	-	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	11	Program Pemberdayaan Masyarakat	%	%	1 tahun	0.3	0.3	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
157	-	Program Penurunan Emisi GRK	13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	30	Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Penurunan Emisi GRK	tCO2eq	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
158	-	Pengelolaan Area HCV	15.1.1.*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	31	Pengelolaan Areal HCV	Proporsi kawasan huta terhadap total luas lahan	Persen	1 tahun	13.76	13.76	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
159	-	Pengelolaan Area HCV	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	32	Pengelolaan Areal HCV	Luas Area HCV yang terkelola dengan baik	Ha	1 tahun	99	99	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill

160	-	Pengelolaan Flora dan Fauna yang masuk dalam Red List Index	15.4.1.*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	33	Pengelolaan Flora dan Fauna yang masuk dalam Red List Index	Jenis Flora dan Fauna yang dilindungi	Spesies	1 tahun	6	6	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
161	-	-	6.1.1.*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	1	penyediaan dan penyaluran air minum kemasan (galon) di area Kilang dan Perkantoran RU V	persentase area Kilang dan Perkantoran RU V yang menggunakan air minum kemasan (galon) memenuhi target 99,99%	%	1 tahun	99.99	99.99	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
162	-	-	6.2.1.*	Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (a)	2	penyediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di area Kilang dan Perkantoran RU V	persentase area Kilang dan Perkantoran RU V yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air memenuhi target 99,99%	%	1 tahun	99.99	99.99	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
163	-	-	6.2.1.*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman (b)	3	penyediaan fasilitas sanitasi yang layak di area Kilang dan Perkantoran RU V	persentase area yang memiliki sanitasi yang layak di area Kilang dan Perkantoran RU V memenuhi target 99,99%	%	1 tahun	99.99	99.99	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
164	-	-	6.2.1.*	Persentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) (d)	4	penyediaan akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik area Kilang dan Perkantoran RU V yang berada di 4 titik	jumlah akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik area Kilang dan Perkantoran RU V memenuhi target 4 titik	titik	1 tahun	4	4	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
165	-	-	6.2.1.*	Persentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja (e)	5	penyediaan sistem pengelolaan lumpur tinja area Kilang dan Perkantoran RU V	jumlah sistem pengelolaan lumpur tinja area Kilang dan Perkantoran RU V	titik	1 tahun	4	0	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
166	-	-	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	6	pemantauan proporsi air limbah yang dikelola secara aman menggunakan aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup)	persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman memenuhi target 99,99%	%	1 tahun	99.99	50	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
167	-	-	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (a) Air Permukaan	7	penyaluran air baku untuk keperluan domestik bersumber dari air sungai wain	persentase air baku bersumber dari air permukaan untuk keperluan domestik memenuhi target 99,99%	%	1 tahun	99.99	0	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
168	-	-	6.6.1.*	Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu.	8	pemantauan kualitas badan air (permukaan dan tanah) area operasi Kilang RU V Balikpapan	pengujian kualitas badan air (permukaan dan tanah) berada di bawah baku mutu berdasarkan PP RI No.22 Tahun 2021 Lampiran VI Kelas 2 dan Perda Prov Kaltim No.02 Tahun 2011	titik	1 tahun	12	12	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
169	-	-	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	9	penyediaan rumah yang layak huni bagi Pekerja RU V	persentase rumah yang layak huni bagi Pekerja RU V memenuhi target 99,99% dan memenuhi Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman	%	1 tahun	99.99	99.99	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
170	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	2	Tenaga kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja dengan upah sesuai UMR	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
171	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	3	Kemitraan dengan suplayer lokal	Jumlah suplayer lokal yang bekerjasama dengan perusahaan	suplayer	1 tahun	24	24	PT. Waru Kaltim Plantation
172	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	4	Kemitraan dengan kontraktor loka lokal	Jumlah kontraktor lokal yang bekerjasama dengan perusahaan	Kontraktor	1 tahun	12	12	PT. Waru Kaltim Plantation
173	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	5	Program kemitraan pembangunan/penerimaan TBS Luar	Jumlah masyarakat lokal yang menjual TBS ke PKS	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
174	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	6	Proram peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha	Modal usaha diberikan kepada kelompok GULALI yaitu biaya pengadaan bibit ikan lele dan ikan nila	orang	1 tahun	13	13	PT. Waru Kaltim Plantation
175	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	7	Program ekonomi kreatif masyarakat kelurahan waru	Bantuan fasilitas Rumah UMKM kelurahan Waru	orang	1 tahun	5	5	PT. Waru Kaltim Plantation
176	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	8	Program ekonomi kreatif masyarakat kelurahan waru yaitu kelompok tani USAHA MANDIRI	Bantuan modal usaha budidaya tanaman buah dalam pot PKK mandiri kepada kelompok tani MANDIRI BERSAMA	orang	1 tahun	15	15	PT. Waru Kaltim Plantation
177	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	9	Program ekonomi kreatif berupa bantuan modal usaha kelompok bayangkari kec. waru	Bantuan bibit jambu kristal sebagai program ketahanan pangan	orang	1 tahun	15	15	PT. Waru Kaltim Plantation
178	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	10	Program ekonomi kreatif masyarakat desa Sesulu dalam memanfaatkan pekarangan	Bantuan modal usaha budidaya tanaman buah dalam pot PKK mandiri desa Sesulu	orang	1 tahun	29	29	PT. Waru Kaltim Plantation
179	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	11	Program ekonomi kreatif, bantuan modal usaha budidaya lebah madu klenceng UKM mandiri bersama	Bantuan modal usaha budidaya lebah madu klenceng UKM Mandiri Bersama desa sesulu	orang	1 tahun	9	9	PT. Waru Kaltim Plantation
180	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	12	Program ekonomi kreatif dalam bidang lingkungan	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sempadan sungai	orang	1 tahun	15	15	PT. Waru Kaltim Plantation
181	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	13	Program ekonomi kreatif masyarakat desa sesulu dalam kegiatan menjaga ketahanan pangan	Bantuan modal usaha budidaya ikan lele kelompok IPGUT desa sesulu	orang	1 tahun	29	29	PT. Waru Kaltim Plantation

182	-	Keikutsertaan jamsostek	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	14	Mengikutsertakan seluruh karyawan sebagai peserta Jamsostek	Jumlah peserta jamsostek	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
183	-	Keikutsertaan BPJS Kesehatan	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	15	Mengikutsertakan seluruh karyawan dan keluarga dalam program BPJS Kesehatan	Jumlah karyawan dan keluarga yang mengikuti BPJS kesehatan	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
184	-	Menyediakan tunjangan pangan/beras bagi seluruh karyawan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	16	Pemberian tunjangan beras/makanan	Menyediakan tunjangan pangan/beras bagi seluruh karyawan dan keluarganya	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
185	-	Layanan kesehatan	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	17	Penyediaan layanan kesehatan bagi seluruh karyawan dan keluarganya	Seluruh karyawan dan keluarga dapat mengakses layanan kesehatan di perusahaan	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
186	-	Ketersediaan tenaga medis di perusahaan	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	18	Perusahaan menyiapkan tenaga medis yang terdiri dari Dokter, Perawat dan bidan	Seluruh karyawan dan keluarganya dapat terlayani dalam berobat oleh tenaga medis perusahaan	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
187	-	Keamanan seluruh karyawan dan keluarganya	16.1.4.*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	19	Ketersediaan tenaga keamanan yang terdiri dari security, kepolissin dan TNI	Seluruh karyawan dan keluarganya merasa aman dalam menjalankan seluruh aktifitasnya	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
188	-	Ketersediaan air bersih	6.1.1.*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	20	Program pengelolaan air bersih untuk karyawan	Seluruh karyawan dan keluarganya tidak kekurangan air bersih	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
189	-	Penghijauan untuk udara bersih	9.4.1.*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	21	Program penghijauan sempadan sungai dan seluruh pekarangan rumah	seluruh karyawan dan keluarga mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari polusi	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
190	-	Mengentaskan kemiskinan	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	22	Program penyediaan rumah layak huni	Seluruh karyawan dan keluarga menempati rumah layak huni di lingkungan perusahaan	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
191	-	Penyuluhan ibu hamil dan penyediaan tenaga kesehatan yang handal	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	23	Menekan angka kematian Ibu (AKI)	Angka kematian ibu (AKI)	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
192	-	Penyediaan tenaga bidan yang handal	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	24	Penyediaan fasilitas kesehatan untuk persalinan	ibu hamil yang ditolong	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
193	-	Kegiatan posyandu dan penyediaan PMT sehat	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	25	Kegiatan posyandu dan penyediaan PMT sehat	Angka kematian balita (AKBa)	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
194	-	Kegiatan posyandu dan penyediaan makanan bergizi untuk balita posyandu masyarakat	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	26	Kegiatan posyandu dan penyediaan PMT Posyandu desa Lingkar	Angka kematian balita/stunting	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
195	-	Penyuluhan PHBS	3.2.1*	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	27	Penyuluhan PHBS	Angka kematian karena pravelensi tekanan darah tinggi	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
196	-	Penyuluhan kesehatan dan penyediaan kontrasepsi modern	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	28	Penyuluhan kesehatan dan penyediaan kontrasepsi modern	Total pasangan usia subur	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
197	-	Penyuluhan kesehatan dan penyediaan kontrasepsi modern	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	29	Penyuluhan kesehatan dan penyediaan kontrasepsi modern	Total pasangan usia subur	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
198	-	Pelayanan kesehatan yang handal	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	30	Pelayanan kesehatan yang handal	Ummet need pelayanan kesehatan	Kasus	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
199	-	Penyediaan fasilitas belajar bagi anak usia sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	31	Penyediaan fasilitas sekolah TK/PAUD, fasilitas BUS antar jemput untuk seluruh anak karyawan yang sekolah mulai tingkat TK/SD/SMP?SMA/SMKA	Pembangunan sekolah TK/PAUD dan penyediaan fasilitas BUS antar jemput	unit	1 tahun	12	12	PT. Waru Kaltim Plantation
200	-	Penyediaan fasilitas TPA	4.a.1.*	Proporsi sekolah SMP/MTS/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	32	Penyediaan fasilitas TPA bagi anak karyawan	pembangunan fasilitas TPA	Unit	1 tahun	10	10	PT. Waru Kaltim Plantation

201	-	Beasiswa	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	33	Pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi sekolah ring-1 perusahaan	pemberian beasiswa prestasi	orang	1 tahun	76	76	PT. Waru Kaltim Plantation
202	-	Bantuan fasilitas pendukung sekolah	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	34	Bantuan fasilitas pendukung sekolah ring-1 perusahaan	bantuan fasilitas sekolah ring-1	unit	1 tahun	6	6	PT. Waru Kaltim Plantation
203	-	Insentif Guru eksternal	4.a.1.*	Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	35	Program pemberian insentif guru sekolah eksternal	bantuan insentif guru	orang	1 tahun	12	12	PT. Waru Kaltim Plantation
204	-	Peningkatan kompetensi guru sekolah binaan	4.c.1.*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (1. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.)	36	Presentasi guru yang memiliki kompetensi dalam proses PBM dan pengelolaan sekolah	guru yang memenuhi kualifikasi	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
205	-	Penyediaan fasilitas kesehatan	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	37	penyediaan fasilitas kesehatan untuk persalinan	ibu hamil yang ditolong	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
206	-	Kesetaraan kesempatan kerja bagi perempuan	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial/ kepemimpinan di perusahaan publik/swasta	38	proporsi perempuan yang bekerja	Jumlah karyawan perempuan yang bekerja sebagai karyawan tetap	orang	1 tahun	86	86	PT. Waru Kaltim Plantation
207	-	Penetapan kebijakan HAM	5.6.2.*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	39	Kebijakan terkait dengan kesetaraan gender dan HAK pekerja	Kebijakan/IKA/SOP	unit	1 tahun	1	1	PT. Waru Kaltim Plantation
208	-	Penyediaan lapangan kerja	8.3.1.*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	40	Penerimaan tenaga kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja dengan upah UMR	orang	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
209	-	Penyediaan Bank dan Mesin ATM dilindungi perusahaan dan kantor	8.10.1.*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	41	Penyediaan fasilitas bank dan ATM	Jumlah ATM yang bisa di akses oleh karyawan	unit	1 tahun	1	1	PT. Waru Kaltim Plantation
210	-	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	9.4.1.*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	42	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Pabrik Kelapa Sawit	Penurunan Emisi GRK	IC02eq	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
211	-	Pengelolaan HCV	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	43	Pengelolaan Area HCV	Luas Area HCV yang dikelola dengan baik	Ha	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
212	-	Pengelolaan Area HCV	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	44	Penerimaan tenaga kerja	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	%	1 tahun	17	17	PT. Waru Kaltim Plantation
213	-	Program penurunan Emisi GRK	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	45	Penyusunan dokumentasi laporan penurunan Emisi GRK	Laporan Penurunan GRK	Laporan	1 tahun	1	1	PT. Waru Kaltim Plantation
214	-	Sertifikasi ISPO	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	46	Sertifikasi ISPO	Sertifikasi ISPO	Sertifikat	1 tahun	1	1	PT. Waru Kaltim Plantation
215	-	Laporan Tahunan Sustainability	12.6.1.*	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutannya	47	Laporan Tahunan Sustainability	Publikasi laporan Tahunan Sustainability	Laporan	1 tahun	1	1	PT. Waru Kaltim Plantation
216	-	Program bank Sampah	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang daur ulang	48	Daur ulang sampah domestik melalui program bank sampah	% sampah daur ulang	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation

217	-	Pengelolaan sampah rumah tangga	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang dikelola	49	Pengelolaan sampah rumah tangga	% sampah yang dikelola	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
218	-	Pengelolaan sampah rumah tangga	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	50	Pengelolaan sampah rumah tangga	Jumlah rumah yang dikelola	%	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
219	-	Penyediaan fasilitas perumahan	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	51	Penyediaan fasilitas perumahan	Jumlah layk huni bagi seluruh karyawan	unit	1 tahun	99.99	99.99	PT. Waru Kaltim Plantation
220	-	-	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	10	Pengelolaan sampah rumah tangga	persentase rumah tangga area Rumah Dinas Pertamina yang terlayani pengelolaan sampah	%	1 tahun	99.99	99.99	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan
221	0	0	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1	Kebijakan Perusahaan	Semua karyawan wajib terdaftar dalam Program Jaminan Sosial	%	1 tahun	100	90	PT Maju Kalimantan Hadapan
222	0	0	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di (a) kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	2	Beasiswa Siswa Berprestasi	Menjamin anak-anak di wilayah perusahaan dan desa sekitar menyelesaikan pendidikan	%	1 tahun	100	100	PT Maju Kalimantan Hadapan
223	0	0	4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SD atau sederajat)	3	Kegiatan Ekstra Kurikuler	Tidak terjadi perundungan dalam wilayah sekolah	%	1 tahun	100	100	PT Maju Kalimantan Hadapan
224	0	0	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	4	Pembangunan Sarana Pengolahan Limbah (IPAL)	Tidak terjadi pencemaran limbah	%	1 tahun	100	100	PT Maju Kalimantan Hadapan
225	0	0	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	5	Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Memastikan semua areal yang teridentifikasi dapat dikelola	Ha	1 tahun	138.96	138.96	PT Maju Kalimantan Hadapan
226	0	Program WSS Saliki merupakan program pengembangan masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Saliki tahun 2016 dan dikembangkan oleh VICO Indonesia yang kini menjadi PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PT PHSS) pada tahun 2017 bersama dengan PUPR melalui program Pamsimas. Upaya pemenuhan air bersih bagi Desa Saliki di Kecamatan Muara Badak ini bukan pekerjaan yang mudah. Lokasi Desa Saliki yang berada di paling ujung secara geografis membuat aliran pipa PDAM tidak mampu mencakup wilayah Desa Saliki sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih dengan membuat sumur bor secara mandiri, namun air yang dihasilkan tidak layak untuk dikonsumsi dan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Hingga Pemerintah Desa menginisiasi kegiatan pemenuhan air bersih secara mandiri melalui program WSS Saliki. Kini WSS Saliki telah mampu mengaliri air bersih ke lebih dari 370 rumah di empat RT di Desa Saliki. Dikelola secara mandiri oleh BUMDes Mekar Sejati, kegiatan pengelolaan air bersih mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan memberi sumbangsih kepada Desa Saliki secara luas. Program WSS Saliki menjadi alternatif dan inovasi sosial dalam penyediaan air bersih berbasis masyarakat karena menggunakan	6.1.1.*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	0	Water Supply System (WSS) Saliki	Jumlah RT yang terlayani	4	0 tahun	4	4	PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga
227	0	Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN	1.1.1.*	Tingkat kemiskinan ekstrim	0	Pengadaan /Pemasangan SR Listrik 50 Rumah	Rasio Elektrifikasi Listrik Non PLN	50%	2022 tahun	1	1	PT Welarco Subur Jaya II
228	0	Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN	7.1.1.*	Rasio elektrifikasi	0	Pengadaan /Pemasangan SR Listrik 50 Rumah	Rasio Elektrifikasi Listrik Non PLN	50%	2 tahun	1	1	PT Multi Sarana Avindo
229	0	a	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (a) Air Permukaan	1	Time Based Flow System	Efisiensi penggunaan air bersih	%	1 tahun	90	90	PT. Pertamina EP Asset 5 - Field Sangatta
230	0	a	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (a) Air Permukaan	1	Production Water Flow System	Efisiensi Air	%	1 tahun	95	95	PT. Pertamina EP Asset 5 - Field Sanga-Sanga
231	0	PROPER Biru	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	0	PROPER Biru Rank	ketaatan	%	1 tahun	1	1	Chevron Makasar Ltd - Daerah Operasi Laut Dalam
232	0	Pengelolaan limbah Padat	14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut	0	Pengelolaan limbah Padat	Limbah terbuang ke laut	kg	1 tahun	0	0	Chevron Makasar Ltd - Daerah Operasi Laut Dalam
233	0	Inventarisasi timbulan LB3	12.4.2.*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	0	Inventarisasi timbulan LB3	timbulan Limbah B3	ton	1 tahun	5	2.25	Chevron Makasar Ltd - Daerah Operasi Laut Dalam

234	0	Inventarisasi GRK	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	0	Timbulan GRK terinventarisasi	GRK	%	1 tahun	1	1	Chevron Makasar Ltd - Daerah Operasi Laut Dalam
235	0	Inventarisasi GRK	13.2.2.*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	0	Inventarisasi GRK	% inventory	%	1 tahun	1	1	Chevron Makasar Ltd - Daerah Operasi Laut Dalam
236	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	3	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Persentase sampah nasional yang terkelola	%	1 tahun	80	80	PT. Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara
237	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	4	Pengujian secara berkala setiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun terhadap kualitas udara yang disebabkan kegiatan perusahaan yaitu pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun	Indeks Kualitas Udara	tanpa satuan (indeks 0-1)	1 tahun	0	0	PT. Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara
238	12.12.123	0	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1	Penurunan Angka Kematian Ibu dengan program Peningkatan Kapasitas bidan	Kematian ibu persalinan karena preeklamsia	Orang/1000 (mil)	1 tahun	30	0	RSUD Abdoel Wahab Sjahranie
239	3.8	Kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan balita dan Penyakit Menular	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	2	Kegiatan distribusi Vaksin Covid 19 dan BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional)	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	%	1 tahun	100	100	PT. Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara
240	6. c. 3)c)	Program Ekonomi Kreatif masyarakat melalui pemberian bantuan alat perontok padi	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	Program Ekonomi Kreatif masyarakat melalui pemberian bantuan alat perontok padi	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1 tahun	5	5	PT. Karya Nusa Eka Daya Pks 1
241	6.1	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	1	Pengolahan limbah cair industri minyak dan gas	Hasil Uji Pengolahan Air Limbah sebelum dibuang ke badan sungai tidak melebihi Baku Mutu.	%	1 tahun	100	100	PT. Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara
242	6.2.1.c	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	6.2.1.*	Persentase rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (C)	2	Pembuatan Toilet Sehat di area Monumen Juang Kel. Sangasanga Muara	Tidak ada lagi warga atau pengunjung yang buang air di sembarang tempat/sungai.	%	2022 tahun	95	80	PT Alhasanie
243	6.c.3)c)	Program ekonomi kreatif masyarakat melalui pemberian bantuan mesin caring batik sablon	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	Program ekonomi kreatif masyarakat melalui pemberian bantuan mesin caring batik sablon	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.	23	1 tahun	23	23	PT. Waru Kaltim Plantation
244	8.5.1	1	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	1	penerapan upah minimum sesuai peraturan pada pekerja	Upah minimum sesuai dengan regulasi	%	2022 tahun	95	75	PT Alhasanie
245	9.1	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	5	Rehab Sarana Rumah Kaum Masjid/Marbot, Rehab Posyandu, Semenisasi TK AL-IMAN	Insfrastruktur	%	1 tahun	100	100	PT. Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara

Form 5 Pelaku Usaha

No.	Tujuan SDGs	Indikator SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Instansi Pelaksana Pemerintah / Non Pemerintah
			Kategori	Deskripsi		
1.	TANPA KEMISKINAN	1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim	Keuangan	Sedang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi sehingga realisasi tidak sepenuhnya tercapai.	Menunggu kondisi eksternal dan internal membaik	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
1.	TANPA KEMISKINAN	1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	sumber daya manusia	RT 08,09,15 Karangau tidak terjangkau oleh pemadam kebakaran, dimana paling cepat memiliki waktu tempuh sekitar 30 menit	Melakukan penyuluhan untuk mengurangi dan menanggulangi apabila terjadi bencana	PT Pertamina Trans Kontinental
3	TANPA KEMISKINAN	1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Keuangan	Sedang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi sehingga realisasi tidak sepenuhnya tercapai dan terlambat.	Menunggu kondisi eksternal dan internal membaik	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
4	TANPA KEMISKINAN	1.4.1* Proporsi penduduk/tanah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Keuangan	Sedang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi sehingga realisasi terlambat.	Menunggu kondisi eksternal dan internal membaik	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
5	TANPA KEMISKINAN	1.4.1* Proporsi penduduk/tanah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Kelembagaan	Kesepakatan yang diputuskan oleh masyarakat sering kali tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan	Menegosiasikan jika hasil rapat bisa disetujui apabila seluruh pihak telah setuju/mayoritas perusahaan yang membantu	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
6	TANPA KEMISKINAN	1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Keuangan	Sedang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi sehingga realisasi tidak sepenuhnya tercapai.	Menunggu kondisi eksternal dan internal membaik	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
7	TANPA KEMISKINAN	1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Kelembagaan	Masyarakat belum bisa memutuskan lahan untuk kegiatan NKK dan rencana pelelelahan bersama kedepannya	Perlu ada pendampingan dari agar ada kejelasan dan penerimaan dari masyarakat	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
8	TANPA KEMISKINAN	1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim	Operasional	kegiatan ekonomi pertanian belum efisien (membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam panen/masih memakai alat perontok padi konvensional	Memberikan bantuan Mesin Alat perontok padi kepada setiap desa ring 1	PT. Karya Nusa Eka Daya Pks 1
9	TANPA KEMISKINAN	1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim	Hibah	Penambahan income pasif warga masyarakat	pemberian ijin pengambilan (Hibah) besi tua	PT. Karya Nusa Eka Daya Pks 1
10	TANPA KEMISKINAN	1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim	Operasional	kegiatan ekonomi pertanian belum efisien (membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam panen/masih memakai alat perontok padi konvensional	Memberikan bantuan Mesin Alat perontok padi kepada setiap desa ring 1	PT. Karya Nusa Eka Pks 2
11	TANPA KEMISKINAN	1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim	Hibah	Penambahan income pasif warga masyarakat	pemberian ijin pengambilan (Hibah) besi tua	PT. Karya Nusa Eka Pks 2
12	11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.1 (b).Persentase sampah nasional yang terkelola	Pengumpul/ Pengumpul Bank Sampah	Kesulitan dalam mencari pengumpul sampah (bank sampah) karena lokasi perusahaan di bagian hulu, sehingga akan terkendala dalam biaya pengangkutan yang tidak sebanding dengan nilai ekonomis.	Bekerjasama dengan Pemerintah Desa sekitar untuk membentuk kelembagaan bank sampah (pengumpul/ pengumpul)	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
13	11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.1 (b).Persentase sampah nasional yang terkelola	Kelembagaan	Belum ada kelembagaan di masyarakat yang mengelola sampah	Melakukan koordinasi untuk pengelolaan sampah dengan memberdayakan masyarakat	PT. Pertamina Hulu Mahakam
14	11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.1 (b).Persentase sampah nasional yang terkelola	Pengumpul/Pengumpul Bank Sampah	Kesulitan dalam mencari pengumpul sampah (bank sampah) karena lokasi perusahaan di bagian hulu, sehingga akan terkendala dalam biaya pengangkutan yang tidak sebanding dengan nilai ekonomis.	Bekerjasama dengan Pemerintah Desa sekitar untuk membentuk kelembagaan bank sampah (pengumpul/pengumpul)	PT. Rea Kaltim Plantations- Perdana Oil Mill
15	11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.1 (b).Persentase sampah nasional yang terkelola	Pengumpul/Pengumpul Bank Sampah	Kesulitan dalam mencari pengumpul sampah (bank sampah) karena lokasi perusahaan di bagian hulu, sehingga akan terkendala dalam biaya pengangkutan yang tidak sebanding dengan nilai ekonomis.	Bekerjasama dengan Pemerintah Desa sekitar untuk membentuk kelembagaan bank sampah (pengumpul/pengumpul)	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
16	11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.1 (b).Persentase sampah nasional yang terkelola	Pengumpul/pengumpul Bank Sampah belum maksimal	Kesulitan dalam mencari pengumpul sampah (bank sampah) karena lokasi perusahaan yang jauh sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar	Bekerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk membuat lembaga bank sampah dan DLH kabupaten	PT. Waru Kaltim Plantation
17	15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Operasional	Gangguan dari masyarakat sekitar, yaitu perambahan hutan (Areal HCV), dimana masyarakat menganggap bahwa areal tersebut merupakan areal terlarang	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan pelibatan masyarakat dalam menjaga areal HCV	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
18	15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Operasional	Gangguan dari masyarakat sekitar, yaitu perambahan hutan (Areal HCV), dimana masyarakat menganggap bahwa areal tersebut merupakan areal terlarang	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan pelibatan masyarakat dalam menjaga areal HCV	PT. Rea Kaltim Plantations- Perdana Oil Mill
19	15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Operasional	Gangguan dari masyarakat sekitar, yaitu perambahan hutan (Areal HCV), dimana masyarakat menganggap bahwa areal tersebut merupakan areal terlarang	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan pelibatan masyarakat dalam menjaga areal HCV	PT. Sasana Yudha Bakti- Satria Oil Mill
20	15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Operasional	Gangguan dari masyarakat sekitar, yaitu perambahan hutan (Areal HCV) dimana masyarakat menganggap bahwa areal tersebut merupakan areal terlarang	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan pelibatan masyarakat dalam menjaga areal HCV	PT. Waru Kaltim Plantation
21	2.TANPA KELAPARAN	2.4.1 (a). Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Keuangan	Sedang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi sehingga realisasi tidak tercapai.	Menunggu kondisi eksternal dan internal membaik	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
22	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	Rujukan	Karena RSUD AWS sebagai rujukan maka pasien yang dirujuk adalah pasien dengan kondisi yang tidak bisa ditangani oleh RS rujukan baik dalam hal keterbatasan SDM dan Saprasnya	1. Optimalisasi sistem rujukan yang sudah ada 2. Peminatan RS jejaring rujukan 3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan kota dan provinsi 4. Optimalisasi pengelolaan data monitoring dan Evaluasi	RSUD Abdoel Wahab Sjahranie
23	4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.2 (a).Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/ sederajat	sumber daya manusia	Masih banyak nya SDM Lokal yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki ijazah Sekolah dikarenakan putus sekolah	Menagadakan Paket C Gratis bekerja sama dengan Pihak Pemerintah Desa	PT Multi Sarana Awindo
24	4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	sumber daya manusia	Masih banyak nya SDM Lokal yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki ijazah Sekolah dikarenakan putus sekolah	Program paket C gratis	PT Welarco Subur Jaya II
25	4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.1 (a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	sumber daya manusia	Masih perlu terus meningkatkan angka partisipasi kasar Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Peningkatan APK melalui Pengembangan Prodi, Sosialisasi, kerjasama	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
26	6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1.* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Regulasi	Belum ada aturan yang mengatur secara tertulis terkait pelanggaran/masyarakat yang tidak membayar tagihan air dari WSS skala	Perlu adanya aturan yang dibuat secara resmi terkait hal-hal yang perlu diatur seperti sanksi dan lain sebagainya.	PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga
27	6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.1.* Persentase rumah tangga yang memiliki praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (C)	sumber daya manusia	Kurangnya kesadaran akan kebersihan toilet umum tersebut oleh warga, dan kurangnya pemeliharaan	Melakukan sosialisasi kebersihan toilet serta kerja bakti pembersihan fasilitas umum toilet.	PT Ahasanie
28	6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.4.2 (a). Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya. (a) Air Permukaan	Keuangan	a	a	PT. Pertamina EP Asset 5 - Field Sangatta
29	8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.5.1.* Upah rata-rata per jam pekerja	sumber daya manusia	Ditemukan banyak jumlah ketidakhadiran pekerja, dikarenakan absen/mangkir	Sosialisasi aturan kerja kepada karyawan/pekerja oleh departemen HRD, pemberian sanksi, dll	PT Ahasanie

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT Pertamina Trans Kontinental
Nama Tujuan SDGs	:	1.TANPA KEMISKINAN
Program	:	Penyuluhan Tanggap Darurat Bencana Masyarakat RT 08,09,15 Kariangau Balikpapan
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Aula SDN 021 Balikpapan Barat dan SMPN 21 Balikpapan, 2022-11-24
Latar Belakang	:	Terjadi banyak sekali bencana kebakaran di kota Balikpapan dalam kurun watu 1 tahun terakhir
Proses Pelaksanaan	:	Memberikan materi terkait keluarga tangguh bencana, mengajarkan cara pemadaman api sederhana menggunakan selimut dan APAR
Hasil	:	Banyak warga yang berhasil memadamkan api menggunakan selimut dan APAR
Dampak	:	Warga dapat lebih sigap apabila terjadi kebakaran
Tantangan	:	Mengajarkan masyarakat awam terkait teori api
Pembelajaran	:	Warga menerima informasi materi dengan baik
Peluang Replikasi	:	Dapat diulang kembali dengan sasaran yang berbeda

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Nama Tujuan SDGs	:	1.TANPA KEMISKINAN
Program	:	Transmigran Mandiri
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Samarinda, 2022-12-01
Latar Belakang	:	Masalah SDM yang belum memiliki ketrampilan dalam pemanfaatan SDA yang tersedia
Proses Pelaksanaan	:	Telah Disusun dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
Hasil	:	Mengadakan kegiatan sosialisasi tentang peningkatan SDM masyarakat transmigrasi
Dampak	:	-
Tantangan	:	-
Pembelajaran	:	-
Peluang Replikasi	:	-

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT. Karya Nusa Eka Daya Pks 1
Nama Tujuan SDGs	:	1.TANPA KEMISKINAN
Program	:	Program Ekonomi Kreatif masyarakat melalui pemberian bantuan alat perontok padi
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	desa Long wehea, bea nehas, diak lay, Jak luay, dea beq, 2022-11-08
Latar Belakang	:	kegiatan ekonomi pertanian belum efisien (membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam panen/masih memakai alat perontok padi konvensional
Proses Pelaksanaan	:	Memberikan bantuan Alat berupa mesin perontok padi yang diserahkan perwakilan manajemen PT Karyanusa Eka Daya kepada perwakilan desa ring 1
Hasil	:	Pemberian bantuan mesin alat panen perontok padi untuk mempercepat panen
Dampak	:	1.ucapan teimakasih kepada seluruh jajaran pimpinan PT KED atas bantuan alat perontok padi. 2.haerul selaku pj kades menyambut gembira dengan adanya bantuan alat tersebut mengingat warga desa long wehea biasanya pada saat panen harus menyewa.
Tantangan	:	penjadwalan dan sistem operasional diserahkan kepada desa
Pembelajaran	:	Efisiensi waktu dan tenaga
Peluang Replikasi	:	memberikan bantuan alat pertanian lainnya

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT. Karya Nusa Eka Daya Pks 1
Nama Tujuan SDGs	:	1.TANPA KEMISKINAN
Program	:	program hibah besi tua
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	desa Long wehea, bea nehas, diak lay, Jak luay, dea beq, 2022-01-10
Latar Belakang	:	kesejahteraan masyarakat yang belum merata
Proses Pelaksanaan	:	Memberikan hibah besi tua kepada desa ring 1
Hasil	:	meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dampak	:	meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Tantangan	:	penjadwalan pengambilan besi tua
Pembelajaran	:	Hibah
Peluang Replikasi	:	setiap bulan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT. Karya Nusa Eka Pks 2
Nama Tujuan SDGs	:	1.TANPA KEMISKINAN
Program	:	Program Ekonomi Kreatif masyarakat melalui pemberian bantuan alat perontok padi
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	desa Long wehea, bea nehas, diak lay, Jak luay, dea beq, 2022-11-08
Latar Belakang	:	Proses panen padi masih menggunakan alat konvensional
Proses Pelaksanaan	:	Penyerahan bantuan mesin perontok padi dari perwakilan manajemen PT karyanusa eka daya kepada Perwakilan desa ring 1
Hasil	:	Mempercepat proses panen
Dampak	:	1.ucapan teimakasih kepada seluruh jajaran pimpinan PT KED atas bantuan alat perontok padi. 2.haerul selaku pj kades menyambut gembira dengan adanya bantuan alat tersebut mengingat warga desa long wehea biasanya pada saat panen harus menyewa.
Tantangan	:	penjadwalan dan operasional diserahkan ke pihak desa
Pembelajaran	:	efisiensi waktu dan tenaga
Peluang Replikasi	:	penyerahan alat bantuan lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT. Karya Nusa Eka Pks 2
Nama Tujuan SDGs	:	1.TANPA KEMISKINAN
Program	:	program hibah besi tua
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	desa Long wehea, bea nehas, diak lay, Jak luay, dea beq, 2022-02-10
Latar Belakang	:	kesejahteraan masyarakat belum merata
Proses Pelaksanaan	:	melaksanakan program penyerahan hibah besi tua kepada perwakilan masyarakat desa
Hasil	:	meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dampak	:	meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Tantangan	:	penjadwalan pengambilan besi tua
Pembelajaran	:	hibah
Peluang Replikasi	:	bulanan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	2.TANPA KELAPARAN
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022-12-08
Latar Belakang	:	Banyaknya permasalahan gizi yang ada di Kab Penajam paser utara
Proses Pelaksanaan	:	Pertemuan pengampu program dan pertemuan/rapat dengan penentu kebijakan di masing-masing OPD yang terlibat dalam pengentasan masalah masalah gizi
Hasil	:	Terdapat kesepakatan dan hasil Bersama dalam penentuan kebijakan serta peningkatan indikator-indikator program KIA dan Gizi
Dampak	:	Pelayanan kesehatan terkhusus Program KIA dan Gizi meningkat
Tantangan	:	Penggunaan anggaran yang terikat dengan ketentuan juknis yang mengikat
Pembelajaran	:	Termanfaatkannya data-data indikator program KIA dan Gizi
Peluang Replikasi	:	Bisa di replika di daerah lain

Sosialisasi, Advokasi, Koordinasi, Pembinaan, dan Monitoring Evaluasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan kegiatan dalam bentuk rapat koordinasi, pemantauan dan monitoring.

- Hasil : Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) sehingga dapat menerapkan pola konsumsi pangan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.
- Dampak : Jika masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi pangan diharapkan dapat meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari aspek konsumsi dan dapat mengurangi jumlah angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur
- Tantangan : Sejauh ini pemanfaatan pangan lokal hanya sampai pada tahapan menjadi bahan dasar berbentuk tepung-tepungan untuk kudapan. Kedepannya diharapkan dapat mensubstitusi atau mengganti beras dan terigu. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan "nasi non beras" yang dapat disandingkan dengan "nasi beras" sebagai menu makan utama dalam pola makan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan khususnya berbasis tepung bahan baku lokal dan pengembangan pengolahan tepung lokal menjadi pangan "intermediate" berbasis sumberdaya lokal.
- Pembelajaran : Untuk itu perlu upaya untuk mendorong penyediaan bahan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu dalam mendukung pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Dengan demikian diharapkan pola konsumsi masyarakat dapat kembali kepada budaya dan potensi sumber pangan setempat, sehingga pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan wilayah setempat. Hal lain yang tidak kalah penting perlu dilakukan adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat tentang diversifikasi pangan.
- Peluang Replikasi : Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahun untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang diversifikasi pangan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

- Sumber Data : Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
- Nama Tujuan SDGs : 2.TANPA KELAPARAN
- Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Lokasi dan Waktu: Kabupaten/Kota, 2022-07-04
Kegiatan
- Latar Belakang : Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat tentang diversifikasi pangan perlu dilakukan promosi dengan melakukan gerakan/kampanye diversifikasi pangan, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan ini ingin mengangkat eksistensi penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat agar masyarakat lebih mengenal tentang pangan yang beranekaragam, terutama pangan lokal dan bagaimana mereka dapat mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Secara lebih luas, promosi melalui gerakan diversifikasi pangan melibatkan seluruh stakeholder terkait dan memanfaatkan channel yang sudah berkembang di masyarakat agar dapat terinternalisasi dengan baik kepada khalayak serta diharapkan dapat meningkatkan pamor produk pangan lokal yang saat ini sudah cukup banyak hadir dimasyarakat, namun belum terinfokan kepada masyarakat luas, terutama investor.
- Proses Pelaksanaan : Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll) :
1) Gerakan Diversifikasi Pangan dilaksanakan dalam rangka promosi dan sosialisasi penganekaragaman pangan kepada masyarakat di daerah (provinsi) yang mencakup:
• Penyiapan materi dan bahan promosi
• Gerakan diversifikasi pangan, untuk aneka produk olahan pangan lokal dengan memanfaatkan produk hasil kegiatan Pengolahan Pangan Lokal berbasis Pengembangan Industri Pangan Nasional (PIPAN) di wilayah yang telah berhasil mengembangkannya dan mengganti nasi dari beras dengan nasi dari beras analog (sagu/mocaf/jagung/ubi ungu/dll) dan atau dengan mie yang terbuat dari pangan lokal setempat.
• Gerakan pengenalan menu BZSA dan Gerakan/kampanye sejenis.
2)

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Nama Tujuan SDGs	:	2.TANPA KELAPARAN
Program	:	Program Rakontekda
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Balikpapan, 2022-03-01
Latar Belakang	:	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah merupakan kegiatan rapat untuk menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) pembangunan peternakan dan kesehatan hewan provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten/kota dan merupakan upaya sinergitas program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan baik nasional, regional Kalimantan dan Kalimantan Timur.
Proses Pelaksanaan	:	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022 menghadirkan narasumber dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementan RI, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
Hasil	:	memberikan manfaat bagi pembaca, peserta, dan masyarakat luas sebagai penggerak sektor peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur, kedepannya sesuai Visi dan Misi Gubernur yaitu "Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat."
Dampak	:	Peningkatan Koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Tantangan	:	masih adanya COVID maka terbatasnya peserta.
Pembelajaran	:	Dengan adanya ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan baik nasional, regional Kalimantan dan Kalimantan Timur.
Peluang Replikasi	:	Dapat direplikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT Kaltim Prima Coal
Nama Tujuan SDGs	:	2.TANPA KELAPARAN
Program	:	Program Konfigurasi Kolam Pengendap – Solusi Cerdas Cegah Pencemaran – Tingkatkan Produksi Pangan
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, 2022-01-01
Latar Belakang	:	<p>Lahan pertanian di sebagian besar Desa Sepaso Barat mengandalkan air dengan sistem tadah hujan dan air dari sungai Segadur. Saat musim kemarau, air sangat sulit didapatkan dan sebaliknya saat musim penghujan, air melimpah namun seringkali debit yang tidak terkontrol menjadi sumber masalah bagi petani yakni banjir. Selain itu, lahan pertanian kurang subur dimana pH tanah antara 3.5 - 3.8, nilai pH juga dipengaruhi sistem irigasi yang mengadakan air limpasan rawa yang asam. Produktifitas pada lahan sawah rata-rata 4,5 ton GKP/ha dan panen hanya bisa dilakukan setahun sekali tergantung curah hujan. Selain lahan sawah, produktifitas tanaman hortikultura juga rendah karena faktor yang sama dan pada beberapa lahan memiliki kondisi yang berbukit sehingga pengairan sulit terjangkau.</p>
Proses Pelaksanaan	:	<p>Tahap awal program adalah identifikasi masalah dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa setempat. Setelah melakukan identifikasi masalah, PT. KPC melakukan pemetaan potensi yang akhirnya mencetuskan ide untuk memanfaatkan air pasca pengendapan untuk kebutuhan masyarakat. Inovasi dengan pembangunan pond Kecubung diinisiasi sejak 2018 dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah pada tahap pra konstruksi. Pembangunan atau tahap konstruksi sendiri dilakukan pada tahun 2020 selama 5 bulan. Pembangunan pond Kecubung dengan konfigurasi kolam pengendali debit dengan labirin dan saluran pengalih aliran permukaan berfungsi sebagai pengatur debit ketika air tambang melewati fasilitas kolam ini. Kolam pengendapan untuk daerah penambangan adalah kolam yang dibuat untuk menampung dan mengendapkan partikel air limpasan yang berasal</p>

dari daerah penambangan maupun daerah sekitar penambangan yang nantinya air tersebut akan dibuang menuju tempat pembuangan seperti sungai, rawa, danau, dan lain-lain. Pembangunan kolam pengendap dengan konfigurasi pengendali debit dan labirin dengan pendekatan daerah tangkapan air merupakan salah satu komitmen PT. KPC dalam rangka melakukan kegiatan penambangan yang baik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari operasi penambangan batubara PT. KPC. Dalam melakukan pengelolaan air tambang PT KPC mengacu pada pedoman operasi baku SOP Pengelolaan Kualitas Air Sistem Clustering dan SOP Pengelolaan Air Tambang Skala Midterm. Kolam ini tidak hanya menjaga kepatuhan di setiap kondisi, kolam pengendap dengan konfigurasi baru ini juga memberi manfaat besar pada masyarakat petani yang berada di hilir kolam pengendap. Petani yang awalnya mengandalkan tadah hujan dalam bertani, dengan adanya kolam konfigurasi baru (pond Kecubung) ini maka petani bisa bertani sepanjang tahun dengan mengandalkan air dari kolam pengendap KPC. Terdapat 3 Kelompok Tani (KT) yang mendapatkan manfaat yaitu KT. Bina Warga, KT. Harapan Jaya, dan KT. Harapan baru dengan kegiatan mayoritas tanaman padi sawah dan sebagian hortikultura atau tanaman semusim.

Hasil : Melalui program ini, PT. KPC berhasil membuat inovasi pengelolaan air tambang yang telah sesuai dengan baku mutu dan dapat bermanfaat bagi petani di sekitar aliran air sungai Segadur. Inovasi juga menyelesaikan masalah kekurangan air yang dialami petani. Sebelumnya, petani sawah padi yang hanya dapat menanam dan panen padi sebanyak 1 kali dalam setahun, kini bisa mencapai 5 kali dalam 2 tahun. Hasil pengolahan air telah memenuhi standar baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 113/2003 dan Perda Kaltim 02/2011.

Dampak : Setelah adanya pond Kecubung, petani disekitar aliran air mendapatkan air secara kontinyu sepanjang musim dengan kualitas air yang sesuai baku mutu. Tim PT. KPC rutin melakukan pengecekan kualitas air dan normalisasi sungai Segadur serta saluran-saluran irigasi di lahan pertanian. Para petani saat ini dapat menanam sepanjang tahun tanpa khawatir kekurangan air, bahkan petani sawah dapat menanam hingga 5 kali dalam 2 tahun (sebelumnya hanya mampu sekali setahun). Melalui pelatihan dan

pendampingan tim KPC, petani aktif membuat pupuk kompos dan MOL untuk menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat. Petani mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia dan insektisida kimia. Kampanye bertani ramah lingkungan tidak hanya dilaksanakan pada kelompok tani sekitar aliran Sungai Segadur, melainkan juga ke kelompok tani lain seperti KWT, Bhineka Tunggal Ika, KT. Mandiri Jaya, dan beberapa kelompok tani lainnya. Kampanye ini akan terus diperluas ke seluruh kelompok tani yang ada di Kecamatan Bengalon.

- Tantangan : Pada awal program, perlu beberapa kali dilakukan ujicoba untuk menjaga kualitas air keluaran dari pond. Tantangan terbesar adalah curah hujan yang tinggi serta tidak menentu sehingga banyak penyesuaian yang harus dilakukan berdasarkan kondisi cuaca. Penambahan saluran irigasi juga perlu dilakukan untuk memperluas jangkauan air ke lahan pertanian yang baru dibuka.
- Pembelajaran : Sebagai pembelajaran, perlu dilakukan pemetaan daerah-daerah pertanian yang mempunyai potensi untuk dibuka ke depannya, sehingga pembangunan saluran irigasi bisa diarahkan ke daerah tersebut.
- Peluang Replikasi : Replikasi program ini dapat dilakukan di lokasi-lokasi pond sekitar wilayah kerja PT. KPC yang berdekatan dengan daerah pertanian masyarakat. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada tambang lain yang ingin melakukan replikasi program ini.

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Provinsi Kalimantan Timur, 2022-12-23
Latar Belakang	:	Implementasi Program P4GN mengacu pada Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024, ditetapkan Perjanjian Kinerja BNNP Kaltim Tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan
Proses Pelaksanaan	:	Proses Kegiatan dilakukan mengikuti Petunjuk Operasional Kerja TA. 2022 dengan Dana Sumber DIPA 2022
Hasil	:	Program P4GN Tercapai sesuai dengan target yang di tetapkan pada perjanjian kinerja baik untuk Bidang Rehabilitasi, Pemberantasan Dan Pencegahan serta Advokasi
Dampak	:	Penjangkauan Area Provinsi Kalimantan Timur yang belum di sentuh oleh Program P4GN
Tantangan	:	Anggaran dan SDM yang terbatas serta luasnya Wilayah Kalimantan Timur
Pembelajaran	:	Perlunya Inovasi Program dan Pembaharuan Regulasi di Setiap Bidang Pendukung P4GN
Peluang Replikasi	:	Belum Ada

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-10-01
Latar Belakang	:	Jangkauan yang luas hingga ke tingkat RT sehingga harus dibantu oleh PPKBD dan Sub
Proses Pelaksanaan	:	Diskusi, simulasi, tanya jawab
Hasil	:	Tersampainya informasi sampai tingkatan terkecil
Dampak	:	Tercapainya tujuan yang sudah direncanakan
Tantangan	:	SDM dan penguasaan IT yang masih kurang
Pembelajaran	:	Tatap muka
Peluang Replikasi	:	Dimungkinkan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-10-01
Latar Belakang	:	Informasi yang terus berkembang sehingga mengharuskan PKB dan Kader terus mengupdate ilmu dan pengetahuannya
Proses Pelaksanaan	:	Diskusi, simulasi, tanya jawab
Hasil	:	Mendapatkan tenaga PKB dan kader yang handal dan siap pakai
Dampak	:	Tercapainya sasaran dan target yang telah ditentukan
Tantangan	:	Peran para pemangku kebijakan masih belum maksimal
Pembelajaran	:	Tatap muka
Peluang Replikasi	:	Dimungkinkan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pengendalian Penduduk
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-10-01
Latar Belakang	:	Penyediaan Data yang Akurat dan lengkap
Proses Pelaksanaan	:	Mengelola dan Melaporkan Data setiap Kecamatan
Hasil	:	Tersedianya data melalui aplikasi secara berkala
Dampak	:	Tersajikannya data dalam aplikasi
Tantangan	:	Jaringan Internet yang tidak stabil
Pembelajaran	:	Tatap Muka
Peluang Replikasi	:	Dimungkinkan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pengendalian Penduduk
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-10-01
Latar Belakang	:	Penyediaan Data yang Akurat dan lengkap
Proses Pelaksanaan	:	Mengelola dan Melaporkan Data setiap Kecamatan
Hasil	:	Tersedianya data melalui aplikasi secara berkala
Dampak	:	Tersajikannya data dalam aplikasi
Tantangan	:	Jaringan Internet yang tidak stabil
Pembelajaran	:	Tatap Muka
Peluang Replikasi	:	Dimungkinkan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pengendalian Penduduk
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-02-06
Latar Belakang	:	Data Output dari kegiatan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang harus diverifikasi dan validasi untuk diolah di Balai Penyuluh KB
Proses Pelaksanaan	:	Mencetak data dan Pengadaan Sarpras SIGA (PC)
Hasil	:	Data Keluarga Resiko Stunting dapat tervalidasi dan adanya Sarpras SIGA (PC) di Balai Penyuluh KB Kec.Waru
Dampak	:	Terindikasinya Keluarga yang beresiko stunting dan tidak beresiko stunting
Tantangan	:	SDM harus berhati - hati dalam meverifikasi data dilapangan
Pembelajaran	:	Tatap Muka
Peluang Replikasi	:	Dimungkinkan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-02-01
Latar Belakang	:	UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga.
Proses Pelaksanaan	:	Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Ke Kelompok Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh PKB Di Wilayah Binaan Masing-Masing.
Hasil	:	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Poktan (BKB, BKR, BKL, PPKS).
Dampak	:	Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
Tantangan	:	Tidak Ada.
Pembelajaran	:	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
Peluang Replikasi	:	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-09-05
Latar Belakang	:	UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga.
Proses Pelaksanaan	:	Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP.
Hasil	:	Tersedianya Saprasi Media KIE Dalam Rangka Pencegahan Stunting.
Dampak	:	KIE Untuk Penunjang Penurunan Stunting.
Tantangan	:	Belum Terpenuhinya Secara Maksimal Saprasi Kelompok Kegiatan.
Pembelajaran	:	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dalam Penurunan Stunting.
Peluang Replikasi	:	Dapat Dilakukan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	RSUD Abdoel Wahab Sjahranie
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	RSUD AWS, 2022-12-11
Latar Belakang	:	Masih tingginya angka kematian ibu di tingkat provinsi dengan hasil sensus pada target capaian indikator kehidupan sehat dan sejahtera adalah 80 per 100.000 kelahiran hidup
Proses Pelaksanaan	:	Bersinergi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kota/kabupaten maupun provinsi
Hasil	:	Hasil capaian di RSUD AWS sudah mencapai target dibandingkan dengan angka target MDGs 35/1000 kelahiran hidup dan SDGs 70 per 100.000 kelahiran hidup pada target provinsi kal-tim tahun sampai tahun 2023
Dampak	:	Menurunnya angka kematian ibu dan meningkatnya derajat kesehatan reproduksi
Tantangan	:	1. Koordinasi antar jejaring dan rumah sakit rujukan yang masih belum optimal 2. Akses untuk mencapai pusat rujukan yang jauh dan memerlukan waktu yang lama 3. Pemerataan tenaga kesehatan yang masih kurang 4.Permasalahan di luar RS seperti rujukan tidak jalan, pengetahuan petugas kesehatan yang kurang dll
Pembelajaran	:	Kecepatan dan ketepatan dalam proses merujuk ke RS rujukan
Peluang Replikasi	:	Tetap menjadi program prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/ SDGs tahun berikutnya

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022-12-08
Latar Belakang	:	Karena adanya Kebijakan dari Kementrian Kesehatan bahwa adanya vaksin Baru PCV ke dalam Imunisasi Rutin, untuk mencegah penyakit Pneumoni pada Bayi Balita
Proses Pelaksanaan	:	Penyampaian Materi dari Narasumber dan Kunjungan ke PUskesmas yang telah melaksanakan Imunisasi PCV
Hasil	:	Pelaksanaan Imunisasi PCV mulai dilaksanakan di Kab PPU pada bulan Oktober
Dampak	:	meningkatkan Derajat Kesehatan Bayi dan Balita
Tantangan	:	Kurangnya Sosialisasi pada Masyarakat tentang vaksin PCV sehingga masyarakat belum paham manfaat pemberian vaksin PCV
Pembelajaran	:	Workshop Surveilans dan Imunisasi dalam rangka Introduksi vaksin PCV
Peluang Replikasi	:	Bisa di replika di daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022-12-08
Latar Belakang	:	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
Proses Pelaksanaan	:	Jaminan Kesehatan Daerah dalam Program BPJS PD - Pemda dan Kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan bagi penduduk yang tidak dapat terjaminkan dalam program BPJS PD-Pemda
Hasil	:	Terjaminnya penduduk Penajam Paser Utara dalam Program BPJS PD – Pemda pada bulan November tahun 2022 sebanyak 76.505 Jiwa dan terlaksananya Fasilitas Kesehatan pada 5 (lima) fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan
Dampak	:	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tantangan	:	Peningkatan Jumlah penduduk terhadap Cakupan layanan dan penyediaan anggaran Daerah
Pembelajaran	:	Dengan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah dalam Program BPJS PD - Pemda dan Kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan bagi penduduk yang tidak dapat terjaminkan dalam program BPJS PD-Pemda maka Terjaminkanya Penduduk Penajam Paser Utara dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Peluang Replikasi	:	Bisa di replika di daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022-12-08
Latar Belakang	:	Masih tingginya kasus malaria, rendahnya tingkat pengetahuan, penduduk yg bekerja di hutan, sarana mobilisasi yg sulit, sdm kesehatan yg masih terbatas, maka perlu dilakukan " PELATIHAN KADER MALARIA POPULASI KHUSUS & PELATIHAN IRS
Proses Pelaksanaan	:	Dilaksanakan di Puskesmas & Perusahaan
Hasil	:	Telah terlatih 20 Kader Populasi Khusus dan 10 Tenaga IRS di Perusahaan
Dampak	:	Bisa melakukan, KIE, pengobatan Malaria ringan di wilayah terdepan dan melakukan penyemprotan insektisida di rumah
Tantangan	:	Rekrutmen tenaga populasi khusus, perlu waktu, sulit, karena sebagian latar pendidikan yang kurang
Pembelajaran	:	Waktu pembelajaran minimal 2 hari
Peluang Replikasi	:	Bisa di replika di daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022-12-08
Latar Belakang	:	<p>Pelayanan Kesehatan usia produktif merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Daerah. Pelayanan Kesehatan usia produktif mencakup deteksi dini penyakit tidak menular, pemeriksaan darah, skrining kanker dan Edukasi/Konseling. Maka perlu adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor serta adanya peran aktif masyarakat melalui kegiatan bersumber dari masyarakat yaitu Posbindu PTM. Masyarakat berperan menjadi kader yang dapat menggerakkan antusias masyarakat lainnya untuk berkunjung ke Posbindu PTM. Oleh karena itu disetiap desa/kelurahan diperlukan kader yang nantinya dilatih oleh Petugas Kesehatan untuk mampu melakukan pengukuran faktor resiko PTM dan juga Edukasi ke masyarakat. Dalam hal ini dinas Kesehatan menjadi fasilitator pembentukan kader di desa/kelurahan, serta melakukan koordinasi, dan monitoring evaluasi pelaksanaan program PTM khususnya yang dapat meningkatkan cakupan SPM Usia Produktif</p>
Proses Pelaksanaan	:	Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke Puskesmas untuk melaksanakan koordinasi, monitoring & evaluasi, kunjungan ke Posbindu PTM untuk melakukan supervisi,dan melaksanakan pembentukan kader Posbindu PTM
Hasil	:	Sebanyak 11 Puskesmas dilakukan Koordinasi, Monitoring Evaluasi & Supervisi Posbindu, serta Pembentukan kader Posbindu PTM sebanyak 30 Orang dari 2 Kelurahan
Dampak	:	Adanya peningkatan capaian SPM Usia Produktif di Triwulan 3 & 4, dan adanya kader terlatih Posbindu PTM di Kelurahan Waru dan

Keluarahan Penajam

- Tantangan : Target SPM Usia Produktif adalah 100% namun ketersediaan BMHP PTM terbatas. selain itu antusias wanita usia 30 s.d 50 tahun untuk melakukan skrining kanker masih sangat rendah.
- Pembelajaran : Petugas Puskesmas mampu memberikan pelayanan usia produktif sesuai standar dan kader Posbindu PTM mampu melakukan pengukuran faktor resiko PTM serta bersedia ikut terlibat dalam pelaksanaan Posbindu PTM di Masyarakat
- Peluang Replikasi : Bisa di replika di daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022-12-08
Latar Belakang	:	<p>Pada masa pandemi COVID-19, orang yang mengidap penyakit tidak menular yang selanjutnya disebut Penyandang PTM merupakan populasi yang sangat rentan terinfeksi, bahkan disertai jumlah kematian yang cukup tinggi. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa dari 140 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, sebanyak 30 persen mengidap hipertensi. Hipertensi juga merupakan kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gejala COVID-19 yang parah. Hal itu karena hipertensi bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang dan merupakan salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung. Berdasarkan hal tersebut, di pandang perlu melaksanakan Edukasi kepada masyarakat tentang Pencegahan & Pengendalian Covid-19 bagi Penyandang Hipertensi.</p>
Proses Pelaksanaan	:	Kegiatan dilaksanakan dengan paparan dari narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi
Hasil	:	Sebanyak 15 Orang di edukasi terkait pencegahan dan pengendalian covid-19 bagi penyandang Hipertensi
Dampak	:	Diharapkan masyarakat khusus bagi penyandang Hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan selalu menjaga Kesehatan dirinya, patuh pada protokol kesehatan, konsumsi obat rutin, rutin ke Fasyankes terdekat, melakukan aktifitas fisik dan istirahat yang cukup
Tantangan	:	Merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik harus dilakukan terus menerus sehinga butuh waktu untuk dapat meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

Pembelajaran : masyarakat memahami cara mencegah covid 19 dan mengendalikan tekanan darah bagi peyandang Hipertensi khususnya di masa pandemi covid-19

Peluang Replikasi : Bisa direplika di daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022-12-08
Latar Belakang	:	Penyediaan Obat dan Bahan Habis Pakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan Obat dan Bahan Habis Pakai di sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas)
Proses Pelaksanaan	:	Pengadaan secara E katalog dan E Purchasing
Hasil	:	Terlaksananya Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai melalui E Purchasing
Dampak	:	Terpenuhinya kebutuhan akan Obat dan Bahan Habis Pakai di puskesmas
Tantangan	:	Masih banyaknya penyedia yang tidak dapat memenuhi ketersediaan obat dikarenakan kekosongan bahan baku dan masa produksi yang tidak sesuai dengan perjanjian
Pembelajaran	:	Belanja dengan e katalog dan e pusrcahsing memang aman dari pemeriksaan karena sesuai dengan harga yang dicantumkan di e katalog, akan tetapi untuk pemenuhan barangnya tidak sesuai dengan realisasi
Peluang Replikasi	:	Bisa di replika di daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT Multi Sarana Avindo
Nama Tujuan SDGs	:	3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Program	:	Program Pelayanan Posyandu Balita & lansia Dsn. Margamulya
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Desa purwajaya Kec. Loa Janan, 2022-01-15
Latar Belakang	:	Perbaikan gizi Bayi, dan lansia Dsn . Margamulya
Proses Pelaksanaan	:	Jadwal Rutin Setiap Bulan Pelayanan Posyandu Di Dsn. Margamulya
Hasil	:	Ibu Hamil mendapatkan tambahan susu , bayi terhindar dari stunting dan lansia tercukupi kebutuhan gizinya .
Dampak	:	Masyarakat lebih sehat
Tantangan	:	Tidak ada
Pembelajaran	:	Lebih memperhatikan kesehatan masyarakat
Peluang Replikasi	:	menjadi program rutinitas setiap bulan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT Welarco Subur Jaya II
Nama Tujuan SDGs	:	4.PENDIDIKAN BERKUALITAS
Program	:	Program Sosialisasi Bahaya Narkoba oleh BNN Samarinda di SMPN 5 Loa Janan
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Desa Loa Janan Ulu, 2022-10-10
Latar Belakang	:	Untuk Mencegah Banyak nya kasus Penyalahgunaan Narkoba Di kalangan Sekolah .Agar dapat mencetak siswa/si generasi Emas Di Masa Depan .
Proses Pelaksanaan	:	Pengajuan Permohonan Pemateri Dari BNN Prov. Samarinda Untuk Memberikan Materi Penyuluhan Bahaya Narkoba . Surat Permohonan Kepada Sekolah Untuk menghadirkan siswa& siswi di Kegiatan Penyuluhan .
Hasil	:	Guru dapat mengetahui siswa /si yang berpotensi melakukan penyalahgunaan narkoba dan dapat segera melakukan konseling kepada siswa nya .siswa diajak kerja sama dan bisa melaporkan ke pada guru jika terdapat kasus tsb di sekitar mereka .
Dampak	:	Siswa /si dapat mengetahui bahaya dari penyalahgunaan Narkoba dan juga menambah wawasan siswa /si dan dewan guru
Tantangan	:	Membuat siswa /si Berani Jujur pernah melakukan penyalahgunaan Narkoba. dan Dewan Guru bisa lebih koperaktif dalam permasalahan tsb.
Pembelajaran	:	Dapat mengetahui bagaimana kasus ini bisa masuk di kalangan sekolah . penyebab dan Faktor " Utama nya .
Peluang Replikasi	:	Dapat Dilakukan Penyuluhan Setahun 1x disetiap sekolah

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT Multi Sarana Avindo
Nama Tujuan SDGs	:	4.PENDIDIKAN BERKUALITAS
Program	:	Program Apresiasi Beasiswa Siswa / si berprestasi SMPN 5 Loa Janan
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Desa Loa Janan Ulu, 2022-11-10
Latar Belakang	:	Agar lebih banyak mencetak siswa /si berprestasi dan bisa menjadi Masyarakat yang membawa kemajuan Desa nya .
Proses Pelaksanaan	:	Pendataan Siswa Berprestasi di SMPN 5 Loa janan
Hasil	:	Siswa /si Lebih Terpacu semangat belajar dan mempertahankan kan prestasi dan juga menambah wawasan .
Dampak	:	Siswa / Siswi lebih semangat dalam belajar dan mempertahankan prestasi yang sudah diraih
Tantangan	:	masih banyak pelajar yang butuh semangat belajar dan metode belajar yang lebih inovatif dari guru .
Pembelajaran	:	Memberikan motivasi kepada siswa dan siswi agar lebih bersemangat
Peluang Replikasi	:	Dapat di lakakukan setiap setahun sekali

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Nama Tujuan SDGs	:	4.PENDIDIKAN BERKUALITAS
Program	:	Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2022
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Samarinda, 2022-12-01
Latar Belakang	:	Pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa Kabupaten / kota yang diberlakukan Pemerintah Daerah Setempat
Proses Pelaksanaan	:	Telah disusun dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
Hasil	:	Melaksanakan Kegiatan ini pada tahun Berikutnya
Dampak	:	-
Tantangan	:	-
Pembelajaran	:	-
Peluang Replikasi	:	-

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	5.KESETARAAN GENDER
Program	:	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-03-01
Latar Belakang	:	Memfasilitasi Kegiatan Organisasi Perempuan Untuk Bisa Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah.
Proses Pelaksanaan	:	Penyusunan Jadwal Rapat Koordinasi dan Dilanjutkan Pembuatan Surat Undangan Serta Pengadaan Makan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi GOW dan DWP
Hasil	:	Terlaksananya Rapat Koordinasi GOW dan DWP.
Dampak	:	Tersusunnya Kegiatan dan Program Kegiatan GOW dan DWP.
Tantangan	:	Meningkatkan Peran Aktif Organisasi Perempuan Dalam Mengisi Pembangunan.
Pembelajaran	:	Meningkatkan Rasa Perduli dan Saling Dukung Sesama Anggota dan Terjalannya Silaturahmi.
Peluang Replikasi	:	Saling Aplikatif dan Dapat Dilakukan.

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	5.KESETARAAN GENDER
Program	:	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-01-04
Latar Belakang	:	Melaksanakan Hari-Hari Besar Nasional dan Meningkatkan Jiwa Nasionalisme Organisasi Perempuan.
Proses Pelaksanaan	:	Panduan Pelaksanaan Diterbitkan Lalu Disiapkan Administrasi Pelaksanaan Sesuai Panduan.
Hasil	:	Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Oleh Organisasi Perempuan.
Dampak	:	Membuat program dan kegiatan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan baik bagi anggota maupun masyarakat luas sebagai rangkaian peringatan Hari Hari Besar Nasional.
Tantangan	:	Meningkatkan peran aktif organisasi perempuan dalam mengisi pembangunan.
Pembelajaran	:	Meningkatkan jiwa nasionalisme dan semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan.
Peluang Replikasi	:	Sangat aplikatif dan dapat di lakukan.

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	5.KESETARAAN GENDER
Program	:	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-03-01
Latar Belakang	:	Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan melalui penguatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rangka mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin.
Proses Pelaksanaan	:	Mengadvokasi Pihak desa Kelurahan dan membentuk kelompok usaha perempuan sesuai potensi yang ada di Desa/Kelurahan.
Hasil	:	Terbentuknya kelompok Desa Prima di 10 Desa dan Kelurahan.
Dampak	:	Meningkatnya pendapatan perempuan melalui usaha yang dikelola serta mendapat pembinaan dari Dinas DP3AP2KB.
Tantangan	:	Melakukan kerjasama dengan Dunia Usaha untuk mencari peluang pemasaran dan permodalan usaha.
Pembelajaran	:	Meningkatkan jiwa berdikari bagi perempuan di Desa dan Kelurahan.
Peluang Replikasi	:	Dapat dilakukan.

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	5.KESETARAAN GENDER
Program	:	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-01-09
Latar Belakang	:	Untuk menyamakan persepsi terkait Konsep Pengarusutamaan Gender dan Implementasi sesuai tupoksi dan kewenangan SKPD masing - masing
Proses Pelaksanaan	:	Menyiapkan administrasi berupa undangan dan menyampaikan ke masing-masing anggota Pokja PUG,Focal Poin dan Tim Teknis
Hasil	:	Menyamakan persamaan persepsi Konsep pengarusutamaan Gender bagi POKJA PUG, Tim Teknis dan Focal Point PUG di setiap SKPD
Dampak	:	Masing-masing POKJA PUG, Tim Teknis PUG dan Focal Point SKPD mampu melaksanakan tugas dan fungsinya
Tantangan	:	Konsep Pengarusutamaan Gender tidak dianggap sama pentingnya denga isu lain, dan adanya egosektoral dan keilmuan sehingga perspektif gender masih kurang familier
Pembelajaran	:	Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan Peningkatan SDM untuk mengintegrasikan gender dalam siklus proses pembangunan
Peluang Replikasi	:	Melakukan inovasi yang dapat meningkatkan pemahaman tentang kosep gender dalam proses pembangunan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
Program	:	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air munim
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kecamatan Babulu dan Sepaku, 2022-07-27
Latar Belakang	:	Kualitas air tanah yang kurang bagus dengan tingginya kesadahan
Proses Pelaksanaan	:	membangun sarana dan prasarana air baku dengan kapasitas 10 ltr / detik
Hasil	:	Meningkatnya jumlah KK yang memiliki akses aman dan layak air minum
Dampak	:	Meningkatnya kesehatan masyarakat
Tantangan	:	Kontur wilayah dan sumber air baku yang minim
Pembelajaran	:	Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait penentuan titik air tanah yang dapat dikelola sebagai air baku
Peluang Replikasi	:	Dapat direplikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT. Pertamina EP Asset 5 - Field Sangatta
Nama Tujuan SDGs	:	6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
Program	:	Time Based Flow System
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Fasilitas Produksi, 2022-12-11
Latar Belakang	:	Penggunaan air baku dan air bersih untuk fasilitas produksi cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 40% dari total penggunaan air secara keseluruhan. Jumlah yang cukup besar ini mendorong perusahaan untuk mencari efektifitas penggunaan air dan faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka konsumsi air ini.
Proses Pelaksanaan	:	Program yang kami lakukan yaitu perubahan aliran suplai air yang dipompakan menyesuaikan dengan kebutuhan air di setiap unit. Program ini dapat membuat terjadinya perubahan perilaku dimana yang sebelumnya proses pemompaan air bersih dilakukan selama 24 jam sehari. Sementara dengan adanya program ini terjadi penurunan waktu proses pemompaan menjadi 18 jam sehari. Pada program ini dilakukan penambahan komponen yaitu dengan melakukan perubahan aliran suplai air dengan Tied Flow System selama 6 jam dari Water Treatment Plant (WTP) ke fasilitas produksi ((6 Gathering Station (GS-1, GS-2, GS-3, GS-4, GS-5, GS-6), Main Gathering Station (MGS), Water Injection Plant (WIP) dan Loading Terminal (LT)).
Hasil	:	Value creation yang diperoleh dari program ini adalah mampu mengefisiensikan penggunaan air sebesar 108.467,05 m ³ pada tahun 2020 dan Penghematan Biaya inovasi ini sebesar Rp 2.717.099.602,50 sejak tahun 2020.
Dampak	:	Program ini dapat membuat terjadinya perubahan perilaku dimana yang sebelumnya proses pemompaan air bersih dilakukan selama 24 jam sehari. Sementara dengan adanya program ini terjadi penurunan waktu proses pemompaan menjadi 18 jam sehari.
Tantangan	:	Peningkatan efisiensi penghematan air setiap tahunnya

Pembelajaran : Menghemat air akan membawa berkah untuk kehidupan

Peluang Replikasi : AAA

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT Alhasanie
Nama Tujuan SDGs	:	6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
Program	:	Pembuatan Jamban/Toilet Sehat
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Monumen Juang Sangasanga Muara, 2022-11-30
Latar Belakang	:	Kurangnya fasilitas toilet umum di sekitar lokasi Monumen Juang Sangasanga Muara
Proses Pelaksanaan	:	Pembangunan Jamban/Toilet sehat, kemudian serahterima kepada pihak kelurahan dan warga Sangasanga Muara.
Hasil	:	Fasilitas Jamban/Toilet sehat sudah bisa diakses dan dipergunakan oleh warga secara gratis.
Dampak	:	Kebersihan dan Sanitasi yang baik dan layak.
Tantangan	:	Kurangnya kesadaran tentang kebersihan fasilitas toilet/jamban oleh pengguna dan kurang terawat.
Pembelajaran	:	Dengan adanya Jamban/Toilet umum ini, mengurangi kebiasaan buang air di sembarang tempat maupun sungai, sehingga sanitasi lebih baik.
Peluang Replikasi	:	Bisa menjadi contoh bagi kelurahan lain disekitar

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT Welarco Subur Jaya II
Nama Tujuan SDGs	:	6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
Program	:	Program pengadaan sanitasi Wc di SDN 013 Dsn Putak Desa LDI kec. Loa janan
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Desa Loa Duri Ilir, 2022-09-10
Latar Belakang	:	Menciptakan sanitasi bersih dan layak untuk sekolah
Proses Pelaksanaan	:	Pembuatan Sanitasi WC
Hasil	:	sekolah mendapatkan fasilitas sanitasi yang lebih baik
Dampak	:	memiliki WC yang bersih dan layak untuk siswa dan siswi beserta guru
Tantangan	:	tidak ada
Pembelajaran	:	menjadikan lingkungan sehat dan bersih khususnya di sekolah
Peluang Replikasi	:	sebagai contoh/panutan bagi sekolah lainnya

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT Welarco Subur Jaya II
Nama Tujuan SDGs	:	6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
Program	:	Program pengadaan sanitasi Wc SMPN 5 Loa Janan , Kab. Kukar
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Desa Loa Janan Ulu, 2022-09-05
Latar Belakang	:	Menciptakan Sanitasi bersih dan layak Untuk Sekolah
Proses Pelaksanaan	:	Pembuatan sanitasi WC sebanyak 3 pintu 2 siswa & siswi 1 Guru
Hasil	:	Sekolah mendapatkan fasilitas sanitasi yang lebih baik
Dampak	:	memiliki WC yang bersih dan layak untuk siswa & siswi Beserta Guru.
Tantangan	:	Tidak ada
Pembelajaran	:	Menjadikan sekolah jadi lebih sehat dan bersih
Peluang Replikasi	:	sebagai contoh untuk sekolah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
Program	:	Program Penataan bangunan dan lingkungannya
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Kecamatan penajam, 2022-07-11
Latar Belakang	:	Terdapat beberapa titik PJU yang tidak menyala
Proses Pelaksanaan	:	Melakukan pemeliharaan seperti penggantian lampu yang mati, perbaikan instalasi dan pengecekan kondisi
Hasil	:	PJU beroperasi secara optimal
Dampak	:	Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari
Tantangan	:	Sulitnya pengadaan spare part yang sesuai dengan spesifikasi PJU
Pembelajaran	:	Memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengajukan pengaduan terutama mengenai PJU yang tidak bekerja Optimal
Peluang Replikasi	:	Dapat direplikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT. Rea Kaltim Plantations- Perdana Oil Mill
Nama Tujuan SDGs	:	7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
Program	:	Pembangkit Energi Listrik Biogas
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Kecamatan Kembang Janggut, 2022-12-12
Latar Belakang	:	Pemenuhan energi listrik terbarukan Biogas, untuk memenuhi kebutuhan listrik internal perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan
Proses Pelaksanaan	:	1. Gas Methane yang dihasilkan dari limbah cair pabrik kelapa sawit ditangkap 2. Gas Methane yang sudah tertangkap dijadikan bahan untuk pembangkit turbin dan menghasilkan Energi listrik 3. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan dan masyarakat sekitar
Hasil	:	Energi listrik sebesar 7 MW, untuk memenuhi kebutuhan listrik: 1. Internal perusahaan 2. Masyarakat sekitar sebanyak 8.009 KK pada 25 Desa di 3 Kecamatan (Kembang Janggut, Kenohan, Tabang)
Dampak	:	1. Mitigasi GRK 2. Energi listrik terbarukan
Tantangan	:	Biaya Operasional & Perawatan
Pembelajaran	:	Sistem Biogas
Peluang Replikasi	:	PKS yang menghasilkan limbah cair (POME)

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT. Pertamina Hulu Mahakam
Nama Tujuan SDGs	:	7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
Program	:	WASTEKO
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	TPAS Manggar Balikpapan, 2018-01-01
Latar Belakang	:	<p>Program yang dilakukan di wilayah ring 2 wilayah kerja PT Pertamina Hulu Mahakam merupakan hasil kerja sama perusahaan dan pengelola Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Manggar. Sebagai salah satu unit yang mengelola sampah Kota Balikpapan, TPAS Manggar memiliki potensi untuk menghasilkan gas metan dari penumpukan sampah di lokasi landfill. Pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah rata-rata adalah 480 ton/hari. Dengan angka yang cukup besar ini, maka tumpukan sampah di TPAS Manggar sangat berpotensi menghasilkan gas metan dalam jumlah yang juga besar. Besarnya gas metan dari tumpukan sampah TPAS Manggar tentunya dapat dimanfaatkan untuk digunakan sebagai energi alternatif.</p>
Proses Pelaksanaan	:	<p>Upaya TPAS Manggar yang sangat baik dalam mengelola gas metan menjadi dasar bagi PT PHM untuk mendukung berjalannya program ini agar terus berkelanjutan. Dalam kegiatan ini PT PHM melakukan upaya untuk menginisiasi program yang diberi nama WASTEKO, sebagai bentuk dukungan perbaikan jaringan instalasi pipa, penambahan sumur, perbaikan aspek teknis kemudahan perawatan dan pengukuran gas metana, serta edukasi terkait aspek teknis dan keselamatan dalam berkerja di fasilitas gas yang dikelola oleh TPAS Manggar.</p>
Hasil	:	<p>TPAS Manggar menjadi TPA terbaik ke-2 se-Indonesia dalam kategori Waste to Energy dengan luas landfill 49,89 Ha.</p>
Dampak	:	<p>Program ini dapat memanfaatkan sebanyak 462.680 m³/tahun gas methane untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif menggantikan kebutuhan sekitar 7.200 tabung LPG konvensional bagi 275 KK dan 10 UKM di area Manggar.</p>

- Tantangan : Peningkatan jaringan pengelolaan sampah plastik dan organik serta peningkatan kualitas penjualan UKM warga sekitar dengan diversifikasi produk.
- Pembelajaran : Dengan program ini, warga mendapatkan manfaat dengan (1) menghemat pengeluaran kebutuhan gas LPG dengan memanfaatkan gas methane dari TPAS Manggar dengan aman; (2) mengurangi emisi gas rumah kaca; (3) memenuhi kebutuhan listrik TPAS dari pemanfaatan genset gas methane; (4) peningkatan wellbeing warga dengan transfer knowledge dan pelatihan untuk perawatan sarana pengelolaan gas methane TPAS; (5) Pembentukan dan Peningkatan UKM dengan pelatihan dan diversifikasi produk
- Peluang Replikasi : Dapat direplikasi di daerah lain.

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	PT. Rea Kaltim Plantations Cakra Oil Mill
Nama Tujuan SDGs	:	7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
Program	:	Pembangkit Energi Listrik Biogas
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Kecamatan Kembang Janggut, 2022-12-12
Latar Belakang	:	Pemenuhan energi listrik dari energi terbarukan Biogas, untuk memenuhi kebutuhan listrik internal perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan
Proses Pelaksanaan	:	1. Gas Methane yang dihasilkan dari limbah cair pabrik kelapa sawit ditangkap 2. Gas Methane yang sudah tertangkap dijadikan bahan untuk pembangkit turbin dan menghasilkan Energi listrik, 3. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan dan masyarakat sekitar
Hasil	:	Energi listrik sebesar 7 MW, untuk memenuhi kebutuhan listrik: 1. internal perusahaan 2. masyarakat sekitar sebanyak 8.009 KK pada 25 Desa di 3 Kecamatan (Kembang Janggut, Kenohan, Tabang)
Dampak	:	1. Mitigasi GRK 2. Energi listrik terbarukan
Tantangan	:	Biaya Operasional & Perawatan
Pembelajaran	:	Sistem Biogas
Peluang Replikasi	:	PKS yang menghasilkan limbah cair (POME)

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Program	:	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kab Penajam PAsar Utara, 2022-11-12
Latar Belakang	:	Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi tenaga kerja lokal untuk memasuki dunia usaha, membuat perlu dilakukannya peningkatan keahlian/skill angkatan kerja. Terutama menjelang pelaksanaan pembangunan IKN
Proses Pelaksanaan	:	dilakukan pelatihan terpusat di Balai Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Kemenaker di Samarinda
Hasil	:	16 Orang pelatihan tersertifikasi Alat Berat, dan 20 orang pelatihan tersertifikasi menjahit
Dampak	:	Diharapkan pelatihan ini mampu mengurangi Tingkat Pengangguran terbuka
Tantangan	:	Dengan semakin berkembangnya dunia usaha, terutama menyongong IKN, maka banyaknya angkatan kerja yang perlu ditingkatkan kompetensinya, namun sumber daya yang dimiliki masih cukup terbatas.
Pembelajaran	:	Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan dana untuk meningkatkan kuota pelatihan kompetensi. Dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah di semua level (Provinsi dan Pusat) serta dengan Dunia Usaha Dunia Industri
Peluang Replikasi	:	Bisa direplikasi

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-01-02
Latar Belakang	:	Penetapan wajib pajak daerah
Proses Pelaksanaan	:	Akurasi Data dan Penetapan Pajak Daerah
Hasil	:	Penerbitan Nomor Peserta Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Dampak	:	Tersedianya data perhitungan pajak daerah
Tantangan	:	Masih diperlukan pemetaan sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan pendapatan asli daerah
Pembelajaran	:	pendapatan asli daerah untuk menunjang pembangunan daerah
Peluang Replikasi	:	bisa direplikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
Program	:	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Tersebar 4 kecamatan, 2022-07-18
Latar Belakang	:	Kondisi jalan mantap masih dibawah 50%
Proses Pelaksanaan	:	Dilakukannya perkerasan jalan dengan Rigid
Hasil	:	Meningkatnya Prosentase Jalan Mantap
Dampak	:	Meningkatnya kualitas jalan sebagai akses masyarakat
Tantangan	:	Anggaran yang ada belum dapat mencakup perencanaan secara keseluruhan
Pembelajaran	:	Memilih metode perkerasan jalan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan beban arus lalu lintas
Peluang Replikasi	:	Dapat direplikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
Nama Tujuan SDGs	:	9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
Program	:	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	10 Kabupaten/Kota Se Kaltim, 2022-01-01
Latar Belakang	:	Tranformasi ekonomi Kaltim yang berbasis renewable resources.
Proses Pelaksanaan	:	Strategi, pihak terlibat, penerima manfaat.
Hasil	:	- Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas - Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB - Meningkatkan Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas
Dampak	:	- Menambah Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Non Migas - Menambah Nilai Investasi Sektor Industri Non Migas
Tantangan	:	- Pembangunan prasarana dan sarana industri - Pembangunan Kawasan Industri dan Sentra Industri
Pembelajaran	:	- Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri serta pemanfaatan limbah industri - Pemberdayaan IKM - Perluasan pemasaran
Peluang Replikasi	:	- Lahan yang luas - Kecukupan bahan baku - Stabilitas keamanan yang kondusif - Dukungan pemerintah daerah; RPJMD; Perda No. 10 Tahun 2019 tentang RPIP; Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan - Kawasan Industri existing yaitu KEK MBTK, KIK dan KIE

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
Program	:	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	kabupaten penajam paser utara, 2022-01-17
Latar Belakang	:	Belum banyaknya terminal Tipe B dan C yang ada sehingga banyak trayek tidak terpenuhi
Proses Pelaksanaan	:	Diperlukan kerjasama pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat
Hasil	:	terkoordinirnya dengan baik arus penumpang dan barang
Dampak	:	Arus Penumpang dan barang lancar
Tantangan	:	Semakin bertambahnya arus penumpang dan barang seiring keberadaan IKN
Pembelajaran	:	dengan kerjasama dengan pemerintah akan diharapkan segera muncul terminal dan trayek baru
Peluang Replikasi	:	kerjama dengan Pemerintah Balikpapan dan Tanah Paser

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
Program	:	program pengelolaan pelayaran
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	kecamatan penajam, 2022-03-09
Latar Belakang	:	Belum banyaknya titik pelabuhan sandar pengumpul lokal
Proses Pelaksanaan	:	Rencana induk Pelabuhan
Hasil	:	dokumen laporan
Dampak	:	Cepat tumbuh kembangnya sosial ekonomi masyarakat
Tantangan	:	Bertambah panyaknya Masuknya investor terutama dibidang infastruktur
Pembelajaran	:	dengan banyaknya muncul pelabuhan baru akan seiring percepatan masuk keluarnya penumpang dan barang dari penajam sebaliknya
Peluang Replikasi	:	bekerjasama dengan Kota Balikpapan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
Program	:	program pengelolaan pelayaran
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	penajam, 2022-04-19
Latar Belakang	:	Belum banyaknya tempat pelabuhan pelayaran
Proses Pelaksanaan	:	melakukan kajian rencana induk pelabuhan
Hasil	:	dokumen laporan
Dampak	:	Mempelancar keluar masuknya proses perpindahan orang dan barang
Tantangan	:	banyak potensi tempat pelabuhan pelayaran
Pembelajaran	:	meningkatnya perekonomian khususnya bagi masyarakat
Peluang Replikasi	:	pelabuhan sekitar IKN

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	10.BERKURANGNYA KESENJANGAN
Program	:	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	4 kecamatan, 2022-03-14
Latar Belakang	:	pentingnya pemantauan situasi dan kondisi orang asing di daerah
Proses Pelaksanaan	:	menjalankan tim pengawas orang Asing (TIMPORA) di daerah
Hasil	:	dokumen laporan
Dampak	:	kodisifitas keamanan dan nyaman di daerah
Tantangan	:	kurangnya anggota tim yang melaksanakan pengawasan orang asing dikarenakan anggaran terbatas
Pembelajaran	:	penambahan personil anggota TIMPORA
Peluang Replikasi	:	Pencegahan dini pengawasan orang asing

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	10.BERKURANGNYA KESENJANGAN
Program	:	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	4 kecamatan, 2022-05-09
Latar Belakang	:	pentingnya kewaspadaan dalam rangka deteksi dini rawan konflik di daerah
Proses Pelaksanaan	:	menjalankan tim kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah
Hasil	:	dokumen laporan
Dampak	:	kondusifitas keamanan dan kenyamanan di daerah
Tantangan	:	kurangnya anggota tim yang melaksanakan pemantauan dan penanganan kasus konflik/rawan konflik di karenakan anggaran
Pembelajaran	:	pengantisipasi kerawanan konflik sedini mungkin
Peluang Replikasi	:	Diperlukan kewaspadaan dini akan terjadinya konflik

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	10.BERKURANGNYA KESENJANGAN
Program	:	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	4 kecamatan, 2022-04-12
Latar Belakang	:	pentingnya koordinasi antar umat beragama di daerah
Proses Pelaksanaan	:	penguatan koordinasi antar pemuka dan tokoh agama di daerah melalui forum kerukunan umat beragama
Hasil	:	dokumen laporan
Dampak	:	pengecahan terhadap konflik bernuansa SARA
Tantangan	:	kurang sinergisnya kegiatan forum dengan instansi pemerintah terkait
Pembelajaran	:	Peningkatan sinergitas antar umat beragama
Peluang Replikasi	:	dikhawatirnya adanya konflik baru seiring ada penambahan penduduk IKN

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	10.BERKURANGNYA KESENJANGAN
Program	:	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	4 kecamatan, 2022-01-10
Latar Belakang	:	pentingnya pemantauan terhadap organisasi kemasyarakatan di daerah
Proses Pelaksanaan	:	melakukan pemantauan terhadap organisasi kemasyarakatan di daerah melalui monitoring dan pelaporan
Hasil	:	dokumen laporan
Dampak	:	tertip administrasi dan terkondidikannya organisasi masyarakat di daeah
Tantangan	:	banyak organisasi masyarakat yang terbentuk dan berkembang tidak aktif melapor meupun menerbitkan SKT Ormas
Pembelajaran	:	perlu peningkatan pendataan SKT ormas
Peluang Replikasi	:	masih banyak ormas yang belum mendaftarkan SKT

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	10.BERKURANGNYA KESENJANGAN
Program	:	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	4 kecamatan, 2022-02-07
Latar Belakang	:	pentingnya pemantauan situasi dan kondisi politik di daeran
Proses Pelaksanaan	:	melakukan pemantauan sitausi politik di daerah melalui monitoring dan pelaporan
Hasil	:	dokumen laporan
Dampak	:	kodisifitas situasi politik di daerah
Tantangan	:	kurangnya pengetahuan politik pada masyarakat yang terlibat di partai politik dan tentang penggunaan hak serta kewajiban dalam pemilihan umum
Pembelajaran	:	meningkatnya pengetahuan masyarakat akan ilmu politik
Peluang Replikasi	:	penjabaran di tahun 2024

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Nama Tujuan SDGs	:	10.BERKURANGNYA KESENJANGAN
Program	:	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Samarinda, 2022-12-01
Latar Belakang	:	Penyampaian Rekomendasi UMK oleh Bupati/Walikota terlambat dan Adanya perubahan Peraturan terkait Formula penghitungan Upah Minimum
Proses Pelaksanaan	:	Telah Disusun dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
Hasil	:	Akan dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Kemnaker terkait persiapan penetapan Upah Minimum
Dampak	:	-
Tantangan	:	-
Pembelajaran	:	-
Peluang Replikasi	:	-

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
Program	:	Program pengembangan pemukiman
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Tersebar 4 kecamatan, 2022-07-25
Latar Belakang	:	Belum meratanya pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan pemukiman
Proses Pelaksanaan	:	Melaksanakan pekerjaan sesuai usulan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan survey lokasi
Hasil	:	Terbangunnya jalan dan drainase di kawasan permukiman serta Terpeliharanya jalan lingkungan
Dampak	:	Meratanya pembangunan di desa dan kelurahan
Tantangan	:	Terbatasnya anggaran untuk operasional UPT dan pemeliharaan alat berat
Pembelajaran	:	Perlunya sharing anggaran antara ADD dengan APBD yang dikelola oleh UPT agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakatan dalam peningkatan infrastruktur
Peluang Replikasi	:	Dapat direplikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
Program	:	program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kecamatan Babulu: Desa Gunung Intan, Sriraharja, Sebakung Jaya dan Babulu Darat, 2022-10-20
Latar Belakang	:	Kebutuhan Rumah Tinggal yang Layak Huni
Proses Pelaksanaan	:	Kontraktual
Hasil	:	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 100 Unit
Dampak	:	Tertanganinya Rumah MBR Masyarakat yang Membutuhkan peningkatan kualitas rumah tinggal
Tantangan	:	Banyak kebutuhan akan penanganan rumah masyarakat yang membutuhkan penanganan rumah layak huni kurang lebih 2556
Pembelajaran	:	Proses sosialisasi yang melibatkan masyarakat calon penerima bantuan
Peluang Replikasi	:	Dapat direplikasi karena sudah pernah dilaksanakan tahun 2021

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
Program	:	Penanggulangan Bencana
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kab. Penajam Paser Utara, 2022-08-12
Latar Belakang	:	- Perubahan kondisi lingkungan akibat cuaca ekstrim yang tinggi - Peningkatan abrasi pantai - Sebagai daerah terdampak gempa bumi
Proses Pelaksanaan	:	Lancar
Hasil	:	- Penurunan jumlah terdampak bencana - Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan - Peningkatan partisipasi masyarakat kebencanaan mulai pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
Dampak	:	Positif
Tantangan	:	- Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman resiko bencana - Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengurangan resiko bencana - Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas
Pembelajaran	:	Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang mitigasi bencana
Peluang Replikasi	:	- Dukungan dan komitmen dari pemerintah untuk pengurangan resiko bencana - Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan resiko bencana yang luas - Semakin berkembangnya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan informasi kebencanaan - Pembangunan Insfrastruktur IKN dan sebagai penyanggah IKN

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
Nama Tujuan SDGs	:	14.EKOSISTEM LAUTAN
Program	:	Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Berau, Kutim, Bontang, Balikpapan, PPU dan Paser, 2022-01-12
Latar Belakang	:	luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju Pengelolaan yang Efektif
Proses Pelaksanaan	:	Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil
Hasil	:	Terkelolanya kawasan Konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Dampak	:	Terpeliharanya Konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bagi ekosistem Laut
Tantangan	:	-
Pembelajaran	:	informasi dan pelaksanaan konservasi ruang laut
Peluang Replikasi	:	Pengelolaan Kawasan Konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan Daerah Pusat.

PELAPORAN PEMBELAJARAN

- Sumber Data : Giz Scpopp
- Nama Tujuan SDGs : 15.EKOSISTEM DARATAN
- Program : GIZ-SCPOPP-SULAM
- Lokasi dan Waktu Kegiatan : Kutai Timur, Kec. Kongbeng dan Muara Wahau, 2022-01-01
- Latar Belakang : Mengingat strategisnya industri minyak sawit bagi Kabupaten Kutai Timur, keberlanjutannya perlu dipastikan untuk perbaikan produktivitas, peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar kebun, dan keberterimaan di pasar domestik dan global. Sekitar 19 persendari total 726.000 hektar kebun sawit tertanam di Kutai Timur hasil pemetaan tahun 2020 adalah kebun sawit rakyat. Guna menuju kabupten yang berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan, perlu peningkatan kapasitas pekebun rakyat dan tata kelola lahan di tingkat tapak dan daerah.
- Proses Pelaksanaan : Pendekatandan komponen kegiatan Kerjasama ini menerapkan pendekatan keberlanjutan daerah yang memerlukan kolaborasi para pemangku kepentingan melalui strategi komponen kegiatan : 1. Perencanaan tata ruang desa dan integrasinya ke dalam rencana tata ruang kabupaten 2. Penguatan kompetensi pekebun dan kapasitas koperasi memenuhi standar keberlanjutan ISPO dan RSPO 3. Penguatan kapasitas Pemkab Kutai Timur menuju kabupaten berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan 4. Dukungan pelembagaan keberlanjutan daerah di tingkat nasional, dan promosi sawit berkelanjutan di Jerman
- Hasil : Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, pemerintah desa, dan koperasi petani sawit rakyat untuk dapat mengelola penggunaan lahan dan kebun sawit berkelanjutan. Kerjasama ini secara langsung mendukung

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Visi & Misi Pemerintah Kutai Timur 2021-2026.

- Dampak** : Penggunaan Lahan yang lebih berkelanjutan Praktik Pertanian yang baik dan berkelanjutan Potensial areal perlindungan pada tingkat desa
- Tantangan** : Pengetahuan mengenai Areal Bernilai Konservasi tinggi pada tingkat pemerintah daerah masih sangat kurang, sehingga dari segi dukungan regulasi masih belum sepenuhnya dapat terdukung
- Pembelajaran** : Dengan mempromosikan sertifikasi berkelanjutan dan pendekatan perencanaan penggunaan lahan, dan dengan menetapkan kawasan HCV dan HCS yang layak perlindungan, proyek ini akan membantu melindungi iklim dan keanekaragaman hayati. Dengan dukungan proyek ini, akan mengintegrasikan pelajaran yang didapat, ketika mengembangkan rencana tata guna lahan multipihak ke dalam platform keberlanjutan di tingkat provinsi, dan juga ke dalam platform nasional.
- Peluang Replikasi** : Dengan mereplikasi metode ini maka ini dapat pula mendorong transformasi nasional untuk sektor perkebunan berkelanjutan terutama sekali untuk pekebun rakyat (mandiri)

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	Program Pencatatan Sipil
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-01-02
Latar Belakang	:	Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun
Proses Pelaksanaan	:	Pelayanan di Disdukcapil dan pelayanan keliling ke Desa/Kelurahan
Hasil	:	Kepemilikan Akta Kelahiran di kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 98 persen
Dampak	:	Meningkatnya kepemilikan Akta Kelahiran di Kab. PPU
Tantangan	:	Masih ada anak di Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum memiliki Akta Kelahiran sebesar 2 persen
Pembelajaran	:	Akta Kelahiran bisa digunakan untuk persyaratan masuk sekolah
Peluang Replikasi	:	bisa direplikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Disdukcapil, 2022-01-03
Latar Belakang	:	Kebutuhan akan identitas anak dibawah 5 tahun
Proses Pelaksanaan	:	Lancar
Hasil	:	Anak dibawah umur 5 tahun masuk di Kartu keluarga memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Dampak	:	Tingginya Kepemilikan NIK bagi anak
Tantangan	:	mendorong masyarakat agar segera memasukkan anaknya di dalam kartu keluarga
Pembelajaran	:	Identitas baik untuk kepengurusan dokumen kependudukan
Peluang Replikasi	:	bisa direplikasi oleh dinas yang sama

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	4 kecamatan, 2022-03-08
Latar Belakang	:	pentingnya bintek dan komitmen parpol dalam tertib administrasi
Proses Pelaksanaan	:	melakukan verifikasi dan monitoring
Hasil	:	jumlah parpol/orang
Dampak	:	tertib administrasi dan terkodisikannya partai politik di daerah
Tantangan	:	terlambatnya administrasi pelaporan dari parpol dan kurang maksimalnya tim pelaksana dikarenakan anggaran terbatas
Pembelajaran	:	Peningkatan monitoring parpol yang ada
Peluang Replikasi	:	kemungkinan ada penambahan jumlah partai politik

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kab. PPU, 2022-12-01
Latar Belakang	:	Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta mampu memberikan pelayanan public secara prima
Proses Pelaksanaan	:	KemenPAN dan RB melibatkan Bagian Ortal Pemda Kab/Kota
Hasil	:	Indeks SAKIP dan RB Pemda
Dampak	:	Peningkatan indeks SAKIP dan RB Pemda
Tantangan	:	Ketepatan waktu pengumpulan data capaian kinerja SKPD
Pembelajaran	:	Pembelajaran aplikasi e-SAKIP dengan daerah yang sdh ada
Peluang Replikasi	:	Belum bisa di replikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kab. PPU, 2022-12-01
Latar Belakang	:	Upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik
Proses Pelaksanaan	:	Kemenpan RB bekerja sama dengan Bagian Ortal Setda Kab. PPU sebagai koordinator terhadap UPP
Hasil	:	Peningkatan nilai evaluasi pelayanan publik DPMPTSP 3,24 kategori B- dan Disdukcapil 3.33 kategori B- dengan rata-rata 3,29 (B-)
Dampak	:	Peningkatan pelayanan publik
Tantangan	:	Kondisi geografi, jaringan internet, gap teknologi
Pembelajaran	:	Dengan adanya penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kemenpan RB pelayanan ke masyarakat lebih baik dan pemenuhan fasilitas publik lebih memadai
Peluang Replikasi	:	belum bisa di replikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	Program Perlindungan Khusus Anak
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-01-08
Latar Belakang	:	Pelayanan Perlindungan Anak
Proses Pelaksanaan	:	Rapat untuk menyusun Menyusun Jadwal Pendampingan dan Penjangkauan, membuat Telaan Staf, Surat Tugas, Laporan Perjalanan Dinas, Surat permohonan kepada pihak terkait.
Hasil	:	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan penjangkauan Terhadap anak korban kekerasan.
Dampak	:	Anak korban kekerasan mendapatkan Layanan Pendampingan Khusus.
Tantangan	:	Tersusunya Program dan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak.
Pembelajaran	:	Meningkatkan Layanan Pendampingan Khusus terhadap Anak korban kekerasan.
Peluang Replikasi	:	Dapat Dilakukan.

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	Program Perlindungan Khusus Anak
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-06-07
Latar Belakang	:	Memfasilitasi Kegiatan TP PKK Kab. PPU dalam Rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
Proses Pelaksanaan	:	Rapat Persiapan Sosialisasi Pencegahan KtA, Membuat KAK, Membuat Undangan, Membuat SPJ Kegiatan.
Hasil	:	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KtA.
Dampak	:	Tersusunnya program dan kegiatan TP PKK Kab. PPU
Tantangan	:	Dengan adanya kegiatan ini diharapkan peserta mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan KtA
Pembelajaran	:	dengan adanya kegiatan ini peserta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap tindakan yang dilakukan dalam pencegahan ktA
Peluang Replikasi	:	Dapat Dilakukan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	Program Perlindungan Perempuan
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-11-10
Latar Belakang	:	Terbatasnya Pemahaman masyarakat tentang Kekerasan terhadap Perempuan.
Proses Pelaksanaan	:	Melaksanakan rapat persiapan kegiatan, Mempersiapkan Administrasi, Pelaksanaan Kegiatan, Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi.
Hasil	:	Terwujudnya penyebaran informasi terkait kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Dampak	:	Meningkatnya Kapasitas SDM tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
Tantangan	:	Diperlukan Komitmen bersama untuk dapat melaksanakan,menindaklanjuti dan monitoring secara berkala.
Pembelajaran	:	Presentase, Diskusi dan Tanya Jawab
Peluang Replikasi	:	Dimungkinkan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	Program Perlindungan Perempuan
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-07-08
Latar Belakang	:	Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan
Proses Pelaksanaan	:	1.Melaksanakan rapat persiapan. 2.Mempersiapkan Administrasi 3. Pendampingan Pelayanan Rujukan lanjutan
Hasil	:	Meningkatkan Pelayanan bagi perempuan yang memerlukan rujukan lanjutan
Dampak	:	Meningkatkan Pemahaman korban ,sehingga dapat mengambil keputusan dalam tindakan
Tantangan	:	Diperlukan dukungan dari Opd terkait,instansi vertikal ,keluarga dan Masyarakat
Pembelajaran	:	Pendampingan layanan dan ,pelaporan dan monitoring
Peluang Replikasi	:	Dilaksanakan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	16.PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Program	:	Program Perlindungan Khusus Anak
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-12-06
Latar Belakang	:	Masih minimnya tenaga mediator dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak
Proses Pelaksanaan	:	Membuat Telaan Staf dan Surat Tugas
Hasil	:	Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak
Dampak	:	terlaksananya program pelatihan mediator pelayanan korban kekerasan terhadap anak
Tantangan	:	Meningkatnya pemahaman dan peran pada layanan korban kekerasan terhadap anak
Pembelajaran	:	Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak
Peluang Replikasi	:	Dapat Dilakukan

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Nama Tujuan SDGs	:	17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Program	:	Pengentasan masalah jaringan komunikasi / internet
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kalimantan Timur, 2022-12-01
Latar Belakang	:	jangkauan jaringan internet masih dibawah target TPB
Proses Pelaksanaan	:	kerja sama dengan operator seluler dan Kominfo Pusat & BAKTI Kominfo
Hasil	:	peningkatan coverage telekomunikasi sampai dengan 20% dari target
Dampak	:	peningkatan jumlah pengakses internet
Tantangan	:	kondisi geografi, gap digital/melek digital
Pembelajaran	:	dengan kerja sama ada peningkatan coverage telekomunikasi dan peningkatan jumlah pengakses internet
Peluang Replikasi	:	bisa di replikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Program	:	Program Perekonomian Dan Pembangunan
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kab. PPU, 2022-12-01
Latar Belakang	:	Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pembiayaan infrastruktur
Proses Pelaksanaan	:	Kerjasama Pembangunan Infrastruktur antara Pemerintah dan Badan Usaha
Hasil	:	Pembangunan Infrastruktur untuk kepentingan umum yang pembiayaannya dalam bentuk kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha
Dampak	:	Peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur
Tantangan	:	Kelayakan finansial dari sebuah proyek yang akan ditawarkan dalam bentuk KPBU
Pembelajaran	:	Pemerintah perlu memberikan dukungan dana untuk meningkatkan kelayakan finansial dari sebuah proyek KPBU
Peluang Replikasi	:	Belum bisa di replikasi oleh daerah lain

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Program	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana.
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-03-01
Latar Belakang	:	Informasi yang terus berkembang sehingga mengharuskan PKB dan Kader terus mengupdate ilmu dan pengetahuannya.
Proses Pelaksanaan	:	Diskusi, simulasi, tanya jawab.
Hasil	:	Mendapatkan tenaga PKB dan kader yang handal dan siap pakai.
Dampak	:	Tercapainya sasaran dan target yang telah ditentukan.
Tantangan	:	Peran para pemangku kebijakan masih belum maksimal.
Pembelajaran	:	Tatap muka.
Peluang Replikasi	:	-

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Program	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-10-01
Latar Belakang	:	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program bangga kencana
Proses Pelaksanaan	:	Pembuatan Merchandise
Hasil	:	Terlaksananya pembuatan merchandise
Dampak	:	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program bangga kencana
Tantangan	:	tidak ada
Pembelajaran	:	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program bangga kencana
Peluang Replikasi	:	Ada

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Program	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Lokasi dan Waktu: Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-10-01
Latar Belakang	:	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program bangga kencana
Proses Pelaksanaan	:	Pembuatan dan penayangan iklan di TV dan radio
Hasil	:	Terlaksananya Pembuatan dan penayangan iklan di TV dan radio
Dampak	:	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program bangga kencana
Tantangan	:	tidak ada
Pembelajaran	:	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program bangga kencana
Peluang Replikasi	:	Ada

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Program	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-10-01
Latar Belakang	:	Kurangnya kepedulian mitra kerja terhadap program bangga kencana
Proses Pelaksanaan	:	Rapat koordinasi kecamatan
Hasil	:	Terlaksananya rapat koordinasi kecamatan
Dampak	:	Peningkatan kepedulian mitra kerja terhadap program bangga kencana
Tantangan	:	kurangnya komitmen mitra kerja dalam melaksanakan hasil rakorcam
Pembelajaran	:	Peningkatan kepedulian mitra kerja terhadap program bangga kencana
Peluang Replikasi	:	Ada

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
Nama Tujuan SDGs	:	17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Program	:	Program Pengendalian Penduduk
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Penajam Paser Utara, 2022-01-01
Latar Belakang	:	Penyusunan rencana kerja masyarakat kampung kb
Proses Pelaksanaan	:	Pokja kampung kb
Hasil	:	Terlaksananya pokja kampung kb
Dampak	:	Tersusunnya rencana kerja masyarakat kampung kb
Tantangan	:	penyusunan rencana kerja masyarakat kampung kb belum mengoptimalkan data yang ada
Pembelajaran	:	Tersusunnya rencana kerja masyarakat kampung kb
Peluang Replikasi	:	ada

PELAPORAN PEMBELAJARAN

Sumber Data	:	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur
Nama Tujuan SDGs	:	17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Program	:	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Lokasi dan Waktu Kegiatan	:	Kalimantan Timur, 2022-12-31
Latar Belakang	:	Fasilitasi Usulan dari Perangkat daerah terkait Kerjasama Antar Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta
Proses Pelaksanaan	:	Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta
Hasil	:	Persentase terlaksananya Koordinasi Dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Dampak	:	terwujudnya pelaksanaan kegiatan kerjasama yang sesuai dengan ketentuan
Tantangan	:	Keragaman Bidang Kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
Pembelajaran	:	Meningkatkan Pengetahuan dalam hal bidang kerjasama
Peluang Replikasi	:	Fasilitasi kerjasama



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Kesuma Bangsa No 2

Telephone. (0541) 741044

Faximille. (0541) 742283

SAMARINDA 75123